

EVALUASI FUNGSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN
(Studi Kasus : PPI Bulu Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun Oleh :

NOVANITA RAHMAWATI

NIM. 0210660040 - 66

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
MALANG
2007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul : **“Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (Studi Kasus : PPI Bulu Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (Satu) Fakultas Teknik, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, antara lain :

1. Almarhum Bapak & Ibuku, seluruh keluarga atas doa, motivasi, kesabaran dan pengertiannya.
2. Wara Indira R., ST., MT.& Hendrawan Hamonangan Saragi, ST, MA, selaku dosen pembimbing atas nasehat dan masukannya.
3. Ir. Agus Dwi Wicaksono, lic.rer.reg, Ir. Ismu Rini Dwi Ari, ST., MT, & Wisnu Sasongko, ST., MT. selaku dosen penguji atas masukannya.
4. Wara Indira Rukmi, ST.MT selaku dosen wali atas motivasinya.
5. Seluruh dosen PWK Brawijaya, atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Rismet, Bapak Duri, Mbak Tutut dan masyarakat perikanan PPI Bulu atas kerjasama dan bantuannya selama di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu.
7. Temen2 Plano 2002 & semua yg tidak dapat kami sebutkan satu persatu, *Thanks 4 all.*

Demikianlah tugas akhir ini disusun, dengan segala kekurangannya semoga dapat memberikan manfaat. Akhirnya, penulis berharap agar semua yang telah disebutkan mudah-mudahan dibalas kebaikannya dengan Rahmat dan Hidayah sebesar-besarnya. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 17 Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	9
1.6.2 Ruang Lingkup Materi	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
1.8 Kerangka Pemikiran	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Definisi Umum	16
2.2 Pangkalan Pendaratan Ikan.....	17
2.3 Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan.....	20
2.3.1 Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	20
2.3.2 Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	23
2.3.3 Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....	24
2.3.4 Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....	28
2.3.5 Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	32
2.4 Fungsi Tempat Pelelangan Ikan	38
2.4.1 Fasilitator Pembentukan Harga.....	38
2.4.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	39
2.4.3 Menyediakan Data Statistik yang Akurat	40
2.4.4 Membina Mutu Hasil Perikanan	41
2.4.5 Sumber Pendapatan Daerah	41
2.5 Permasalahan dalam Pembangunan Perikanan Tangkap.....	42
2.6 Penelitian Terdahulu.....	53
2.7 Definisi Operasional	56
2.8 Kerangka Teori	57
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Penentuan Lokasi Wilayah Penelitian	49
3.3 Penentuan Sampel Penelitian.....	51
3.4 Penentuan dan Pemilihan Variabel Penelitian.....	53
3.5 Metode Pengumpulan Data	68
3.5.1 Data Primer.....	68

3.5.2	Data Sekunder.....	74
3.6	Metode Analisis Data	77
3.6.1	Analisis Karakteristik Terhadap Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan.....	78
3.6.2	Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	80
3.6.3	Analisis Faktor.....	87
3.6.4	Analisis Akar Masalah.....	114
3.7	Diagram Alir Penelitian.....	115
3.8	Desain Survei.....	117
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		127
4.1	Tinjauan Kabupaten Tuban	131
4.2	Tinjauan Kecamatan Bancar.....	131
4.2.1	Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Bancar.....	131
4.2.2	Penggunaan Lahan	135
4.2.3	Sistem Transportasi.....	135
4.2.4	Perikanan Tangkap.....	140
4.3	Tinjauan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	140
4.4	Analisis Karakteristik Terhadap Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	153
4.4.1	Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	153
4.4.2	Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	166
4.4.3	Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....	175
4.4.4	Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....	185
4.4.5	Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	199
4.4.6	Fasilitator Pembentukan Harga	209
4.4.7	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	223
4.4.8	Sumber Pendapatan Daerah	232
4.5	Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	237
4.6	Analisis Faktor.....	243
4.7	Analisis Akar Masalah.....	266
BAB V PENUTUP		270
5.1	Kesimpulan.....	270
5.2	Saran	275
Daftar Pustaka.....		xiv
Lampiran		xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Produksi dan Nilai Pelelangan Perikanan Tangkap Kabupaten Tuban Tahun 2000 – 2005	3
Tabel 1.2	Perkembangan Produksi dan Nilai Retribusi Pelelangan Ikan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 1993-2003.....	5
Tabel 2.1	Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI.....	37
Tabel 2.2	Studi Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1	Penyebaran Kuisisioner di Wilayah Penelitian	53
Tabel 3.2	Proses Penentuan Variabel Penelitian.....	55
Tabel 3.3	Indikator Variabel Penelitian	61
Tabel 3.4	Data Observasi Lapangan	69
Tabel 3.5	Data Kuisisioner	70
Tabel 3.6	Data Wawancara	73
Tabel 3.7	Data Studi Kepustakaan.....	75
Tabel 3.8	Data Organisasi/Instansi	76
Tabel 3.9	Kriteria dan Skala Pengukuran Fungsi PPI.....	80
Tabel 3.10	Kaiser - Meyer - Olkin.....	92
Tabel 3.11	Skala Likert Yang Dipergunakan Dalam Penelitian.....	93
Tabel 3.12	Pertanyaan dan Skala Likert pada Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	95
Tabel 3.13	Koefisien Korelasi	112
Tabel 3.14	Matriks Korelasi.....	112
Tabel 3.15	Desain Survei	117
Tabel 4.1	Jumlah dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban Tahun 2000 - 2005.....	129
Tabel 4.2	Perkembangan Nilai Pelelangan Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban Tahun 2000 – 2005	130
Tabel 4.3	Penggunaan Lahan	135
Tabel 4.4	Jumlah dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kecamatan Bancar Tahun 2000 - 2004.....	140
Tabel 4.5	Jenis Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	143
Tabel 4.6	Rincian Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas PPI Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002.....	151
Tabel 4.7	Jumlah Bahan Perbekalan Kapal di PPI Bulu.....	154
Tabel 4.8	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Menjalankan Aktivitas Kapal Perikanan di PPI Bulu	156
Tabel 4.9	Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Kapal Perikanan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	156
Tabel 4.10	Jumlah Armada Kapal Perikanan Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 - 2005	158
Tabel 4.11	Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Kapal Perikanan di PPI Bulu	158
Tabel 4.12	Persepsi Masyarakat Bahwa Jumlah Kapal Yang Mendarat Di PPI Bulu Menentukan Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	159

Tabel 4.13	Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Perairan Untuk Operasi Kapal Perikanan Di PPI Bulu	159
Tabel 4.14	Persepsi Masyarakat Bahwa Kondisi Perairan Di Kawasan PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	160
Tabel 4.15	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran PPI Bulu Berpengaruh Pada Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	160
Tabel 4.16	Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Alur Pelayaran Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	161
Tabel 4.17	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kolam Pelabuhan di PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.	161
Tabel 4.18	Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Kolam Pelabuhan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	162
Tabel 4.19	Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Pemecah Gelombang di PPI Bulu Menyebabkan Kegiatan Berlabuh Kapal Perikanan Tidak Berjalan Lancar.....	162
Tabel 4.20	Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Pemecah Gelombang di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	162
Tabel 4.21	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang.....	164
Tabel 4.22	Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan Mengelola Fasilitas PPI Bulu Dipengaruhi Oleh Kemampuan Aparatur Kelembagaan BPPPI Bulu.....	164
Tabel 4.23	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketidakmampuan Menyediakan Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	165
Tabel 4.24	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang di PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.	165
Tabel 4.25	Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Mendukung Aktivitas Berlabuh Kapal di PPI Bulu Harus Ditopang Dengan Dana Dari Pemerintah	166
Tabel 4.26	Pertumbuhan Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPI Bulu Tahun 2000 – 2005	166
Tabel 4.27	Persepsi Masyarakat Bahwa Volume Ikan Yang Didaratkan di PPI Bulu Mendukung Fungsi PPI Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan.....	167

Tabel 4.28	Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Dipengaruhi Oleh Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di PPI Bulu	168
Tabel 4.29	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI.....	168
Tabel 4.30	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI Mendukung Keberhasilan Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan	169
Tabel 4.31	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jalan Penghubung Di PPI Bulu Dapat Mempersulit Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI Bulu	169
Tabel 4.32	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Dermaga Mendukung Kegiatan Bongkar Muat Ikan Di PPI Bulu.....	170
Tabel 4.33	Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Dermaga Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berhasil Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.....	170
Tabel 4.34	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Ikan Di PPI Bulu	170
Tabel 4.35	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.....	171
Tabel 4.36	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Dalam Mengelola Fasilitas Dermaga Dan Gedung Pelelangan Ikan	173
Tabel 4.37	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	174
Tabel 4.38	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Dermaga Dan Gedung Pelelangan Ikan PPI Bulu Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan	174
Tabel 4.39	Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Melayani Bongkar Muat Ikan Di PPI Bulu Harus Ditopang Dengan Dana Dari Pemerintah.....	174
Tabel 4.40	Prosentase Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Oleh Responden Masyarakat Perikanan di PPI Bulu	176
Tabel 4.41	Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan	177
Tabel 4.42	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Untuk Menangani Ikan Hasil Tangkapan Di PPI Bulu ..	177
Tabel 4.43	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan.....	178

Tabel 4.44	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Instalasi Air Bersih Di PPI Bulu.....	178
Tabel 4.45	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Instalasi Air Bersih Menyebabkan PPI Bulu Tidak Menjadi Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	179
Tabel 4.46	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Pabrik Es di PPI Bulu.....	179
Tabel 4.47	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Pabrik Es Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan	179
Tabel 4.48	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin di PPI Bulu.....	180
Tabel 4.49	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan	181
Tabel 4.50	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Saluran Drainase Di Kawasan PPI Bulu Mendorong Kelancaran Penanganan Ikan Hasil Tangkapan.....	181
Tabel 4.51	Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan Ditentukan Oleh Ketersediaan Saluran Drainase.....	181
Tabel 4.52	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Dalam Menyediakan Instalasi Air Bersih, Pabrik Es, Gudang Dingin, Dan Drainase	183
Tabel 4.53	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan BPPPI Dalam Mengelola Fasilitas Penanganan Ikan Mempengaruhi Fungsi PPI Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	184
Tabel 4.54	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Penanganan Ikan PPI Bulu Berpengaruh Pada Kelancaran Aktivitas Penanganan.....	184
Tabel 4.55	Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Dana Fasilitas Penanganan Ikan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan	185
Tabel 4.56	Prosentase Aktivitas Penampungan Dan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Responden Masyarakat Perikanan PPI Bulu.....	186
Tabel 4.57	Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Dari PPI Mendukung Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	186
Tabel 4.58	Persepsi Masyarakat Bahwa Saluran Pemasaran Yang Efektif Menyebabkan Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	189
Tabel 4.59	Persepsi Masyarakat Bahwa Panjangnya Saluran Pemasaran Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....	190
Tabel 4.60	Prosentase Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga di PPI Bulu.....	190

Tabel 4.61	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga Di Ppi Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Menjadi Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	191
Tabel 4.62	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Mendistribusikan Produksi Perikanan Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan	191
Tabel 4.63	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jaringan Jalan Dan Moda Transportasi Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan Menyebabkan Ketidاكلancaran Pemasaran Produk Perikanan.....	192
Tabel 4.64	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Di PPI Bulu	193
Tabel 4.65	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Mendukung Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....	193
Tabel 4.66	Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir di PPI Bulu	194
Tabel 4.67	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	194
Tabel 4.68	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Jalan Penghubung Memperlancar Aktivitas Pengangkutan Ikan di PPI Bulu	197
Tabel 4.69	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jalan Penghubung PPI Bulu Menyebabkan PPI Tidak Berhasil Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan.....	197
Tabel 4.70	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Gedung Pelelangan, Areal Parkir, Dan Jalan Penghubung.....	198
Tabel 4.71	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan BPPPI Bulu Mengelola Fasilitas Pemasaran Hasil Perikanan Mendukung Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	198
Tabel 4.72	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Pemasaran Ikan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Hasil Perikanan	199
Tabel 4.73	Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Melayani Pemasaran Ikan di PPI Bulu Diperlukan Dana Yang Tidak Sedikit	199
Tabel 4.74	Pelaksanaan Penyuluhan Masyarakat Perikanan PPI Bulu.....	200
Tabel 4.75	Prosentase Peran Serta Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Penyuluhan.....	201
Tabel 4.76	Persepsi Masyarakat Bahwa Penyelenggaraan Penyuluhan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	201

Tabel 4.77	Persepsi Masyarakat Bahwa PPI Bulu Bisa Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data Ditentukan Dari Pengumpulan Data	202
Tabel 4.78	Persepsi Masyarakat Bahwa Pengumpulan Data di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	202
Tabel 4.79	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyuluh Perikanan Dalam Memberikan Penyuluhan Perikanan.....	202
Tabel 4.80	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Penyuluh Perikanan Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data.....	203
Tabel 4.81	Peran Serta Masyarakat Dalam Kelompok Masyarakat Perikanan di PPI Bulu	204
Tabel 4.82	Persepsi Masyarakat Bahwa Keberadaan Kelompok Masyarakat Perikanan Di Wilayah Penelitian Mendukung PPI Bulu Tidak Menjadi Pusat Pelaksanaan Penyuluhan	204
Tabel 4.83	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di PPI Bulu	205
Tabel 4.84	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Di PPI Bulu Menjadikan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan	205
Tabel 4.85	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi Mendukung Fungsi PPI Bulu Dalam Kegiatan Pengumpulan Data	206
Tabel 4.86	Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Dalam Pengumpulan Data	206
Tabel 4.87	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Mengelola Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Dan Kantor Administrasi Mempengaruhi Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	208
Tabel 4.88	Persepsi Masyarakat Bahwa Aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu Yang Tidak Mampu Menyediakan Fasilitas Menjadi Penyebab PPI Bulu Kurang Berhasil Menyelenggarakan Penyuluhan dan Pengumpulan Data	208
Tabel 4.89	Persepsi Masyarakat Bahwa Keterbatasan Dana Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berhasil Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	209
Tabel 4.90	Persepsi Masyarakat Bahwa Dana Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan - Kantor Administrasi PPI Bulu Mendukung Kegiatan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data.....	209
Tabel 4.91	Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga	214

Tabel 4.92	Persepsi Masyarakat Bahwa Penjualan Ikan Hasil Tangkapan PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga	214
Tabel 4.93	Tanggapan Nelayan Anak Buah Kapal Terhadap Sistem Penjualan Ikan Secara Lelang dan Tanpa Lelang Di PPI Bulu	214
Tabel 4.94	Tanggapan Pedagang Terhadap Sistem Penjualan Ikan	215
Tabel 4.95	Prosentase Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu	216
Tabel 4.96	Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga	216
Tabel 4.97	Prosentase Sikap Masyarakat Terhadap Penerapan Kebijakan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu.....	219
Tabel 4.98	Persepsi Masyarakat Bahwa Penerapan Aturan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di PPI Bulu Mempengaruhi Keberhasilan Penyelenggaraan Lelang Ikan PPI Bulu	219
Tabel 4.99	Persepsi Masyarakat Bahwa Penerapan Aturan Penyelenggaraan Lelang di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	220
Tabel 4.100	Prosentase Keterlibatan Masyarakat Memberikan Masukan Dalam Pembuatan Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu	220
Tabel 4.101	Persepsi Masyarakat Bahwa Keterlibatan Saudara Dalam Pembuatan Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu Mempengaruhi Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	221
Tabel 4.102	Prosentase Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang di PPI Bulu ...	222
Tabel 4.103	Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Lembaga KUD Terhadap PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	223
Tabel 4.104	Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Pemilik Kapal.....	224
Tabel 4.105	Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Pemilik Kapal	224
Tabel 4.106	Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Anak Buah Kapal.....	225
Tabel 4.107	Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Anak Buah Kapal	226
Tabel 4.108	Crosstabulasi Perubahan Tingkat Pendapatan Berdasarkan Responden Nelayan dan Tingkat Pendapatan.....	226
Tabel 4.109	Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan Berdasarkan Responden Nelayan Dan Tingkat Pendapatan.....	227
Tabel 4.110	Persepsi Masyarakat Bahwa Perolehan Pendapatan Nelayan Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.....	228
Tabel 4.111	Prosentase Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya.....	229
Tabel 4.112	Prosentase Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	229

Tabel 4.113	Prosentase Kemampuan Responden Nelayan Anak Buah Kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	229
Tabel 4.114	Prosentase Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	230
Tabel 4.115	Crosstabulasi Perubahan Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Berdasarkan Responden Nelayan dan Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Nelayan.....	230
Tabel 4.116	Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan Berdasarkan Responden Nelayan Dan Tingkat Pendapatan.....	231
Tabel 4.117	Kemampuan Keluarga Nelayan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	231
Tabel 4.118	Persepsi Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	232
Tabel 4.119	Persepsi Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berhasil Mengupayakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	232
Tabel 4.120	Perkembangan Penjualan dan Nilai Retribusi Pelelangan Ikan.....	233
Tabel 4.121	Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Dilihat Dari Penerimaan Retribusi Pelelangan Ikan PPI Bulu Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.....	234
Tabel 4.122	Persepsi Masyarakat Bahwa Retribusi Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Tuban Dari PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah	234
Tabel 4.123	Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.....	235
Tabel 4.124	Persepsi Masyarakat Bahwa Sistem Penjualan Ikan di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban	235
Tabel 4.125	Persepsi Masyarakat Bahwa Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD Dalam Penyaluran Retribusi Pelelangan Ikan Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah	236
Tabel 4.126	Persepsi Masyarakat Bahwa Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban Dengan KUD dalam Penyaluran Retribusi Pelelangan Ikan Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah	236
Tabel 4.127	Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Berdasarkan Kriteria Dan Skala Pengukuran Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	237
Tabel 4.128	Prosentase Persepsi Responden Masyarakat Perikanan.....	244
Tabel 4.129	Nilai Validitas Pertanyaan Pada Masing – masing Variabel Penelitian	246
Tabel 4.130	Reliabilitas Variabel Penelitian.....	248
Tabel 4.131	Matriks Korelasi.....	251

Tabel 4.132 Koefisien Korelasi	253
Tabel 4.133 Kaiser – Meyer – Olkin	256
Tabel 4.134 Hasil Uji KMO dan Bartlett.....	256
Tabel 4.135 Penentuan Jumlah Faktor Berdasarkan Akar Ciri Dan Prosentase Keragaman Kumulatif.....	257
Tabel 4.136 Penyebaran Variabel-Variabel Pada Faktor Yang Terbentuk.....	260
Tabel 4.137 Penentuan Variabel Pada Setiap Faktor	260
Tabel 4.138 Penyebaran Variabel-Variabel Pada Faktor Yang Terbentuk.....	261
Tabel 4.139 Penentuan Variabel Pada Setiap Faktor	262
Tabel 4.140 Penamaan pada Faktor – faktor Yang terbentuk.....	263
Tabel 4.141 Potensi dan Masalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu.....	268

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kapal perikanan masih berlabuh di sepanjang pantai pendaratan.6
Gambar 1.2	Bongkar muat ikan di sepanjang jalan oleh masyarakat perikanan7
Gambar 1.3	Transaksi jual beli ikan sebagai bentuk kegiatan pemasaran di pesisir pantai luar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu7
Gambar 1.4	Ikan yang didaratkan di PPI Bulu tidak melalui proses pelelangan ikan.....7
Gambar 1.5	Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....10
Gambar 1.6	Ruang Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu11
Gambar 1.7	Kerangka Pemikiran.....15
Gambar 2.1	Saluran Pemasaran Ikan30
Gambar 2.2.	Kerangka Teori.....47
Gambar 3.1	Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....50
Gambar 3.2	Tahapan Analisis Faktor92
Gambar 3.3	Diagram Alir Penelitian116
Gambar 4.1	Wilayah Administrasi Kecamatan Bancar132
Gambar 4.2	Lokasi PPI Bulu pada Kecamatan Bancar133
Gambar 4.3	Lokasi PPI Bulu pada Desa Nelayan Kecamatan Bancar134
Gambar 4.4	Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar.....137
Gambar 4.5	Jaringan Jalan Yang Melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu...138
Gambar 4.6	Perangkutan Yang Melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....139
Gambar 4.7	Karakteristik Lokasi PPI Bulu142
Gambar 4.8	Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu148
Gambar 4.9	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban149
Gambar 4.10	Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa150
Gambar 4.11	Jangkauan Penangkapan Ikan157
Gambar 4.12	Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan163
Gambar 4.13	Perkembangan Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 – 2005.....171
Gambar 4.14	Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan172
Gambar 4.15	Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....182
Gambar 4.16	Pola Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Kabupaten Tuban.....187
Gambar 4.17	Pola Pemasaran Hasil Perikanan Luar Kabupaten Tuban.....188
Gambar 4.18	Jangkauan Pemasaran Produk Perikanan195
Gambar 4.19	Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....196
Gambar 4.20	Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengumpulan Data207
Gambar 4.21	Alur Tata Cara Pelelangan Ikan di PPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban213
Gambar 4.22	Fungsi PPI Bulu Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....217
Gambar 4.23	Scree Plot259
Gambar 4.24	Akar Masalah Fungsi PPI Bulu Tidak Optimal267

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Cahyono, Bambang. 2000. *Budi Daya Ikan Air Tawar*. Yogyakarta: Kanisius
- Cohen, John M and Norman T. Uphoff. 1980. *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity*. World Development 8.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Hanafiah, Saefuddin. 1983. *Tataniaga Hasil Perikanan*. Jakarta : UI Press
- Hadi, Basa & Rachmat. 1997. *Konsep Pedoman Umum Nilai Tukar Nelayan*. Jakarta : UI Press
- Dahuri, R. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita Jakarta.
- Djojodipuro, Marsudi. 1996. *Teori Lokasi*. Jakarta: FE –UI
- Kramadibrata, Soedjono. 2002. *Perencanaan Pelabuhan*. Bandung : ITB
- Mansyur, Cholil. 1988. *Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nazaruddin, Regina K dan F. Rahardi. 1993. *Agribisnis Perikanan*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nugroho, Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Nikijulur. 1987. *Permintaan dan Penawaran serta Implikasinya bagi Pembangunan Perikanan*. Jakarta : Erlangga
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 7. Jember : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiarto. 2003. *Teknik Sampling*. Edisi 2. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum
- Supranto. 2004. *Analisis Multivariat : Arti dan Interpretasi*. Jakarta : PR Rineka Cipta
- Subagyo, Waluyo. 2003. *Hubungan Pelabuhan Perikanan dengan Perkembangan Kegiatan Penangkapan Ikan di Laut Pada Suatu Daerah*. Bogor : IPB (<http://www.hayati-ipb.com/users/Waluyo.html>)
- Sunarno. 2003. *Kebijakan Pengembangan Infrastruktur mendukung Pembangunan Ekonomi Maritim Kawasan Selatan Indonesia*. Yogyakarta
- Triatmojo, Bambang. 2003. *Pelabuhan*. Yogyakarta : Beta offset
- Wiriaatmadja, Soekandar M.A. 1983. *Pokok – pokok Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: C.V. Yasaguna

Terbitan Terbatas

- Agus Dwi Wicaksono dan Budi Sugiarto.2001.*Modul Studio Perencanaan Desa*. Malang: Prodi PWK
- Tim Kreatif Ganeca Komputer.2005.*Modul Aplikasi SPSS*. Malang : Tim Kreatif Ganeca Komputer.
- BPS Kabupaten Tuban. 2005. *Kecamatan Bancar Dalam Angka Tahun 2005*. Tuban : BPS Kabupaten Tuban
- BAPPEDA Kabupaten Tuban. 2005. *Review Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2015*. Tuban: BAPPEDA Kabupaten Tuban
- BAPPEDA Kotamadya Semarang. 2003. *Pertimbangan Pemilihan Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Kota Semarang Tahun 2002*. Semarang : BAPPEDA Kotamadya Semarang
- BPPPI Bulu Kabupaten Tuban. 2005. *Laporan Tahunan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2005*. Tuban : BPPPI Bulu Kabupaten Tuban
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban. 2005. *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2005*. Tuban: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban. *Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2005– 2010*. Tuban: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban
- Direktorat Jenderal Perikanan dan Kelautan. 1994. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perikanan
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2002. *Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Perikanan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perikanan
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 1987. *Keputusan Menteri Pertanian No: 604/Kpts/OT/210/9/95 tentang organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan*. Jakarta : Menteri Pertanian Republik Indonesia
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan*. Jakarta : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. kep. 02/men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan*. Jakarta : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : per.16/men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan*. Jakarta : Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 1985. *Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Menteri Pertanian Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Menteri Pertanian No. 1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Dengan Instansi Terkait Dalam Pengelolaan Pelabuhan Perikanan*. Jakarta : Menteri Pertanian Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Tuban. *Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan*. Tuban : Bupati Tuban

Karya Yang Tidak Diterbitkan

- Prayogo, Handoyo. 2003. *Arahan Lokasi dan Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Rafli, Mohamad. 2004. *Identifikasi Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kota Semarang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Sugeng, Sunarno. 2000. *Optimalisasi Fasilitas Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Bajomulyo Juwana Pati*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang : Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro
- Bambang, Azis Nur. 2004. *Evaluasi Pangkalan Pendaratan Ikan Tasik Agung dalam Upaya Penataan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Rembang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang : Fakultas Perikanan Universitas Diponegoro
- Yolindra. 2005. *Pelabuhan Perikanan Nusantara Pondok Dadap Malang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
- Pablo, Barnabas. 2006. *Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar Kabupaten Rembang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang : Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya
- Setiawan, A., Susilo E., Qoid, N. Harahap dan H. Riniwati. 1993. *Peranan KUD/TPI dan Pedagang Ikan dalam Usaha Penangkapan Ikan. (Studi Kasus dengan pendekatan ”Ketergantungan dan Inovasi” di Pacitan, Jawa Timur*. Malang : Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya
- Suartama, K. 2003. *Studi Tentang Perbedaan Konstruksi Alat Tangkap Pursesine di Perairan Prigi dan Probolinggi*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang : Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang
- Mahyuddin, B. 2001. *Peranan Pelelangan Ikan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan. (Kasus Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu)*. Bogor :Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor

RINGKASAN LAPORAN

**EVALUASI FUNGSI PPI BULU,
KECAMATAN BANCAR, KABUPATEN TUBAN**

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan dapat dilihat dari aktivitas kapal perikanan dan jumlah kapal perikanan yang mendarat. Hal ini sekaligus menjadi variabel yang berpengaruh terhadap fungsi PPI.	Aktivitas kapal perikanan •Jumlah kapal yang mendarat •Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan •Ketersediaan fasilitas alur pelayaran •Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan •Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang •Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana
	Jumlah kapal perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan		
	Kondisi perairan	Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37)	Kondisi perairan berpengaruh pada kelancaran seluruh kegiatan kapal perikanan.	
	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	Triatmodjo (2003: 28-29)	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang dapat mendorong kelancaran fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.	
	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan			
	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	Kramadibrata (2002 : 32)		
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan dana dalam mengelola fasilitas PPI diperlukan guna mendukung PPI berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.	
Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)			

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan	PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dapat dilihat dari jumlah ikan yang didaratkan. Variabel ini berpengaruh terhadap fungsi PPI.	<p>Volume ikan yang didaratkan</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI •Ketersediaan fasilitas dermaga. •Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan •Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI. •Ketersediaan dana
	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37)	Kemudahan pencapaian ke lokasi TPI dapat memperlancar pengangkutan hasil perikanan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI. Variabel ini berpengaruh terhadap fungsi PPI.	
	Ketersediaan fasilitas dermaga.	Triatmodjo (2003 : 29)	Ketersediaan fasilitas dermaga untuk bongkar muat ikan mendorong keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:24)	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penampungan ikan mendorong fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.	
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas PPI diperlukan guna mendukung PPI berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan dapat dilihat dari aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan. Variabel ini berpengaruh terhadap fungsi PPI.	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:24)	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan digunakan sebagai tempat sortir ikan, memperagakan lelang dan pengepakan. Variabel ini berpengaruh pada fungsi PPI.	•Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih •Ketersediaan fasilitas pabrik es •Ketersediaan fasilitas gudang dingin
	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:25)	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih berfungsi dalam pencucian ikan sehingga mendorong keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat penanganan ikan hasil tangkapan.	•Ketersediaan fasilitas drainase •Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI. •Ketersediaan dana
	Ketersediaan fasilitas pabrik es	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:26)	Ketersediaan fasilitas pabrik es dan gudang dingin diperlukan untuk kesegaran ikan. Variabel ini berpengaruh pada fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	
	Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)			
	Ketersediaan fasilitas drainase	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27)	Fasilitas drainase diperlukan dalam pembuangan limbah aktivitas perikanan setelah penanganan ikan hasil tangkapan	
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas penanganan ikan di PPI diperlukan guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas Pemasaran	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	Kemampuan PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan dilihat dari lokasi pusat aktivitas pemasaran.	<ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas Pemasaran •Lembaga pemasaran •Informasi pasar dan harga •Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan. •Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan •Ketersediaan fasilitas areal parkir •Ketersediaan fasilitas jalan penghubung •Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana
	Lembaga pemasaran	Bambang Cahyono, 2000:108-110	Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat berpengaruh pada kelancaran/efisiensi pemasaran.	
	Informasi pasar dan harga	Dahuri R dalam Mahyuddin B (2001:37)	Keberadaan informasi pasar dan harga mendukung kelancaran pemasaran dari produsen ke konsumen.	
	Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan.	Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37)	Kemudahan aksesibilitas dapat memperlancar pengangkutan hasil perikanan dari produsen ke konsumen.	
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:25)	Fasilitas gedung pelelangan mendukung kegiatan penampungan dan jual beli ikan sebagai bentuk pemasaran hasil perikanan.	
	Ketersediaan fasilitas areal parkir	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27)	Fasilitas areal parkir dan jalan penghubung mempengaruhi kelancaran distribusi hasil perikanan.	
	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung			
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas pemasaran ikan dari PPI diperlukan guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pemasaran ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	Adanya penyuluhan dan pengumpulan data menunjukkan keberhasilan PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan •Pengumpulan data
	Pengumpulan data			•Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan •Ketersediaan fasilitas kantor administrasi •Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana
	Kemampuan penyuluh perikanan	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan	Penyuluh perikanan yang mampu di bidangnya menentukan keberhasilan memberikan penyuluhan ke masyarakat perikanan	
	Kelompok masyarakat perikanan		Keberadaan kelompok masyarakat perikanan mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan	
	Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:31)	Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan digunakan untuk menyelenggarakan penyuluhan.	
	Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:35)	Fasilitas kantor administrasi digunakan sebagai tempat pengumpulan data.	
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas diperlukan guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Fasilitator pembentukann harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002	Melalui penjualan dan pembayaran ikan hasil tangkapan dapat menunjukkan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.	Penjualan ikan hasil tangkapan <ul style="list-style-type: none"> •Pembayaran ikan hasil tangkapan •Peraturan penyelenggaraan lelang •Peran serta masyarakat •Kemampuan aparatur kelembagaan KUD
	Pembayaran ikan hasil tangkapan			
	Peraturan penyelenggaraan lelang	Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	Penerapan peraturan pelelangan dan peran serta masyarakat dalam penentuan retribusi penyelenggaraan lelang mempengaruhi keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga	
	Peran serta masyarakat Penelitian oleh Sastrawidjaja (2005 : 28) tentang Persepsi masyarakat perikanan terhadap pembentukan dan pengorganisasian sistem pelelangan ikan di Jawa dan Sumatra.	Penelitian oleh Sastrawidjaja (2005 : 28) tentang Persepsi masyarakat perikanan terhadap pembentukan dan pengorganisasian sistem pelelangan ikan di Jawa dan Sumatra.		
	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD dalam menyelenggarakan lelang berpengaruh pada keberhasilan fungsi TPI	

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Hadi <i>et al.</i> (1997:50)	Pendapatan dan kemampuan nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dapat melihat keberhasilan pembangunan PPI untuk kesejahteraan nelayan.	<ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan responden nelayan •Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga •Penjualan ikan hasil tangkapan
	Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga			
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Rogers & Shoemaker dalam Susilo E, <i>et al.</i> (1993: 36)	Penjualan ikan hasil tangkapan mempengaruhi fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga	
Menyediakan data statistik yang akurat.	Daerah, musim, dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan	Pasal 14 UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan	Subvariabel dalam data statistik yang akurat dapat diwakili dengan danya subvariabel pengumpulan data pada fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.	-
	Luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya			
	Jumlah nelayan/petani ikan			
	Produk, ukuran ikan yang tertangkap			
	Musim pemijahan ikan			

Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Membina mutu hasil perikanan	Penanganan hasil	Direktorat Jenderal Perikanan (1987) dalam Mahyuddin B (2001:14)	Ketiga subvariabel tersebut telah tercakup dalam subvariabel aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan pada pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan.	
	Memilah dan menimbang			
	Pengepakan			
Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002	Adanya penerimaan retribusi sesuai target menunjukkan PPI telah berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi <ul style="list-style-type: none"> •Penjualan ikan hasil tangkapan •Koordinasi antara Pemerintah dan KUD
	Penjualan ikan hasil tangkapan		Sistem penjualan ikan hasil tangkapan berpengaruh pada penerimaan retribusi	
	Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	Koordinasi antar keduanya mempengaruhi kelancaran penyaluran retribusi pelelangan ikan.	

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37) Triatmodjo (2003: 28-29) Kramadibrata (2002 : 32) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26) Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32) 	Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas berlabuh kapal perikanan ▪ Tingkat pengaruh aktivitas kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan
		Jumlah kapal perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kapal perikanan yang berlabuh. ▪ Tingkat pengaruh jumlah kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.
		Kondisi perairan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan ▪ Tingkat pengaruh kondisi perairan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan
		Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan fasilitas alur pelayaran. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas alur pelayaran terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.
		Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.
		Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pemecah gelombang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan
		Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang. ▪ Tingkat pengaruh kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas kolam pelabuhan dan alur pelayaran.
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> □ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan □ Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37) □ Triatmodjo (2003 : 29) □ Mahyudin (2001 : 11) □ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26) □ Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32) 	Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi ikan ▪ Tingkat pengaruh produksi ikan yang didaratkan di PPI terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.
		Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cara dan jarak pengangkutan ikan hasil tangkapan dari tempat pendaratan kapal ke lokasi TPI ▪ Tingkat pengaruh kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
		Ketersediaan fasilitas dermaga.	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan fasilitas dermaga. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas dermaga terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI.	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan aparatur lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan. ▪ Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan dana fasilitas dalam mendukung penyediaan fasilitas dermaga dan gedung pelelangan.

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> ▪Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan ▪Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Sugeng (2002:22) ▪Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) ▪Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26) ▪Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32) 	Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh aktivitas penanganan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan.
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penanganan ikan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan intalasi air bersih. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas instalasi air bersih terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan.
		Ketersediaan fasilitas pabrik es	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas pabrik es . ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pabrik es terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan fasilitas gudang dingin	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gudang dingin. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gudang dingin terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan fasilitas drainase	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas drainase ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas drainase terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan.
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
□ Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas Pemasaran	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan terhadap pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
□ Bambang Cahyono, 2000:108-110		Lembaga pemasaran	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Lembaga pemasaran dalam penyaluran hasil perikanan. ▪Tingkat pengaruh saluran pemasaran terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
□ Dahuri R dalam Mahyuddin B (2001:37)		Informasi pasar dan harga	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan informasi pasar dan harga ▪Tingkat pengaruh informasi pasar dan harga terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
□ Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37)		Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Jarak, waktu dan cara pengangkutan ikan hasil tangkapan ke daerah pemasaran ikan. ▪Tingkat pengaruh aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
□ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam sugeng (2002:22)		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan sebagai tempat yang memperlancar jual beli lelang di PPI ▪Tingkat pengaruh fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
□ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)		Ketersediaan fasilitas areal parkir	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas areal parkir ▪Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
□ Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kelengkapan dan fungsi fasilitas areal parkir ▪Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan dana pengelolaan fasilitas pemasaran ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran hasil perikanan.

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> ▪Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan ▪Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan ▪Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Sugeng (2002:22) ▪Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ,2002 ▪Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26) ▪Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32) 	Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan penyuluhan ▪Tingkat pengaruh penyelenggaraan penyuluhan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Pengumpulan data	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data perikanan ▪Tingkat pengaruh pengumpulan data dan informasi pada keberhasilan fungsi PPI sebagai Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Kemampuan penyuluh perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur penyuluh perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.
		Kelompok masyarakat perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok masyarakat perikanan ▪Tingkat pengaruh keberadaan kelompok masyarakat perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan fungsi fasilitas balai pertemuan nelayan ▪Tingkat pengaruh fasilitas balai pertemuan nelayan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan fungsi fasilitas tempat pelelangan ikan ▪Tingkat pengaruh fasilitas tempat pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> □ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 □ Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) □ Penelitian oleh Sastrawidjaja (2005:28) □ Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) 	Fasilitator pembentukan harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ordinal	Proses jual beli ikan hasil tangkapan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
		Pembayaran ikan hasil tangkapan	Ordinal	Cara pembayaran ikan hasil tangkapan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengaruh cara pembayaran ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
		Peraturan penyelenggaraan lelang	Ordinal	Aturan penyelenggaraan lelang yang berlaku <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengaruh aturan penyelenggaraan lelang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga
		Peran serta masyarakat	Ordinal	Keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan penyelenggaraan lelang ikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan penyelenggaraan lelang ikan terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
		Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	Ordinal	Kemampuan lembaga KUD dalam menjalankan tugasnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengaruh kemampuan lembaga KUD terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.

Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> □ Hadi <i>et al</i> (1997:40) □ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendapatan responden nelayan ▪ UMR Kabupaten Tuban ▪ Tingkat pengaruh pendapatan responden nelayan terhadap keberhasilan fungsi PPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
		Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga ▪ Tingkat pengaruh kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam mendukung keberhasilan PPI ▪ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
		Penjualan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses jual beli ikan hasil tangkapan ▪ Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan
<ul style="list-style-type: none"> □ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 □ Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) 	Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan retribusi pelelangan ikan ▪ Tingkat pengaruh penerimaan retribusi lelang terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah
		Penjualan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses jual beli ikan hasil tangkapan ▪ Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah.
		Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu. ▪ Tingkat pengaruh koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu dalam penyaluran retribusi lelang terhadap PPI sebagai sumber pendapatan daerah.

Metode Pengumpulan Data

Data Observasi Lapangan

No.	Jenis Data	Kegunaan Data
1.	Lokasi PPI meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Sarana angkutan dan jalan yang melewati PPI• Ketersediaan jaringan listrik, jaringan air bersih dan saluran drainase yang melewati PPI• Jarak dengan pemukiman nelayan dan pertokoan alat perikanan• Jarak dengan pom bensin• Jarak dengan Industri pengolah ikan	<ul style="list-style-type: none">• Tinjauan PPI Bulu
2.	Fasilitas meliputi : <ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan Fasilitas• Kondisi fisik bangunan dan fungsi fasilitas• Site plan ruang PPI	<ul style="list-style-type: none">• Tinjauan PPI Bulu• Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu• Dasar untuk analisis faktor guna mencari penyebab fungsi PPI tidak optimal
3.	<ul style="list-style-type: none">• Aksesibilitas yaitu jarak antara tempat pendaratan kapal ke gedung TPI	<ul style="list-style-type: none">• Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan
4.	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan aktivitas perikanan, meliputi aktivitas kapal perikanan, penanganan ikan hasil tangkapan, pemasaran, penyuluhan, pengumpulan data, dan penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none">• Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.• Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI.

Data Kuisiener

No.	Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan Data
1.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> •Kemudahan menjalankan aktivitas kapal perikanan •Jumlah kapal perikanan •Kondisi perairan •Ketersediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan •Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana 	Responden masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal dan pedagang.	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
2.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> •Volume ikan yang didaratkan •Aksesibilitas ke lokasi TPI •Ketersediaan fasilitas dermaga, gedung pelelangan •Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
3.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan •Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan, Instalasi Air Bersih, Pabrik Es, Gudang Dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>), Drainase, •Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
4.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas Penampungan Dan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan •Saluran Pemasaran •Indormasi pasar dan harga •Kemudahan mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan •Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung. •Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

Data Kuisioner

No.	Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan Data
5.	<p>Persepsi masyarakat terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Penyelenggaraan Penyuluhan •Pengumpulan data •Kemampuan Penyuluh Perikanan •Kelompok Masyarakat Perikanan •Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi •Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI •Ketersediaan dana 	<p>Responden masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal dan pedagang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
6.	<p>Persepsi masyarakat terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Penjualan ikan hasil tangkapan •Pembayaran ikan hasil tangkapan •Peraturan penyelenggaraan lelang ikan •Peran serta masyarakat •Kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD 		<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
7.	<p>Persepsi masyarakat terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pendapatan responden nelayan •Kemampuan responden nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya •Penjualan ikan hasil tangkapan 		<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal.
8.	<p>Persepsi masyarakat terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Penerimaan retribusi •Penjualan ikan hasil tangkapan •Koordinasi antara Pemerintah dengan KUD 		<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. •Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal.

Data Wawancara

No.	Jenis Data	Sumber data	Kegunaan Data
1.	<ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas kapal perikanan •Jumlah kapal perikanan •Kondisi perairan •Ketersediaan dana •Kemampuan aparatur kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> •Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal dan pedagang •Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
2.	<ul style="list-style-type: none"> •Pengangkutan ikan hasil tangkapan •Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> •Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal •Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI.
3.	<ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan •Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> •Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal •Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
4.	<ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas Pemasaran •Saluran Pemasaran •Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan •Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> •Pedagang •Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
5.	<ul style="list-style-type: none"> •Penyelenggaraan Penyuluhan •Pengumpulan data •Kelompok masyarakat perikanan •Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> •Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal. •Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
6.	<ul style="list-style-type: none"> •Penjualan ikan hasil tangkapan •Peraturan penyelenggaraan lelang ikan •Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD 	<ul style="list-style-type: none"> •Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal, dan pedagang •Badan Pengelola PPI Bulu •KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo” 	<ul style="list-style-type: none"> •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. •Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
7.	<ul style="list-style-type: none"> •Sistem pengelolaan PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> •Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban 	<ul style="list-style-type: none"> •Tinjauan PPI Bulu
8.	<ul style="list-style-type: none"> •Pengelolaan PPI Bulu terkait dengan pembiayaan dan kelembagaan. •Potensi dan permasalahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu •Upaya mengoptimalkan fungsi PPI •Harapan terhadap PPI di wilayah penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> •Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu, Kecamatan Bancar •Koperasi Unit Desa ” Trisno Maniko Karyo” Kecamatan Bancar •Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Tuban 	<ul style="list-style-type: none"> •Tinjauan PPI Bulu •Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI. •Dasar pertimbangan dalam rekomendasi

Data Studi Kepustakaan

Jenis Data	Sumber data	Kegunaan Data
<ul style="list-style-type: none">•Fungsi PP/PPI•Fungsi TPI•Maksud dan tujuan TPI•Fasilitas Pelabuhan Perikanan/PPI•Kelembagaan Pelabuhan Perikanan/PPI•Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap•Jumlah kapal perikanan dan volume ikan•Kondisi perairan•Aktivitas kapal perikanan, penanganan ikan hasil tangkapan, pemasaran, penyuluhan dan pengumpulan data, penjualan dan pembayaran ikan hasil tangkapan•Lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga•kemampuan penyuluh perikanan dan kelompok masyarakat perikanan•Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan•Peraturan penyelenggaraan lelang•Peran serta masyarakat•Kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD•Pendapatan dan kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga•Penerimaan retribusi•Koordinasi antara Pemerintah dan KUD•Analisis Faktor dan Akar Masalah	<p>Perpustakaan S1 Universitas Brawijaya Malang</p> <ul style="list-style-type: none">•Perpustakaan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang•Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang•Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta (www.dkp.go.id)	<ul style="list-style-type: none">•Gambaran umum•Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI•Dasar untuk analisis kriteria fungsi PPI•Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

Data Organisasi/Instansi

Jenis Data	Sumber Dokumen	Sumber Data	Kegunaan Data
<p>Kebijakan pembangunan bidang perikanan dan kelautan Kabupaten Tuban</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas perikanan di Kabupaten Tuban 	RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005-2015	BAPPEDA Kabupaten Tuban	Gambaran umum yang menunjukkan orientasi PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban
Rencana strategis pembangunan perikanan dan kelautan	Rencana strategis pembangunan perikanan dan kelautan Tahun 2005	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	
<p>Produksi dan nilai pelelangan Perikanan tangkap Kabupaten Tuban dan Kecamatan Bancar Tahun 2000 – 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban 	Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2005	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	
<p>Tarif retribusi pelelangan ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan penyelenggaraan lelang 	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga
<p>Kondisi geografis dan batas administrasi Kecamatan Bancar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta administrasi Kecamatan Bancar ▪ Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar ▪ Sistem transportasi Kecamatan Bancar 	Kecamatan Bancar dalam Angka Tahun 2005	BPS Kabupaten Tuban Kantor Kecamatan Bancar	Gambaran Umum yang menunjukkan orientasi PPI Bulu terhadap Kecamatan Bancar

Data Organisasi/Instansi

Jenis Data	Sumber Dokumen	Sumber Data	Kegunaan Data
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Data Jenis Fasilitas dan Peta Layout PPI Bulu Tahun 2006 <input type="checkbox"/> Jumlah Ikan yang didaratkan di PPI Bulu <input type="checkbox"/> Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas PPI Bulu <input type="checkbox"/> Susunan organisasi kelembagaan pengurus PPI <input type="checkbox"/> Jumlah Armada Kapal Perikanan Nelayan PPI Bulu <input type="checkbox"/> Pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Laporan Tahunan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2005	BPPPI Bulu	Gambaran umum <input type="checkbox"/> Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas PPI 	Laporan Tahunan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2006	BPPPI Bulu	Gambaran umum
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penerimaan retribusi 	Data Potensi Perikanan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2005 Kecamatan Bancar	BPPPI Bulu	Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI

Analisis Karakteristik terhadap Fungsi PPI

Penerapan analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan dalam analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu.

Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI meliputi :

1. Tempat berlabuh kapal perikanan meliputi subvariabel aktivitas kapal perikanan, jumlah kapal yang mendarat, kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan, ketersediaan fasilitas alur pelayaran, ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan, ketersediaan fasilitas pemecah gelombang, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
2. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan meliputi subvariabel volume ikan yang didaratkan, aksesibilitas ke lokasi gedung TPI, ketersediaan fasilitas dermaga, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
3. Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan meliputi subvariabel aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas instalasi air bersih, ketersediaan fasilitas pabrik es, ketersediaan fasilitas gudang dingin, ketersediaan fasilitas drainase, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
4. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan meliputi subvariabel aktivitas pemasaran, lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga, aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas areal parkir, ketersediaan fasilitas jalan penghubung, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
5. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data meliputi subvariabel penyuluhan, pengumpulan data, kemampuan penyuluh perikanan, kelompok masyarakat perikanan, ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan, ketersediaan fasilitas kantor administrasi, kemampuan aparatur kelembagaan dinas perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana
6. Fasilitator pembentukan harga, meliputi subvariabel penjualan ikan hasil tangkapan, pembayaran ikan hasil tangkapan, peraturan penyelenggaraan lelang, peran serta masyarakat, kemampuan aparatur kelembagaan KUD.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, meliputi subvariabel pendapatan responden nelayan, kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, penjualan ikan hasil tangkapan.
8. Sumber pendapatan daerah, meliputi subvariabel penerimaan retribusi, penjualan ikan hasil tangkapan, koordinasi antara pemerintah dengan KUD.

Teknik analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi berdasarkan persepsi masyarakat sehingga menggunakan pendekatan analisis kuantitatif.

Analisis Tingkat Optimal Fungsi PPI

- Analisis tingkat optimal fungsi pangkalan pendaratan ikan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan. **Analisis tingkat optimal fungsi PPI, yaitu pengukuran tingkat optimal fungsi PPI didasarkan pada kriteria fungsi dengan memberikan skala pengukuran pada setiap kriteria.** Jumlah tingkatan skala pengukuran fungsi dengan 8 kriteria didasarkan pada dalil Sturges sebagai berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 8)$$

$$K = 1 + 3,3 (0,9)$$

$$K = 3$$

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Tempat Berlabuh Kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan	Kapal yang mendarat di PPI tidak mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	Kapal yang mendarat di PPI cukup mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	Kapal yang mendarat di PPI mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat
	Jumlah kapal perikanan	Tidak ada kapal yang mendarat di PPI	Kapal yang mendarat di PPI sebanyak < 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT	Kapal yang mendarat di PPI sebanyak \geq 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT
	Kondisi perairan	PPI berada di daerah dengan perairan yang tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut yang beresiko terhadap kerusakan kapal perikanan.	PPI berada di daerah dengan perairan cukup tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut namun tidak beresiko terhadap kerusakan kapal perikanan.	PPI berada di daerah dengan perairan tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang laut.
	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	Tidak tersedia fasilitas alur pelayaran	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mengarahkan kapal yang akan masuk/keluar ke kolam pelabuhan.	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk mengarahkan kapal yang akan masuk/keluar ke kolam pelabuhan.
	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	Tidak tersedia fasilitas kolam pelabuhan	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, melakukan gerakan untuk memutar kapal.	Fasilitas tersedia, berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, melakukan gerakan untuk memutar kapal.
	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	Tidak tersedia fasilitas pemecah gelombang	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk melindungi areal perairan pelabuhan, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk melindungi areal perairan pelabuhan, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut.
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.	Menyediakan fasilitas, tanpa memelihara fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang	Menyediakan dan memelihara fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan pemecah gelombang.
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.	Tersedia dana penyediaan fasilitas tanpa dana pemeliharaan, perbaikan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.	Tersedia dana untuk penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Tidak ada ikan hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal perikanan di PPI	Kapal perikanan dapat mendaratkan ikan di PPI < 2000 ton /tahun.	Kapal perikanan dapat mendaratkan ikan di PPI sebesar ≥ 2000 ton/tahun.
	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi gedung TPI.	Cukup mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI tetapi tidak melalui jalan penghubung.	Mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI dan melalui jalan penghubung.
	Ketersediaan fasilitas dermaga.	Tidak tersedia fasilitas dermaga.	Fasilitas tersedia, tidak digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan dan panjang dermaga < 50 m.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan dan panjang dermaga 50 – 100 m.
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan	Fasilitas tersedia tetapi tidak digunakan sebagai tempat penampungan ikan.	Fasilitas tersedia, digunakan sebagai tempat penampungan ikan
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI.	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Tersedia dana penyediaan, dan pemeliharaan tanpa perbaikan fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Tersedia dana untuk penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Tidak ada aktivitas penanganan di PPI	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI terdiri dari <4 aktivitas penanganan.	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI terdiri dari 4 aktivitas meliputi pemilahan, penimbangan, pengawetan, dan pengepakan.
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani < 3 aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan atau pengepakan ikan hasil tangkapan tetapi kurang memenuhi syarat kelayakan gedung pelelangan.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani 3 aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan dan pengepakan ikan hasil tangkapan, serta memenuhi syarat kelayakan gedung pelelangan.
	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Tidak tersedia fasilitas instalasi air bersih	Fasilitas tersedia tetapi hanya berfungsi untuk pembersihan ikan atau pembersihan lantai gedung pelelangan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk pembersihan ikan serta pembersihan lantai gedung pelelangan.
	Ketersediaan fasilitas pabrik es	Tidak tersedia fasilitas pabrik es	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai / es balok es.	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.
	Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)	Tidak tersedia fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan
	Ketersediaan fasilitas drainase	Tidak tersedia fasilitas drainase	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah aktivitas perikanan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah aktivitas perikanan.
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Tersedia dana penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.
Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Lembaga pemasaran	Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen panjang, yaitu 5 lembaga pemasaran.	Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen cukup, yaitu 4 lembaga pemasaran.	Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen sedikit, yaitu 3 lembaga pemasaran.
	Informasi pasar dan harga	Tidak menyediakan informasi pasar dan harga.	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran atau pergerakan arus barang dan harga.	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga.
	Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan.	Tidak mudah mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan dengan tidak tersedia jaringan jalan dan moda transportasi darat.	Cukup mudah mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan dengan ketersediaan jaringan jalan atau moda transportasi darat.	Mudah mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan dengan ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi darat.
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.
	Ketersediaan fasilitas areal parkir	Tidak tersedia fasilitas areal parkir	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	Tidak tersedia fasilitas jalan penghubung	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Tersedia dana penyediaan tanpa pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Tersedia dana penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung
Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Tidak terselenggara penyuluhan di PPI.	Terselenggara penyuluhan di PPI mengenai teknis penangkapan atau prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.	Terselenggara penyuluhan di PPI mengenai teknis penangkapan, dan prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.
	Pengumpulan data	Tidak lengkap meliputi data kapal perikanan	Data kondisi perikanan kurang lengkap meliputi data kapal perikanan dan jumlah nelayan atau produksi ikan.	Data kondisi perikanan lengkap meliputi data kapal perikanan, jumlah nelayan, produksi ikan

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Fasilitator pembentukan harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang di gedung TPI.	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang dan tanpa lelang di gedung TPI.	Seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang di gedung TPI.
	Pembayaran ikan hasil tangkapan	Hasil penjualan tanpa lelang dan dibayar beberapa hari setelah ikan habis terjual.	Hasil penjualan secara lelang dibayar lunas setelah ikan habis terjual.	Hasil penjualan secara lelang dan dibayar lunas oleh pembeli pada saat lelang.
	Peraturan penyelenggaraan lelang	Peraturan penyelenggaraan lelang yang berlaku tidak berdasarkan perda pevelangan ikan, yaitu perda propinsi dan perda kabupaten.	Peraturan penyelenggaraan lelang yang berlaku hanya berdasarkan perda pevelangan, yaitu perda propinsi atau perda kabupaten saja.	Peraturan penyelenggaraan lelang yang berlaku berdasarkan perda pevelangan, yaitu perda propinsi dan perda kabupaten.
	Peran serta masyarakat	Tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan.	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tetapi tidak terealisasi.	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan dan terealisasi.
	Kemampuan aparaturnya lembaga KUD	Tidak menyelenggarakan lelang ikan dan tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	Menyelenggarakan lelang ikan tetapi tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	Menyelenggarakan lelang ikan, melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.

Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Tingkat pendapatan responden nelayan cenderung menurun	Tingkat pendapatan responden nelayan cenderung tetap	Tingkat pendapatan responden nelayan cenderung meningkat
	Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga	Nilai tukar nelayan /kemampuan keluarga nelayan cenderung menurun	Nilai nilai tukar nelayan = 1 keluarga nelayan cenderung konstan	Nilai tukar nelayan >1 yang berarti keluarga nelayan cenderung meningkat
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang di gedung TPI.	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang dan tanpa lelang di gedung TPI.	Seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang di gedung TPI.
Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Pemerintah Daerah tidak menerima retribusi pevelangan ikan.	Pemerintah Daerah menerima retribusi pevelangan ikan sebesar < 1,25% dari tarif retribusi sebesar 5%	Pemerintah Daerah menerima retribusi pevelangan ikan sebesar $\geq 1,25\%$ dari tarif retribusi sebesar 5%
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang di gedung TPI.	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang dan tanpa lelang	Seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang di gedung TPI.
	Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Tidak ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pevelangan ikan	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pevelangan ikan hanya sebagai formalitas.	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pevelangan ikan

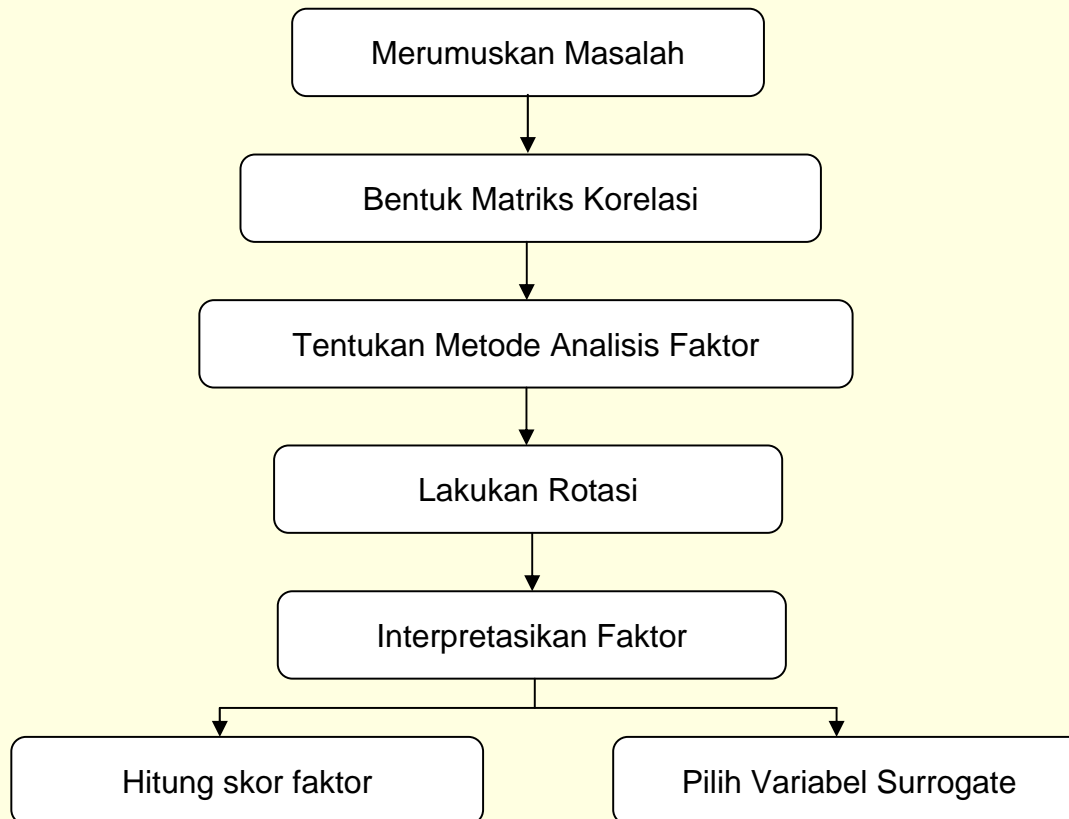
Kriteria & Skala Pengukuran Fungsi PPI

Berdasarkan 8 kriteria dan skala pengukuran fungsi PPI diperoleh tingkat optimal fungsi PPI di wilayah penelitian sebagai berikut :

- **Fungsi PPI optimal**, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 115 – 147
- **Fungsi PPI kurang optimal**, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 82 – 114
- **Fungsi PPI tidak optimal**, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 49 – 81

Tahapan Analisis Faktor

Menurut Nugroho (2005 : 91) analisis faktor merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan meringkas faktor-faktor yang merupakan dimensi suatu variabel, definisi dan sebuah fenomena tertentu



Merumuskan Masalah

1. Merumuskan Masalah meliputi beberapa hal (Supranto, 2004 : 122):
 - a. Tujuan analisis faktor harus diidentifikasi
 - b. Menentukan variabel yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan peneliti yang didasarkan pada penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka.
 - c. Pengukuran variabel berdasarkan skala likert
 - Menurut Nugroho (2005 : 91) analisis faktor yang berasal dari data primer melalui suatu kuisioner akan mengkuantitatifkan data dengan skala likert.
 - Skala likert merupakan jenis skala yang dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik) seperti sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.
 - Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini, dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan.
 - Jawaban setiap item instrumen ini, memiliki gradasi dari tertinggi sampai pada terendah (Hasan, 2002 : 72).

Jumlah gradasi tiap variabel & skala likert

- Banyaknya gradasi dalam setiap variabel pada penelitian ini didasarkan pada dalil Sturges yang dirumuskan sebagai berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 8)$$

$$K = 1 + 3,3 (0,90)$$

$$K = 3$$

- Skala Likert Yang Dipergunakan Dalam Penelitian:

Skala Likert	Keterangan
1	Setuju
2	Kurang setuju
3	Tidak setuju

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Aktivitas kapal perikanan(X11)	a :Bagaimanakah aktivitas kapal perikanan di PPI Bulu?	1	Kapal yang mendarat di PPI tidak mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat
		2	Kapal yang mendarat di PPI cukup mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat
		3	Kapal yang mendarat di PPI dengan mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat
	b : Apakah aktivitas kapal perikanan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Jumlah kapal perikanan (X12)	a : Berapa jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu?	1	Tidak ada kapal yang mendarat di PPI
		2	< 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT
		3	≥20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT
	b : Apakah jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu menentukan keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	c : PPI berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, apakah ditunjukkan oleh jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Kondisi perairan (X13)	a : Bagaimana kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan di PPI Bulu?	1	Tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut yang beresiko terhadap kerusakan kapal
		2	Cukup tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut namun tidak beresiko terhadap kerusakan kapal.
		3	Tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang laut
	b : Apakah kondisi perairan di kawasan PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Ketersediaan fasilitas alur pelayaran (X14)	a : Apakah ketersediaan fasilitas alur pelayaran PPI Bulu berpengaruh pada keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas alur pelayaran di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan (X15)	a : Apakah ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas kolam pelabuhan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang (X16)	a : Apakah tidak tersedianya fasilitas pemecah gelombang menyebabkan kegiatan berlabuh kapal perikanan tidak berjalan dengan lancar?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas pemecah gelombang di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X17)	a : Bagaimanakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas.
		2	Mampu menyediakan fasilitas, tanpa memelihara fasilitas.
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.
	b : Apakah keberhasilan mengelola PPI Bulu dipengaruhi oleh kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	c : Apakah ketidakmampuan menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Ketersediaan dana (X18)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah untuk mengelola fasilitas yang mendukung aktivitas berlabuh kapal di PPI Bulu harus ditopang dengan dana dari Pemerintah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Volume ikan (X21)	a : Apakah volume ikan yang didaratkan di PPI Bulu mendukung fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan dipengaruhi oleh jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI (X22)	a : Bagaimanakah kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI?	1	Tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi TPI.
		2	Cukup mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI tetapi tidak melalui jalan penghubung.
		3	Mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI dan melalui jalan penghubung.
	b : Apakah kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI mendukung keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	c : Apakah tidak adanya jalan penghubung dapat mempersulit pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas dermaga (X23)	a : Apakah ketersediaan fasilitas dermaga mendukung kegiatan bongkar muat ikan di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas dermaga di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan (X24)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penampungan ikan di PPI Bulu?	1.	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat penampungan ikan
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat penampungan ikan
	b : Apakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X25)	a : Bagaimanakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas.
		2	Mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas.
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.
	b : Apakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan dana (X26)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan PPI Bulu berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah untuk mengelola fasilitas yang melayani bongkar muat ikan di PPI Bulu harus ditopang dengan dana dari Pemerintah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan (X31)	a : Bagaimana aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu?	1	Tidak ada aktivitas penanganan di PPI
		2	Tidak lengkap meliputi < 4 aktivitas penanganan.
		3	Lengkap meliputi 4 aktivitas yaitu pemilahan, penimbangan, pengawetan, dan pengepakan.
	b : Apakah aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan (X32)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan untuk menangani ikan hasil tangkapan di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas
		2	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani sebagian aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, atau pengepakan ikan hasil tangkapan
		3	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani seluruh aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, dan pengepakan ikan hasil tangkapan.
	b : Apakah ketersediaan gedung pelelangan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih (X33)	a : Bagaimana ketersediaan fasilitas instalasi air bersih di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas instalasi air bersih
		2	Fasilitas tersedia tetapi hanya berfungsi untuk pembersihan ikan atau pembersihan lantai gedung pelelangan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk pembersihan ikan serta pembersihan lantai gedung pelelangan
	b : Apakah ketersediaan instalasi air bersih menyebabkan PPI Bulu tidak menjadi pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas pabrik es (X34)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pabrik es di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas pabrik es
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.
		3	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.
	b : Apakah ketersediaan pabrik es menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas gudang dingin (X35)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gudang dingin di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas gudang dingin
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas gudang dingin berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas drainase (X36)	a : Apakah ketersediaan saluran drainase di kawasan PPI Bulu mendorong kelancaran penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan ditentukan oleh ketersediaan fasilitas drainase?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X37)	a : Bagaimanakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam menyediakan fasilitas instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas.
		2	Mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas.
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.
	b : Apakah kemampuan BPPPI dalam mengelola fasilitas penanganan ikan mempengaruhi fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan dana (X38)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan PPI Bulu berpengaruh pada kelancaraan aktivitas penanganan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya dana fasilitas penanganan ikan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Aktivitas Pemasaran (X41)	a : Bagaimana anda melakukan aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan?	1	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
		2	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI dan luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
		3	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
	b : Apakah aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan dari PPI mendukung fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	a : Apakah saluran pemasaran yang efektif menyebabkan keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Lembaga pemasaran (X42)	b : Apakah panjangnya saluran pemasaran menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Informasi pasar dan harga (X43)	a : Bagaimanakah ketersediaan informasi pasar dan harga di PPI Bulu?	1	Tidak menyediakan informasi pasar dan harga.
		2	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran atau pergerakan arus barang dan harga.
		3	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga.
	b : Apakah ketersediaan informasi pasar dan harga di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil menjadi pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan (X44)	a : Bagaimanakah kemudahan mendistribusikan produksi perikanan PPI Bulu ke daerah pemasaran tangkapan ikan?	1	Tidak mudah dengan tidak tersedia jaringan jalan dan moda transportasi darat.
		2	Cukup mudah dengan ketersediaan jaringan jalan atau moda transportasi darat.
		3	Mudah dengan ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi darat.
	b : Apakah ketersediaan moda transportasi dan jaringan jalan ke lokasi pusat – pusat pemasaran tangkapan ikan mendukung fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan (X45)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan.
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan sebagai tempat transaksi jual beli ikan mendukung fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas areal parkir (X46)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas areal parkir di PPI Bulu ?	1	Tidak tersedia fasilitas areal parkir
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan
	b : Apakah ketersediaan fasilitas areal parkir di PPI Bulu menyebabkan PPI tidak berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Ketersediaan fasilitas jalan penghubung (X47)	a : Apakah ketersediaan fasilitas jalan penghubung memperlancar aktivitas pengangkutan ikan di PPI Bulu?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
	b : Apakah ketersediaan jalan penghubung di PPI Bulu menyebabkan PPI tidak berhasil sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X48)	a : Bagaimanakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, dan jalan penghubung?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas
		2	Mampu menyediakan tanpa memelihara fasilitas
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas
	b : Apakah kemampuan BPPPI Bulu mengelola fasilitas pemasaran hasil perikanan mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Ketersediaan dana (X49)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas pemasaran ikan di PPI menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan ?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
	b : Apakah untuk mengelola fasilitas yang melayani pemasaran ikan dengan sistem lelang di PPI Bulu diperlukan dana yang tidak sedikit?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Penyuluhan (X51)	a : Apakah saudara pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu?	1	Tidak pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu
		2	Mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan.
		3	Mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan dan prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.
	b : Apakah penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Pengumpulan data (X52)	a : Menurut saudara apakah PPI Bulu bisa berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data ditentukan dari pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah pengumpulan data di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan penyuluh perikanan (X53)	a : Menurut saudara, bagaimana aparatur penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan?	1	Hanya mampu meyakinkan
		2	Mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan
		3	Mampu meyakinkan, mengakomodasi masalah di bidang perikanan dan mampu menghubungkan masyarakat perikanan dengan sumber informan.
	b : Apakah kemampuan aparatur penyuluh perikanan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kelompok masyarakat perikanan (X54)	a : Apakah saudara telah bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan di PPI Bulu?	1	Belum bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan.
		2	Bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan tetapi hanya sebagai formalitas.
		3	Bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan dan berperan aktif dalam penyuluhan.
	b : Apakah keberadaan kelompok masyarakat perikanan mendukung PPI Bulu tidak menjadi pusat pelaksanaan penyuluhan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan (X55)	a : Apakah ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan mendukung penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan di PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas kantor administrasi (X56)	a : Apakah ketersediaan fasilitas kantor administrasi mendukung fungsi PPI Bulu dalam kegiatan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas kantor administrasi menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil dalam pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X57)	a : Apakah kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI mengelola fasilitas balai pertemuan nelayan dan kantor administrasi mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu yang tidak mampu menyediakan fasilitas menjadi penyebab PPI Bulu kurang berhasil menyelenggarakan penyuluhan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan dana (X58)	a : Apakah dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas balai pertemuan nelayan dan kantor administrasi PPI Bulu diperlukan untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah keterbatasan dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran	
Penjualan ikan hasil tangkapan (X61)	a : Menurut saudara, apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju	
		2	Kurang setuju	
		3	Tidak setuju	
	b : Apakah penjualan ikan hasil tangkapan PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju	
		2	Kurang setuju	
		3	Tidak setuju	
Pembayaran ikan hasil tangkapan(X62)	a : Bagaimana cara pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu?	1	Hasil penjualan dibayar beberapa hari setelah ikan habis terjual.	
		2	Hasil penjualan dibayar lunas setelah ikan habis terjual.	
		3	Hasil penjualan langsung dibayar lunas oleh pembeli.	
	b : Apakah cara pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju	
		2	Kurang setuju	
		3	Tidak setuju	
Peraturan penyelenggaraan lelang (X63)	a : Bagaimanakah sikap saudara terhadap penerapan kebijakan KUD dalam penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu?	1	Tidak mendukung	
		2	Mendukung tetapi menjalankan sebagian	
		3	Mendukung dan menjalankan sepenuhnya	
	b : Apakah penerapan aturan penyelenggaraan pelelangan ikan di PPI Bulu mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan lelang ikan PPI Bulu?	1	Setuju	
		2	Kurang setuju	
		3	Tidak setuju	
		c : Apakah aturan penyelenggaraan lelang di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
			2	Kurang setuju
			3	Tidak setuju

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Peran serta masyarakat (X64)	a : Apakah saudara pernah terlibat memberikan masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu?	1	Tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan.
		2	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tetapi tidak terealisasi.
		3	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan dan terealisasi
	b : Apakah keterlibatan saudara dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak mampu membentuk harga secara lelang?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Kemampuan aparaturnya lembaga KUD (X65)	a : Bagaimana kemampuan aparaturnya lembaga KUD terhadap pengelolaan PPI Bulu?	1	Tidak menyelenggarakan lelang ikan dan tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
		2	Menyelenggarakan lelang ikan tetapi tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
		3	Menyelenggarakan lelang ikan, melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
	b : Apakah kemampuan aparaturnya lembaga KUD terhadap PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak mampu sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Pendapatan responden nelayan (X71)	a : Bagaimanakah peningkatan pendapatan saudara saat ini?	1	Menurun
		2	Tetap
		3	Meningkat
	b : Apakah perolehan pendapatan saudara/i menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga (X72)	a : Bagaimanakah peningkatan kemampuan saudara/i dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga?	1	Menurun
		2	Tetap
		3	Meningkat
	b : Apakah kemampuan saudara/i memenuhi kebutuhan hidup keluarga menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Penjualan ikan hasil tangkapan (X73)	a : Apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Penerimaan retribusi (X81)	a : Apakah keberhasilan PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah dilihat dari penerimaan retribusi pelelangan ikan PPI Bulu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tuban dari PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Pertanyaan & Skala Likert Evaluasi Fungsi PPI

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Penjualan ikan hasil tangkapan (X82)	a : Apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah sistem penjualan ikan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Koordinasi antara Pemerintah dengan KUD (X83)	a : Bagaimanakah koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu?	1	Tidak ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan
		2	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan hanya sebagai formalitas.
		3.	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan terealisasi.
	b : Apakah koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah?	1	Tidak setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Setuju.

Menentukan Bentuk Matriks Korelasi

- ✓ Proses analisis didasarkan pada suatu matriks korelasi agar variabel pendalaman yang berguna bisa diperoleh dari penelitian matriks ini
- ✓ Agar analisis faktor bisa tepat digunakan maka variabel-variabel yang akan dianalisis harus berkorelasi. Apabila koefisien korelasi antar variabel terlalu kecil, hubungan lemah, analisis faktor tidak tepat. Diharapkan variabel asli berkorelasi dengan sesama variabel lainnya. Juga berkorelasi dengan faktor sebagai variabel baru yang disaring dari variabel – variabel asli.
- ✓ Untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya hubungan antar variabel, maka digunakan pedoman

Koefisien Korelasi	Kualifikasi
0.00 – 0.199	Lemah Sekali
0,20– 0.399	Lemah
0.40 – 0.599	Cukup
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 10.00	Sangat Kuat

Menentukan Metode Analisis Faktor & Penentuan Banyaknya Faktor

3. Menentukan Metode Analisis Faktor

Metode yang dipergunakan dalam analisis faktor, yaitu principal components analysis dan common faktor analysis

4. Penentuan Banyaknya Faktor

- ✓ Maksud melakukan analisis faktor adalah mencari variabel baru yang disebut faktor yang saling tidak berkorelasi, bebas satu sama lainnya, lebih sedikit jumlahnya daripada variabel asli, akan tetapi bisa menyerap sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli atau yang dapat memberikan sumbangan terhadap varian seluruh variabel
- ✓ beberapa kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan banyaknya faktor, yaitu:
 - a. Akar ciri (Eigenvalues)
 - b. Persentase Keragaman (Percentage of Variances)
 - c. Scree Plot

Rotasi & Interpretasi Faktor

5. Melakukan Rotasi

Metode rotasi yang banyak dipergunakan adalah varimax procedure. Prosedur ini merupakan metode orthogonal yang berusaha meminimumkan banyaknya variabel dengan muatan tinggi pada satu faktor, dengan demikian memudahkan pembuatan interpretasi mengenai faktor

6. Menginterpretasikan Faktor

Interpretasi faktor dapat dilihat pada output SPSS melalui Total Variance Explained yang menunjukkan kemampuan faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan suatu definisi atau variabel dan Component Matrix yang memperlihatkan faktor-faktor dimensi yang merupakan faktor dalam suatu variabel

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
Mengidentifikasi karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu	Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪Aktivitas berlabuh kapal perikanan ▪Jumlah responden nelayan yang mendaratkan kapal di PPI dan luar PPI 	Survey primer ke masyarakat dg kuisioner dan wawancara	-Tteknik distribusi frekuensi berdasarkan persepsi masyarakat - Photomapping sebagai pelengkap secara visual dan spasial	Karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu
		Jumlah kapal perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Jumlah kapal perikanan yang berlabuh. ▪Tingkat pengaruh jumlah kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey sekunder BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dg kuisioner dan wawancara		
		Kondisi perairan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan ▪Tingkat pengaruh kondisi perairan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey primer BPPPI Bulu dg wawancara, masyarakat dg kuisioner & wawancara		
		Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas alur pelayaran. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas alur pelayaran terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. 	Survey primer ke masyarakat dg kuisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 			
		Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pemecah gelombang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. 			

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Kemampuan aparaturnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang. ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparaturnya kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas kolam pelabuhan dan alur pelayaran. 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dg metode wawancara, ke masyarakat dg metode kuisisioner & wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dg metode kuisisioner & wawancara		
	Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Produksi ikan ▪Tingkat pengaruh produksi ikan yang didaratkan di PPI terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dg metode kuisisioner & wawancara		
		Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪Cara dan jarak pengangkutan ikan hasil tangkapan dari tempat pendaratan kapal ke lokasi TPI ▪Tingkat pengaruh kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dg metode kuisisioner & wawancara		
		Ketersediaan fasilitas dermaga.	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas dermaga. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas dermaga terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 			

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparatur lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dg wawancara. Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner & wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana fasilitas dalam mendukung penyediaan fasilitas dermaga dan gedung pelelangan. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dg wawancara, masyarakat dg kuisisioner & wawancara		
	Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh aktivitas penanganan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penanganan ikan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke masyarakat dg metode kuisisioner, wawancara dan observasi		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan intalasi air bersih. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas instalasi air bersih terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas pabrik es	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas pabrik es . ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pabrik es terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 			
		Ketersediaan fasilitas gudang dingin	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gudang dingin. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gudang dingin terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 			
		Ketersediaan fasilitas drainase	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas drainase ▪Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas drainase terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 			
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dg wawancara, ke masyarakat dg kuisisioner & wawancara		
	Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan terhadap pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner, wawancara & observasi		
		Lembaga pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪Lembaga pemasaran dalam penyaluran hasil perikanan. ▪Tingkat pengaruh saluran pemasaran terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner & wawancara.		
		Informasi pasar dan harga	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan informasi pasar dan harga ▪Tingkat pengaruh informasi pasar dan harga terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 			
		Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Jarak, waktu dan cara pengangkutan ikan hasil tangkapan ke daerah pemasaran ikan. ▪Tingkat pengaruh aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. 			

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan sebagai tempat yang memperlancar jual beli lelang di PPI ▪Tingkat pengaruh fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi.		
		Ketersediaan fasilitas areal parkir	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan fasilitas areal parkir ▪Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 			
		Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kelengkapan dan fungsi fasilitas areal parkir ▪Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 			
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dg wawancara. Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner & wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪Ketersediaan dana pengelolaan fasilitas pemasaran ikan hasil tangkapan. ▪Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran hasil perikanan. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner & wawancara		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
	Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Penyelenggaraan penyuluhan ▪Tingkat pengaruh penyelenggaraan penyuluhan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> ▪Pengumpulan data perikanan ▪Tingkat pengaruh pengumpulan data dan informasi pada keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey primer ke BPPPI Bulu dg wawancara Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Kemampuan penyuluh perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan aparaturnya penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan ▪Tingkat pengaruh kemampuan aparaturnya penyuluh perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dg wawancara. Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Kelompok masyarakat perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kelompok masyarakat perikanan ▪Tingkat pengaruh keberadaan kelompok masyarakat perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey primer ke BPPPI Bulu dg wawancara. Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan fungsi fasilitas balai pertemuan nelayan ▪ Tingkat pengaruh fasilitas balai pertemuan nelayan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner, wawancara dan observasi.		
		Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan fungsi fasilitas tempat pelelangan ikan ▪ Tingkat pengaruh fasilitas tempat pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner, wawancara dan observasi.		
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. ▪ Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dg wawancara. Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. ▪ Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dg wawancara Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara.		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
	Fasilitator pembentuk harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Proses jual beli ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu		
		Pembayaran ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Cara pembayaran ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh cara pembayaran ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Peraturan penyelenggaraan lelang	<ul style="list-style-type: none"> ▪Aturan penyelenggaraan lelang yang berlaku ▪Tingkat pengaruh aturan penyelenggaraan lelang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke KUD dg wawancara. Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪Keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan penyelenggaraan lelang ikan ▪Tingkat pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan penyelenggaraan lelang ikan terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara		
		Kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan lembaga KUD dalam menjalankan tugasnya ▪Tingkat pengaruh kemampuan lembaga KUD terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke KUD dg wawancara, ke masyarakat dg kuisisioner dan wawancara.		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Pendapatan responden nelayan dan kecenderungan peningkatannya ▪Tingkat pengaruh pendapatan responden nelayan terhadap keberhasilan fungsi PPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kecenderungan peningkatannya ▪Tingkat pengaruh kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam mendukung keberhasilan PPI meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Proses jual beli ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
	Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> ▪Penerimaan retribusi pelelangan ikan ▪Tingkat pengaruh penerimaan retribusi lelang terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara.		

Desain Survey

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪Proses jual beli ikan hasil tangkapan ▪Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara		
		Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu. ▪Tingkat pengaruh koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu dalam penyaluran retribusi lelang terhadap PPI sebagai sumber pendapatan daerah. 	Survey sekunder ke Dinas perikanan Tuban dan KUD dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara.		
Mengevaluasi tingkat optimal fungsi PPI	Variabel dan subvariabel yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik fungsi PPI				Analisis Tingkat Optimal Fungsi PPI dg kriteria & skala pengukuran fungsi PPI	Tingkat optimal fungsi PPI
Menentukan faktor penyebab fungsi PPI Bulu tidak optimal	Subvariabel yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik fungsi PPI				Teknik Analisis Faktor dan Analisis Akar Masalah	Faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan perikanan tangkap dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya. Pembangunan perikanan tangkap juga dapat meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan tangkap terhadap pembangunan perikanan nasional. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003:32) menyatakan bahwa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pembangunan perikanan tangkap di Indonesia adalah sebagai berikut, (1) Pembangunan berorientasi ke wilayah darat, sedangkan kelautan belum mendapat posisi yang semestinya; (2) Kemampuan Sumber Daya Manusia, teknologi pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan masih rendah, terutama pada masyarakat nelayan; (3) Minimnya dukungan dana terhadap pembangunan sektor kelautan khususnya perikanan, hal ini ditandai dengan kekurangan sarana – prasarana pendukung bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan baik kualitas maupun kuantitasnya; (4) Tingkat kompetisi yang masih rendah pada tingkat produksi, harga dan kualitas dengan ditandai sedikitnya pengusaha yang bergerak dalam bidang ini; (5) Belum adanya pendekatan saintifik untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta dukungan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mewujudkan tangguhnya sektor kelautan dan perikanan.

Kawasan Laut Utara Jawa merupakan kawasan yang cukup mendapat perhatian dari Pemerintah karena memiliki potensi sumber daya kelautan yang potensial untuk dikembangkan. Kawasan Laut Utara Jawa beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Menjawab tantangan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan harus dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya perikanan yang ada, mendorong ekspor dalam upaya memanfaatkan peluang pasar

dan perubahan pola hidup masyarakat serta upaya mengeliminir ancaman dari setiap perubahan yang tengah berkembang. Pengoptimalisasian potensi sumberdaya perikanan dapat dilakukan apabila didukung dengan penyediaan fasilitas perikanan yang berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan. Penyediaan fasilitas perikanan sebagai akses dari produsen ke konsumen merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan membantu mengoptimalkan pembangunan perikanan tangkap.

Salah satu Kawasan Laut Utara Jawa adalah Kabupaten Tuban sebagai salah satu Kabupaten di kawasan Pantai Utara Jawa, Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban mempunyai kawasan pantai sepanjang 65 km yang membujur dari Timur ke Barat. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2015, kawasan pantai Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang potensial untuk dibangun tempat sentral kegiatan perikanan sehingga pemerintah menyediakan fasilitas perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat pelelangan Ikan. Fasilitas perikanan tersebut terdapat di sentra-sentra kegiatan nelayan, yaitu (1) 1 unit Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Bulumeduro; (2) 1 unit Pangkalan Perahu di Desa Gesikharjo; (3) 1 unit Pangkalan Perahu di Desa Kradenan; (4) 2 unit TPI di Desa Karangagung; (5) 1 unit TPI di Desa Beji; (6) 1 unit TPI di Desa Tambakboyo; (7) 1 unit TPI di Desa Socorejo; (8) 1 unit TPI di Desa Glondonggede; (9) 1 unit TPI di Desa Palang; dan (10) 1 unit TPI di Desa Mentoso. Penyediaan fasilitas perikanan tersebut berfungsi untuk mendayagunakan potensi kelautan terutama di bidang penangkapan ikan di laut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengelola potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tuban terdapat kegiatan pelelangan ikan hasil tangkapan yang mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Kontribusi yang diberikan dari tahun 2000 hingga tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Produksi dan Nilai Pelelangan Perikanan Tangkap Kabupaten Tuban Tahun 2000 - 2005

Tahun	Produksi (Ton)		Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
	Ikan yang didaratkan	Ikan yang dilelang		
2000	8.609	719	3.039.010.150	-
2001	9.262	807	4.221.714.220	38,92
2002	9.847	664	2.326.290.000	-44,89
2003	9.384	557	2.381.036.000	2,35
2004	9.337	797	2.501.872.000	5,07
2005	9.360	642	2.218.274.000	-11,33
Rata – rata pertumbuhan (%/tahun)				-1,98

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Tahun 2000 - 2005

Pada tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa tidak seluruh ikan hasil tangkapan di Kabupaten Tuban dilelang dan menghasilkan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Hasil pelelangan ikan tersebut memberikan kontribusi terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2001 dengan prosentase 38,92% kemudian menurun drastis pada tahun 2002 sebesar 44,89% sehingga rata – rata pertumbuhan nilai pelelangan perikanan tangkap Kabupaten Tuban menurun sebesar 1,98%. Adanya penurunan nilai pelelangan perikanan tangkap dalam kurun waktu tersebut menunjukkan kontribusi hasil pelelangan ikan sebagai sumber pendapatan daerah masih minim.

Sesuai dengan penjelasan pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan dijelaskan bahwa fungsi Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan adalah sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat penyuluhan dan pengumpulan data. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada dasarnya berfungsi memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi perikanan. Aktivitas ekonomi perikanan didukung dengan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memicu perkembangan sebuah Pangkalan Pendaratan Ikan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan (1987) dalam Mahyuddin B (2001:13) fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah mampu menyediakan fasilitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, menyediakan data statistik yang akurat, membina mutu hasil perikanan, meliputi penanganan hasil, memilah & menimbang, pengepakan, fasilitator pembentukan harga dan sebagai

sumber pendapatan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh PPI di Indonesia berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan fungsi idealnya.

Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar merupakan salah satu fasilitas perikanan di Kabupaten Tuban. Pada awal pembangunan masih berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun pada tahun 1986 dan merupakan fasilitas perikanan yang pertama di Kabupaten Tuban. Pada tahun 1993 TPI berubah status menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan satu - satunya pelabuhan perikanan type D di Kabupaten Tuban. Seiring dengan berjalannya waktu permasalahan – permasalahan yang terjadi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu semakin kompleks. PPI Bulu tidak berjalan secara optimal sesuai dengan fungsi idealnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perikanan.

Sejak tahun 2002 aktivitas perikanan tidak terpusat di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Aktivitas perikanan yang semula dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu sebagian beralih ke sepanjang jalan dan pantai di luar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Aktivitas perikanan tersebut meliputi aktivitas pendaratan kapal, penanganan ikan hingga pemasaran hasil tangkapan ikan. Perubahan ruang aktivitas perikanan ini menunjukkan PPI Bulu tidak menjadi pusat sosial ekonomi perikanan.

Aktivitas berlabuh kapal perikanan hanya dengan mendaratkan kapal di sepanjang pantai. Kapal perikanan yang berlabuh tidak ditampung di kolam pelabuhan untuk melindungi kapal dari ombak laut. Setelah kapal berlabuh kemudian ikan hasil tangkapan didaratkan atau bongkar muat ikan di sepanjang jalan dan pantai, tidak pada dermaga yang melayani bongkar muat ikan.

Sejak tahun 2003 Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak melalui proses jual beli ikan secara lelang. Transaksi jual beli ikan hanya dilakukan antara nelayan dan pedagang tanpa melibatkan KUD sebagai pengelola pelelangan ikan.

Penyediaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu untuk melayani aktivitas perikanan masih terbatas, kurang terawat dan memadai dimana terjadi kerusakan pada bangunan fasilitas; fasilitas yang tersedia sebagian telah berubah

fungsi bahkan tidak berfungsi sama sekali. Disamping itu dana operasional untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dalam upaya pengoptimalan fungsi PPI terbatas.

Penurunan nilai retribusi pelelangan ikan dimulai pada tahun 2001. Lebih jelasnya mengenai perkembangan produksi ikan serta nilai retribusi pelelangan ikan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perkembangan Produksi dan Nilai Retribusi Pelelangan Ikan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 1993-2003

Tahun	Produksi (Ton)	Pelelangan Ikan (Rp)		Pertumbuhan (%)
		Harga	Nilai Retribusi (5%)	
1993	1.253	1.454.196.610	72.709.830	-
1994	1.344	1.636.274.610	81.813.725	12,5
1995	1.320	1.570.992.350	78.549.617	-3,9
1996	1.160	2.206.678.690	110.333.934	40,4
1997	760	1.706.306.770	85.315.338	-22,6
1998	875	3.787.863.820	189.393.191	121,9
1999	449	2.283.975.600	114.198.780	-39,7
2000	445	2.540.015.000	127.000.750	11,2
2001	306	2.220.015.700	111.000.785	-12,6
2002	153	1.151.351.500	40.607.437	-63,4
2003	1.523	6.044.530.200	-	-
2004	3.802	16.573.010.000	-	-
2005	4.507	17.062.466.000	-	-

Sumber : Data Potensi Perikanan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat ditunjukkan bahwa pada tahun 1998 mencapai nilai retribusi pelelangan ikan tertinggi yaitu Rp. 189.393.191 dengan prosentase 121,9%. Pada tahun 2001 mulai terjadi penurunan nilai retribusi pelelangan ikan sebesar 12,6% dan terus menurun hingga pada tahun 2003 sudah tidak ada pelelangan ikan dan tidak menghasilkan retribusi pelelangan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban.

Adanya kegiatan jual beli ikan hasil tangkapan secara monopoli oleh tengkulak di luar PPI Bulu. Hal ini menjadikan nilai jual ikan tidak meningkat, tidak mengikuti harga pasar sehingga menurunkan peluang peningkatan pendapatan nelayan. Permasalahan tersebut menunjukkan PPI Bulu kurang berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perikanan ke arah lebih sejahtera, khususnya nelayan.

Bertitik tolak dari isu permasalahan yang terjadi di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang bertujuan

untuk mengevaluasi tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu serta menentukan faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal sehingga diperoleh suatu rekomendasi agar fungsi PPI optimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan – permasalahan yang terjadi di wilayah penelitian yang mendasari penelitian ini antara lain:

1. Perubahan ruang aktivitas perikanan yang semula dilakukan sepenuhnya di PPI Bulu beralih ke sepanjang jalan, pantai di luar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Hal ini menunjukkan PPI Bulu tidak menjadi pusat sosial ekonomi perikanan (*Observasi lapangan, 2006*).
2. PPI Bulu tidak menampung kapal perikanan yang mendarat di PPI Bulu. Kapal perikanan mendarat di sepanjang pantai, tidak memiliki fasilitas kolam pelabuhan untuk menampung kapal perikanan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1(*Observasi lapangan, 2006*).



Gambar 1.1 Kapal perikanan masih berlabuh di sepanjang pantai pendaratan. Tidak ada kolam pelabuhan yang menampung kapal sebagai perlindungan kapal dari ombak laut.

3. PPI Bulu tidak mampu mengakomodasi aktivitas bongkar muat ikan dimana tidak tersedia fasilitas dermaga yang melayani bongkar muat ikan . Bongkar muat ikan dilakukan di sepanjang jalan dan pantai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 (*Observasi lapangan, 2006*).



Gambar 1.2 Bongkar muat ikan di sepanjang jalan oleh masyarakat perikanan

4. PPI Bulu kurang mampu menangani ikan hasil tangkapan dimana ikan yang didaratkan di PPI Bulu tidak melalui proses pendinginan.
5. PPI Bulu tidak menjadi pusat pemasaran ikan hasil tangkapan. Pedagang tidak hanya membeli ikan dari PPI Bulu, melainkan membeli ikan di sepanjang pantai dan jalan luar PPI.



Gambar 1.3 Transaksi jual beli ikan sebagai bentuk kegiatan pemasaran di pesisir pantai luar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

6. Kegiatan penyuluhan di PPI Bulu kurang lengkap dalam menunjang aktivitas perikanan di PPI Bulu.
7. Pembentukan harga dalam jual beli ikan hasil tangkapan ditentukan oleh pedagang tanpa lelang. (*Wawancara, 2006*)



Gambar 1.4 Ikan yang didaratkan di PPI Bulu tidak melalui proses pelelangan ikan

8. Keberadaan PPI Bulu belum mampu menjadikan masyarakat perikanan lebih sejahtera.

9. Sejak tahun 2001 terjadi penurunan nilai retribusi pelelangan ikan sebesar 12,6% dan terus menurun hingga pada tahun 2003 sudah tidak ada pelelangan ikan dan tidak menghasilkan retribusi pelelangan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban. (*Laporan Tahunan BPPPI, 2005*)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu?
2. Bagaimanakah tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu?
3. Apakah yang menjadi faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu tidak optimal?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Mengidentifikasi karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu.
2. Mengevaluasi tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu.
3. Menentukan faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu tidak optimal.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tuban, sebagai bahan masukan untuk mengetahui tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu dan faktor penyebabnya sehingga terdapat pedoman dalam upaya memperbaiki fungsi PPI Bulu.
2. Bagi Koperasi Unit Desa “Tresno Maneko Karyo”, sebagai bahan masukan dalam memperbaiki fungsi PPI Bulu sehingga pelelangan ikan bisa berjalan kembali.
3. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam mengoptimalkan fungsi PPI Bulu sehingga fasilitas perikanan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat perikanan untuk mendukung kelancaran aktivitas perikanan.
4. Bagi kalangan akademis, sebagai bahan referensi, masukan pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya pengoptimalan fungsi PPI Bulu berdasarkan rekomendasi yang akan diberikan.
5. Bagi peneliti, sebagai aplikasi dari ilmu yang telah didapatkan selama menjalani studi di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota berkaitan dengan keoptimalan fasilitas perikanan, yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan penelitian adalah Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu terdiri dari beberapa ruang, yaitu Pantai pendaratan, Gedung Tempat Pelelangan Ikan, Ruang Pengemasan, Gudang peralatan, Coldstorage, Pabrik Es, Bengkel nelayan, Areal parkir, Kios agrobisnis, Toko nelayan, dan Kantor administrasi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.5 dan 1.6 berikut,

Gambar 1.5 Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

Gambar 1.6 Ruang Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Pembahasan materi pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa komponen terkait dengan fungsi PPI antara lain adalah :

1. Tempat berlabuh kapal perikanan, meliputi aktivitas kapal perikanan, jumlah kapal yang mendarat, ketersediaan fasilitas alur pelayaran, ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas.
2. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, meliputi jumlah ikan yang didaratkan, aksesibilitas ke lokasi TPI, ketersediaan fasilitas dermaga, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas.
3. Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan, meliputi Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan, ketersediaan jaringan prasarana air bersih, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas instalasi air bersih, ketersediaan fasilitas pabrik es, ketersediaan fasilitas gudang dingin (*coldstorage/chillroom*), kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas.
4. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, meliputi aktivitas pemasaran, lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga, aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas areal parkir, ketersediaan fasilitas jalan penghubung, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas.
5. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data, meliputi penyuluhan, pengumpulan data, kemampuan penyuluh perikanan, kelompok masyarakat perikanan, ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan, ketersediaan fasilitas kantor administrasi, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.

6. Fasilitator pembentukan harga, meliputi penjualan ikan hasil tangkapan, pembayaran ikan hasil tangkapan, peraturan penyelenggaraan lelang, peran serta masyarakat, kemampuan aparatur kelembagaan KUD.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, meliputi pendapatan responden nelayan, kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, penjualan ikan hasil tangkapan.
8. Sumber pendapatan daerah, meliputi penerimaan retribusi, penjualan ikan hasil tangkapan, koordinasi antara pemerintah dengan KUD.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan pokok – pokok pikiran yang ada pada tiap bab penelitian yang berjudul “Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu“ terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan penelitian, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan serta memberikan gambaran kerangka pemikiran dalam proses penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori maupun konsep yang mendukung proses analisis penelitian ini, yaitu mengenai karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), teori analisis faktor dan analisis akar masalah untuk mencari faktor penyebab berdasarkan hasil analisis tingkat optimal fungsi PPI.

Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan metode – metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian, penentuan lokasi wilayah penelitian, penentuan sampel penelitian, penentuan dan pemilihan variabel penelitian, metode pengumpulan data sampai pada metode analisa serta diagram alir penelitian yang merinci langkah – langkah pengerjaan penelitian ini.

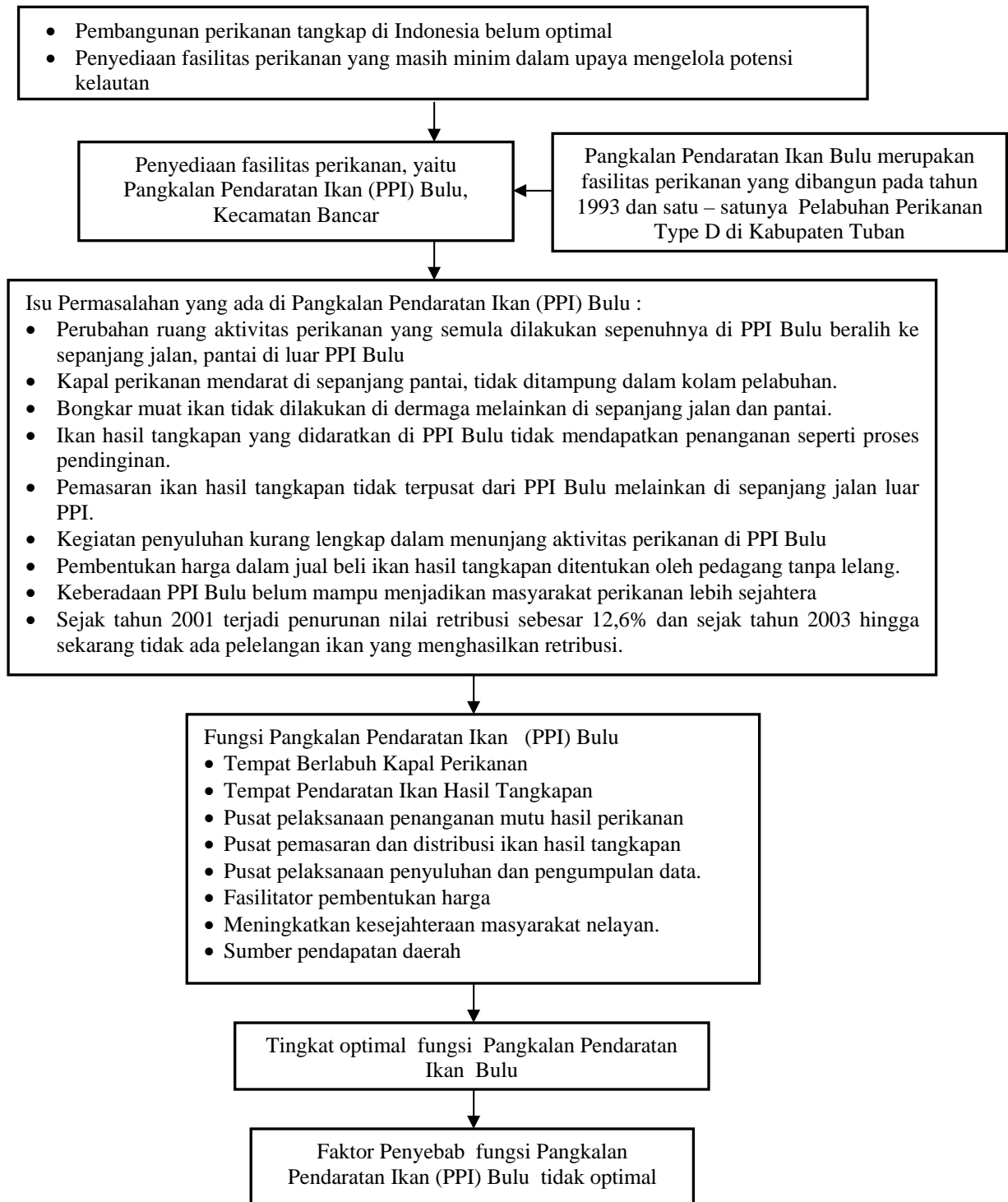
Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi gambaran umum yang menunjukkan orientasi wilayah penelitian terhadap wilayah yang lebih luas serta uraian yang akan digunakan dalam analisis, meliputi analisis karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan dengan teknik distribusi frekuensi, analisis tingkat optimal fungsi PPI dengan teknik kriteria fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kemudian dicari faktor penyebabnya dengan teknik analisis faktor dan analisis akar masalah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang disajikan pada Bab V merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada pada Bab I. Selain itu bab ini berisi saran sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) agar PPI lebih berfungsi secara optimal dalam melayani kepentingan masyarakat perikanan, pemerintah dan swasta.

1.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	9
1.6.2 Ruang Lingkup Materi.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan	13
1.8 Kerangka Pemikiran.....	15
Gambar 1.1 Kapal perikanan masih berlabuh di sepanjang pantai pendaratan.....	6
Gambar 1.2 Bongkar muat ikan di sepanjang jalan oleh masyarakat perikanan ...	7
Gambar 1.3 Transaksi jual beli ikan sebagai bentuk kegiatan pemasaran di pesisir pantai luar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	7
Gambar 1.4 Ikan yang didaratkan di PPI Bulu tidak melalui proses pelelangan ikan.....	7
Gambar 1.5 Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	10
Gambar 1.6 Ruang Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	11
Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran.....	15
Tabel 1.1 Perkembangan Produksi dan Nilai Pelelangan Perikanan Tangkap Kabupaten Tuban Tahun 2000 - 2005.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan Produksi dan Nilai Retribusi Pelelangan Ikan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 1993-2003.....	5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Umum

Beberapa definisi umum dan istilah yang dipergunakan dalam penelitian dengan judul "Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan" adalah sebagai berikut :

- Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang bersifat relatif dan mutlak akan kegunaan suatu sasaran kerja tertentu atau suatu pembangunan yang direncanakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Peter R. Stopher dan Arnim H. Meyburg (Stopher dan Meyburg, 1978 : 2) : "*Evaluation maybe the relative and absolute assesment of the worth whileness of particular courses of action or planned expenditure*"

Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuntungan (*advantage*) dan kerugiannya (*disadvantage*). Kegiatan evaluasi juga dapat mengusulkan suatu kemungkinan untuk melakukan "*do nothing*" terhadap suatu permasalahan. Kegiatan evaluasi bukanlah suatu pengambilan keputusan akan tetapi hanya merupakan alat untuk menuju pengambilan keputusan (Lichfield, et al., 1975 : 7)

- Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna; jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; kerja suatu bagian tubuh (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2004 : 298)
- Pangkalan Pendaratan Ikan adalah prasarana perikanan sebagai pangkalan operasional, tempat tambat dan berlabuh kapal – kapal perikanan, pendaratan, pelelangan dan pemasaran hasil perikanan serta berfungsi sebagai tempat pengawasan sumber daya ikan, dengan klasifikasi di bawah pelabuhan perikanan (Pasal 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 02/men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan ikan)

2.2 Pangkalan Pendaratan Ikan

- Pelabuhan Perikanan adalah suatu areal yang terlindung dari keganasan laut, dimana kapal dapat berteduh dan memperoleh pelayanan dalam keperluan muat dan bongkar serta pengelolaan aktivitas yang berlangsung didalamnya. (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra, 2005: 15).
- Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berarti tempat berlabuh atau penambatan perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk memuat perbekalan kapal, awak kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat nelayan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra, 2005: 15).
- Sesuai dengan penjelasan pasal 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 02/men/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan ikan dijelaskan bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan adalah prasarana perikanan sebagai pangkalan operasional, tempat tambat dan berlabuh kapal – kapal perikanan, pendaratan, pelelangan dan pemasaran hasil perikanan serta berfungsi sebagai tempat pengawasan sumber daya ikan, dengan klasifikasi di bawah pelabuhan perikanan.
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya (lingkungan kerja ekonomi perikanan) yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun pengolahannya. Sebagai lingkungan kerja ekonomi perikanan, di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan terdapat Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang. Fasilitas

perikanan tersebut dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil. (Direktorat Jenderal Perikanan (1997) dalam Azis Nur Bambang, 2004:23)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai salah satu jenis Pelabuhan Perikanan memiliki aktivitas yang berbeda dengan pelabuhan lainnya, seperti pelabuhan niaga dimana pada umumnya semua aktivitas seperti bongkar, pengisian perbekalan, pengadaan dan perbaikan ringan serta perawatan dilakukan di dermaga yang sama; sebaiknya mengingat perbedaan waktu serta kebutuhan akan ruang yang tumpang tindih, maka di PPI harus terdapat pemisahan tempat untuk setiap lokasi aktivitas. Apabila tingkat operasi kecil hanya berskala kecil, sehingga faktor efisiensi mudah dicapai, maka kebutuhan akan sarana dermaga yang terpisah mungkin tidak terlalu mendesak. Untuk usaha perikanan yang apabila dermaga bongkar hanya digunakan selama beberapa jam saja dalam sehari, maka dermaga ini dapat pula digunakan untuk tambat labuh.

Namun demikian, demi kelancaran aktivitas, disarankan untuk mengadakan pemisahan tersebut bahkan lebih jauh dengan menyediakan dermaga terpisah bagi tambat labuh, suplai dan perawatan serta perbaikan. Agar dapat berfungsi sesuai dengan peranannya dan sesuai dengan karakter fisiknya sebagai satu kesatuan tata ruang PPI, maka perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kegiatannya. Kegiatan operasional tersebut di bagi menjadi :

- a. Penangkapan Ikan (*fishing ground*)
- b. Pendaratan di dermaga bongkar (*landing*)
- c. Tambat labuh dan istirahat (*berthing*)
- d. Penanganan (*handling*)
- e. Pelelangan (*auctioning*)
- f. Pengepakan (*packing*)
- g. Pengangkutan (*transportation*)
- h. Pemasaran (*marketing*)

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (1994) dalam Azis Nur Bambang (2004 : 25-26), fasilitas pada Pelabuhan Perikanan /

Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai dengan pola kegiatan operasional di atas dibagi menjadi tiga.

A. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok merupakan bangunan pelindung pantai yang berfungsi untuk melindungi Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan dari gangguan alam. Fasilitas ini diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayaran, tempat berlabuh kapal serta bongkar muat hasil tangkapan. Fasilitas pokok tersebut terdiri dari :

- a. Alur pelayaran
- b. Kolam pelabuhan
- c. Bangunan penahan gelombang (*breakwater*)
- d. Dermaga/jetty
- e. Pantai pendaratan
- f. Turap penahan tanah
- g. Jalan dalam kompleks pelabuhan

B. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah semua fasilitas yang dibangun untuk menunjang kelancaran operasional Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi :

- a. Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- b. Tangki BBM dan Instalasinya
- c. Instalasi Listrik
- d. *Cold Storage/chillroom* lengkap dengan unit pembekuannya
- e. Dock/Slipway
- f. Bengkel reparasi
- g. Gedung – gedung untuk penanganan/pengolahan
- h. Tempat penjemuran dan perbaikan jarring

C. Fasilitas Tambahan (Penunjang)

Fasilitas tambahan (penunjang) adalah semua fasilitas yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan operasional di lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan, diantaranya meliputi :

- a. Kantor administrasi (Adpel, syahbandar, bea cukai, keamanan dan lain – lain)
- b. Toko/ warung serba ada (Waserda)
- c. Balai pertemuan nelayan
- d. Perumahan karyawan/*mess operator*
- e. MCK umum
- f. Fasilitas ibadah
- g. Fasilitas kesehatan
- h. Perumahan /pemukiman nelayan
- i. Tempat penginapan nelayan
- j. Saluran drainase dan fasilitas kebersihan lainnya.
- k. Fasilitas pembersih limbah kapal dan industri perikanan.

2.3 Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan

Dalam rangka pengembangan perikanan, khususnya di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan. Pemerintah berkewajiban membangun fasilitas perikanan. Dalam hal ini fasilitas perikanan tersebut berbentuk pelabuhan perikanan dan saluran - saluran induk untuk pertambakan/perkolaman. Pelabuhan perikanan sifatnya sebagai satu lingkungan kerja ekonomi perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan Pelabuhan Perikanan type D. Untuk itu penentuan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan dapat merupakan pendekatan dengan pertimbangan – pertimbangan fungsi Pelabuhan Perikanan. Sesuai dengan penjelasan pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan dijelaskan bahwa fungsi Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan adalah terinci sebagai berikut :

2.3.1 Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

A. Aktivitas Kapal Perikanan

Sebagai tempat berlabuh dan tambat/merapat kapal – kapal perikanan. Berlabuh/merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan, memuat perbekalan, dan istirahat.

B. Jumlah Kapal Perikanan

Kapal perikanan yang mendarat di PPI sebanyak 20 buah kapal perikanan berukuran 10 - 30 GT, ekuivalen dengan 200 GT – 600 GT.

C. Kondisi Perairan

Berdasarkan Bappeda Kotamadya Semarang *dalam* Handoyo Prayogo (2003 : 37) menyatakan bahwa PPI yang mampu mendukung operasional kapal – kapal perikanan harus berada di perairan yang tenang dengan memungkinkan kapal untuk bersandar lebih dekat dengan lokasi bongkar muat. Secara alamiah berada didaerah yang tidak dipengaruhi oleh gelombang laut

D. Fasilitas Alur Pelayaran

Menurut Triatmodjo (2003: 28), alur pelayaran berfungsi untuk mengarahkan kapal yang akan masuk/keluar ke kolam pelabuhan sehingga mempermudah dan memperlancar olah gerak kapal. Persyaratan alur pelayaran adalah :

- Harus cukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus.
- Mempunyai kedalaman > 2m dan lebar yang sesuai dengan kapal – kapal yang menggunakan pelabuhan.

Alur pelayaran ditandai dengan alat bantu pelayaran yang berupa pelampung dan lampu – lampu. Bagian – bagian alur pelayaran meliputi :

- Daerah tempat kapal melempar sauh di luar pelabuhan
- Daerah pendekatan di luar alur masuk
- Alur masuk di luar pelabuhan dan kemudian di dalam daerah terlindung
- Kapal menuju dermaga
- Daerah kolam putar

E. Fasilitas Kolam Pelabuhan

Menurut Triatmodjo (2003 : 29), kolam pelabuhan merupakan daerah perairan sebagai tempat berlabuh kapal, melakukan gerakan untuk memutar kapal (di kolam putar). PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan harus mampu menampung dan mendukung operasional kapal – kapal perikanan. Untuk itu persyaratan kolam pelabuhan adalah :

- Kolam pelabuhan harus tenang, terlindung dari gangguan gelombang untuk memungkinkan penambatan selama 95% - 97,5% dari hari atau lebih dalam satu tahun.
- Mempunyai kedalaman > 2 m. Apabila laut dangkal maka harus dilakukan pengerukan untuk mendapatkan kedalaman yang diperlukan.

F. Fasilitas Pemecah Gelombang

Menurut Kramadibrata (2002 : 32), pemecah gelombang merupakan fasilitas pelindung utama bagi pelabuhan. Berfungsi untuk melindungi areal perairan pelabuhan, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut, sehingga kapal dapat berlabuh dengan tenang guna dapat melakukan bongkar muat.

G. Kelembagaan

Kelembagaan di Pelabuhan Perikanan pada prinsipnya tergantung pada kelompoknya, yakni Pelabuhan Perikanan yang belum diusahakan (yang seluruh sarannya dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan) dan pelabuhan perikanan yang diusahakan (yang sebagian sarannya dikelola secara produktif dan ekonomis oleh PERUM). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) *dalam* Yolindra (2005:26), lembaga/instansi yang terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang diusahakan serta pengumpulan data perikanan terdiri atas :

a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan adalah Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI). BPPPI merupakan bagian dari organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang secara struktur kedudukannya berada langsung dibawah Wakil Kepala Dinas. BPPPI secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi. BPPPI mempunyai tugas menyediakan dan mengawasi fasilitas PPI.

- Melaksanakan sebagian tugas tertentu dari Dinas Perikanan dan Kelautan dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis program perikanan tangkap.

- Melaksanakan sebagian tugas tertentu dari Dinas Perikanan dan Kelautan dalam rangka melayani masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan, di bidang pelayanan barang dan jasa Pangkalan Pendaratan Ikan.
- Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana PPI serta tata operasional kegiatan nelayan, kapal perikanan dan pengusaha perikanan.

Badan Pengelola PPI bagian tata usaha menangani fungsi administrasi yang baku, salah satu diantaranya ialah pengumpulan data statistik pelabuhan perikanan misalnya frekuensi pendaratan dan kunjungan kapal.

b. Dinas Perikanan

Lembaga unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan berfungsi untuk merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan kelautan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

- Pemanfaatan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan;
- Pembinaan kenelayanan di Pangkalan Pendaratan Ikan;
- Pelayanan jasa Pangkalan Pendaratan Ikan;
- Uji coba teknologi dan percontohan penangkapan ikan;
- Pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- Pembimbingan ketrampilan penangkapan ikan kepada nelayan;
- Penanaman dan pengendalian pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2.3.2 Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

A. Volume Ikan

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, PPI diarahkan untuk dapat mengakomodasikan kegiatan kapal perikanan guna mendaratkan/ bongkar ikan

hasil tangkapannya (*unloading activities*) dengan volume ikan yang didaratkan 10 ton /hari atau 2000 ton / tahun. ()

B. Aksesibilitas ke Lokasi Gedung TPI

Berdasarkan Badan Perencanaan Daerah Kotamadya Semarang *dalam* Handoyo Prayogo (2003 : 37), menyebutkan prasyarat PPI berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan adalah adanya kemudahan pencapaian ke lokasi gedung TPI. Kemudahan pencapaian didukung oleh ketersediaan jalur khusus sebagai jalur penghubung antara tempat pendaratan kapal ke lokasi gedung TPI.

C. Fasilitas Dermaga

Fasilitas dermaga merupakan salah satu fasilitas yang memberikan pelayanan terhadap aktivitas pendaratan ikan hasil tangkapan. Menurut Triatmodjo (2003 : 29), dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal pada waktu bongkar muat barang. Pada Pangkalan Pendaratan Ikan, panjang dermaga adalah 50 – 100 m digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan agar terjamin kualitas ikan yang didaratkan, prosesnya cepat dan aman sampai TPI, sebagai tempat penyaluran perbekalan dan tempat administrasi tambat. Dengan adanya dermaga mampu memberikan kemudahan operasi dan proses kegiatan bongkar muat hasil tangkapan.

D. Fasilitas Gedung Pelelangan Ikan

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:24), menyatakan bahwa PPI sebagai tempat pendaratan ikan memerlukan fasilitas gedung pelelangan yang digunakan sebagai tempat penampungan ikan.

2.3.3 Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan

Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan adalah :

- Menangani hasil perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang bertujuan untuk mempertahankan mutu ikan dan menghindari kerugian

pasca panen sehingga mutu ikan yang didistribusikan ke daerah konsumen tidak jauh merosot.

- Mengusahakan agar kesegaran ikan setelah tertangkap bisa dipertahankan selama mungkin atau menjaga agar produksi ikan setelah sampai di tangan konsumen masih dalam keadaan segar. Hal ini bertujuan untuk mencapai nilai ekonomis yang maksimal dari hasil usaha perikanan, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan serta membahayakan kesehatannya sebagai akibat dari praktek-praktek yang bersifat penipuan, pemalsuan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan dan higiene.

Hal ini menunjukkan penanganan ikan segar atau istilahnya *handling* merupakan salah satu bagian penting dalam mata rantai industri perikanan. Baik buruknya ikan segar akan mempengaruhi mutu ikan sebagai bahan makanan atau sebagai bahan mentah untuk proses pengolahan lebih lanjut.

A. Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan

Penanganan ikan segar di Pelabuhan memerlukan perhatian yang baik karena terdiri dari beberapa pekerjaan. Penanganan mutu hasil perikanan dimulai pada pendaratan ikan sampai kedatangan konsumen dengan aktivitas penanganan meliputi :

- 1) Pemilahan
- 2) Penimbangan
- 3) Penyimpanan
- 4) Pengepakan

Menurut Nazaruddin (1993:42), *packing* dilakukan terutama untuk konsumsi ikan segar. Cara *packing* harus disesuaikan dengan jarak produksi perikanan ke konsumen. Yang terpenting yaitu mempertahankan keawetan ikan agar sampai di tangan konsumen dalam keadaan segar sehingga harganya tidak turun. Untuk itu diperlukan peralatan packing yang tepat. Untuk jarak lokasi yang dekat, ikan – ikan segar bisa dimasukkan dalam keranjang bambu yang diberi es. Akan tetapi, untuk jarak jauh biasanya memakai peti atau tong plastik. Akan lebih

baik lagi bila dalam *packing* menggunakan peti dingin (*cool box*), yaitu peti yang dindingnya mempunyai lapisan isolator.

Dalam penanganan, hal – hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Jangan sampai ada yang luka pada bagian kulitnya karena dapat mempercepat proses pembusukan.
2. Penambahan es untuk menjaga kesegaran ikan.
3. Jangan biarkan ikan – ikan tersebut kena sinar matahari langsung.

B. Fasilitas Gedung Pelelangan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:24), menyatakan bahwa PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan memerlukan fasilitas gedung pelelangan yang berfungsi sebagai tempat aktivitas penanganan meliputi pemilahan, penimbangan, dan pengepakan ikan hasil tangkapan nelayan.

Gedung pelelangan ikan sebagai tempat penanganan ikan hasil tangkapan harus memiliki syarat kelayakan TPI. Syarat kelayakan TPI diantaranya menyangkut kebersihan lokasi TPI dan syarat konstruksi TPI. Lokasi sekitar TPI perlu dibersihkan setiap hari dan dijaga agar terhindar dari kotoran – kotoran yang bersifat bakteriologis, fisis dan kimia guna menghindari kontaminasi dan penularan penyakit terhadap ikan. Menurut Mahyudin (2001 : 11) persyaratan gedung pelelangan Ikan yaitu :

- Lantai TPI memiliki kemiringan 2 % agar benda cair segera meluncur/mengalir ke saluran drainase.
- Bangunan TPI bentuknya terbuka dan bebas cahaya dan udara masuk.
- Dipinggir/ditiang TPI dipasang kran air agar memudahkan dalam pencucian ikan atau lantai TPI.
- Penerangan TPI secukupnya.
- Dinding TPI dari keramik agar mudah dibersihkan.
- Sepanjang/sekeliling TPI dibuat pagar dan ada pintu agar tidak semua bisa masuk kedalam TPI.
- Diruang TPI disediakan tempat-tempat sampah

Berdasarkan direktorat jenderal perikanan (1981 : 36), menyatakan bahwa bangunan TPI dibagi menjadi 3 (tiga) zona sesuai dengan kegiatan yang terdapat di gedung pelelangan, yaitu :

- Bagian untuk pemilahan. Dalam pemilahan diawali dengan sortir persiapan lelang, sortir ikan dilakukan menurut jenis, ukuran, dan mutunya.
- Bagian untuk penimbangan. Penimbangan ini bersamaan pada saat pelelangan ikan, yaitu untuk tempat memperagakan dan melelang ikan. Bagian ini terletak di tengah bangunan pelelangan
- Bagian pengepakan, digunakan untuk tempat mengepak ikan yang telah dilelang karena tidak menggunakan lagi wadah semula sewaktu dilelang.

C. Fasilitas Air Tawar (instalasi air bersih)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:25), menyatakan bahwa penyediaan air bersih/air tawar memegang peranan sangat penting dalam Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan. Nelayan memerlukan air bersih saat pembersihan ikan dan kapal serta pencucian lantai TPI. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

- Air tersedia dalam jumlah yang cukup.
- Memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan.
- Tersedia instalasi untuk menyimpan dan mengalirkan.

D. Fasilitas Pabrik Es

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:26), menyatakan bahwa fasilitas pabrik es berfungsi untuk pembuatan es dan penumpukan/penyimpanan es curai/es balok. Kapasitas gudang penyimpanan es sebaiknya cukup untuk menyimpan es dalam beberapa hari. Namun demikian besarnya kapasitas dipengaruhi oleh keteraturan suplai ikan sepanjang tahun. Besarnya ruangan untuk menyimpan sejumlah berat es tertentu akan berbeda – beda tergantung pada jenis es yang disimpan.

E. Fasilitas Gudang Dingin (*Cold Storage/chillroom*)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:26), menyatakan bahwa ikan mudah mengalami perubahan temperatur (kebusukan) jika tidak cepat ditangani. Proses kebusukan ikan dapat ditangani dengan cara membekukan ikan hasil tangkapan secepat mungkin. Prinsip penanganan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (*clean, quick and cold*). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap pelabuhan perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan harus dilengkapi fasilitas *cold storage*. Fasilitas tersebut diperlukan agar dapat mempertahankan kesegaran ikan sehingga kebusukan ikan yang terjadi dapat ditekan.

F. Fasilitas Drainase

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27), menyatakan bahwa fasilitas drainase berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah aktivitas perikanan.

2.3.4 Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

A. Aktivitas Pemasaran

Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan adalah menjadi pusat penampungan ikan yang didaratkan di PPI dan pusat distribusi ikan hasil tangkapan dari PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik. Ikan yang didaratkan bisa berupa ikan yang berasal dari daerah lain melalui kapal perikanan pengangkut (*carrier vessel*) atau jalan darat.

B. Lembaga Pemasaran

Nikijulur *et al.* (1987: 57 – 79), menyatakan bahwa pemasaran hasil perikanan merupakan mata rantai produksi yang memiliki peranan penting dalam subsektor perikanan karena adanya kenyataan bahwa sebagian besar nelayan Indonesia memasarkan hasil tangkapan mereka, selain ada pula sejumlah nelayan yang menangkap ikan untuk dikonsumsi sendiri. Nilai hasil tangkapan yang diperolehnya dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, memperbaiki peralatan penangkapan dan menabung jika ada kelebihan. Besarnya nilai hasil

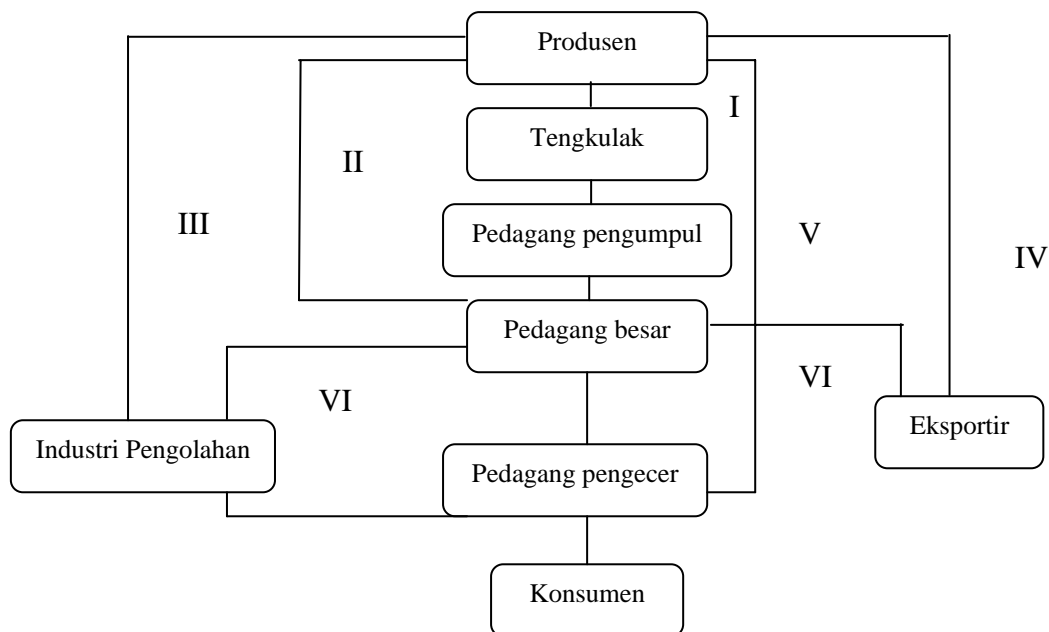
tangkapan disamping tergantung pada kualitas produksi juga dipengaruhi oleh lembaga pemasaran tempat nelayan menjual hasil tangkapan.

Lembaga pemasaran yaitu badan – badan hukum atau perorangan yang menggerakkan arus barang dari produsen ke konsumen. Lembaga pemasaran hasil perikanan perlu diketahui oleh para petani karena lembaga ini berkaitan erat dengan faktor harga jual yang bisa diperoleh oleh petani produsen. Di samping itu, lembaga pemasaran juga berkaitan erat dengan efisiensi pemasaran.

Untuk memperoleh harga jual yang baik dan pemasaran yang efisien, penyusunan program pemasaran harus memperhatikan jalur lembaga pemasaran. Dengan demikian, jalur lembaga pemasaran yang sedikit akan terbentuk margin pemasaran yang rendah sehingga harga di tingkat petani tinggi dan harga di tingkat konsumen layak. Dengan demikian, kedua belah pihak (petani dan konsumen) saling diuntungkan. Margin pemasaran adalah selisih antara harga di tingkat konsumen dan harga di tingkat petani produsen.

Pemasaran yang melibatkan banyak lembaga pemasaran akan meningkatkan margin pemasaran, harga di tingkat produsen menjadi rendah, dan harga di tingkat konsumen tinggi. Dengan demikian, produsen dan konsumen tidak saling diuntungkan. Produsen akan memperoleh pendapatan yang rendah dan daya beli konsumen menjadi rendah.

Bambang Cahyono (2000 :108-110), mengungkapkan bahwa lembaga – lembaga pemasaran yang umumnya terlibat dalam memasarkan ikan adalah tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer (pasar umum, supermarket, rumah makan, warung dll), industri pengolahan dan eksportir. Proses pemasaran ikan hingga sampai ke konsumen dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Saluran Pemasaran Ikan

(Sumber : Bambang Cahyono (2000 :108-110))

Keterangan :

- Saluran Pemasaran I adalah produsen, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen. Program pemasaran ini menggunakan saluran pemasaran yang panjang karena melibatkan banyak lembaga pemasaran. Margin pemasaran yang terbentuk akan tinggi sehingga program ini tidak efisien.
- Saluran Pemasaran II adalah petani, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Program pemasaran ini menggunakan saluran pendek karena hanya melibatkan dua lembaga pemasaran untuk mencapai ke konsumen. Program pemasaran ini akan menguntungkan lagi jika petani produsen dapat menjual produksinya langsung kepada pedagang pengecer (saluran V). Saluran pemasaran V ini merupakan saluran yang pendek dan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan saluran pemasaran III, IV dan VI.
- Pedagang pengumpul merupakan pedagang yang mengumpulkan komoditi perikanan dari pengusaha, produsen dalam jumlah yang cukup besar untuk dipasarkan kembali ke pedagang lain.

- Pedagang besar merupakan pedagang yang membeli komoditi perikanan dari pedagang pengumpul atau langsung dari produsen/pengusaha untuk dijual kembali.
- Pedagang pengecer merupakan pedagang yang menjual komoditi perikanan langsung ke tangan konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen dalam partai kecil

C. Kebijakan Pemasaran Melalui Tempat Pelelangan Ikan

Pemasaran produk perikanan dan kelautan, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli atau konsumen (*buyer market*). Kondisi semacam ini mengakibatkan harga jual produk perikanan pada umumnya atau seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan). Menurut Dahuri R *dalam* Mahyuddin B (2001:37), ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan Indonesia masih lemah, yaitu :

1) Lemahnya *market intelligence* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (*preference*) para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan.

Informasi pasar meliputi stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga. Hal ini berperan menunjang perumusan kebijaksanaan dalam menentukan jenis, volume dan kualitas dari suatu barang untuk suatu pasar dalam periode waktu tertentu. Karenanya informasi pasar sangat diperlukan oleh nelayan, petani ikan, pengolah hasil perikanan, pedagang dan konsumen. Penelitian pasar, penelitian pemasaran dan penyampaian informasi pasar penting untuk tujuan perbaikan efisiensi pemasaran dan peningkatan volume pemasaran.

2) Belum memadainya prasarana dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. PPI harus mampu memberikan dasar yang kokoh bagi perbaikan jaringan pemasaran dan distribusi yang diperlukan. Berdasarkan Bappeda Kotamadya Semarang *dalam* Handoyo Prayogo (2003 : 37), bahwa aksesibilitas dalam distribusi produk perikanan dari produsen ke konsumen atau daerah pemasaran tangkapan ikan didukung oleh :

- Ketersediaan jaringan jalan sebagai jalur transportasi utama atau regional ke daerah pemasaran tangkapan ikan.
- Ketersediaan moda transportasi darat dan laut untuk keperluan pengangkutan ikan ke daerah pemasaran tangkapan ikan.

D. Fasilitas Gedung Pelelangan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:25), bahwa PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan menggunakan fasilitas gedung pelelangan untuk tempat penampungan dan transaksi jual beli ikan dengan sistem lelang. Ketersediaan fasilitas ini berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.

E. Fasilitas Areal Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27), fasilitas areal parkir digunakan untuk tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan sehingga memudahkan kelancaran arus lalu lintas di PPI.

F. Fasilitas Jalan Penghubung

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27), jalan penghubung merupakan jalan kompleks pelabuhan yang berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan.

2.3.5 Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

Fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan adalah memberikan pengarahan terhadap masyarakat nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Penyuluhan sebagai bentuk penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat perikanan dan pengguna jasa, yaitu meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan keluarganya, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan,

pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Penyuluhan perikanan sangat diperlukan karena pertimbangan sebagai berikut :

1. Wawasan dan pengetahuan sumber daya manusia perikanan masih perlu ditingkatkan; sumber daya manusia perikanan memiliki potensi untuk maju dan mandiri;
2. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan belum memanfaatkan teknologi terapan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya;
3. Saat ini terdapat perubahan sosial yang lebih demokratis dan tata pemerintahan yang lebih banyak melimpahkan kewenangan kepada daerah sehingga memerlukan perubahan paradigma di kalangan pejabat, aparat, dan masyarakat;
4. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan.

Adanya sifat dan bentuk kegiatan perikanan yang sangat spesifik maka dirasakan perlunya penyelenggaraan penyuluhan perikanan tersendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Adapun hal-hal yang mendasari perlunya penyuluhan perikanan antara lain disebabkan :

1. Selama ini sistem penyuluhan bersifat polivalen dan bersifat khas sehingga tidak tersedia kelembagaan, fasilitas, tenaga penyuluh yang secara khusus menangani bidang perikanan;
2. Kondisi teknis, lingkungan, ekologis, dan sosial perikanan sangat spesifik sehingga perlu dilaksanakan secara tersendiri;
3. Penyuluhan perikanan dalam pelaksanaannya belum diselenggarakan dalam konteks jejaring kerja.

A. Penyuluhan

Penyuluhan ini dapat dilakukan antara lain terhadap nelayan dan keluarganya (*fisherfolk*), pengusaha kapal perikanan, dan para pedagang ikan. Penyuluhan yang diperlukan yaitu :

1. Penyuluhan secara teknis penangkapan maupun manajemen usaha yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas.
2. Pendidikan dan penyuluhan tataniaga. Hal ini dapat membantu memperbaiki sistem tataniaga dan perbaikan kepentingan konsumen. Penyuluhan dan pendidikan yang diberikan kepada nelayan dan pedagang mengenai prinsip – prinsip dan praktek tataniaga meliputi perbaikan metode – metode pengepakan, *handling*, pengangkutan, penyimpanan, distribusi dan pengetahuan serta ketrampilan tentang permodalan, informasi pasar, dan penanggulangan resiko.

B. Pengumpulan Data

Sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan diperlukan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut misalnya data kapal perikanan (frekuensi kunjungan dan pendaratan ikan), data jumlah nelayan, data produksi ikan, dan sebagainya.

C. Kelembagaan Penyuluhan Perikanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan bahwa kelembagaan penyuluhan perikanan di lapangan dilaksanakan oleh unit kerja lapangan yang disebut Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan. Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, atau pusat teknologi perikanan yang berada di daerah yang bersangkutan. Salah satu pos yang dimaksud adalah Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan merupakan tempat berpangkalnya para penyuluh fungsional perikanan atau penyuluh lainnya dalam melaksanakan tugas penyuluhan perikanan. Tugas penyuluh perikanan dalam penyuluhan perikanan adalah :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penyuluhan perikanan;
- b. Melaksanakan penyuluhan perikanan di lapangan;
- c. Melakukan kegiatan administrasi penyuluhan perikanan;
- d. Melakukan kerja sama dan memperluas jejaring kerja;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan perikanan yang dilaksanakannya

Penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan memiliki beberapa metode pendekatan, dapat bersifat *persuasif*, *akomodatif*, dan *fasilitatif*.

- a. *Persuasif* artinya bahwa penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan khalayak yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan.
- b. *Akomodatif* artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan di bidang perikanan oleh masyarakat, penyuluh perikanan harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan sikap dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh khalayak yang disuluh.
- c. *Fasilitatif* artinya bahwa penyuluh perikanan harus mampu memanfaatkan jejaring kerja penyuluhan perikanan untuk menghubungkan antara khalayak yang disuluh dengan pihak lain seperti sumber teknologi, sumber permodalan, sumber informasi, akses pasar, dan lain-lain.

D. Kelompok Masyarakat Perikanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat dibentuk kelompok khalayak yang disuluh berdasarkan kesamaan jenis usaha, wilayah pemukiman, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Kelompok khalayak dapat merupakan suatu forum

komunikasi bersama atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat perikanan.

G. Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:31), fasilitas yang memberikan pelayanan terhadap aktivitas penyuluhan adalah balai pertemuan nelayan. Fasilitas ini digunakan sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan bagi masyarakat perikanan.

H. Fasilitas Kantor Administrasi

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:35), fasilitas kantor administrasi digunakan sebagai tempat pengumpulan data statistik perikanan.

Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tersebut disesuaikan dengan standar Pangkalan Pendaratan Ikan pada kelas Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu : Pelabuhan Perikanan Samudera (Kelas A); Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kelas B); Pelabuhan Perikanan Pantai (Kelas C), dimana ketiga jenis pelabuhan perikanan ini dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pelabuhan Perikanan Kelas D yang lazim disebut Pangkalan Pendaratan Ikan. Pada kategori terakhir inilah lazim dilakukan transaksi melalui pelelangan. Pengelompokan Pelabuhan Perikanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan beban tugas, skala dan ruang lingkungannya. Klasifikasi mengenai PP lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
1.	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2.	Panjang dermaga dan Kedalaman kolam pelabuhan	Dermaga : >300 m Kolam pelabuhan : >3 m	Dermaga : 150-300 m Kolam pelabuhan : >3 m	Dermaga : 100-150 m Kolam pelabuhan : >2 m	Dermaga : 50-100 m Kolam pelabuhan : >2 m
3.	Kapasitas kolam pelabuhan	Menampung kapal perikanan yang berkekuatan >6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran > 60 GT)	Menampung kapal perikanan yang berkekuatan 2500 – 3000 GT (ekivalen dengan 50 buah kapal berukuran 50 -60 GT)	Menampung kapal perikanan yang berkekuatan 750 – 1250 GT (ekivalen dengan 25 buah kapal berukuran 30 – 50 GT)	Menampung kapal perikanan yang berkekuatan 200 GT – 600 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 10-30 GT)
4.	Volume ikan yang didaratkan	60 ton/hari 40.000 ton / tahun	30 - 50 ton / hari atau sekitar 8.000 - 15.000 ton / tahun	15 - 20 ton / hari atau sekitar 4.000 ton / tahun	10 ton /hari atau 2000 ton / tahun
5.	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	2-5 Ha
6.	Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Tersedia tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Tersedia tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Tersedia tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Tidak tersedia tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan

Sumber : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan

Melihat luasnya fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menyangkut berbagai aspek kegiatan perikanan, maka dapat dikatakan bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sebagai barometer tingkat kemajuan perikanan di daerah yang bersangkutan.

2.4 Fungsi Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan. Tempat Pelelangan Ikan merupakan pemicu perkembangan sosial ekonomi di sebuah Pangkalan Pendaratan Ikan. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan (1987) *dalam* Mahyuddin B (2001:13), fungsi dari sebuah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah :

2.4.1 Fasilitator Pembentukan Harga

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 tentang retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan, bahwa penyelenggaraan pelelangan ikan merupakan salah satu kegiatan pokok di dalam Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran. Melalui penyelenggaraan pelelangan ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga. Penyelenggaraan pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5. Tahun 2002 adalah sebagai berikut,

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan,
- (2) Hasil penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar lunas oleh pembeli pada saat pelelangan
- (3) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga terhadap ikan hasil budidaya petani
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan atas ijin Bupati

2.4.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Sesuai dengan arahan GBHN, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai tujuan utama pembangunan perikanan. Hadi *et al.* (1997:40), menyatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah dengan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk meningkatkan efisiensi pemasaran hasil tangkapan.

Hadi *et al.* (1997:50), menyatakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan menggunakan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mempertimbangkan seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran keluarga nelayan. Oleh karena itu, segala upaya pemerintah yang menyediakan fasilitas perikanan, yaitu PPI, TPI dapat berfungsi optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Besarnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) memberikan gambaran kemampuan masyarakat nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yaitu,

- Jika pendapatan $>$ pengeluaran (Nilai tukar nelayan >1) artinya keluarga nelayan mampu memenuhi kebutuhan primer dan berpotensi mengkonsumsi kebutuhan non primer.
- Jika pendapatan = pengeluaran (Nilai tukar nelayan =1) artinya keluarga nelayan mampu memenuhi kebutuhan primer saja.
- Jika pendapatan $<$ pengeluaran (Nilai tukar nelayan <1) artinya keluarga nelayan tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan berpotensi mengalami defisit anggaran rumah tangga.

Arah gerakan Nilai Tukar Nelayan memberikan gambaran dinamika tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dari waktu ke waktu. NTN atau kemampuan keluarga nelayan yang cenderung meningkat memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan keluarga nelayan cenderung membaik.

Jika NTN atau kemampuan keluarga nelayan cenderung konstan berarti tingkat kesejahteraan keluarga nelayan cenderung statis. Sebaliknya, jika NTN atau kemampuan keluarga nelayan cenderung menurun, berarti tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan cenderung memburuk dan merupakan indikasi makin miskin.

Menurut Rogers & Shoemaker *dalam* Susilo E, *et al.* (1993: 36), menyatakan bahwa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan program pemerintah sebagai salah satu solusi untuk menjawab masalah pemasaran hasil perikanan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dari pembangunan sektor perikanan. Adanya sistem pelelangan yang dilakukan di TPI menyebabkan terjadinya kenaikan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan.

2.4.3 Menyediakan Data Statistik yang Akurat

Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan, Pasal 14 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan penyusunan rencana pengembangan perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan data teknik dan data produksi perikanan yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Data tersebut meliputi antara lain :

- a. Daerah, musim, dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan;
- b. Luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya;
- c. Jumlah nelayan/petani ikan;
- d. Produk, ukuran ikan yang tertangkap, musim pemijahan ikan dan sebagainya.

Setelah data-data tersebut diolah, Pemerintah melaksanakan penyebaran seluas-luasnya terutama kepada para nelayan dan petani ikan.

2.4.4 Membina Mutu Hasil Perikanan

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan (1987) *dalam* Mahyuddin B (2001:14), fungsi TPI dalam membina mutu hasil perikanan meliputi penanganan hasil, memilah dan menimbang, pengepakan.

2.4.5 Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan (2000) *dalam* Suartama K. (2003 : 28) bahwa maksud dan tujuan dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan yaitu sebagai pusat pelayanan jasa dan semua kegiatan perikanan, memudahkan pembinaan nelayan serta memonitor produksi perikanan, meningkatkan tataniaga ikan dan kesejahteraan nelayan serta memberi peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan sebagai sumber pendapatan daerah berhubungan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan, yaitu tentang besarnya retribusi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran ketertiban pelelangan ikan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Penjabaran aturan atau produk hukum di TPI Bulu mengacu pada Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 tentang retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 tentang retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dinyatakan bahwa tarif retribusi pelelangan ikan di TPI Bulu adalah 5%, dimana besarnya tarif tersebut ditetapkan dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada hari itu. Tarif retribusi sebesar 5% dibebankan kepada nelayan/petani ikan (penjual) dan pedagang /bakul (pembeli ikan) masing – masing sebesar 2,5 %, dengan rincian penggunaan tarif retribusi sebagai berikut,

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 0,75 %
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 1,25%

- (3) KUD sebesar 3% (0,25% untuk perawatan TPI, 1,5% untuk pengembangan KUD dan 1,25% untuk gaji karyawan TPI).

2.5 Permasalahan dalam Pembangunan Perikanan Tangkap

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perikanan (2002) *dalam* Handoyo Prayogo (2003 : 32) bahwa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pembangunan perikanan tangkap di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan berorientasi ke wilayah darat, sedangkan kelautan belum mendapat posisi yang semestinya
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia, teknologi pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan masih rendah, terutama pada masyarakat nelayan
3. Minimnya dukungan dana terhadap pembangunan sektor kelautan khususnya perikanan, hal ini ditandai dengan kekurangan sarana – prasarana pendukung bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan baik kualitas maupun kuantitasnya
4. Tingkat kompetisi yang masih rendah pada tingkat produksi, harga dan kualitas dengan ditandai sedikitnya pengusaha yang bergerak dalam bidang ini.
5. Belum adanya pendekatan saintifik untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta dukungan lembaga riset dan perguruan tinggi guna mewujudkan tangguhnya sektor kelautan dan perikanan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Studi-studi yang pernah dilakukan terkait dengan wilayah penelitian maupun yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban” dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel Yang digunakan	Metode Analisis	Isi Penelitian	Perbedaan
Mohammad Rafli (2004) tentang Identifikasi Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial • Kependudukan • Ekonomi • Fisik • Teknologi dan Informasi • Kelembagaan • Pembiayaan • Hubungan Antar Stakeholder • Hukum • Tata Ruang 	Metode Analisis Kuantitatif (Analisis Faktor dan analisis pakar/ <i>expert</i>)	<p>Penelitian ini mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan wilayah pesisir, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosial kependudukan • Ekonomi • Kelembagaan • Hubungan Antar Stakeholder • Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan metode Analisis Faktor dan analisis pakar/<i>expert</i> yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan wilayah pesisir. • Penelitian penulis hanya menggunakan analisis faktor untuk mengetahui faktor – faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal.
Handoyo Prayogo (2003) tentang Arahan Lokasi dan Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi PPI • Lokasi TPI • Fasilitas PPI 	Metode Analisis deskriptif-evaluatif-development	Mengetahui strategi pengembangan prasarana Pelabuhan Perikanan melalui pendekatan dengan didasarkan pada penentuan lokasi dan besaran kegiatan pelabuhan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang pengembangan prasarana pelabuhan perikanan dengan pendekatan lokasi untuk memperoleh hasil yang optimal. • Penelitian penulis mengkaji karakteristik PPI ditinjau dari lokasi dan karakteristik terhadap fungsi PPI ditinjau dari fasilitas.
Yolindra (2005) Tentang Pelabuhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana – prasarana • Keterpaduan ruang fisik 	Metode Analisis Deskriptif	Mengetahui karakteristik fungsi prasarana dan keterpaduan ruang pelabuhan perikanan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas keterpaduan ruang pelabuhan

Penelitian	Variabel Yang digunakan	Metode Analisis	Isi Penelitian	Perbedaan
Nusantara Pondok Dadap Malang	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik masyarakat sekitar 		PPI dapat menciptakan kelancaran&keamanan sirkulasi manusia, barang dan kendaraan	<p>perikanan untuk kelancaran sirkulasi manusia, barang dan kendaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penelitian penulis mengkaji karakteristik fungsi PPI dengan aktivitas sebagai bagian dari fungsi di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.
Azis Nur Bambang (2004) tentang Evaluasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tasik Agung Dalam Upaya Penataan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Rembang	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan, kondisi dan fungsi sarana – prasarana. Tata letak bangunan PPI Estetika PPI 	Metode analisis deskriptif – evaluatif yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan RTBL pada Kawasan Bahari Terpadu	Mengetahui kondisi dan fungsi sarana – prasarana berdasarkan persepsi masyarakat dan adanya kesesuaian tata letak, luas bangunan, sarana dan prasarananya maupun estetikanya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan fungsi pengembangan PPI Tasik Agung	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini mengevaluasi PPI berdasarkan kebutuhan masyarakat dan RTBL pada Kawasan Bahari Terpadu Penelitian penulis mengevaluasi fungsi PPI berdasarkan standar fungsi pelabuhan perikanan/ pangkalan pendaratan ikan
Barnabas Pablo (2006) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> Aturan /kebijakan pelelangan Sistem manajemen pelelangan Nelayan dan bakul Kemampuan aparatur kelembagaan Koordinasi antara Pemerintah dan KUD Fasilitas Pemerintah Daerah, KUD dan bank 	Metode Analisis Deskriptif menggunakan pendekatan pembahasan masalah secara deskriptif yang mengacu pada faktor – faktor penyebab keberhasilan pengelolaan TPI	Mengetahui penyebab keberhasilan pengelolaan TPI, diantaranya sistem manajemen KUD berpedoman pada pola manajemen keuangan “satu atap” yakni sistem pengelolaan keuangan yang ditangani langsung oleh Pusat KUD Propinsi, mekanisme pelelangan ikan dan penentuan tarif retribusi didasarkan pada perda Propinsi, dan perda daerah., aparatur kelembagaan KUD mampu membuat transparansi pengelolaan keuangan dan iklim kerjasama yang	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini mencari faktor penyebab keberhasilan pengelolaan TPI sebagai pusat sosial ekonomi perikanan Penelitian penulis mencari faktor penyebab PPI belum berfungsi secara optimal dimana pembahasan TPI sebagai bagian dari PPI.

Penelitian	Variabel Yang digunakan	Metode Analisis	Isi Penelitian	Perbedaan
			konduusif antara Pemerintah dan KUD	
Sastrawidjaja (2005) tentang Persepsi masyarakat perikanan terhadap pembentukan dan pengorganisasian sistem pelelangan ikan di Jawa dan Sumatra	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas TPI • Peran serta masyarakat 	Metode analisis deskriptif	Mengetahui penyebab TPI tidak dimanfaatkan secara optimal berdasarkan persepsi masyarakat perikanan. Penyebabnya adalah belum adanya peran serta masyarakat dalam memberdayakan sarana, prasarana dan infrastruktur yang telah dibangun; dalam perencanaan lokasi pembangunan TPI, dalam penentuan besarnya retribusi dan pembebanannya serta dalam pelaksanaan dan pengawasan pelelangan ikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengetahui penyebab TPI tidak dimanfaatkan secara optimal dari segi partisipasi masyarakat • Penelitian penulis mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal dari segi partisipasi masyarakat sebagai salah satu variabel penyebab, lingkup penelitian tidak hanya TPI melainkan juga PPI.

Sumber : Studi Kepustakaan, 2006

2.7 Definisi Operasional

Dari kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu definisi operasional berdasarkan variabel – variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir M, 1988). Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel – variabel yang akan diukur sebagai berikut :

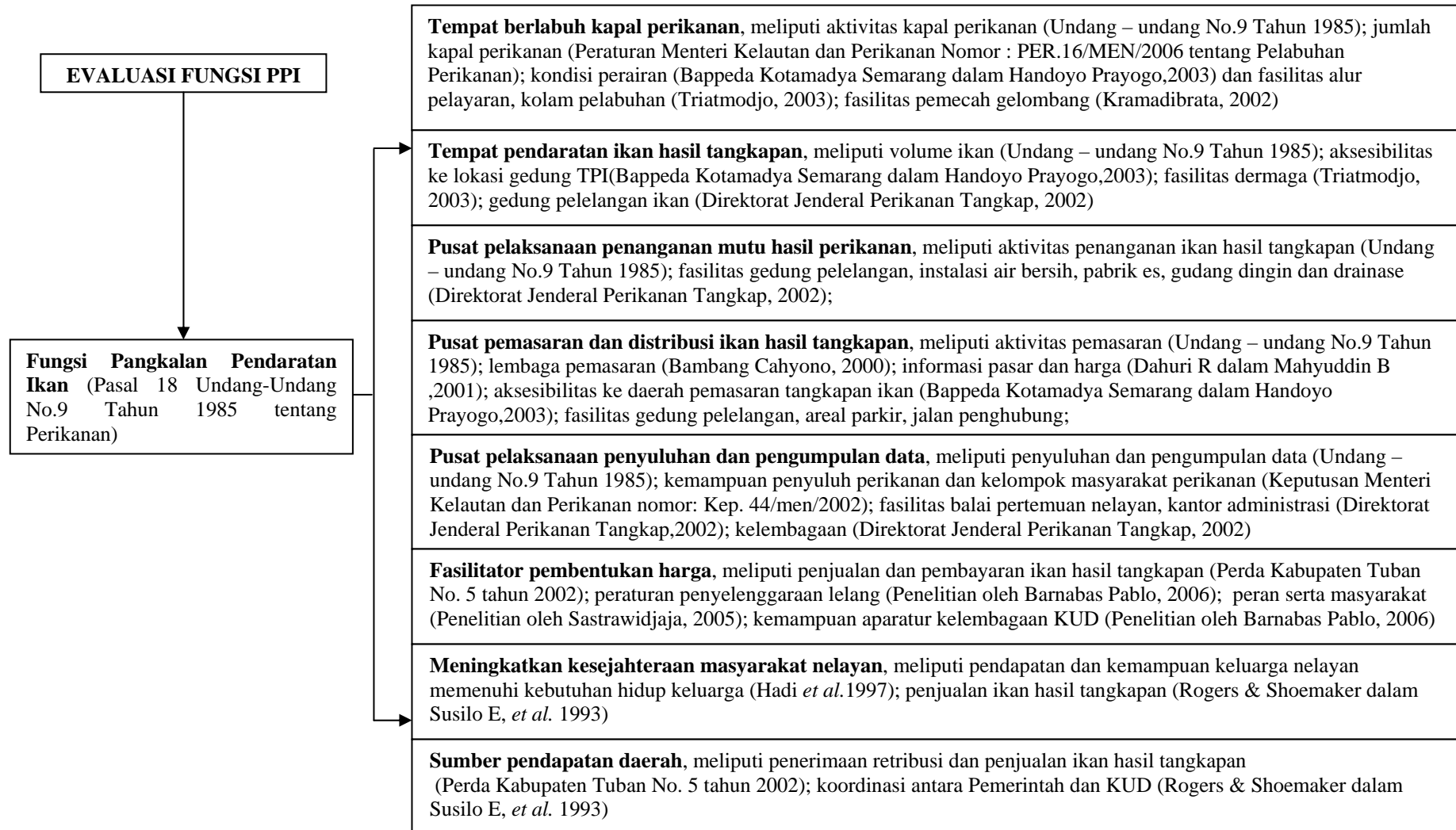
1. Evaluasi adalah penilaian yang bersifat relatif dan mutlak akan kegunaan suatu sasaran kerja tertentu.
2. Fungsi adalah kegunaan suatu hal atau daya guna
3. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah fasilitas perikanan sebagai pangkalan operasional, tempat tambat dan berlabuh kapal – kapal perikanan, pendaratan,

pelelangan, pemasaran hasil perikanan dan tempat pengawasan sumber daya ikan yang menjadi pusat pelayanan masyarakat perikanan dan merupakan golongan pelabuhan perikanan dengan type D.

4. Optimal adalah kondisi yang paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan.
5. Fungsi PPI yang optimal adalah keadaan yang menggambarkan operasional PPI berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi PPI.
6. Masyarakat perikanan yang dijadikan objek penelitian yaitu masyarakat nelayan dan pedagang yang memiliki hubungan secara langsung dengan Pangkalan Pendaratan Ikan.
7. Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan yang dikaji meliputi :
 - Tempat berlabuh kapal perikanan
 - Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
 - Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
 - Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
 - Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.
 - Fasilitator pembentukan harga
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
 - Sumber pendapatan daerah.

2.8 Kerangka Teori

Tinjauan teori yang dipergunakan dalam penelitian bertujuan untuk membantu dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Kerangka teori dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Teori

Sumber : Hasil Pemikiran Tahun 2007

BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Definisi Umum.....	16
2.2 Pangkalan Pendaratan Ikan	17
2.3 Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	20
2.3.1 Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	20
2.3.2 Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	23
2.3.3 Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....	24
2.3.4 Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	28
2.3.5 Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	32
2.4 Fungsi Tempat Pelelangan Ikan.....	38
2.4.1 Fasilitator Pembentukan Harga	38
2.4.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	39
2.4.3 Menyediakan Data Statistik yang Akurat	40
2.4.4 Membina Mutu Hasil Perikanan	41
2.4.5 Sumber Pendapatan Daerah	41
2.5 Permasalahan dalam Pembangunan Perikanan Tangkap	42
2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas	42
2.6.1 Validitas	43
2.6.2 Reliabilitas.....	44
2.7 Analisis Faktor	45
2.7.1 Model Analisis Faktor.....	45
2.7.2 Statistik yang Relevan dengan Analisis Faktor.....	47
2.8 Analisis Akar Masalah	52
2.9 Penelitian Terdahulu	53
2.10 Definisi Operasional.....	56

2.11 Kerangka Teori.....	57
Tabel 2.1 Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI.....	37
Tabel 2.2 Kaiser – Meyer – Olkin.....	48
Tabel 2.3 Koefisien Korelasi.....	50
Tabel 2.4 Studi Penelitian Terdahulu.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

Menurut Hasan (2002:21) yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (*methods* = tatacara). Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian yang melingkupi prosedur dan teknik penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi – situasi atau kejadian – kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta di lapangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari informasi aktual, mengidentifikasi masalah – masalah dan untuk membuat komparasi dan evaluasi (Suryabrata, 1983 :19). Metode yang digunakan adalah kausal komparatif seperti yang diungkapkan Sunggono (2005:36) bahwa metode kausal komparatif bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada. Kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul atau diteliti.

Secara umum metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan. Kemudian metode evaluatif untuk mengevaluasi tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dan dicari kembali faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal.

3.2 Penentuan Lokasi Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu yang berlokasi di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Kecamatan Bancar terdiri dari tujuh Desa Nelayan sebagai desa pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, yaitu Desa Bancar, Bogorejo, Boncong, Bulumeduro, Banjarjo, Bulujowo, dan Sukolilo. Dasar pertimbangan pemilihan wilayah penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu merupakan fasilitas perikanan yang pertama di Kabupaten Tuban. Dibangun pada tahun 1986 berupa Tempat Pelelangan Ikan, pada tahun 1993 status TPI meningkat menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan dan sebagai satu –satunya Pelabuhan Perikanan tipe D.
- b. Sebelum statusnya meningkat menjadi PPI, yaitu pada era tahun 1990-an pernah diakui sebagai salah satu TPI di Jawa Timur yang melaksanakan lelang secara murni dan nilai retribusi yang besar sehingga tidak kalah bersaing dengan TPI lainnya. Tahun 1998, nilai retribusinya Rp. 189.393.191 dengan pertumbuhan 121,99%.
- c. Skala pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Kecamatan Bancar. Kecamatan Bancar memiliki potensi produksi perikanan tangkap paling tinggi di Kabupaten Tuban. Dalam kurun waktu 5 tahun, tahun 2000 hingga tahun 2004 rata –rata perkembangannya adalah 9,1%.
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu berada pada lokasi yang strategis, yaitu pada jalur Pantai Utara Jawa yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah
- e. Sejak tahun 2001 terdapat isu permasalahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu yang menunjukkan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu belum berfungsi secara optimal. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu belum mampu melayani seluruh Desa Nelayan di Kecamatan Bancar.

Lokasi wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut,

Gambar 3.1 Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar

3.3 Penentuan Sampel Penelitian

Sebuah sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dapat diambil dari sebagian populasi yang diharapkan dapat menghasilkan gambaran keseluruhan sifat populasi yang bersangkutan. Penentuan sampel penelitian harus representatif bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi dan sampel harus representatif. Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka dalam pengambilan sampel, penelitian harus mempertimbangkan adanya unsur metode sebagai acuan dalam penentuan jumlah serta distribusi sampel. Oleh karena itu digunakanlah teknik survei sampel (*sample survey/sample enumeration*) dimana perhitungan - perhitungan hanya dilakukan pada bagian unit populasi saja.

Pemberian kuisisioner ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya tersebar sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung dengan semua responden karena alasan biaya dan waktu. Penyebaran kuisisioner ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan sampel untuk penyebaran kuisisioner dengan menggunakan metode teknik *Purposive Sampling* , yaitu pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Tujuannya ialah memperoleh sampel yang representatif dengan memilih subjek yang tidak hanya sebagai pelaku, akan tetapi juga memahami seluk-beluk permasalahan penelitian yang ingin menjadi fokus kerja peneliti (Danim, 1997: 98).

Metode teknik *Purposive Sampling* yang menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (Arikunto, 1997 :117)

- Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri – ciri, sifat –sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri – ciri pokok populasi.
- Subjek yang diambil sebagai sampel benar – benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri –ciri yang terdapat pada populasi (key subjects).

- Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan

Kelompok yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat perikanan, yaitu nelayan dan pedagang. Kelompok nelayan pada umumnya merupakan struktur dua kelas. Masyarakat terbagi menjadi dua lapisan yang cenderung bersifat antagonistik sebagaimana kelompok majikan dan buruh dalam dunia industri. Dua lapisan tersebut adalah pemilik kapal dan peralatan penangkapan ikan(juragan), dan nelayan (nelayan anak buah kapal), yakni mereka yang mengandalkan tenaganya dengan bekerja. Pemilihan sampel nelayan pemilik kapal, nelayan Anak Buah Kapal dan pedagang didasarkan pada hal – hal berikut,

- Memiliki kepentingan melakukan aktivitas perikanan di wilayah penelitian.
- Masyarakat selaku ‘users’ yang berhak memperoleh pelayanan fasilitas perikanan di wilayah penelitian.
- Masyarakat yang mengetahui seluk beluk permasalahan di wilayah penelitian.

2. Teknik Perhitungan Sampel

Berdasarkan Slovin (1960) dalam Hasan (2002:161) bahwa metode perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah masyarakat perikanan

d = derajat kepercayaan (90%) dengan tingkat kesalahan 10% (0,1)

Masyarakat perikanan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nelayan dan pedagang yang berada di lokasi wilayah penelitian, yaitu 7 Desa nelayan di Kecamatan Bancar sebagai skala pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Jumlah masyarakat perikanan tersebut adalah

- Masyarakat nelayan sebesar 5098 jiwa, terdiri dari 630 jiwa nelayan pemilik kapal dan 4468 jiwa nelayan Anak Buah Kapal (ABK)

- Masyarakat pedagang sebesar 120 jiwa, terdiri dari 45 jiwa tengkulak, 43 jiwa pedagang besar, dan 32 jiwa pedagang pengecer

Jumlah populasi masyarakat perikanan adalah 5218 jiwa. Dari populasi tersebut dilakukan perhitungan jumlah sampel penelitian berdasarkan Slovin (1960) dalam Hasan (2002:161) adalah sebagai berikut,

$$n = \frac{5218}{5218(0,1)^2 + 1} = 98$$

Berdasarkan hasil perhitungan maka sampel penelitian adalah 98 sampel. Penentuan jumlah sampel pada masing – masing masyarakat perikanan menggunakan metode proporsional sampel karena terdapat perbedaan jumlah antar masyarakat perikanan. Jumlah masyarakat perikanan terbanyak akan memiliki jumlah sampel yang lebih banyak pula. Lebih jelasnya jumlah sampel pada masing – masing masyarakat perikanan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Penyebaran Kuisisioner di Wilayah Penelitian

No	Responden Masyarakat Perikanan	Jumlah Masyarakat Perikanan (Sumber : BPPPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban)	Prosentase (%)	Jumlah sampel
1.	Nelayan Pemilik Kapal	630	12,1	12
3.	Nelayan Anak Buah Kapal	4468	85,5	83
4.	Pedagang :			
	a. Tengkulak	45	0,8	1
	b. Pedagang besar	43	0,8	1
	c. Pedagang pengecer	32	0,6	1
	Jumlah	5228	100	98

Sumber : Hasil Perhitungan 2006

3.4 Penentuan dan Pemilihan Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam kelompok tersebut (Sugiarto, 2003 : 13). Proses penentuan dan pemilihan variabel dalam penelitian yang berjudul “evaluasi fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan” ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu.

Secara umum variabel dikelompokkan menjadi delapan, yaitu tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data, fasilitator pembentukan harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan sumber pendapatan daerah. Lebih jelasnya proses penentuan dan pemilihan variabel dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Proses Penentuan Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan dapat dilihat dari aktivitas kapal perikanan dan jumlah kapal perikanan yang mendarat. Hal ini sekaligus menjadi variabel yang berpengaruh terhadap fungsi PPI. Kondisi perairan berpengaruh pada kelancaran seluruh kegiatan kapal perikanan. Ketersediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang dapat mendorong kelancaran fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Kemampuan aparatur kelembagaan dan dana dalam mengelola fasilitas PPI diperlukan guna mendukung PPI berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas kapal perikanan • Jumlah kapal yang mendarat • Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan • Ketersediaan fasilitas alur pelayaran • Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan • Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang • Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana
	Jumlah kapal perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan		
	Kondisi perairan	Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37)		
	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	Triatmodjo (2003: 28-29)		
	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan			
	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	Kramadibrata (2002 : 32)		
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)		
Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)			
Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan	PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dapat dilihat dari jumlah ikan yang didaratkan. Variabel ini berpengaruh terhadap fungsi PPI. Kemudahan pencapaian ke lokasi TPI dapat memperlancar	<ul style="list-style-type: none"> • Volume ikan yang didaratkan • Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI • Ketersediaan fasilitas dermaga. • Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan
	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 :		

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
		37)	pengangkutan hasil perikanan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI. Variabel ini berpengaruh terhadap fungsi PPI.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI. • Ketersediaan dana
	Ketersediaan fasilitas dermaga.	Triatmodjo (2003 : 29)	Ketersediaan fasilitas dermaga untuk bongkar muat ikan mendorong keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:24)	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penampungan ikan mendorong fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.	
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas PPI diperlukan guna mendukung PPI berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		
Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan dapat dilihat dari aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan. Variabel ini berpengaruh terhadap fungsi PPI.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan • Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan • Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih • Ketersediaan fasilitas pabrik es • Ketersediaan fasilitas gudang dingin
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:24)	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan digunakan sebagai tempat sortir ikan, memperagakan lelang dan	

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
			pengepakan. Variabel ini berpengaruh pada fungsi PPI.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas drainase • Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI. • Ketersediaan dana
	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:25)	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih berfungsi dalam pencucian ikan sehingga mendorong keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat penanganan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan fasilitas pabrik es	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:26)	Ketersediaan fasilitas pabrik es dan gudang dingin diperlukan untuk kesegaran ikan. Variabel ini berpengaruh pada fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	
	Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)			
	Ketersediaan fasilitas drainase	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27)	Fasilitas drainase diperlukan dalam pembuangan limbah aktivitas perikanan setelah penanganan ikan hasil tangkapan	
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas penanganan ikan di PPI diperlukan guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		
Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas Pemasaran	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	Kemampuan PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan dilihat dari lokasi pusat aktivitas pemasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas Pemasaran • Lembaga pemasaran • Informasi pasar dan harga • Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan.
	Lembaga pemasaran	Bambang Cahyono, 2000:108-110	Banyaknya lembaga	

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
			pemasaran yang terlibat berpengaruh pada kelancaran/efisiensi pemasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan • Ketersediaan fasilitas areal parkir • Ketersediaan fasilitas jalan penghubung • Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana
	Informasi pasar dan harga	Dahuri R dalam Mahyuddin B (2001:37)	Keberadaan informasi pasar dan harga mendukung kelancaran pemasaran dari produsen ke konsumen.	
	Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan.	Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003 : 37)	Kemudahan aksesibilitas dapat memperlancar pengangkutan hasil perikanan dari produsen ke konsumen.	
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:25)	Fasilitas gedung pelelangan mendukung kegiatan penampungan dan jual beli ikan sebagai bentuk pemasaran hasil perikanan.	
	Ketersediaan fasilitas areal parkir	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:27)	Fasilitas areal parkir dan jalan penghubung mempengaruhi kelancaran distribusi hasil perikanan.	
	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung			
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas pemasaran ikan dari PPI diperlukan guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pemasaran ikan hasil tangkapan.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		
Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan	Adanya penyuluhan dan pengumpulan data menunjukkan keberhasilan PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan • Pengumpulan data • Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan • Ketersediaan fasilitas kantor
	Pengumpulan data			

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
	Kemampuan penyuluh perikanan	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan penyuluhan perikanan	Penyuluh perikanan yang mampu di bidangnya menentukan keberhasilan memberikan penyuluhan ke masyarakat perikanan	<ul style="list-style-type: none"> administrasi Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Ketersediaan dana
	Kelompok masyarakat perikanan		Keberadaan kelompok masyarakat perikanan mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan	
	Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:31)	Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan digunakan untuk menyelenggarakan penyuluhan.	
	Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002:35)	Fasilitas kantor administrasi digunakan sebagai tempat pengumpulan data.	
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26)	Kemampuan aparatur kelembagaan dan tersedianya dana dalam mengelola fasilitas diperlukan guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.	
	Ketersediaan dana	Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		
Fasilitator pembentukan harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002	Melalui penjualan dan pembayaran ikan hasil tangkapan dapat menunjukkan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.	<ul style="list-style-type: none"> Penjualan ikan hasil tangkapan Pembayaran ikan hasil tangkapan Peraturan penyelenggaraan lelang Peran serta masyarakat Kemampuan aparatur kelembagaan KUD
	Pembayaran ikan hasil tangkapan			
	Peraturan penyelenggaraan lelang	Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	Penerapan peraturan pelelangan dan peran serta masyarakat dalam penentuan retribusi penyelenggaraan lelang mempengaruhi keberhasilan fungsi PPI	
	Peran serta masyarakat	Penelitian oleh Sastrawidjaja (2005 : 28) tentang		

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
		Persepsi masyarakat perikanan terhadap pembentukan dan pengorganisasian sistem pelelangan ikan di Jawa dan Sumatra.	sebagai fasilitator pembentukan harga	
	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD dalam menyelenggarakan lelang berpengaruh pada keberhasilan fungsi TPI	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Hadi <i>et al.</i> (1997:50)	Pendapatan dan kemampuan nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dapat melihat keberhasilan pembangunan PPI untuk kesejahteraan nelayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan responden nelayan • Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga • Penjualan ikan hasil tangkapan
	Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga			
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Rogers & Shoemaker dalam Susilo E, <i>et al.</i> (1993: 36)	Penjualan ikan hasil tangkapan mempengaruhi fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga	
Menyediakan data statistik yang akurat.	Daerah, musim, dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan	Pasal 14 UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan	Subvariabel dalam data statistik yang akurat dapat diwakili dengan danya subvariabel pengumpulan data pada fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.	-
	Luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya			
	Jumlah nelayan/petani ikan			
	Produk, ukuran ikan yang tertangkap			
	Musim pemijahan ikan			
Membina mutu hasil perikanan	Penanganan hasil	Direktorat Jenderal Perikanan (1987) dalam Mahyuddin B (2001:14)	Ketiga subvariabel tersebut telah tercakup dalam subvariabel aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan pada pusat pelaksanaan penanganan ikan	-
	Memilah dan menimbang			
	Pengepakan			

Variabel	Subvariabel	Sumber Pustaka	Dasar Pertimbangan	Subvariabel yang dipilih
			hasil tangkapan.	
Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002	Adanya penerimaan retribusi sesuai target menunjukkan PPI telah berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan retribusi • Penjualan ikan hasil tangkapan • Koordinasi antara Pemerintah dan KUD
	Penjualan ikan hasil tangkapan		Sistem penjualan ikan hasil tangkapan berpengaruh pada penerimaan retribusi	
	Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan TPI Karanganyar	Koordinasi antar keduanya mempengaruhi kelancaran penyaluran retribusi pelelangan ikan.	

Sumber: Hasil pemikiran tahun 2007

Adapun seluruh variabel penelitian yang telah dipilih tersebut dijelaskan indikator pada masing - masing variabel. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3,

Tabel 3.3 Indikator Variabel Penelitian

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang 	Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas berlabuh kapal perikanan • Tingkat pengaruh aktivitas kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan
		Jumlah kapal perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kapal perikanan yang berlabuh. • Tingkat pengaruh jumlah kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.
		Kondisi perairan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan • Tingkat pengaruh kondisi perairan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan
		Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas alur pelayaran. • Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas alur pelayaran terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
		Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.
		Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pemecah gelombang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang. Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas kolam pelabuhan dan alur pelayaran.
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan. Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan Bappeda Kotamadya Semarang dalam Handoyo Prayogo (2003) 	Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Produksi ikan Tingkat pengaruh produksi ikan yang didaratkan di PPI terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.
		Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Cara dan jarak pengangkutan ikan hasil tangkapan dari tempat pendaratan kapal ke lokasi TPI Tingkat pengaruh kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
		Ketersediaan fasilitas dermaga.	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas dermaga. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas dermaga terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan.

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
: 37) • Triatmodjo (2003 : 29) • Mahyudin (2001 : 11) • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26) • Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32)		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI.	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparatur lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan. • Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan. • Tingkat pengaruh ketersediaan dana fasilitas dalam mendukung penyediaan fasilitas dermaga dan gedung pelelangan.
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Sugeng (2002:22) • Direktorat Jenderal Perikanan 	Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan. • Tingkat pengaruh aktivitas penanganan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan.
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penanganan ikan. • Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan intalasi air bersih. • Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas intalasi air bersih terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan.

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
		Ketersediaan fasilitas pabrik es	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas pabrik es . • Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pabrik es terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas gudang dingin. • Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gudang dingin terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan fasilitas drainase	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas drainase • Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas drainase terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan • Tingkat pengaruh kemampuan aparaturnya lembaga mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan. • Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan • Bambang Cahyono, 2000:108-110 • Dahuri R dalam Mahyuddin B (2001:37) • Bappeda Kotamadya Semarang dalam 	Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas Pemasaran	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan • Tingkat pengaruh aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan terhadap pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
		Lembaga pemasaran	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pemasaran dalam penyaluran hasil perikanan. • Tingkat pengaruh saluran pemasaran terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
		Informasi pasar dan harga	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi pasar dan harga • Tingkat pengaruh informasi pasar dan harga terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
		Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak, waktu dan cara pengangkutan ikan hasil tangkapan ke daerah pemasaran ikan. • Tingkat pengaruh aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan sebagai tempat yang memperlancar jual beli lelang di PPI Tingkat pengaruh fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
		Ketersediaan fasilitas areal parkir	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas areal parkir Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
		Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan fungsi fasilitas areal parkir Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana pengelolaan fasilitas pemasaran ikan hasil tangkapan. Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran hasil perikanan.
<ul style="list-style-type: none"> Pasal 18 Undang – undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan Kep. 44/men/2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan 	Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan penyuluhan Tingkat pengaruh penyelenggaraan penyuluhan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Pengumpulan data	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data perikanan Tingkat pengaruh pengumpulan data dan informasi pada keberhasilan fungsi PPI sebagai Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Kemampuan penyuluh perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan Tingkat pengaruh kemampuan aparatur penyuluh perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> penyuluhan perikanan • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Sugeng (2002:22) • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ,2002 • Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2002) dalam Yolindra (2005:26) • Direktorat Jenderal Perikanan (2002) dalam Handoyo Prayogo (2003: 32) 		Kelompok masyarakat perikanan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat perikanan • Tingkat pengaruh keberadaan kelompok masyarakat perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan fungsi fasilitas balai pertemuan nelayan • Tingkat pengaruh fasilitas balai pertemuan nelayan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan fungsi fasilitas tempat pelelangan ikan • Tingkat pengaruh fasilitas tempat pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. • Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.
		Ketersediaan dana	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. • Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 • Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) • Penelitian oleh 	Fasilitator pembentukan harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Proses jual beli ikan hasil tangkapan • Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
		Pembayaran ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Cara pembayaran ikan hasil tangkapan • Tingkat pengaruh cara pembayaran ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
		Peraturan penyelenggaraan lelang	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan penyelenggaraan lelang yang berlaku • Tingkat pengaruh aturan penyelenggaraan lelang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga

Sumber Pustaka	Variabel	Subvariabel	Skala Pengukuran	Indikator
Sastrawidjaja (2005:28) • Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24)		Peran serta masyarakat	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan penyelenggaraan lelang ikan Tingkat pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan penyelenggaraan lelang ikan terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
		Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan lembaga KUD dalam menjalankan tugasnya Tingkat pengaruh kemampuan lembaga KUD terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga.
<ul style="list-style-type: none"> Hadi <i>et al</i> (1997:40) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan responden nelayan UMR Kabupaten Tuban Tingkat pengaruh pendapatan responden nelayan terhadap keberhasilan fungsi PPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
		Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tingkat pengaruh kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam mendukung keberhasilan PPI Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
		Penjualan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Proses jual beli ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 Penelitian oleh Barnabas Pablo (2006:24) 	Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi pelelangan ikan Tingkat pengaruh penerimaan retribusi lelang terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah
		Penjualan ikan hasil tangkapan	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Proses jual beli ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah.
		Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Ordinal	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu. Tingkat pengaruh koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu dalam penyaluran retribusi lelang terhadap PPI sebagai sumber pendapatan daerah.

Sumber : Hasil pemikiran, 2007

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan studi ini langkah pertama yang dilakukan adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Hasan, 2002 : 83). Pengumpulan data ini meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode observasi/survei lapangan, penyebaran kuisisioner dan wawancara. Untuk mempermudah perolehan data dengan metode pengumpulan data tersebut, digunakan instrumen penelitian. Menurut Arikunto (1997:136) Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah kuisisioner, ceklis (*chek-list*) atau daftar centang, dokumentasi foto, pedoman wawancara dan lain - lain. Jadi instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu metode. Pengumpulan data dengan suatu metode dan alat pengumpulan data dibedakan menjadi dua yaitu :

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi atau survei lapangan, penyebaran kuisisioner dan wawancara.

A. Pengamatan /Observasi Lapangan

Pengamatan langsung (observasi) meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2002: 133). Metode pengamatan/observasi dengan jalan mengamati langsung obyek studi untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai kondisi eksisting obyek studi, yang tidak mungkin diperoleh dari survei sekunder, diantaranya mengenai karakteristik Pangkalan Pendaratan Ikan, meliputi lokasi dan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan. Jenis data observasi lapangan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut,

Tabel 3.4
Data Observasi Lapangan

No.	Jenis Data	Kegunaan Data
1.	Lokasi PPI meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Sarana angkutan dan jalan yang melewati PPI • Ketersediaan jaringan listrik, jaringan air bersih dan saluran drainase yang melewati PPI • Jarak dengan pemukiman nelayan dan pertokoan alat perikanan • Jarak dengan pom bensin • Jarak dengan Industri pengolah ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan PPI Bulu
2.	Fasilitas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Fasilitas • Kondisi fisik bangunan dan fungsi fasilitas • Site plan ruang PPI 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan PPI Bulu • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu • Dasar untuk analisis faktor guna mencari penyebab fungsi PPI tidak optimal
3.	Aksesibilitas yaitu jarak antara tempat pendaratan kapal ke gedung TPI	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan
4.	Pelaksanaan aktivitas perikanan, meliputi aktivitas kapal perikanan, penanganan ikan hasil tangkapan, pemasaran, penyuluhan, pengumpulan data, dan penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI.

Sumber : Hasil Pemikiran, tahun 2006

Metode pengumpulan data tersebut ditunjang dengan alat pengumpulan data, yaitu :

- Daftar Cek berupa peta wilayah, peta layout PPI untuk menggambarkan kondisi lokasi, fasilitas dan aktivitas perikanan di PPI sesuai jenis data yang telah ditentukan.
- Kamera, peralatan mekanis ini digunakan untuk merekam gambaran fisik yang mampu memberikan informasi-informasi nyata berkaitan dengan lokasi, fasilitas dan aktivitas perikanan PPI sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan.

B. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode dan alat pengumpulan data dalam upaya mengumpulkan informasi dengan menyerahkan sejumlah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat perikanan, yaitu nelayan

pemilik kapal, nelayan anak buah kapal dan pedagang pada wilayah penelitian. Pertanyaan – pertanyaan yang telah ditentukan bertujuan untuk mengetahui karakteristik fungsi PPI berdasarkan persepsi masyarakat di wilayah studi.

Tujuan dari metode kuesioner ini adalah:

- 1.) Mengetahui data identitas responden, meliputi: usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, mata pencaharian sampingan dan asal desa.
- 2.) Mengetahui karakteristik masyarakat, kelembagaan biaya, informasi dan fasilitas berdasarkan persepsi masyarakat perikanan dan mengetahui faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tidak optimal di wilayah penelitian berdasarkan variabel penelitian tersebut.
- 3.) Mengetahui fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berfungsi normal, berubah fungsi bahkan fasilitas yang tidak berfungsi berdasarkan persepsi masyarakat perikanan.
- 4.) Mengetahui jumlah responden masyarakat perikanan yang menjalankan aktivitas perikanan di PPI dan luar PPI

Jenis data, kegunaan data pemberian kuisisioner berdasarkan masing – masing aspek diatas dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut,

Tabel 3.5
Data Kuisisioner

No.	Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan Data
1.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan menjalankan aktivitas kapal perikanan • Jumlah kapal perikanan • Kondisi perairan • Ketersediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan • Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana 	Responden masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal dan pedagang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
2.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Volume ikan yang didaratkan • Aksesibilitas ke lokasi TPI • Ketersediaan fasilitas dermaga, gedung pelelangan • Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

3.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan • Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan, Instalasi Air Bersih, Pabrik Es, Gudang Dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>), Drainase, • Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
4.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas Penampungan Dan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan • Saluran Pemasaran • Informasi pasar dan harga • Kemudahan mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan • Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung. • Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
5.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Penyuluhan • Pengumpulan data • Kemampuan Penyuluh Perikanan • Kelompok Masyarakat Perikanan • Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi • Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI • Ketersediaan dana 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal
6.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Penjualan ikan hasil tangkapan • Pembayaran ikan hasil tangkapan • Peraturan penyelenggaraan lelang ikan • Peran serta masyarakat • Kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

7.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan responden nelayan • Kemampuan responden nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya • Penjualan ikan hasil tangkapan 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal.
8.	Persepsi masyarakat terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan retribusi • Penjualan ikan hasil tangkapan • Koordinasi antara Pemerintah dengan KUD 		<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI. • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal.

Sumber : Hasil Pemikiran, tahun 2006

C. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dimana jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002 : 85). Metode wawancara merupakan pengembangan dari penyebaran kuisioner untuk memperoleh penjelasan dan informasi lebih lanjut terkait dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan pada pihak – pihak pengelola terkait dengan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), masyarakat yang menjalankan aktivitas perikanan dan pihak – pihak yang mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi di wilayah penelitian meliputi :

- Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu, Kecamatan Bancar
- Koperasi Unit Desa ” Trisno Maniko Karyo” Kecamatan Bancar
- Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Tuban
- Nelayan dan pedagang

Jenis data dan kegunaan data wawancara dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut,

Tabel 3.6
Data Wawancara

No.	Jenis Data	Sumber data	Kegunaan Data
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas kapal perikanan • Jumlah kapal perikanan • Kondisi perairan • Ketersediaan dana • Kemampuan aparatur kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal dan pedagang • Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan ikan hasil tangkapan • Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal • Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI.
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan • Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal • Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas Pemasaran • Saluran Pemasaran • Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan • Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagang • Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Penyuluhan • Pengumpulan data • Kelompok masyarakat perikanan • Ketersediaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal. • Badan Pengelola PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan ikan hasil tangkapan • Peraturan penyelenggaraan lelang ikan • Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat perikanan meliputi nelayan pemilik kapal, anak buah kapal, dan pedagang • Badan Pengelola PPI Bulu • KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. • Dasar untuk analisis tingkat optimal fungsi PPI
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengelolaan PPI Bulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Tuban 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan PPI Bulu

8.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan PPI Bulu terkait dengan pembiayaan dan kelembagaan. ▪ Potensi dan permasalahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu ▪ Upaya mengoptimalkan fungsi PPI ▪ Harapan terhadap PPI di wilayah penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu, Kecamatan Bancar ▪ Koperasi Unit Desa ” Trisno Maniko Karyo” Kecamatan Bancar ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Tuban 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan PPI Bulu • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI. • Dasar pertimbangan dalam rekomendasi
----	--	---	--

Sumber : Hasil Pemikiran, tahun 2006

Untuk mempermudah perolehan data dengan metode wawancara tersebut, perlu digunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data sehingga data yang diperoleh hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis serta lebih mudah diolah.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002 : 82). Data ini diperoleh dari berbagai sumber di luar kegiatan survey lapangan melalui berbagai teknik, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan melalui studi literatur yang berasal dari buku – buku serta studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Lebih jelasnya studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Data Studi Kepustakaan

Jenis Data	Sumber data	Kegunaan Data
<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi PP/PPI • Fungsi TPI • Maksud dan tujuan TPI • Fasilitas Pelabuhan Perikanan/PPI • Kelembagaan Pelabuhan Perikanan/PPI • Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap • Jumlah kapal perikanan dan volume ikan • Kondisi perairan • Aktivitas kapal perikanan, penanganan ikan hasil tangkapan, pemasaran, penyuluhan dan pengumpulan data, penjualan dan pembayaran ikan hasil tangkapan • Lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga • kemampuan penyuluh perikanan dan kelompok masyarakat perikanan • Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan • Peraturan penyelenggaraan lelang • Peran serta masyarakat • Kemampuan aparatur kelembagaan KUD • Pendapatan dan kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga • Penerimaan retribusi • Koordinasi antara Pemerintah dan KUD • Analisis Faktor dan Akar Masalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan S1 Universitas Brawijaya Malang • Perpustakaan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang • Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang • Departemen Kelautan dan Perikanan Jakarta (www.dkp.go.id) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum • Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI • Dasar untuk analisis kriteria fungsi PPI • Dasar untuk analisis faktor guna mencari faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

Sumber : Hasil Pemikiran, tahun 2006

2. Organisasi/Instansi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari instansi-instansi terkait antara lain : BAPPEDA Kabupaten Tuban, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Kantor Kecamatan, BPPPI Kantor Kepala Desa Nelayan di

Kecamatan Bancar dan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Adapun kebutuhan data yang diperlukan antara lain. :

Tabel 3.8
Data Organisasi/Instansi

Jenis Data	Sumber Dokumen	Sumber Data	Kegunaan Data
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pembangunan bidang perikanan dan kelautan Kabupaten Tuban Fasilitas perikanan di Kabupaten Tuban 	RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005-2015	BAPPEDA Kabupaten Tuban	Gambaran umum yang menunjukkan orientasi PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban
<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis pembangunan perikanan dan kelautan 	Rencana strategis pembangunan perikanan dan kelautan Tahun 2005	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	
<ul style="list-style-type: none"> Produksi dan nilai pelelangan Perikanan tangkap Kabupaten Tuban dan Kecamatan Bancar Tahun 2000 – 2005 Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban 	Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2005	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	
<ul style="list-style-type: none"> Tarif retribusi pelelangan ikan Aturan penyelenggaraan lelang 	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga
<ul style="list-style-type: none"> Kondisi geografis dan batas administrasi Kecamatan Bancar Peta administrasi Kecamatan Bancar Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar Sistem transportasi Kecamatan Bancar 	Kecamatan Bancar dalam Angka Tahun 2005	BPS Kabupaten Tuban Kantor Kecamatan Bancar	Gambaran Umum yang menunjukkan orientasi PPI Bulu terhadap Kecamatan Bancar
<ul style="list-style-type: none"> Data Jenis Fasilitas dan Peta Layout PPI Bulu Tahun 2006 Jumlah Ikan yang didaratkan di PPI Bulu Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas PPI Bulu Susunan organisasi kelembagaan pengurus PPI Jumlah Armada Kapal Perikanan Nelayan PPI Bulu Pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Laporan Tahunan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2005	BPPPI Bulu	<ul style="list-style-type: none"> Gambaran umum Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI

Jenis Data	Sumber Dokumen	Sumber Data	Kegunaan Data
<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pembangunan bidang perikanan dan kelautan Kabupaten Tuban Fasilitas perikanan di Kabupaten Tuban 	RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005-2015	BAPPEDA Kabupaten Tuban	Gambaran umum yang menunjukkan orientasi PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban
<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis pembangunan perikanan dan kelautan 	Rencana strategis pembangunan perikanan dan kelautan Tahun 2005	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	
<ul style="list-style-type: none"> Produksi dan nilai pelelangan Perikanan tangkap Kabupaten Tuban dan Kecamatan Bancar Tahun 2000 – 2005 Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban 	Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2005	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	
<ul style="list-style-type: none"> Tarif retribusi pelelangan ikan Aturan penyelenggaraan lelang 	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan ikan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban	Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga
<ul style="list-style-type: none"> Kondisi geografis dan batas administrasi Kecamatan Bancar Peta administrasi Kecamatan Bancar Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar Sistem transportasi Kecamatan Bancar 	Kecamatan Bancar dalam Angka Tahun 2005	BPS Kabupaten Tuban Kantor Kecamatan Bancar	Gambaran Umum yang menunjukkan orientasi PPI Bulu terhadap Kecamatan Bancar
<ul style="list-style-type: none"> Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas PPI 	Laporan Tahunan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2006	BPPPI Bulu	Gambaran umum
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi 	Data Potensi Perikanan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2005 Kecamatan Bancar	BPPPI Bulu	Dasar untuk analisis karakteristik terhadap fungsi PPI

Sumber : Hasil Pemikiran, Tahun 2006

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Hasan (2002: 97) analisis data pada dasarnya dapat diartikan menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya (dengan

menggunakan angka selisih atau angka rasio), membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan (persentase).

Tujuan analisis data yaitu data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah –masalah penelitian, memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian, memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian dan bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya (Hasan, 2002; 98).

Melalui analisis data, data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder diolah sehingga menghasilkan suatu gambaran mengenai kondisi permasalahan yang ada. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nawawi (1983:32) bahwa terdapat dua pendekatan analisis dimana perbedaan tersebut pada dasarnya terletak dalam masalah analisa dan penyajian data. Pendekatan analisis kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoretis. Pengolahan data dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir tertentu menurut hukum logika. Pendekatan analisis kuantitatif mempergunakan data berupa angka atau jumlah dengan berbagai klasifikasi yang antara lain berbentuk frekuensi, nilai rata – rata, penyimpangan dari nilai baku, persentase, nilai maksimum dll. Pengolahan data tersebut dilakukan secara matematis dengan mempergunakan berbagai rumus statistika yang sesuai dengan sifat dan jenis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian meliputi:

3.6.1 Analisis Karakteristik Terhadap Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan

Metode analisa deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1983 : 63). Metode analisis deskriptif dalam penyusunan studi ini disesuaikan dengan obyek yang diteliti dengan pembahasan secara tajam pada tiap variabel.

Penerapan analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan dalam analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu. Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI meliputi :

1. Tempat berlabuh kapal perikanan meliputi subvariabel aktivitas kapal perikanan, jumlah kapal yang mendarat, kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan, ketersediaan fasilitas alur pelayaran, ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan, ketersediaan fasilitas pemecah gelombang, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
2. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan meliputi subvariabel volume ikan yang didaratkan, aksesibilitas ke lokasi gedung TPI, ketersediaan fasilitas dermaga, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
3. Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan meliputi subvariabel aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas instalasi air bersih, ketersediaan fasilitas pabrik es, ketersediaan fasilitas gudang dingin, ketersediaan fasilitas drainase, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
4. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan meliputi subvariabel aktivitas pemasaran, lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga, aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas areal parkir, ketersediaan fasilitas jalan penghubung, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana.
5. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data meliputi subvariabel penyuluhan, pengumpulan data, kemampuan penyuluh perikanan, kelompok masyarakat perikanan, ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan, ketersediaan fasilitas kantor administrasi, kemampuan aparatur kelembagaan dinas perikanan dan BPPPI, ketersediaan dana
6. Fasilitator pembentukan harga, meliputi subvariabel penjualan ikan hasil tangkapan, pembayaran ikan hasil tangkapan, peraturan penyelenggaraan lelang, peran serta masyarakat, kemampuan aparatur kelembagaan KUD.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, meliputi subvariabel pendapatan responden nelayan, kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, penjualan ikan hasil tangkapan.
8. Sumber pendapatan daerah, meliputi subvariabel penerimaan retribusi, penjualan ikan hasil tangkapan, koordinasi antara pemerintah dengan KUD.

Teknik analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi berdasarkan persepsi masyarakat sehingga menggunakan pendekatan analisis kuantitatif.

3.6.2 Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan

Analisis tingkat optimal fungsi pangkalan pendaratan ikan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan. Analisis tingkat optimal fungsi PPI, yaitu pengukuran tingkat optimal fungsi PPI didasarkan pada kriteria fungsi dengan memberikan skala pengukuran pada setiap kriteria. Jumlah tingkatan skala pengukuran fungsi dengan 8 kriteria didasarkan pada dalil Sturges sebagai berikut :

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

$$K = 1 + 3,3 (\log 8)$$

$$K = 1 + 3,3 (0,9)$$

$$K = 3$$

Hasilnya analisis ini berupa tingkat optimal fungsi PPI di wilayah penelitian Lebih jelasnya mengenai kriteria dan skala pengukuran fungsi PPI dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Kriteria dan Skala Pengukuran Fungsi PPI

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Tempat Berlabuh Kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan	Kapal yang mendarat di PPI tidak mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	Kapal yang mendarat di PPI cukup mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	Kapal yang mendarat di PPI mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat
	Jumlah kapal perikanan	Tidak ada kapal yang mendarat di PPI	Kapal yang mendarat di PPI sebanyak < 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT	Kapal yang mendarat di PPI sebanyak \geq 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
	Kondisi perairan	PPI berada di daerah dengan perairan yang tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut yang beresiko terhadap kerusakan kapal perikanan.	PPI berada di daerah dengan perairan cukup tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut namun tidak beresiko terhadap kerusakan kapal perikanan.	PPI berada di daerah dengan perairan tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang laut.
	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	Tidak tersedia fasilitas alur pelayaran	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mengarahkan kapal yang akan masuk/keluar ke kolam pelabuhan.	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk mengarahkan kapal yang akan masuk/keluar ke kolam pelabuhan.
	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	Tidak tersedia fasilitas kolam pelabuhan	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, melakukan gerakan untuk memutar kapal.	Fasilitas tersedia, berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, melakukan gerakan untuk memutar kapal.
	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	Tidak tersedia fasilitas pemecah gelombang	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk melindungi areal perairan pelabuhan, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk melindungi areal perairan pelabuhan, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut.
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.	Menyediakan fasilitas, tanpa memelihara fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang	Menyediakan dan memelihara fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan pemecah gelombang.
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.	Tersedia dana penyediaan fasilitas tanpa dana pemeliharaan, perbaikan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.	Tersedia dana untuk penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.
Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Tidak ada ikan hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal perikanan di PPI	Kapal perikanan dapat mendaratkan ikan di PPI < 2000 ton /tahun.	Kapal perikanan dapat mendaratkan ikan di PPI sebesar ≥ 2000 ton/tahun.
	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi	Cukup mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI tetapi tidak melalui jalan penghubung.	Mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI dan melalui jalan penghubung.

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
	Ketersediaan fasilitas dermaga.	Tidak tersedia fasilitas dermaga.	Fasilitas tersedia, tidak digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan dan panjang dermaga < 50 m.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan dan panjang dermaga 50 – 100 m.
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan	Fasilitas tersedia tetapi tidak digunakan sebagai tempat penampungan ikan.	Fasilitas tersedia, digunakan sebagai tempat penampungan ikan
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI.	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Tersedia dana penyediaan, dan pemeliharaan tanpa perbaikan fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan	Tersedia dana untuk penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dermaga, gedung pelelangan ikan
Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Tidak ada aktivitas penanganan di PPI	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI terdiri dari <4 aktivitas penanganan.	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI terdiri dari 4 aktivitas meliputi pemilahan, penimbangan, pengawetan, dan pengepakan.
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani < 3 aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan atau pengepakan ikan hasil tangkapan tetapi kurang memenuhi syarat kelayakan gedung pelelangan.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani 3 aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan dan pengepakan ikan hasil tangkapan, serta memenuhi syarat kelayakan gedung pelelangan.
	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Tidak tersedia fasilitas instalasi air bersih	Fasilitas tersedia tetapi hanya berfungsi untuk pembersihan ikan atau pembersihan lantai gedung pelelangan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk pembersihan ikan serta pembersihan lantai gedung pelelangan.

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
	Ketersediaan fasilitas pabrik es	Tidak tersedia fasilitas pabrik es	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai / es balok es.	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.
	Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)	Tidak tersedia fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan
	Ketersediaan fasilitas drainase	Tidak tersedia fasilitas drainase	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah aktivitas perikanan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah aktivitas perikanan.
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.	Tersedia dana penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase.
Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas pemasaran	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI dan luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
	Lembaga pemasaran	Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen panjang, yaitu 5 lembaga pemasaran.	Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen cukup, yaitu 4 lembaga pemasaran.	Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen sedikit, yaitu 3 lembaga pemasaran.

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
	Informasi pasar dan harga	Tidak menyediakan informasi pasar dan harga.	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran atau pergerakan arus barang dan harga.	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga.
	Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan.	Tidak mudah mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan dengan tidak tersedia jaringan jalan dan moda transportasi darat.	Cukup mudah mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan dengan ketersediaan jaringan jalan atau moda transportasi darat.	Mudah mendistribusikan produksi perikanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan dengan ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi darat.
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.
	Ketersediaan fasilitas areal parkir	Tidak tersedia fasilitas areal parkir	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan
	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	Tidak tersedia fasilitas jalan penghubung	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Tersedia dana penyediaan tanpa pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung	Tersedia dana penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, jalan penghubung

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Tidak terselenggara penyuluhan di PPI.	Terselenggara penyuluhan di PPI mengenai teknis penangkapan atau prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.	Terselenggara penyuluhan di PPI mengenai teknis penangkapan, dan prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.
	Pengumpulan data	Tidak lengkap meliputi data kapal perikanan	Data kondisi perikanan kurang lengkap meliputi data kapal perikanan dan jumlah nelayan atau produksi ikan.	Data kondisi perikanan lengkap meliputi data kapal perikanan, jumlah nelayan, produksi ikan
	Kemampuan penyuluh perikanan	Hanya mampu meyakinkan	Mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan	Mampu meyakinkan, mengakomodasi masalah di bidang perikanan dan mampu menghubungkan masyarakat perikanan dengan sumber informan.
	Kelompok masyarakat perikanan	Belum terbentuk kelompok masyarakat perikanan	Terbentuk kelompok masyarakat perikanan tetapi hanya sebagai formalitas	Terbentuk kelompok masyarakat perikanan yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat.
	Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	Tidak tersedia fasilitas balai pertemuan nelayan.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat pemberian penyuluhan bagi masyarakat perikanan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat pemberian penyuluhan bagi masyarakat perikanan.
	Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	Tidak tersedia fasilitas kantor administrasi	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat pengumpulan data statistik perikanan.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan data statistik perikanan.
	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Tidak mengelola PPI dimana tidak menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi	Mengelola PPI dengan menyediakan tanpa memelihara dan memperbaiki fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi	Mengelola PPI dengan menyediakan, memelihara, dan memperbaiki fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi
	Ketersediaan dana	Tidak tersedia dana untuk penyediaan dan pemeliharaan fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi	Tersedia dana untuk penyediaan tanpa pemeliharaan dan perbaikan fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi	Tersedia dana untuk penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas balai pertemuan nelayan, kantor administrasi.

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
Fasilitator pembentukan harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang di gedung TPI.	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang dan tanpa lelang di gedung TPI.	Seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang di gedung TPI.
	Pembayaran ikan hasil tangkapan	Hasil penjualan tanpa lelang dan dibayar beberapa hari setelah ikan habis terjual.	Hasil penjualan secara lelang dibayar lunas setelah ikan habis terjual.	Hasil penjualan secara lelang dan dibayar lunas oleh pembeli pada saat lelang.
	Peraturan penyelenggaraan lelang	Peraturan penyelenggaraan lelang yang berlaku tidak berdasarkan perda pelelangan ikan, yaitu perda propinsi dan perda kabupaten.	Peraturan penyelenggaraan lelang yang berlaku hanya berdasarkan perda pelelangan, yaitu perda propinsi atau perda kabupaten saja.	Peraturan penyelenggaraan lelang yang berlaku berdasarkan perda pelelangan, yaitu perda propinsi dan perda kabupaten.
	Peran serta masyarakat	Tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan.	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tetapi tidak terealisasi.	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan dan terealisasi.
	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	Tidak menyelenggarakan lelang ikan dan tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	Menyelenggarakan lelang ikan tetapi tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	Menyelenggarakan lelang ikan, melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Tingkat pendapatan responden nelayan cenderung menurun	Tingkat pendapatan responden nelayan cenderung tetap	Tingkat pendapatan responden nelayan cenderung meningkat
	Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup	Nilai tukar nelayan /kemampuan keluarga nelayan cenderung menurun	Nilai nilai tukar nelayan = 1 keluarga nelayan cenderung konstan	Nilai tukar nelayan >1 yang berarti keluarga nelayan cenderung meningkat
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang di gedung TPI.	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang dan tanpa lelang di gedung TPI.	Seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang di gedung TPI.
Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Pemerintah Daerah tidak menerima retribusi pelelangan ikan.	Pemerintah Daerah menerima retribusi pelelangan ikan sebesar < 1,25% dari tarif retribusi sebesar 5%	Pemerintah Daerah menerima retribusi pelelangan ikan sebesar $\geq 1,25\%$ dari tarif retribusi sebesar 5%
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di	Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI	Seluruh ikan hasil tangkapan yang

Kriteria Pengukuran Fungsi	Variabel	Skala Pengukuran		
		1	2	3
		PPI Bulu tidak dijual secara lelang di gedung TPI.	Bulu dijual secara lelang dan tanpa lelang	didaratkan di PPI Bulu dijual secara lelang di gedung TPI.
	Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Tidak ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan hanya sebagai formalitas.	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan

Sumber : Hasil pemikiran, 2007

Berdasarkan tabel kriteria dan skala pengukuran fungsi PPI diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 kriteria untuk mengukur fungsi PPI sehingga diperoleh tingkat optimal fungsi PPI sebagai berikut :

- Fungsi PPI optimal, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 115 – 147
- Fungsi PPI kurang optimal, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 82 – 114
- Fungsi PPI tidak optimal, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 49 – 81

3.6.3 Analisis Faktor

Analisis faktor dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal. Konsep dasar analisis faktor adalah :

- Menurut Supranto (2004 : 114), analisis faktor merupakan nama umum yang menunjukkan suatu kelas prosedur, utamanya dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas, dari variabel yang banyak diubah menjadi sedikit variabel, misalnya dari 15 variabel yang lama diubah menjadi 4 atau 5 variabel baru yang disebut faktor dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli (*original variabel*).
- Menurut Nugroho (2005 : 91), analisis faktor merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan meringkas faktor-faktor yang merupakan dimensi suatu variabel, definisi dari sebuah fenomena tertentu.
- Menurut Maholtra (1993) dalam Modul aplikasi SPSS (2005 : 19), analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan adanya keterkaitan antar item/variabel/butir. Pada prinsipnya analisis faktor menyederhanakan hubungan yang beragam dan kompleks pada variabel yang diamati dengan menyatukan faktor

atau dimensi yang saling berhubungan atau mempunyai korelasi pada suatu struktur data yang baru yang mempunyai set faktor lebih kecil. Data – data yang dimasukkan umumnya data metrik dan terdiri dari variabel – variabel dengan jumlah yang besar. Sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data, instrument/angket diuji cobakan terlebih dahulu kepada responden dan kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut;

1. Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid memiliki validitas rendah. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2002 : 144). Jadi uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuisioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti.

Pengujian validitas dilakukan dengan Rumus Korelasi *Product Moment*, sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = koefisien korelasi

X = skor butir

Y = skor total butir

n = jumlah butir

(Pearson yang dikutip oleh Sanusi, 2003 : 53)

Alat ukur yang dapat dipergunakan dalam pengujian validitas suatu kuisioner adalah angka hasil korelasi antara skor pernyataan dengan skor keseluruhan pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuisioner. Jenis korelasi yang dipergunakan adalah korelasi *pearson* antara skor setiap pertanyaan dengan skor total item.

Validitas suatu butir pertanyaan dilihat pada hasil output SPSS pada tabel *Correlations* dengan melihat nilai dari *Pearson Correlation* serta nilai signifikan pada masing-masing pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} yang merupakan nilai dari *Pearson Correlation* > dari r_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel nilai kritis r (Triton, 2005 : 260).

2. Reliabilitas

Pengertian umum menyatakan bahwa instrumen penelitian harus reliabel. Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang berlainan. Reliabilitas ini secara implisit mengandung obyektivitas karena hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh siapa pengukurnya (Sanusi, 2003 : 58).

Reliabilitas sendiri, dikatakan oleh Arikunto (2002 : 154) menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut telah baik. Selanjutnya menurut Arikunto (2002 : 171-172) menyatakan bahwa untuk menguji tingkat reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Dimana :

$$\sigma = \frac{\sum X_2 - \sum X_2 / n}{N}$$

Keterangan:

- r = reliabilitas instrumen
- k = banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir
- σ_t^2 = varians total

Menurut Nugroho (2005 : 72), reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,60.

A. Model Analisis Faktor

Secara matematis, analisis faktor agak mirip dengan regresi linear berganda, yaitu bahwa setiap variabel dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari faktor yang mendasari (*underlying factors*). Jumlah (*amount*) varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya yang tercakup dalam analisis disebut *communality*. Kovariansi antara variabel yang diuraikan, dinyatakan dalam suatu *common factors* yang sedikit jumlahnya ditambah dengan faktor unik untuk setiap variabel. Faktor-faktor ini tidak secara jelas terlihat (*not overly observed*) (Supranto, 2004 : 115-116).

Jika variabel-variabel dibakukan (*standardized*), model faktor dapat ditulis sebagai berikut (Supranto, 2004 : 116):

$$X_i = B_{i1} F_1 + B_{i2} F_2 + B_{i3} F_3 + \dots + B_{ij} F_j + \dots + B_{im} F_m + V_i \mu_1$$

Dimana :

X_i = Variabel ke-i yang dibakukan (rata-ratanya nol, standar deviasinya satu)

B_{ij} = Koefisien regresi parsial yang dibakukan untuk variabel ke-i pada *common faktor* ke-j

F_j = *Common faktor* ke-j

V_i = Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke-i pada faktor unik ke-i

μ_1 = Faktor unik variabel ke-i

m = Banyaknya *common faktor*

Faktor yang unik tidak berkorelasi dengan sesama faktor yang unik dan juga tidak berkorelasi dengan *common faktor*. *Common faktor* sendiri bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel-variabel yang terlihat (*the observed variables*) hasil penelitian lapangan (Supranto, 2004 : 116).

$$F_i = W_{i1} X_1 + W_{i2} X_2 + W_{i3} X_3 + \dots + W_{ik} X_k$$

Dimana:

F_i = perkiraan faktor ke-i (didasarkan pada nilai variabel X dengan koefisiennya W_i)

W_i = timbangan atau koefisien nilai faktor ke-i

k = banyaknya variabel

Dimungkinkan untuk memilih timbangan (*weight*) atau koefisien nilai faktor (*faktor score coefficients*) sehingga faktor yang pertama menjelaskan sebagian besar porsi seluruh varian atau menyerap sebagian besar varian seluruh variabel. Lebih lanjut, faktor 1 menyerap sebagian besar varian dari seluruh variabel, kemudian faktor 2 menyerap sebagian besar sisa varian dari seluruh variabel setelah diperoleh faktor 1, dan faktor ketiga menyerap sebagian besar sisa varian dari seluruh variabel setelah faktor 1 dan faktor 2 diperoleh. Begitu selanjutnya hingga varian dari seluruh variabel sudah terserap (Supranto, 2004 : 117).

B. Statistik yang Relevan dengan Analisis Faktor

Statistik yang relevan dengan analisis faktor adalah sebagai berikut :

1. *Barlett's Test of Sphericity*

Yaitu suatu uji statistik yang dipergunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak saling berkorelasi (*uncorrelated*) dalam populasi. Dengan perkataan lain matriks korelasi populasi merupakan matriks identitas, dimana setiap variabel berkorelasi dengan dirinya sendiri secara sempurna dengan $r = 1$ akan tetapi sama sekali tidak berkorelasi dengan lainnya $r = 0$. jadi elemen pada diagonal utama matriks semua nilainya 1, sedangkan diluar diagonal utama nilainya nol (Supranto, 2004 : 117).

2. *Communality*

Yaitu jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau bagian varian yang dijelaskan oleh *common faktor* atau besarnya sumbangan suatu faktor terhadap varian seluruh variabel (Supranto, 2004 : 118). Menurut Santoso (2002), semakin besar komunalitas sebuah peubah berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk.

3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy

Yaitu suatu indeks yang dipergunakan untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi antara 0,5 – 1,0 berarti analisis faktor tepat, kalau kurang dari 0,5 analisis faktor dikatakan kurang tepat (Supranto, 2004 : 118).

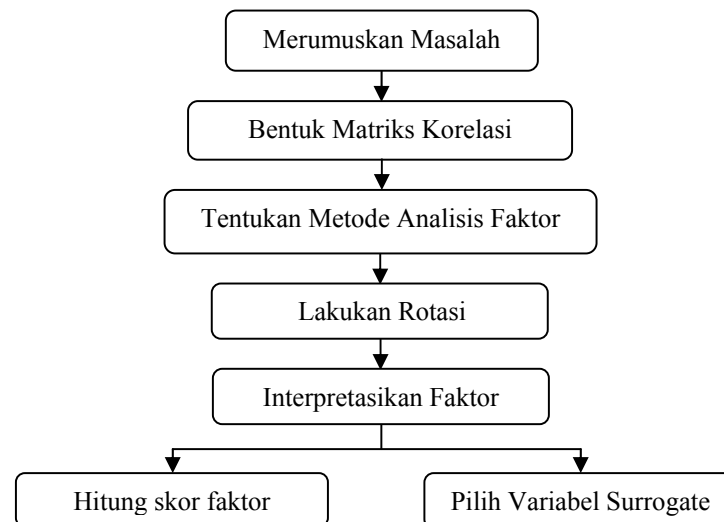
Nilai kecil dari KMO atau kurang dari 0,5 menunjukkan bahwa faktor analisis dari variabel – variabel tidaklah baik, meskipun korelasi antara sepasang variabel tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain. Diharapkan bahwa keseluruhan nilai KMO lebih besar dari 0,8 tetapi ukuran KMO diatas 0,6 masih bisa ditolerir. Menurut Subhash Sharma (1996) dalam Modul aplikasi SPSS (2005:23), tabel KMO ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kaiser – Meyer – Olkin

Ukuran KMO	Rekomendasi
$\geq 0,90$	Baik sekali
$\geq 0,80$	Baik
$\geq 0,70$	Sedang
$\geq 0,60$	Cukup
$\geq 0,50$	Kurang
$< 0,50$	Ditolak

C. Tahapan Analisis Faktor

Adapun langkah-langkah dalam analisis faktor dapat dilihat pada Gambar 3.7 sebagai berikut,



(Sumber: Supranto, 2004 : 121)

Gambar 3.2
Tahapan Analisis Faktor

a. Merumuskan Masalah

Merumuskan masalah meliputi beberapa hal (Supranto, 2004 : 122):

1. Tujuan analisis faktor harus diidentifikasi.
Menjelaskan tujuan dari penelitian dengan menggunakan analisis faktor, yaitu menentukan faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tidak optimal.
2. Menentukan variabel yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan peneliti yang didasarkan pada penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka. Berdasarkan proses pemilihan dan penentuan variabel, maka variabel yang diujikan sebanyak sepuluh variabel.
3. Pengukuran variabel berdasarkan skala likert. Menurut Nugroho (2005 : 91) analisis faktor yang berasal dari data primer melalui suatu kuisioner akan mengkuantitatifkan data dengan skala *likert*.

Skala *likert* merupakan jenis skala yang dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik) seperti sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Variabel penelitian yang diukur dengan skala *likert* ini, dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-item instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen ini, memiliki gradasi dari tertinggi sampai pada terendah (Hasan, 2002 : 72).

Banyaknya gradasi dalam setiap variabel pada penelitian ini didasarkan pada dalil Sturges yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,3 \log n \\ K &= 1 + 3,3 (\log 8) \\ K &= 1 + 3,3 (0,90) \\ K &= 3 \end{aligned}$$

Lebih jelasnya skala *likert* untuk setiap variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.11
Skala Likert Yang Dipergunakan Dalam Penelitian

Skala <i>Likert</i>	Keterangan
1	Setuju
2	Kurang setuju
3	Tidak setuju

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Lebih jelasnya skala *likert* untuk setiap variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.11

4. Banyaknya elemen sampel (n) harus cukup/memadai, sebagai petunjuk kasar, jika k banyaknya jenis variabel (atribut) $n = 4$ atau 5 kali k .

Atau dapat dirumuskan :

$$\text{Sampel minimum} = 5 \times \sum \text{variabel}$$

Tabel 3.12 Pertanyaan dan Skala Likert pada Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Aktivitas kapal perikanan(X11)	a :Bagaimanakah aktivitas kapal perikanan di PPI Bulu?	1	Kapal yang mendarat di PPI tidak mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat
		2	Kapal yang mendarat di PPI cukup mudah mendaratkan ikan memuat perbekalan dan istirahat
		3	Kapal yang mendarat di PPI dengan mudah mendaratkan ikan memuat perbekalan dan istirahat
	b : Apakah aktivitas kapal perikanan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Jumlah kapal perikanan (X12)	a : Berapa jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu?	1	Tidak ada kapal yang mendarat di PPI
		2	< 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT
		3	≥20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT
	b : Apakah jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu menentukan keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	c : PPI berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, apakah ditunjukkan oleh jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Kondisi perairan (X13)	a : Bagaimana kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan di PPI Bulu?	1	Tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut yang beresiko terhadap kerusakan kapal
		2	Cukup tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut namun tidak beresiko terhadap kerusakan kapal.
		3	Tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang laut
	b : Apakah kondisi perairan di kawasan PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
		3	Tidak Setuju.
Ketersediaan fasilitas alur pelayaran (X14)	a : Apakah ketersediaan fasilitas alur pelayaran PPI Bulu berpengaruh pada keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas alur pelayaran di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan (X15)	a : Apakah ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas kolam pelabuhan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang (X16)	a : Apakah tidak tersedianya fasilitas pemecah gelombang menyebabkan kegiatan berlabuh kapal perikanan tidak berjalan dengan lancar?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas pemecah gelombang di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X17)	a : Bagaimanakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas.
		2	Mampu menyediakan fasilitas, tanpa memelihara fasilitas.
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.
	b : Apakah keberhasilan mengelola PPI Bulu dipengaruhi oleh kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	c : Apakah ketidakmampuan menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	3	Tidak Setuju.
		1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Ketersediaan dana (X18)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah untuk mengelola fasilitas yang mendukung aktivitas berlabuh kapal di PPI Bulu harus ditopang dengan dana dari Pemerintah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Volume ikan (X21)	a : Apakah volume ikan yang didaratkan di PPI Bulu mendukung fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
	b : Apakah keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan dipengaruhi oleh jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI (X22)	a : Bagaimanakah kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI?	1	Tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi TPI.
		2	Cukup mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI tetapi tidak melalui jalan penghubung.
		3	Mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI dan melalui jalan penghubung.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	b : Apakah kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI mendukung keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	c : Apakah tidak adanya jalan penghubung dapat mempersulit pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas dermaga (X23)	a : Apakah ketersediaan fasilitas dermaga mendukung kegiatan bongkar muat ikan di PPI Bulu?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya fasilitas dermaga di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan (X24)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penampungan ikan di PPI Bulu?	1.	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat penampungan ikan
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat penampungan ikan
	b : Apakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X25)	a : Bagaimanakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas.
		2	Mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas.
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.
	b : Apakah kemampuan aparatur kelembagaan Dinas	1	Setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan dana (X26)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan PPI Bulu berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah untuk mengelola fasilitas yang melayani bongkar muat ikan di PPI Bulu harus ditopang dengan dana dari Pemerintah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan (X31)	a : Bagaimana aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu?	1	Tidak ada aktivitas penanganan di PPI
		2	Tidak lengkap meliputi < 4 aktivitas penanganan.
		3	Lengkap meliputi 4 aktivitas yaitu pemilahan, penimbangan, pengawetan, dan pengepakan.
	b : Apakah aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan (X32)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan untuk menangani ikan hasil tangkapan di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas
		2	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani sebagian aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, atau pengepakan ikan hasil tangkapan
		3	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani seluruh aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, dan pengepakan ikan hasil tangkapan.
	b : Apakah ketersediaan gedung pelelangan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih (X33)	a : Bagaimana ketersediaan fasilitas instalasi air bersih di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas instalasi air bersih
		2	Fasilitas tersedia tetapi hanya berfungsi untuk pembersihan ikan atau pembersihan lantai gedung pelelangan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk pembersihan ikan serta pembersihan lantai gedung pelelangan
	b : Apakah ketersediaan instalasi air bersih menyebabkan PPI Bulu tidak menjadi pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas pabrik es (X34)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas pabrik es di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas pabrik es
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.
		3	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.
	b : Apakah ketersediaan pabrik es menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas gudang dingin (X35)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gudang dingin di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas gudang dingin
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas gudang dingin berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
Ketersediaan fasilitas drainase (X36)	a : Apakah ketersediaan saluran drainase di kawasan PPI Bulu mendorong kelancaran penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan ditentukan oleh ketersediaan fasilitas drainase?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI (X37)	a : Bagaimanakah kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI dalam menyediakan fasilitas instalasi air bersih, pabrik es, gudang dingin, dan drainase?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas.
		2	Mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas.
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.
	b : Apakah kemampuan BPPPI dalam mengelola fasilitas penanganan ikan mempengaruhi fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan dana (X38)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan PPI Bulu berpengaruh pada kelancaraan aktivitas penanganan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah tidak tersedianya dana fasilitas penanganan ikan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Aktivitas Pemasaran (X41)	a : Bagaimana anda melakukan aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan?	1	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
		2	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI dan luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
		3	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
	b : Apakah aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan dari PPI mendukung fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Lembaga pemasaran (X42)	a : Apakah saluran pemasaran yang efektif menyebabkan keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah panjangnya saluran pemasaran menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Informasi pasar dan harga (X43)	a : Bagaimanakah ketersediaan informasi pasar dan harga di PPI Bulu?	1	Tidak menyediakan informasi pasar dan harga.
		2	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran atau pergerakan arus barang dan harga.
		3	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga.
	b : Apakah ketersediaan informasi pasar dan harga di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil menjadi pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan (X44)	a : Bagaimanakah kemudahan mendistribusikan produksi perikanan PPI Bulu ke daerah pemasaran tangkapan ikan?	1	Tidak mudah dengan tidak tersedia jaringan jalan dan moda transportasi darat.
		2	Cukup mudah dengan ketersediaan jaringan jalan atau moda transportasi darat.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	b : Apakah ketersediaan moda transportasi dan jaringan jalan ke lokasi pusat – pusat pemasaran tangkapan ikan mendukung fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	3	Mudah dengan ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi darat.
		1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan (X45)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan di PPI Bulu?	1	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan.
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas gedung pelelangan sebagai tempat transaksi jual beli ikan mendukung fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas areal parkir (X46)	a : Bagaimanakah ketersediaan fasilitas areal parkir di PPI Bulu ?	1	Tidak tersedia fasilitas areal parkir
		2	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan.
		3	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan
	b : Apakah ketersediaan fasilitas areal parkir di PPI Bulu menyebabkan PPI tidak berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Ketersediaan fasilitas jalan penghubung (X47)	a : Apakah ketersediaan fasilitas jalan penghubung memperlancar aktivitas pengangkutan ikan di PPI Bulu?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	b : Apakah ketersediaan jalan penghubung di PPI Bulu menyebabkan PPI tidak berhasil sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI (X48)	a : Bagaimanakah kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas gedung pelelangan, areal parkir, dan jalan penghubung?	1	Tidak mampu menyediakan fasilitas
		2	Mampu menyediakan tanpa memelihara fasilitas
		3	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas
	b : Apakah kemampuan BPPPI Bulu mengelola fasilitas pemasaran hasil perikanan mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Ketersediaan dana (X49)	a : Apakah ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas pemasaran ikan di PPI menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan ?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
	b : Apakah untuk mengelola fasilitas yang melayani pemasaran ikan dengan sistem lelang di PPI Bulu diperlukan dana yang tidak sedikit?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Penyuluhan (X51)	a : Apakah saudara pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu?	1	Tidak pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu
		2	Mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan.
		3	Mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan dan prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.
	b : Apakah penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Pengumpulan data (X52)	a : Menurut saudara apakah PPI Bulu bisa berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	1	Setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	b : Apakah pengumpulan data di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat penyuluhan dan pengumpulan data?	2	Kurang Setuju
		3	Tidak setuju.
		1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan penyuluh perikanan (X53)	a : Menurut saudara, bagaimana aparaturnya penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan?	1	Hanya mampu meyakinkan
		2	Mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan
		3	Mampu meyakinkan, mengakomodasi masalah di bidang perikanan dan mampu menghubungkan masyarakat perikanan dengan sumber informan.
	b : Apakah kemampuan aparaturnya penyuluh perikanan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kelompok masyarakat perikanan (X54)	a : Apakah saudara telah bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan di PPI Bulu?	1	Belum bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan.
		2	Bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan tetapi hanya sebagai formalitas.
		3	Bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan dan berperan aktif dalam penyuluhan.
	b : Apakah keberadaan kelompok masyarakat perikanan mendukung PPI Bulu tidak menjadi pusat pelaksanaan penyuluhan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	a : Apakah ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan mendukung penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu?	1	Setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan di PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan?	1	Setuju.
	2	Kurang Setuju.	
	3	Tidak setuju.	
Ketersediaan fasilitas kantor administrasi (X56)	a : Apakah ketersediaan fasilitas kantor administrasi mendukung fungsi PPI Bulu dalam kegiatan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah ketersediaan fasilitas kantor administrasi menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil dalam pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI (X57)	a : Apakah kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI mengelola fasilitas balai pertemuan nelayan dan kantor administrasi mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu yang tidak mampu menyediakan fasilitas menjadi penyebab PPI Bulu kurang berhasil menyelenggarakan penyuluhan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Ketersediaan dana (X58)	a : Apakah dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas balai pertemuan nelayan dan kantor administrasi PPI Bulu diperlukan untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	b : Apakah keterbatasan dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Penjualan ikan hasil tangkapan (X61)	a : Menurut saudara, apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
	b : Apakah penjualan ikan hasil tangkapan PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Pembayaran ikan hasil tangkapan(X62)	a : Bagaimana cara pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu?	1	Hasil penjualan dibayar beberapa hari setelah ikan habis terjual.
		2	Hasil penjualan dibayar lunas setelah ikan habis terjual.
		3	Hasil penjualan langsung dibayar lunas oleh pembeli.
	b : Apakah cara pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Peraturan penyelenggaraan lelang (X63)	a : Bagaimanakah sikap saudara terhadap penerapan kebijakan KUD dalam penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu?	1	Tidak mendukung
		2	Mendukung tetapi menjalankan sebagian
		3	Mendukung dan menjalankan sepenuhnya
	b : Apakah penerapan aturan penyelenggaraan pelelangan ikan di PPI Bulu mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan lelang ikan PPI Bulu?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
	c : Apakah aturan penyelenggaraan lelang di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Peran serta masyarakat (X64)	a : Apakah saudara pernah terlibat memberikan masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu?	1	Tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan.
		2	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tetapi tidak terealisasi.
		3	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan dan terealisasi
	b : Apakah keterlibatan saudara dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak mampu membentuk harga secara lelang?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak Setuju.
Kemampuan aparatur kelembagaan KUD (X65)	a : Bagaimana kemampuan aparatur lembaga KUD terhadap pengelolaan PPI Bulu?	1	Tidak menyelenggarakan lelang ikan dan tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
		2	Menyelenggarakan lelang ikan tetapi tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
		3	Menyelenggarakan lelang ikan, melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.
	b : Apakah kemampuan aparatur lembaga KUD terhadap PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak mampu sebagai fasilitator pembentukan harga?	1	Setuju
		2	Kurang setuju
		3	Tidak setuju
Pendapatan responden nelayan (X71)	a : Bagaimanakah peningkatan pendapatan saudara saat ini?	1	Menurun
		2	Tetap

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
		3	Meningkat
	b : Apakah perolehan pendapatan saudara/i menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang setuju.
		3	Tidak setuju.
Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga (X72)	a : Bagaimanakah peningkatan kemampuan saudara/i dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga?	1	Menurun
		2	Tetap
		3	Meningkat
	b : Apakah kemampuan saudara/i memenuhi kebutuhan hidup keluarga menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Penjualan ikan hasil tangkapan (X73)	a : Apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Penerimaan retribusi (X81)	a : Apakah keberhasilan PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah dilihat dari penerimaan retribusi pelelangan ikan PPI Bulu untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tuban dari PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.

Variabel Yang Diujikan	Pertanyaan	Skala	Indikator Skala Pengukuran
		3	Tidak setuju.
Penjualan ikan hasil tangkapan (X82)	a : Apakah cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
	b : Apakah sistem penjualan ikan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban?	1	Setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Tidak setuju.
Koordinasi antara Pemerintah dengan KUD (X83)	a : Bagaimanakah koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu?	1	Tidak ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan
		2	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan hanya sebagai formalitas.
		3.	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan terealisasi.
	b : Apakah koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah?	1	Tidak setuju.
		2	Kurang Setuju.
		3	Setuju.

Sumber : Hasil pemikiran, tahun 2006

b. Menentukan Bentuk Matriks Korelasi

Proses analisis didasarkan pada suatu matriks korelasi agar variabel pendalaman yang berguna bisa diperoleh dari penelitian matriks ini. Agar analisis faktor bisa tepat digunakan maka variabel-variabel yang akan dianalisis harus berkorelasi. Dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan antara variabel dan tidak membedakan jenis variabel dependen ataupun independen. Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang terdiri dari *Pearson*, *Spearman* dan *Kendall*. Jika sampel data lebih dari 30 (sample besar) sebaiknya menggunakan korelasi *Pearson* (karena memenuhi asumsi parametrik). Jika sampel data kurang dari 30 (sample kecil) maka sebaiknya menggunakan korelasi *Spearman* atau *Kendall* (karena memenuhi asumsi non-parametrik).

Apabila koefisien korelasi antar variabel terlalu kecil, hubungan lemah, analisis faktor tidak tepat. Diharapkan variabel asli berkorelasi dengan sesama variabel lainnya. Juga berkorelasi dengan faktor sebagai variabel baru yang disaring dari variabel – variabel asli. Banyaknya faktor lebih sedikit daripada banyaknya variabel.

Untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan menggunakan pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis dengan dasar hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis :

Ho : Tidak ada hubungan antara (korelasi) antara dua variabel

Hi : Ada hubungan (korelasi) antara dua variabel; atau angka korelasi tidak 0.

Dasar pengambilan keputusan

- Ho di terima, tidak ada hubungan jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom $\text{sig.}(2\text{-tailed}) > \text{level of significant } (\alpha) = 0,05$.
- Ho di tolak, ada hubungan jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, atau nilai $p\text{-value}$ pada kolom $\text{sig.}(2\text{-tailed}) < \text{level of significant } (\alpha) = 0,05$.

Setelah mengetahui adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut maka pada tahap analisa selanjutnya adalah perhitungan untuk mengetahui seberapa besar derajat keterkaitan variabel dengan tetap berpedoman pada hasil uji. Sedangkan untuk memperoleh seberapa kuat atau lemahnya hubungan pengaruh, maka digunakan pedoman:

Tabel 3.13
Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Kualifikasi
0.00 – 0.199	Lemah Sekali
0.20 – 0.399	Lemah
0.40 – 0.599	Cukup
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 10.00	Sangat Kuat

Sumber: Singgih, 2000 : 125

Hubungan antar variabel biasanya disebut dengan koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk memeriksa arah dan kuatnya hubungan setiap variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien adalah plus (+) atau minus (-) yang menunjukkan arah korelasi. Makna sifat korelasi (Nugroho, 2005: 36) antara lain :

1. Korelasi positif (+) berarti jika variabel x_1 mengalami kenaikan maka variabel x_2 juga akan mengalami kenaikan atau jika variabel x_2 mengalami kenaikan maka variabel x_1 juga akan mengalami kenaikan.
2. Korelasi negatif (-) berarti jika variabel x_1 mengalami kenaikan maka variabel x_2 mengalami penurunan atau jika variabel x_2 mengalami kenaikan maka variabel x_1 akan mengalami penurunan.

Adapun matriks korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.13

Tabel 3.14
Matrix Korelasi

Variabel	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
X ₁							
X ₂							
X ₃							
X ₄							
X ₅							
X ₆							
X ₇							

Sumber: Supranto (2004 : 125)

c. Menentukan Metode Analisis Faktor

Metode yang biasanya dipergunakan dalam analisis faktor, yaitu *principal components analysis* dan *common faktor analysis*.

d. Penentuan Banyaknya Faktor

Maksud melakukan analisis faktor adalah mencari variabel baru yang disebut faktor yang saling tidak berkorelasi, bebas satu sama lainnya, lebih sedikit jumlahnya daripada variabel asli, akan tetapi bisa menyerap sebagian besar informasi yang

terkandung dalam variabel asli atau yang dapat memberikan sumbangan terhadap varian seluruh variabel.

Terdapat beberapa kriteria yang dapat dipergunakan untuk menentukan banyaknya faktor, yaitu:

1.) Akar ciri (*Eigenvalues*)

Suatu *eigenvalues* menunjukkan besarnya sumbangan dari faktor terhadap varian seluruh variabel asli. Hanya faktor dengan varian lebih besar dari satu (> 1) yang dimasukkan dalam model. Faktor dengan varian lebih kecil dari satu (< 1) tidak lebih baik dari asli, sebab variabel asli telah dibakukan (*standardized*) yang berarti rata-ratanya nol dan variannya satu (Supranto, 2004 : 128).

2.) Persentase Keragaman (*Percentage of Variances*)

Kriteria persentase keragaman ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada persentase kumulatif dari keragaman total yang dapat dijelaskan (*cumulative percentage of total variance extracted*) oleh faktor. Banyaknya faktor yang diekstraksi ditentukan sedemikian rupa sehingga kumulatif persentase varian yang diekstraksi oleh faktor mencapai suatu level tertentu yang memuaskan. Pedoman yang disarankan ialah bahwa ekstraksi faktor dihentikan jika kumulatif persentase varian sudah mencapai paling sedikit 60% atau 75% dari seluruh variabel asli (Supranto, 2004 : 129-130).

3.) *Scree Plot*

Scree plot merupakan suatu plot dari *eigenvalue* sebagai fungsi banyaknya faktor, dalam upaya untuk ekstraksi. Bentuk *scree plot* dipergunakan untuk menentukan banyaknya faktor. Bentuk *scree plot* adalah diagram pencar dalam ruang dua dimensi dimana sumbu horisontal menyatakan nomor urut faktor dan sumbu vertikal menyatakan besarnya nilai eigen. Diagram ini memiliki bagian terjal di sebelah kiri dan bagian landai di sebelah kanan. Melihat bentuk *scree plot*, faktor yang dipergunakan adalah faktor yang diagramnya terletak di sebelah kiri sampai dengan titik dimana terjadi perubahan dari terjal ke landai.

e. Melakukan Rotasi

Metode rotasi yang banyak dipergunakan adalah *varimax procedure*. Prosedur ini merupakan metode orthogonal yang berusaha meminimumkan banyaknya variabel

dengan muatan tinggi pada satu faktor, dengan demikian memudahkan pembuatan interpretasi mengenai faktor.

f. **Menginterpretasikan Faktor**

Interpretasi faktor dapat dilihat pada output SPSS melalui *Total Variance Explained* yang menunjukkan kemampuan faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan suatu definisi atau variabel dan *Component Matrix* yang memperlihatkan faktor-faktor dimensi yang merupakan faktor dalam suatu variabel.

3.6.4 Analisis Akar Masalah

Melalui analisis akar masalah juga dapat diketahui penyebab adanya permasalahan yang terjadi di PPI Bulu. Analisis ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dimana penyebab permasalahan diuraikan secara deskriptif melalui pohon akar masalah. Dengan teknik analisis akar masalah dapat diketahui penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah hanya dapat dilihat secara pintas.

A. Pengertian

Teknik analisis akar masalah sering disebut sebagai analisa akar atau pohon masalah karena melalui teknik ini, dapat melihat ‘akar’ dari suatu masalah. Dan kalau sudah dilaksanakan, hasil dari teknik ini kadang – kadang mirip pohon dengan akar banyak. Analisis akar masalah sering dipakai dengan masyarakat sebab sangat visual dan dapat melibatkan banyak orang dengan waktu yang sama. Teknik dapat dipakai dengan situasi yang berbeda, tapi lebih penting dari itu, dapat dipakai dimana saja ada masalah tetapi penyebab masalah tersebut kurang jelas.

B. Manfaat

Melalui teknik ini, orang yang terlibat dalam hal memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah hanya dapat dilihat secara pintas. Teknik analisis akar masalah dapat melibatkan orang setempat yang tahu secara mendalam masalah yang ada.

C. Langkah Pembuatan

Masalah utama yang ingin diatasi ditulis di kartu metaplan, lalu ditempel di lantai sebagai ‘batang akar’. Mulai dari batang, membuka diskusi mengenai penyebab – penyebab. Dari setiap penyebab yang muncul, ditanya lagi ‘kenapa begitu? Apa

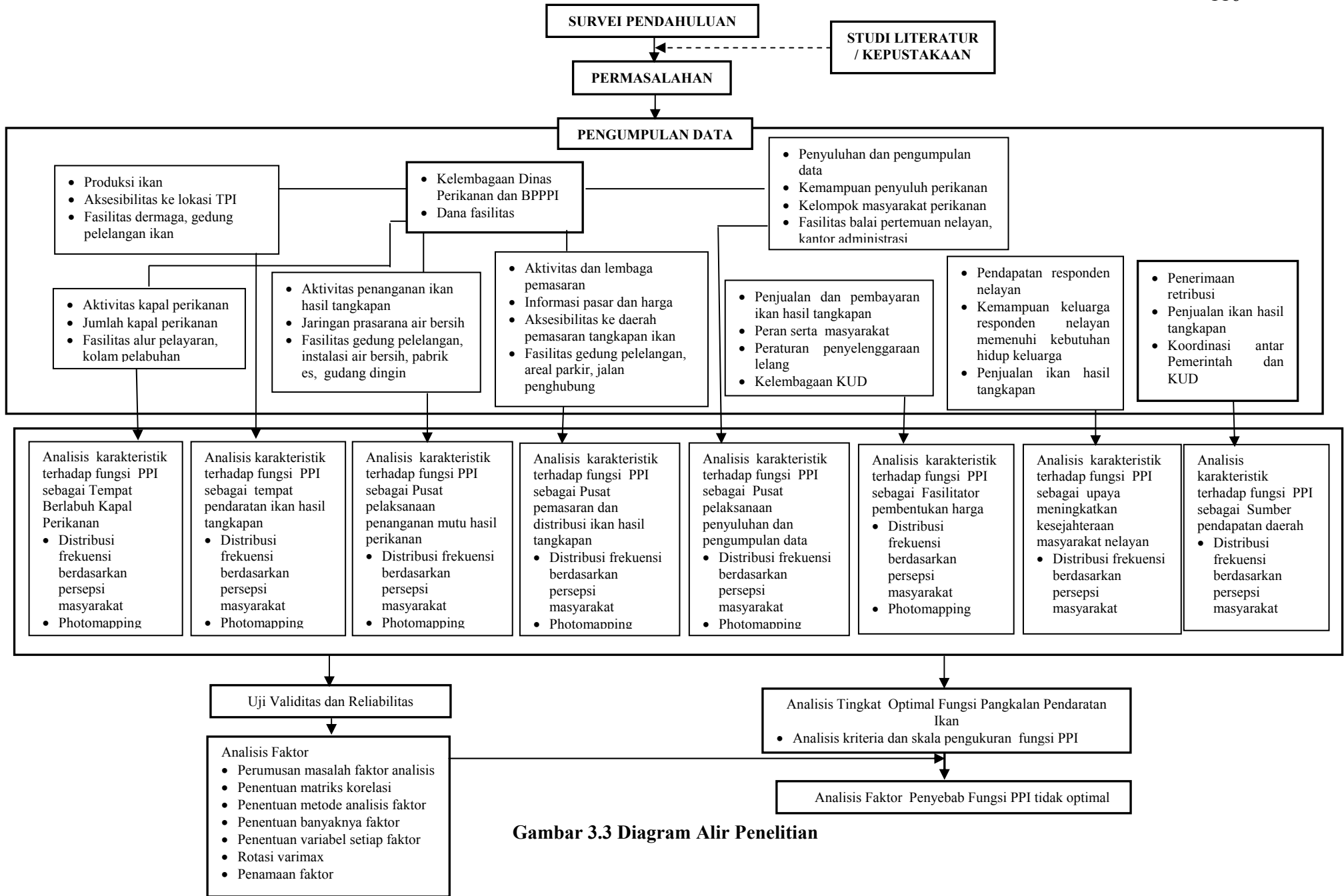
penyebabnya?'. Untuk mempermudah cara pikir, dan mencek bahwa tidak ada yang dilupa, menganggap bahwa setiap masalah adalah akibat dari kondisi lain – tanyalah ‘Kondisi ini adalah akibat dari apa? Akhirnya akan muncul gambar yang lengkap mengenai penyebab – penyebab dan akibatnya hasilnya akan sangat terinci. Komentar apa saja yang dikeluarkan sebagai penyebab dapat ditulis supaya makin komplit. Setelah selesai, semua komentar bisa dikaji kembali.

Akhirnya akan muncul satu gambar yang lengkap dan terinci dengan akar yang diwakili oleh penyebab masalah, dan akibat dari masalah tersebut. Setelah gambar selesai dan akar telah dibahas sampai mendalam, maka akhirnya masalah terakhir dalam satu akar dapat terlihat. Kesimpulan dari tahapan pembuatan dapat secara ringkas diuraikan seperti urutan di bawah ini (Modul Studio Perencanaan Desa (Dwi, *et al*, 2001: VII-1s/d3)):

1. Mengidentifikasi masalah utama (yang perlu dipecahkan)
2. Mengidentifikasi penyebab masalah tersebut (curah pendapat)
3. Mengelompokkan sebab – sebab tersebut
4. Mengidentifikasi tingkatan penyebab (I, II, III)
5. Menentukan tujuan dan harapan (keluaran)
6. Memprioritaskan penyebab yang paling mendesak
7. Memprioritaskan harapan yang paling efektif, mudah dan realistis untuk dicapai
8. Menyusun rencana kegiatan – ingatlah ‘5W dan 1 H’

3.7 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian merupakan langkah – langkah yang harus dilalui atau dikerjakan dalam penelitian agar lebih teratur dan terarah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Berikut ini adalah diagram alir penelitian,



Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian

3.8 Desain Survei

Desain survei ini memuat tahapan pelaksanaan survey agar pelaksanaan survey menjadi lebih terarah dan sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. Lebih jelas tentang desain survei dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut,

Tabel 3.15 Desain Survei

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
Mengidentifikasi karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu	Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas berlabuh kapal perikanan Jumlah responden nelayan yang mendaratkan kapal di PPI dan luar PPI Tingkat pengaruh aktivitas kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> Analisis distribusi frekuensi berdasarkan persepsi masyarakat Photomapping sebagai pelengkap secara visual dan spasial 	Karakteristik fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu
		Jumlah kapal perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kapal perikanan yang berlabuh. Tingkat pengaruh jumlah kapal perikanan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey sekunder BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Kondisi perairan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi perairan untuk operasi kapal perikanan Tingkat pengaruh kondisi perairan terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey primer BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan		
		Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas alur pelayaran. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas alur pelayaran terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pemecah gelombang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. 			
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang. Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas kolam pelabuhan dan alur pelayaran. 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan. Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
	Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	<ul style="list-style-type: none"> Produksi ikan Tingkat pengaruh produksi ikan yang didaratkan di PPI terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	<ul style="list-style-type: none"> Cara dan jarak pengangkutan ikan hasil tangkapan dari tempat pendaratan kapal ke lokasi TPI Tingkat pengaruh kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas dermaga.	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas dermaga. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas dermaga terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI terhadap keberhasilan mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan. Tingkat pengaruh ketersediaan dana fasilitas dalam mendukung penyediaan fasilitas dermaga dan gedung pelelangan. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
	Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan. Tingkat pengaruh aktivitas penanganan dalam mendukung keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penanganan ikan. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan instalasi air bersih. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas instalasi air bersih terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas pabrik es	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas pabrik es . Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas pabrik es terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chi</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas gudang dingin. Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas gudang dingin terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Ketersediaan fasilitas drainase	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan fasilitas drainase Tingkat pengaruh ketersediaan fasilitas drainase terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan hasil tangkapan. Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
	Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan • Tingkat pengaruh aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan terhadap pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi		
		Lembaga pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pemasaran dalam penyaluran hasil perikanan. • Tingkat pengaruh saluran pemasaran terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara.		
		Informasi pasar dan harga	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi pasar dan harga • Tingkat pengaruh informasi pasar dan harga terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara.		
		Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak, waktu dan cara pengangkutan ikan hasil tangkapan ke daerah pemasaran ikan. • Tingkat pengaruh aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara.		
		Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan sebagai tempat yang memperlancar jual beli lelang di PPI • Tingkat pengaruh fasilitas gedung pelelangan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi.		
		Ketersediaan fasilitas areal parkir	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan fasilitas areal parkir • Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi.		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan fungsi fasilitas areal parkir • Tingkat pengaruh fasilitas areal parkir terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi.		
		Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. • Tingkat pengaruh kemampuan aparatur kelembagaan mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan 	Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana pengelolaan fasilitas pemasaran ikan hasil tangkapan. • Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran hasil perikanan. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
	Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan penyuluhan • Tingkat pengaruh penyelenggaraan penyuluhan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data perikanan • Tingkat pengaruh pengumpulan data dan informasi pada keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
		Kemampuan penyuluh perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparaturnya dalam memberikan penyuluhan perikanan Tingkat pengaruh kemampuan aparaturnya terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 	<p>Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara.</p> <p>Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara</p>		
		Kelompok masyarakat perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok masyarakat perikanan Tingkat pengaruh keberadaan kelompok masyarakat perikanan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	<p>Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara.</p> <p>Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara</p>		
		Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan fungsi fasilitas balai pertemuan nelayan Tingkat pengaruh fasilitas balai pertemuan nelayan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	<p>Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi.</p>		
		Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan fungsi fasilitas tempat pelelangan ikan Tingkat pengaruh fasilitas tempat pelelangan ikan terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data 	<p>Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner, wawancara dan observasi.</p>		
		Kemampuan aparaturnya Dinas Perikanan dan BPPPI	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparaturnya dalam mengelola fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Tingkat pengaruh kemampuan aparaturnya mengelola fasilitas PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 	<p>Survey primer ke Dinas Perikanan Kab. Tuban, BPPPI Bulu dengan metode wawancara.</p> <p>Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara</p>		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
	Fasilitator pembentuk an harga	Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana untuk menyediakan, memelihara dan memperbaiki fasilitas pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Tingkat pengaruh ketersediaan dana pemeliharaan fasilitas terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 	Survey primer ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara.		
		Penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> Proses jual beli ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Pembayaran ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> Cara pembayaran ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh cara pembayaran ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Peraturan penyelenggaraan lelang	<ul style="list-style-type: none"> Aturan penyelenggaraan lelang yang berlaku Tingkat pengaruh aturan penyelenggaraan lelang terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke KUD dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan penyelenggaraan lelang ikan Tingkat pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan penyelenggaraan lelang ikan terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara		
		Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan lembaga KUD dalam menjalankan tugasnya Tingkat pengaruh kemampuan lembaga KUD terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. 	Survey primer ke KUD dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisisioner dan wawancara.		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan responden nelayan dan kecenderungan peningkatannya Tingkat pengaruh pendapatan responden nelayan terhadap keberhasilan fungsi PPI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara		
		Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kecenderungan peningkatannya Tingkat pengaruh kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam mendukung keberhasilan PPI meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara		
		Penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> Proses jual beli ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap keberhasilan fungsi PPI meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara		
	Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan retribusi pelelangan ikan Tingkat pengaruh penerimaan retribusi lelang terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah 	Survey sekunder ke BPPPI Bulu dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara.		
		Penjualan ikan hasil tangkapan	<ul style="list-style-type: none"> Proses jual beli ikan hasil tangkapan Tingkat pengaruh proses jual beli ikan hasil tangkapan terhadap fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah. 	Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara		
		Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu. Tingkat pengaruh koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD TPI Bulu dalam penyaluran retribusi lelang terhadap PPI sebagai sumber pendapatan daerah. 	Survey sekunder ke Dinas perikanan Tuban dan KUD dengan metode wawancara. Survey primer ke masyarakat dengan metode kuisioner dan wawancara.		

Tujuan	Variabel	Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Metode Perolehan Data	Metode Analisis	Output
Mengevaluasi tingkat optimal fungsi PPI	Variabel dan subvariabel yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik fungsi PPI				Analisis kriteria fungsi PPI dengan skala pengukuran.	Tingkat optimal fungsi PPI
Menentukan faktor penyebab fungsi PPI Bulu tidak optimal	Subvariabel yang digunakan dalam mengidentifikasi karakteristik fungsi PPI				Teknik Analisis Faktor dan Analisis Akar Masalah	Faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal

Sumber : Hasil Pemikiran, Tahun 2007

3.1	Jenis Penelitian	59
3.2	Penentuan Lokasi Wilayah Penelitian	60
3.3	Penentuan Sampel Penelitian.....	62
3.4	Penentuan dan Pemilihan Variabel Penelitian.....	64
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	79
3.5.1	Data Primer	79
3.5.2	Data Sekunder	85
3.6	Metode Analisis Data	88
3.6.1	Analisis Karakteristik Terhadap Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	89
3.6.2	Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan.....	91
3.6.3	Analisis Faktor	98
3.6.4	Analisis Akar Masalah	119
3.7	Diagram Alir Penelitian.....	119
3.8	Desain Survei.....	120
Tabel 3.1	Penyebaran Kuisisioner di Wilayah Penelitian	53
Tabel 3.2	Proses Penentuan Variabel Penelitian.....	66
Tabel 3.3	Indikator Variabel Penelitian	72
Tabel 3.4	Data Observasi Lapangan	80
Tabel 3.5	Data Kuisisioner	81
Tabel 3.6	Data Wawancara.....	84
Tabel 3.7	Data Studi Kepustakaan.....	86
Tabel 3.8	Data Organisasi/Instansi	87
Tabel 3.9	Kriteria dan Skala Pengukuran Fungsi PPI.....	91
Tabel 3.10	Skala Likert Yang Dipergunakan Dalam Penelitian.....	10
Tabel 3.11	Pertanyaan dan Skala Likert pada Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan	101
Tabel 3.12	Koefisien Korelasi	118
Tabel 3.13	Matriks Korelasi	118
Tabel 3.14	Desain Survei.....	120
Gambar 3.1	Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	61

Gambar 3.2 Tahapan Analisis Faktor 99
Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian 119

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban memiliki kawasan pantai sepanjang 65 Km yang terdiri dari lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar dengan luas wilayah sebesar 11.245,03 Ha. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dengan luas lahan sebesar 1,8 Ha adalah Pelabuhan Perikanan Type D yang berada di Kabupaten Tuban.

A. Kebijakan Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Tuban perlu adanya suatu kebijakan di tiap-tiap sektor pembangunan, salah satunya adalah kebijakan pembangunan bidang Perikanan dan Kelautan sehingga arahan yang akan dicapai dapat lebih terarah. Berdasarkan RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005-2015 maka kebijakan pembangunan bidang Perikanan dan Kelautan tersebut adalah :

- a. Mengembangkan pengelolaan perikanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengoptimalkan penerapan teknologi tepat guna.
- c. Mengembangkan distribusi dan pemasaran untuk kestabilan harga.
- d. Pembangunan kelautan diarahkan pada berdayagunanya sumberdaya laut Kabupaten Tuban secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestarian ekosistemnya untuk meningkatkan kesejahteraan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- e. Pengusahaan potensi kelautan menjadi berbagai kegiatan ekonomi.
- f. Dalam upaya pengembangan kelautan perlu diberikan perhatian khusus pada pengembangan kawasan pesisir secara tepat dengan mengutamakan kepentingan umum dan masyarakat setempat.

B. Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban mencantumkan rencana strategis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban tahun 2005 - 2010 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Mendorong pengembangan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang harus dikelola secara berkelanjutan, guna kemakmuran nelayan/petani ikan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maju dan mandiri

2. Misi

- a. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan berkelanjutan;
- b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- c. Peningkatan penyediaan bahan pangan sumber protein hewani dan bahan baku industri;
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta aparatur dinas;
- e. Peningkatan pendapatan nelayan/petani;
- f. Pemulihan dan perlindungan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan serta kaitannya dengan lingkungan hidup;
- g. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif

3. Tujuan

- a. Peningkatan ekspor hasil perikanan
- b. Peningkatan konsumsi ikan
- c. Pemberdayaan nelayan dan petani ikan
- d. Rehabilitasi dan pengendalian, pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan

4. Sasaran :

1. Meningkatkan produksi perikanan sebesar 5%
2. Meningkatkan penghasilan nelayan ikan rata – rata 5%
3. Meningkatkan penghasilan petani ikan rata – rata 5%
meningkatkan produksi benih ikan dan udang 1%
4. Meningkatkan konsumsi ikan penduduk rata – rata sebesar 3,85%(kg/kap/th)
5. Meningkatkan armada perikanan bermotor tempel sebesar 1,7%
6. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah sebesar 3,5%

B. Perikanan Tangkap

1. Produktivitas Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap Kabupaten Tuban merupakan salah satu potensi sektor perikanan Kabupaten Tuban yang dihasilkan dari lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Pada tahun 2000 hingga tahun 2005 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah produksi ikan yang didaratkan di Kabupaten Tuban. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut,

Tabel 4.1 Jumlah dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban Tahun 2000 - 2005

Kabupaten Tuban			PPI Bulu	
Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2000	8609	-	445	-
2001	9262	7,5	306	-31,24
2002	9847	6,3	153	-49,89
2003	9384	-4,7	1.523	892,75
2004	9337	-0,5	3.802	149,52
2005	9360	0,2	4.507	18,53
Rata – rata pertumbuhan jumlah produksi (%/tahun)		1,76		195,9

Sumber : - Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2005
- Laporan Tahunan Badan Pengelola PPI Bulu Tahun 2000 - 2005

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah dan perkembangan produksi perikanan tangkap diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut, rata – rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 1,76% dengan penurunan terbesar pada tahun 2003 sebesar 4,7% kemudian pada tahun 2004 sebesar 0,5%. Berbeda halnya dengan produksi ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, rata – rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 195,9%, jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bulu pada tahun 2003 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 892,75% kemudian hingga tahun 2005 sebesar 18,53%.

2. Perekonomian Perikanan Tangkap

Hasil tangkapan ikan yang daratkan dan dilelang akan menghasilkan nilai retribusi pelelangan ikan sehingga memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Tuban. Perkembangan nilai pelelangan perikanan tangkap Kabupaten Tuban tahun 2000 hingga tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Perkembangan Nilai Pelelangan Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban Tahun 2000 – 2005

Kabupaten Tuban				PPI Bulu		
Tahun	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2000	719	3.039.010.150	-	445	127.000.750	11,2
2001	807	4.221.714.220	38,92	306	111.000.785	-12,59
2002	664	2.326.290.000	-44,89	153	40.607.437	-63,42
2003	557	2.381.036.000	2,35	1.523	-	-
2004	797	2.501.872.000	5,07	3.802	-	-
2005	642	2.218.274.000	-11,33	4.507	-	-
Rata – rata pertumbuhan (%/tahun)			-1,98			-12,96

Sumber : - Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2005
 - Laporan Tahunan Badan Pengelola PPI Bulu Tahun 2000 - 2005

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperlihatkan rata – rata pertumbuhan nilai pelelangan perikanan tangkap menurun sebesar 1,98% pertahun dengan penurunan terbesar pada tahun 2002, yaitu 44,89 %. Jika dibandingkan dengan PPI Bulu dalam kurun waktu yang sama, rata – rata pertumbuhan pelelangan ikan di PPI Bulu menurun sebesar 12,96% dengan penurunan awal pada tahun 2001 dan terus menurun sejak tahun 2003 hingga saat ini produksi ikan yang didaratkan di PPI Bulu dijual tanpa melalui proses pelelangan ikan sehingga tidak ada nilai retribusi.

3. Fasilitas Perikanan

Fasilitas perikanan yang menjadi tempat pendaratan kapal dan tempat pelelangan hasil tangkapan ikan di Kabupaten Tuban adalah Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat pelelangan Ikan (TPI) yang lokasinya terdapat di sentra-sentra kegiatan nelayan, yaitu :

- a. 1 unit Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Bulumeduro
- b. 1 unit Pangkalan Perahu di Desa Gesikharjo
- c. 1 unit Pangkalan Perahu di Desa Kradenan
- d. 2 unit TPI di Desa Karangagung
- e. 1 unit TPI di Desa Beji
- f. 1 unit TPI di Desa Tambakboyoy
- g. 1 unit TPI di Desa Socorejo
- h. 1 unit TPI di Desa Glondonggede
- i. 1 unit TPI di Desa Palang
- j. 1 unit TPI di Desa Mentoso

1 unit PPI di Desa Bulumeduro adalah PPI Bulu yang berada di Kabupaten Tuban, berlokasi di sebelah barat Kabupaten Tuban.

Aktivitas pelelangan hasil tangkapan ikan ditangani oleh unit usaha pelelangan ikan pada masing – masing Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koperasi Unit Desa (KUD) ”Trisno Maneko Karyo” Kecamatan Bancar
- b. Badan Usaha Desa (BUD) ”Mina Bahari Makmur” Kecamatan Tambakboyo
- c. Koperasi Unit Desa (KUD) ”Taman Mina Padi” Kecamatan Tuban
- d. Koperasi Nelayan ”Samudra Jaya” Kecamatan Palang

Aktivitas pelelangan ikan di PPI Bulu ditangani oleh Koperasi Unit Desa (KUD) ”Trisno Maneko Karyo” Kecamatan Bancar

4.2 Tinjauan Kecamatan Bancar

4.2.1 Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Bancar

Kecamatan Bancar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tuban yang berada di kawasan pantai dengan luas wilayah sebesar 2.419,35 ha. Kecamatan Bancar terdiri dari 7 Desa Nelayan, yaitu Desa Bancar, Bogorejo, Boncong, Bulumeduro, Bulujowo, Banjarjo, dan Sukolilo. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tepatnya berada di Desa Bulumeduro. Batas – batas Kecamatan Bancar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tambakboyo
- c. Sebelah Barat : Propinsi Jawa Tengah
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirogo

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 Wilayah administrasi Kecamatan Bancar, gambar 4.2 Lokasi PPI Bulu pada Kecamatan Bancar, dan gambar 4.3 Lokasi PPI Bulu pada Desa Nelayan Kecamatan Bancar

Gambar 4.1 Wilayah Administrasi Kecamatan Bancar

Gambar 4.2 Lokasi PPI Bulu pada Kecamatan Bancar

Gambar 4.3 Lokasi PPI Bulu pada Desa Nelayan Kecamatan Bancar

4.2.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu pola yang di gunakan untuk melihat perbandingan jumlah masing-masing penggunaan. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan lahan di sekitar PPI Bulu yang terdapat di Desa Nelayan Kecamatan Bancar dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Penggunaan Lahan
Desa Nelayan Kecamatan Bancar Tahun 2005**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah	741,6	34,4
2.	Ladang	705,6	32,7
3.	Hutan	19,0	0,8
4.	Tambak	48,2	2,2
5.	Permukiman	370,1	17,2
6.	Industri Perikanan	153,5	7,1
7.	Lain - lainnya	119,2	5,5
	Total	2157,2	100

Sumber : Kecamatan Bancar Dalam Angka, Tahun 2005

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penggunaan lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar berupa sawah dan ladang sebesar 741,6 Ha dan 705,6 Ha. Penggunaan lahan pemukiman sebesar 17,2 % yang berada di sekitar PPI Bulu, yaitu 1- 2 km dari PPI Bulu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.4 Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar.

4.2.3 Sistem Transportasi

A. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan salah satu prasarana yang berfungsi untuk menunjang kelancaran aksesibilitas baik akses masuk maupun akses keluar. Kelancaran aksesibilitas masuk maupun keluar dari Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dapat menunjang kegiatan masyarakat perikanan. Hal ini untuk mendukung pergerakan orang dan barang, yaitu pengiriman modal kerja dan pemasaran produk perikanan.

Jaringan jalan yang melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu merupakan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) yang menghubungkan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2015 status jalan tersebut adalah jalan propinsi dengan fungsi jalan arteri primer. Selain jalan tersebut terdapat jalan yang menghubungkan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dengan desa nelayan dan lingkungan sekitar lainnya, dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan perkerasan jalan yaitu,

1. Jalan Aspal

Jalan aspal ini terletak pada jalan - jalan utama di sepanjang jalur Pantai Utara Jawa yang melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, yaitu sepanjang 3,5 Km dan jalan utama yang menghubungkan antara desa dengan jalur Pantai Utara Jawa. Kondisi jalan ini tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi perkerasan yang terbuat dari aspal, tidak berlubang dan tidak mengganggu kelancaran aktifitas masyarakat perikanan.

2. Jalan Makadam

Jalan makadam ini menghubungkan antara rumah – rumah penduduk pada kawasan pemukiman nelayan dan antara rumah – rumah penduduk dengan jalan utama di sepanjang jalur Pantai Utara Jawa. Panjang jalan 3,3 km dengan kondisi yang baik terlihat dari tidak adanya lubang dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

3. Jalan Tanah

Jalan tanah yang ada merupakan jalan yang terbuat dari perkerasan yang berbahan tanah. Jalan tanah sepanjang 1,3 km banyak ditemukan pada jalan – jalan kecil yang menghubungkan permukiman nelayan dengan sawah atau ladang disekitarnya. Jaringan jalan yang melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dapat dilihat pada gambar 4.5

B. Sistem Perangkutan

Sistem perangkutan merupakan bagian dari sistem transportasi yang harus ada agar sistem transportasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan sistem perangkutan yang baik dapat mempermudah proses pengangkutan orang maupun barang. Sistem perangkutan umum yang melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu diantaranya adalah bus antar propinsi, bus antar kecamatan, dan angkutan pedesaan. Pergerakan masyarakat Desa Nelayan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu menggunakan angkutan pedesaan, mobil pickup dan truck untuk menunjang aktivitas perikanan di kawasan tersebut. Selain itu sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan pribadi untuk beberapa keperluan, misalnya becak, motor dan sepeda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6

Gambar 4.4 Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar

Gambar 4.5 Jaringan Jalan Yang Melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

Gambar 4.6 Perangkutan Yang Melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

4.2.4 Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap menjadi salah satu potensi yang ada di Kecamatan Bancar dengan jumlah produksi pada tahun 2000 hingga tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut,

Tabel 4.4 Jumlah dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kecamatan Bancar Tahun 2000 - 2004

Kecamatan Bancar			PPI Bulu	
Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2000	2987	-	445	-
2001	3852	28,9	306	-31,24
2002	4144	7,5	153	-49,89
2003	4225	1,9	1.523	892,75
2004	4136	-2,1	3.802	149,52
Rata – rata pertumbuhan jumlah produksi (%/tahun)		9,05		195,9

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban Tahun 2000 - 2005

Berdasarkan tabel 4.6 jumlah dan perkembangan produksi perikanan tangkap diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tersebut, rata – rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap Kecamatan Bancar sebesar 9,05% dengan penurunan terbesar pada tahun 2004 sebesar 2,1 %. PPI Bulu merupakan fasilitas perikanan yang berada di PPI Bulu, namun jumlah tangkapan di Kecamatan Bancar tidak seluruhnya ditampung di PPI Bulu. Produksi ikan yang didaratkan di PPI Bulu meningkat pesat pada tahun 2003 sebesar 892,75% dan tahun 2004 masih naik sebesar 149,52%.

4.3 Tinjauan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

A. Lokasi

Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu berlokasi di Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. PPI Bulu dibangun pada tahun 1986 dalam bentuk TPI dan sejak tahun 1993 status meningkat menjadi PPI. Adanya TPI membentuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat perikanan dan menjadi pemicu awal perubahan status TPI menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Lokasi PPI Bulu diantaranya adalah :

- Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu berada di jalur yang strategis. Jaringan jalan yang melewati PPI Bulu merupakan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), yang menghubungkan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2015

status jalan tersebut adalah jalan propinsi dengan fungsi jalan arteri primer dan dibangun sebagai outer ring-road (lingkar luar) bagi Kabupaten Tuban.

- Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dilewati oleh jaringan prasarana (*utilitas*) yang menunjang aktivitas perikanan di PPI, yaitu : air bersih yang bersumber dari instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyuplai air tawar; jaringan listrik yang berasal dari PLN berupa instalasi listrik tegangan menengah dan tegangan rendah; saluran drainase tanpa pendangkalan kotoran/sampah sedangkan sistem pengelolaan sampah belum tersedia sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar pantai membuang sampah ke pantai.
- PPI Bulu berada di perairan pantai yang dangkal pada perkampungan nelayan. Sebelum dibangun fasilitas perikanan berupa TPI telah terbentuk aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan antara nelayan dan pedagang di sepanjang jalan sekitar TPI Bulu.
- PPI Bulu dekat dengan pemukiman nelayan, yaitu 1 – 2 km sehingga strategis sebagai berkumpulnya aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan, penyaluran tenaga kerja perikanan untuk PPI dan sebaliknya penyaluran hasil perikanan ke konsumen.
- PPI Bulu dekat dengan pertokoan alat perikanan yaitu 1- 2 Km. Pertokoan alat perikanan tersebut berjumlah 19 unit yang berlokasi di depan PPI Bulu, yaitu Desa Banjarjo dan Bulumeduro. Beberapa peralatan yang tidak tersedia di pertokoan alat perikanan tersebut, seperti pukot harimau, lampu galaxy dibeli dari Kota Tuban dan Surabaya
- Terdapat pom bensin di sekitar PPI Bulu, yaitu pada jarak 2, 3 dan 5 km dari PPI Bulu. Pencapaian menuju pom bensin dengan alat transportasi becak, sepeda dan sepeda motor.
- Industri pengolahan ikan berada pada jarak 1- 2 km dari PPI Bulu. Tersebar di Desa Boncong, Bulumeduro, Banjarjo, dan Bulujowo

Gambaran mengenai karakteristik lokasi berdirinya PPI Bulu dapat dilihat pada gambar 4.7

Gambar 4.7 Karakteristik Lokasi PPI Bulu

B. Fasilitas

Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu memiliki Luas Lahan sebesar 1,8 Ha dengan berbagai fasilitas untuk mengakomodasi aktivitas nelayan dan pedagang. Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu terdiri dari tiga jenis fasilitas, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang dengan penjabaran pada tabel 4.10 sebagai berikut,

Tabel 4.5 Jenis Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2005

No.	Jenis Fasilitas	Luas
1.	Fasilitas Pokok :	
	Luas tanah komplek	8860 m ²
	Tembok Penahan Tanah (Revetment)	115 m
	Pantai pendaratan	0,3 Ha
	Areal Parkir	175 m ²
	Pagar PPI	233 m ²
2.	Fasilitas Fungsional :	
	Gedung Pelelangan Ikan	162 m ²
	Pabrik Es (10 ton)	250 m ²
	Cold Storage/Chill room (10 ton)	18 m ²
	Gudang peralatan	133 m ²
	Waserda/Kios Agrobisnis	20 m ²
	Instalasi PDAM (sumber air tawar)	3lt/dt
	Instalasi Listrik/PLN	2,2 KVA
	Instalasi telekomunikasi	-
	Bengkel nelayan	84 m ²
	Gedung pengepakan ikan	70 m ²
	Kantor Administrasi	950 m ²
3.	Fasilitas Penunjang :	
	Kantor administrasi	950 m ²
	Pos jaga PPI	12 m ²
	Toko BAP	19 unit
	Perumahan Karyawan	4 unit
	Drainase	86 m ²
	Pemukiman nelayan	-
Pengolah Limbah	2 m ²	

Sumber : Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar

Gambar 4.8 Fasilitas Pangkalan Pebdaratan Ikan Bulu

C. Pengelolaan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu merupakan fasilitas perikanan yang telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dan pedagang guna menunjang kegiatan perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.

Mengingat pentingnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat perikanan Bulu, maka perlu adanya pengelolaan yang baik dan profesional. Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu diperlukan untuk menyediakan fasilitas, mengatur, manajemen penyelenggaraan kegiatan perikanan pada kawasan PPI dengan melibatkan berbagai pengelola (*stakeholder*). Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu meliputi aspek kelembagaan dan pembiayaan.

1. Kelembagaan

Kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola fasilitas perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, yaitu sebagai motivator untuk menciptakan manajemen yang terpadu. Lembaga – lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Tuban, Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu, Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Tani “Tresno Maneko Karyo”.

a. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur

Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur adalah lembaga yang memiliki tugas pokok sebagai Unit Pelaksana Teknis Propinsi Jawa Timur di bidang perikanan dan kelautan. Lembaga tersebut berperan dalam penyediaan sarana – prasarana perikanan untuk melayani kebutuhan masyarakat perikanan. Salah satunya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang telah disediakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Dalam pengelolaan PPI Bulu, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dibantu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan kelautan, Badan Pengelola PPI Bulu dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis program perikanan tangkap dan mengeluarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu.

b. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban adalah lembaga yang memiliki tugas pokok sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan, berfungsi untuk merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan kelautan. Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 01 Tahun 2001 terdiri dari :

- Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
- Unsur Pembantu yaitu Kepala Bagian Tata Usaha
- Unsur Pelaksanaan yaitu Kepala Sub Dinas

Sub bagian dan Seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.

1. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub bagian Program dan Pelaporan
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Dinas Usaha Perikanan membawahi 4 (empat) Seksi :
 - a. Seksi Bina Usaha Perikanan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Perikanan
 - c. Seksi Produksi dan Pemasaran
 - d. Seksi Pengelolaan Budidaya dan Penangkapan
3. Sub Dinas Sumber Hayati Perairan membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
 - c. Seksi Pengendalian Sumberdaya Ikan
4. Sub Dinas Sumberdaya Kelautan membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi
 - b. Seksi Observasi dan Konservasi
 - c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut
5. Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan meliputi :
 - a. Kecamatan Tuban
 - b. Kecamatan Palang

- c. Kecamatan Jenu
 - d. Kecamatan Bancar
 - e. Kecamatan Widang
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan meliputi :
- a. Balai Benih Ikan Desa Banjararum, Kecamatan Rengel
 - b. Balai Benih Ikan Desa Jojogan, Kecamatan Singgahan
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar

Unsur pelaksanaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, mempunyai tugas menyelenggarakan unsur rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan.

Sejak Otonomi Daerah tahun 1998 terkait dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, Dinas Perikanan Kabupaten Tuban memperoleh wewenang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur untuk mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan. Hal ini didasari dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 tahun 2002 tentang retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan.

c. Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu

Tugas pokok Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas PPI Bulu dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dibentuk Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sebagian tugas tertentu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis program perikanan tangkap.
2. Melaksanakan sebagian tugas tertentu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dalam rangka melayani masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan, di bidang pelayanan barang dan jasa Pangkalan Pendaratan Ikan.
3. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana PPI serta tata operasional kegiatan nelayan, kapal perikanan dan pengusaha perikanan.

Untuk melaksanakan tugasnya, susunan organisasi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu terdiri dari :

- a. Kepala BPPPI Bulu
- b. Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengelolaan terdiri dari :
 - Sub seksi Sarana
 - Sub seksi Pengusahaan Jasa
 - Sub seksi Kenelayanan

Adapun uraian tugas dari masing – masing bagian/seksi sebagai berikut :

- a. Kepala BPPPI Bulu

Kepala Badan Pengelola PPI bertugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana/prasarana serta tata operasional pelayanan kepada nelayan, kapal perikanan dan pengusaha perikanan serta melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta

- b. Sub. Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha bertugas melaksanakan urusan administrasi rumah tangga, personalia dan keuangan serta mengatur ketertiban dan keamanan di lingkungan PPI. Dalam bertugas, sub bagian tata usaha di Bantu oleh staf umum, staf kepegawaian dan staf keuangan serta kelompok satuan pengamanan.

- c. Seksi Pengelolaan

Untuk pelayanan teknis operasional pada Pangkalan Pendaratan Ikan ada beberapa seksi – seksi yang terdiri dari :

- Seksi Sarana

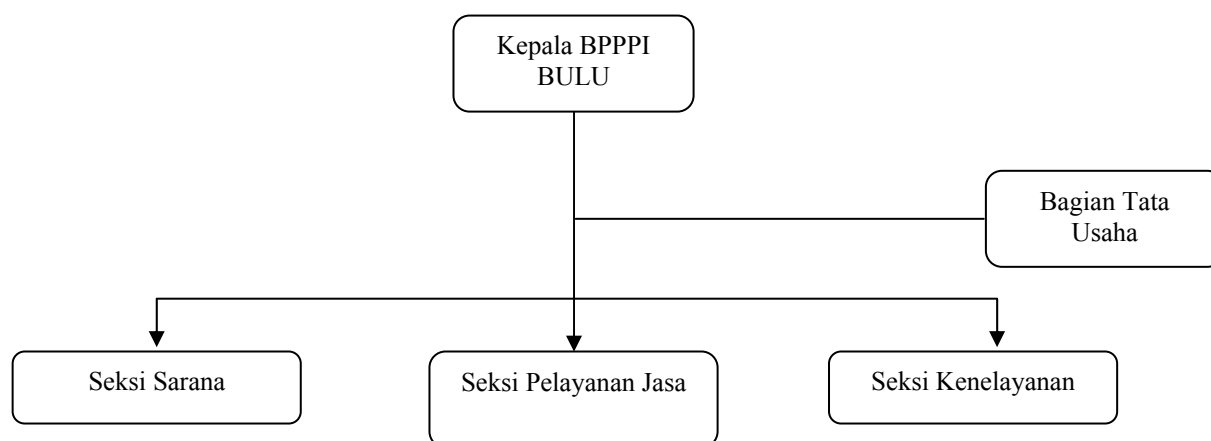
Bertugas melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana/prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi sarana dibantu oleh pelaksana gudang es dan pelaksana dermaga

- Seksi Pengusahaan Jasa

Bertugas melaksanakan pengusahaan/ pelayanan barang dan jasa di PPI. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pengusahaan jasa dibantu oleh pelaksana pemungut retribusi dan pelaksanaan jasa Pangkalan Pendaratan Ikan.

- Seksi Kenelayanan

Badan organisasi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu sebagaimana telah dituangkan pada SK kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor 23 tahun 1993 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban sebagai berikut :



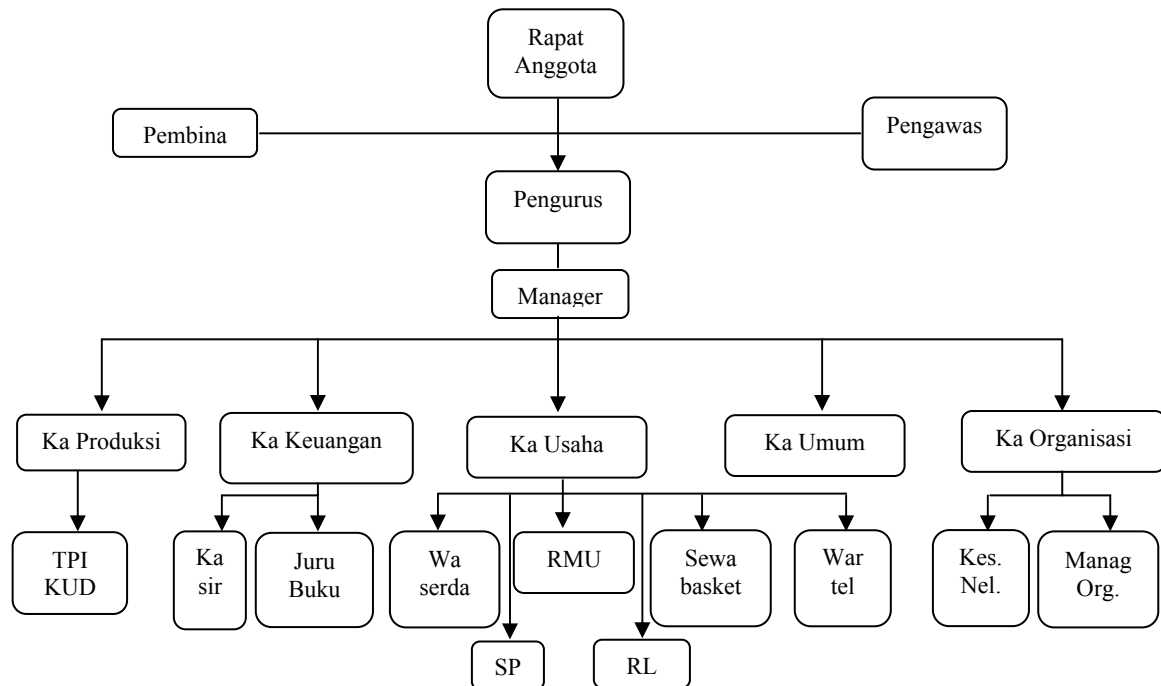
Gambar 4.9 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban

d. Koperasi Unit Desa Mina Tani “Tresno Maneko Karyo”

Koperasi Unit Desa Mina Tani” Tresno Maneko Karyo” adalah lembaga yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah sebagai unit pelaksana pelelangan ikan untuk mengelola TPI Bulu. Secara administratif, KUD ini berada dalam wilayah Kecamatan Bancar dan diberi kewenangan mengelola semua unit Pelelangan TPI yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut. Namun, sampai dengan dicabutnya Ijin Usaha Pelelangan, KUD ini hanya menangani satu unit TPI. Anggota KUD terdiri dari nelayan dan petani sebanyak 1.230 orang. KUD Mina Tani sudah berdiri sejak tahun 1946, namun baru mendapat legalitas yuridiksi pada tahun 1956 dengan Nomor Ijin BH No. 133.7/BH/P/12-67.18-2-1992.

Koperasi Unit Desa Mina Tani” Tresno Maneko Karyo” sebagai lembaga perekonomian rakyat menjalankan beberapa aktivitas, antara lain unit pelelangan, sarana produksi, simpan pinjam, warung serba ada (waserda), *Rice Milling Unit* (RMU), pembayaran rekening listrik dan warung telekomunikasi (wartel). Sebagai lembaga pengelola dan penyelenggara pelelangan ikan, KUD berperan menyelenggarakan kegiatan jual beli ikan melalui pelelangan ikan dan bertugas dalam

mengelola keuangan retribusi pelepasan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, KUD ditunjang dengan adanya pengurus yang tersusun dalam struktur organisasi (Gambar 4.37)



Gambar 4.10 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa

Saat ini aktivitas – aktivitas tersebut tidak beroperasi lagi sejak dicabutnya ijin usaha pengelolaan TPI oleh Pemerintah, kecuali rekening listrik dan wartel.

B. Pembiayaan

Pembiayaan yang dimaksud adalah biaya yang diperlukan untuk penyediaan fasilitas dan pemeliharaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dalam mengakomodasi penyelenggaraan aktivitas perikanan di PPI Bulu. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dibangun pada tahun 1986 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Propinsi Jawa Timur untuk membiayai penyediaan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu berada di bawah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan sehingga untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas berikutnya juga bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan secara langsung diserahkan pada Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Dana yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu diperoleh dari hasil operasional pemanfaatan fasilitas PPI Bulu oleh masyarakat

perikanan Pemanfaatan fasilitas PPI menghasilkan retribusi yang diserahkan pada bendahara pembantu penerima pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 yang dihimpun dari pemanfaatan dan pelayanan fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan dapat dilihat pada tabel 4.6,

Tabel 4.6 Rincian Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas PPI Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002

No.	Pemanfaatan Fasilitas	Tarif Retribusi
1.	Penggunaan Gedung TPI oleh penyelenggara lelang	1/5 (seperlima) bagian retribusi lelang
2.	Pemanfaatan Cold Storage/chillroom	-
3.	Pemanfaatan Bangunan TPI:	
	Ruangan Agrobisnis I	Rp. 10.000/m ² /tahun
	Ruangan Agrobisnis II	Rp. 10.000/m ² /tahun
	Kios Nelayan	Rp. 10.000/m ² /tahun
	Ruangan Handling Ikan	Rp. 10.000/m ² /tahun
4.	Pemanfaatan ruangan Bengkel PPI	Rp. 10.000/m ² /tahun
5.	Pemanfaatan peralatan Handling	Rp. 250/unit/jam
6.	Penyaluran Air bersih	-
7.	Pemanfaatan Lahan	Rp. 4000/m ² /tahun
8.	Pemakaian Peralatan PPI	Rp. 2500/m ² /tahun

Sumber : Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Tahun 2005

Dari tabel 4. dijelaskan seluruh tarif retribusi pemanfaatan fasilitas di PPI Bulu tetapi hanya fasilitas ruangan handling dan bengkel PPI yang disewa dan menghasilkan retribusi pemanfaatan fasilitas.

Berbeda dengan aktivitas perikanan, sistem pembiayaan kegiatan pelelangan ikan dikelola oleh Koperasi Unit Desa Mina Tani "Tresno Maneko Karyo" sejak tahun 1978 dan menghasilkan retribusi pelelangan ikan. Dalam menjalankan tugasnya, KUD bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban terkait dengan penerimaan retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Daerah yang mengatur pelelangan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Melalui retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan tersebut menjadi suntikan dana bagi KUD serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan, bahwa tarif retribusi pelelangan ikan di TPI Bulu adalah 5%, dimana besarnya tarif tersebut ditetapkan dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada hari itu. Tarif retribusi sebesar 5% dibebankan kepada nelayan/petani ikan (penjual) dan pedagang /bakul (pembeli ikan) masing – masing sebesar 2,5 %, dengan rincian sebagai berikut,

- Pemerintah Daerah Tingkat I sebesar 0,75 %
- Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar 1,25%
- KUD sebesar 3% (0,25% untuk perawatan TPI, 1,5% untuk pengembangan KUD dan 1,25% untuk gaji karyawan TPI).

4.4 Analisis Karakteristik Terhadap Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

Sesuai ketentuan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan dengan pendekatan fungsi Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan terdapat 8 fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan. Delapan fungsi PPI yang akan dikaji meliputi tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data, meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, fasilitator pembentukan harga, dan sumber pendapatan daerah. Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dapat dikaji sebagai berikut,

4.4.1 Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

Analisis karakteristik terhadap fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai tempat berlabuh kapal perikanan dilihat dari aktivitas kapal perikanan, jumlah kapal perikanan yang berlabuh, ketersediaan fasilitas alur pelayaran, ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, serta ketersediaan dana.

A. Aktivitas Kapal Perikanan

Aktivitas kapal perikanan yang utama adalah penangkapan ikan sebagai upaya untuk memperoleh ikan hasil tangkapan dengan cara melaut. Dengan melaut mampu memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidup masyarakat perikanan. Nelayan yang melaut terdiri dari nelayan pemilik kapal, anak buah kapal dan nakhoda dengan melaut selama 15 – 20 hari perbulan. Sistem yang diterapkan oleh nelayan Bulu adalah sistem “*one day fishing*”, yaitu nelayan melaut menginap selama satu malam, berangkat melaut antara jam 14.00 – 15.00 sore hari dan mendarat kembali pada jam 02.00 – 06.00 pagi hari. Nelayan pergi melaut pada malam hari karena suhu udara di laut pada malam hari hangat, disamping itu ikan akan lebih tertarik naik ke permukaan laut dengan adanya cahaya yang berasal dari kapal nelayan sehingga penangkapan ikan lebih maksimal (semua tergantung musim). Dengan waktu melaut kurang dari 24 jam sebagai bentuk

penerapan sistem “*one day fishing*” oleh nelayan Bulu menjadikan hasil tangkapan ikan yang diperoleh tetap segar.

Berbeda dengan waktu penangkapan dalam satu tahun, waktu penangkapan ikan nelayan Bulu dibedakan menjadi 2 periode, yaitu pada bulan Maret, April, Mei dan bulan Agustus, September, Oktober, November. Pada bulan tersebut disebut sebagai musim kapat atau musim panen yang bertiup angin barat dengan gelombang laut yang tidak terlalu besar. Pada bulan – bulan tersebut nelayan pergi melaut untuk menangkap ikan. Pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli dan Desember disebut sebagai musim paceklik yang bertiup angin timur dengan gelombang laut yang lebih besar. Pada bulan – bulan tersebut nelayan tidak pergi melaut, melainkan mengisi waktu dengan pembersihan dan perbaikan kapal.

Selama ini area penangkapan ikan berada di sebelah barat sampai dengan kawasan Pulau Karimunjawa dan sebelah timur sampai kawasan Pulau Bawean. Jenis armada kapal kecil berukuran <5GT (sampan), kapal sedang berukuran 5GT (dogol/srool), kapal sedang berukuran 10 GT (payang), memiliki area penangkapan dengan radius 5 mil. Jenis armada kapal besar berukuran 20 GT (purseseine) mencapai area penangkapan ikan dengan radius 30 - 40 mill. Tepatnya jangkauan penangkapan ikan nelayan PPI Bulu sampai ke Pekalongan, Batang, Tegal, Jepara, Rembang dan Muncar. Jangkauan penangkapan ikan dapat dilihat pada gambar 4.11

a. Pembekalan Kapal Perikanan

Kapal perikanan sebelum berangkat melaut perlu memuat perbekalan, mulai dari bahan makanan untuk awak kapal dan bahan bakar minyak untuk mesin. Lebih jelasnya mengenai jumlah perbekalan kapal yang akan melaut dari PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Jumlah Bahan Perbekalan Kapal di PPI Bulu Tahun 2003 - 2005

Jenis Bahan	Tahun		
	2003	2004	2005
Solar (lt)	2.006.112	2.569.900	2.190.075
Oli (lt)	119.301	195.224	199.629
Bensin (lt)	1.390	-	-
Minyak tanah (lt)	158.580	502.860	870.445
Air (lt)	1.295.534	2.149.300	2.207.870
Garam (kg)	293.619	760.521	901.266

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pengelola PPI Bulu

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat dilihat bahwa perbekalan yang diperlukan bagi kapal yang akan melaut senantiasa meningkat dari tahun 2003 hingga tahun 2005 dengan jumlah bekal terbanyak yaitu solar dan air sedangkan bensin sejak tahun 2004 sudah tidak digunakan sebagai bahan perbekalan kapal di PPI Bulu dan kapal yang melaut tidak membawa bahan tambahan es sebagai pengawet. Cara pemuatan bahan – bahan perbekalan ke kapal perikanan adalah sebagai berikut :

- Air tawar diambil dari tandon pusat dan ditempatkan dalam jirigen, kemudian diangkut oleh nelayan menuju ke kapal.
- Solar, bensin dibeli dari pom bensin di luar PPI Bulu, minyak tanah, oli dibeli dari toko yang berjarak 1-2 Km di sekitar PPI Bulu kemudian dibawa oleh nelayan dengan becak beserta perbekalan lain.

Kapal perikanan yang melaut juga membawa peralatan tangkap yang meliputi pukot cincin *purseseine*, pukot kantong (payang dan dogol), lampu galaxy, lampu petromax yang dibeli dari Tuban, Surabaya, Kragan

Pembekalan kapal nelayan Bulu masih dilakukan di sepanjang pantai bahkan ada yang menyebrangi lautan untuk mengangkut perbekalan menuju ke kapal masing-masing sehingga kemudahan dalam pembekalan kapal belum dirasakan oleh seluruh nelayan Bulu (tabel 4.8).

b. Pendaratan ikan hasil tangkapan

Kapal perikanan yang telah melaut dan mendarat kembali, berlabuh di sepanjang pantai pendaratan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan. Kapal yang berlabuh membentuk barisan kapal di sepanjang pantai dan kapal ditambatkan dengan mengikat tali kapal pada tiang – tiang di belakang bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dan sekitarnya. Pendaratan ikan hasil tangkapan dilakukan di sepanjang pantai (4 km) sesuai dengan tempat pendaratan kapal kemudian ikan diambil dari palka, diletakkan di blung, kranjang dan diangkut dengan pikulan 2 orang ke gedung TPI dan sepanjang jalan di luar PPI Bulu.

c. Istirahat

Setelah dilakukan bongkar muat ikan, kapal – kapal berlabuh melanjutkan istirahat di sepanjang pantai. Dengan berlabuh di sepanjang pantai dan kondisi perairan masih dipengaruhi oleh gelombang laut maka kapal – kapal yang berlabuh pernah mengalami kerusakan hingga tenggelam. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun

2005, dimana ada 15 kapal milik nelayan Bulu yang tenggelam di sekitar PPI Bulu.

Gambaran mengenai kemudahan menjalankan aktivitas kapal perikanan oleh masyarakat perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu diperjelas dengan hasil kuisioner ke responden masyarakat perikanan (tabel 4.8) sedangkan aktivitas kapal perikanan dapat dilihat pada gambar 4.12

Tabel 4.8 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Menjalankan Aktivitas Kapal Perikanan di PPI Bulu

No	Aktivitas Kapal Perikanan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Kapal yang mendarat di PPI tidak mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	34	34,69
2.	Kapal yang mendarat di PPI cukup mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	48	48,98
3.	Kapal yang mendarat di PPI dengan mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat	16	16,33
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa mayoritas sebesar 48,98% responden menyatakan kapal yang mendarat di PPI Bulu cukup mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat. Selebihnya kapal yang mendarat di PPI Bulu dengan mudah mendaratkan ikan, memuat perbekalan dan istirahat berada pada prosentase paling kecil, yaitu 16%. Kemudahan menjalankan aktivitas kapal perikanan oleh nelayan di sebuah PPI menunjukkan kemampuan PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Berdasarkan hasil survey primer dapat dilihat bahwa 56,12% responden masyarakat perikanan menyatakan tidak setuju bahwa aktivitas kapal perikanan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan (Tabel 4.9).

Tabel 4.9 Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Kapal Perikanan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	16	16,33
2.	Kurang setuju	27	27,55
3.	Tidak setuju	55	56,12
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.11 Jangkauan Penangkapan Ikan

B. Jumlah Kapal Perikanan

Jenis armada kapal perikanan yang mendarat di PPI Bulu meliputi armada kapal berjenis Purseseine, Payang, Dogol/ Srool, dan Sampan. Jumlah armada kapal perikanan di PPI Bulu selama periode 5 tahun dari tahun 2000 s/d 2005 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut,

Tabel 4.10 Jumlah Armada Kapal Perikanan Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 - 2005

No.	Tahun	Jenis Armada Kapal				Jumlah
		Kapal besar (Purseseine 20 GT)	Kapal sedang (Payang 10 GT)	Kapal sedang (Dogol/Srool 5GT)	Kapal kecil (Sampan <5GT)	
1.	2000	132	367	28	15	542
2.	2001	134	428	27	11	600
3.	2002	139	80	312	156	687
4.	2003	140	80	312	156	688
5.	2004	140	80	312	156	688
6.	2005	128	80	280	142	630

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pengelola PPI Bulu

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa jumlah armada kapal terbanyak berada pada tahun 2003 dan tahun 2004 dengan jumlah masing – masing 688 kapal dan jumlah armada kapal paling sedikit pada tahun 2000 dengan jumlah 542 kapal. Pada tahun 2005 telah terjadi penurunan sebesar 8% dengan jumlah armada kapal perikanan sebanyak 630 kapal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengelola PPI Bulu bahwa dalam waktu yang bersamaan PPI Bulu mampu menampung 25 kapal purseseine berkekuatan 20 GT untuk berlabuh di pantai pendaratan PPI Bulu tetapi dari hasil survey ke responden bahwa dalam waktu yang bersamaan kapal yang mendarat di PPI Bulu jumlahnya beragam. Sebesar 68,37% responden masyarakat perikanan menyatakan jumlah kapal perikanan yang mendarat di PPI Bulu pada waktu yang bersamaan sebanyak ≥ 20 kapal dan 31,63% responden menyatakan kurang dari 20 kapal perikanan mendarat di PPI Bulu (Tabel 4.11)

Tabel 4.11 Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Kapal Perikanan di PPI Bulu

No	Jumlah Kapal Perikanan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak ada kapal yang mendarat di PPI	0	0,00
2.	< 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT	31	31,63
3.	≥ 20 kapal perikanan berukuran 10 – 30 GT	67	68,37
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Beragamnya jumlah kapal perikanan yang mendarat di PPI Bulu tersebut didukung dengan fenomena sebagian responden pernah memilih mendaratkan kapal di luar pantai pendaratan PPI Bulu, yaitu sebesar 40,8% responden. Besarnya jumlah

kapal perikanan yang mendarat di sebuah PPI menunjukkan keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Demikian halnya dengan yang terjadi di PPI Bulu, sebesar 45,92% responden menyatakan setuju bahwa jumlah kapal yang mendarat di PPI Bulu menentukan keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12 Persepsi Masyarakat Bahwa Jumlah Kapal Yang Mendarat Di PPI Bulu Menentukan Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	45	45,92
2.	Kurang Setuju.	32	32,65
3.	Tidak Setuju.	21	21,43
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

C. Kondisi Perairan

Kondisi perairan yang tenang pada lokasi berdirinya PPI mampu mendukung operasional kapal – kapal perikanan sehingga memungkinkan kapal untuk bersandar lebih dekat dengan lokasi bongkar muat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengelola PPI Bulu diperoleh gambaran mengenai kondisi perairan pada lokasi berdirinya PPI Bulu. Kondisi perairannya masih sering dipengaruhi oleh gelombang laut sehingga tidak tenang dan masih beresiko terhadap kapal – kapal perikanan yang berlabuh. Pernyataan tersebut ditunjang dengan data dari BPPPI Bulu bahwa pada tahun 2005 sebanyak 15 kapal tenggelam di PPI Bulu, meski fenomena tersebut jarang terjadi tetapi sudah cukup meresahkan nelayan Bulu. Hasil wawancara tersebut didukung dengan hasil survey responden bahwa 52,04% menyatakan kondisi perairan di PPI Bulu tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut yang beresiko terhadap kerusakan kapal dan sebesar 47,95% responden lainnya menyatakan kondisi perairan cukup tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut namun tidak beresiko terhadap kerusakan kapal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 dan gambar 4.12

Tabel 4.13 Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Perairan Untuk Operasi Kapal Perikanan Di PPI Bulu

No	Kondisi Perairan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut yang beresiko terhadap kerusakan kapal	51	52,04
2.	Cukup tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut namun tidak beresiko terhadap kerusakan kapal	47	47,95
3.	Tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang laut	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Kondisi perairan berpengaruh pada kelancaran operasional kapal – kapal perikanan. Hal ini juga ditunjukkan oleh tanggapan dari 61,22% responden masyarakat perikanan yang menyatakan setuju bahwa kondisi perairan di kawasan PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Responden masyarakat perikanan lainnya sebesar 25,51% kurang setuju dan 13,27% tidak setuju dengan pernyataan tersebut (Tabel 4.14)

Tabel 4.14 Persepsi Masyarakat Bahwa Kondisi Perairan Di Kawasan PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	60	61,22
2.	Kurang Setuju.	25	25,51
3.	Tidak Setuju.	13	13,27
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

D. Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran

Berdasarkan hasil observasi ke wilayah penelitian, PPI Bulu tidak memiliki alur pelayaran untuk mengarahkan kapal masuk ke dan keluar dari kolam pelabuhan guna mempermudah dan memperlancar olah gerak kapal (Gambar 4.12). Hal ini menunjukkan ketersediaan fasilitas alur pelayaran berpengaruh pada keberhasilan fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. sebesar 52,04% responden menyatakan setuju bahwa ketersediaan fasilitas alur pelayaran di PPI Bulu berpengaruh pada keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Prosentase responden lainnya sebesar 47,96% kurang setuju dengan pernyataan tersebut (Tabel 4.15)

Tabel 4.15 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran PPI Bulu Berpengaruh Pada Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	51	52,04
2.	Kurang Setuju.	47	47,96
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Ketersediaan fasilitas alur pelayaran berpengaruh pada keberhasilan PPI Bulu tetapi dengan tidak tersedianya fasilitas alur pelayaran bukan menjadi penyebab utama PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Hal tersebut ditunjukkan oleh persepsi masyarakat sebesar 53,06% kurang setuju bahwa tidak tersedianya fasilitas alur pelayaran menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai

tempat berlabuh kapal perikanan dan yang menyatakan setuju sebesar 27,55% (Tabel 4.16).

Tabel 4.16 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Alur Pelayaran Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	27	27,55
2.	Kurang Setuju.	52	53,06
3.	Tidak Setuju.	19	19,39
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

E. Ketersediaan Fasilitas Kolam Pelabuhan

PPI Bulu tidak memiliki kolam pelabuhan yang digunakan sebagai tempat penampungan kapal perikanan, tempat melakukan gerakan untuk memutar kapal. Pada wilayah penelitian kapal perikanan mendarat di sepanjang pantai yang luasnya 0,3 Ha sehingga kapal yang berlabuh tidak cukup terlindung dari gangguan arus dan ombak laut (Gambar 4.12). Hasil wawancara dengan pengelola PPI Bulu menyebutkan bahwa dengan belum tersedianya kolam pelabuhan menjadikan nelayan pemilik kapal perikanan Bulu malas untuk mendaratkan kapal di PPI Bulu dan memilih mendaratkan kapal di luar PPI Bulu yang jaraknya dari tempat pendaratan kapal ke jalan lebih dekat, yaitu 1-2 km.

Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan berpengaruh pada fungsi PPI sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari 61,22% responden yang setuju dengan pernyataan tersebut dan 38,78% kurang setuju bahwa ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan (Tabel 4.17)

Tabel 4.17 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kolam Pelabuhan di PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	60	61,22
2.	Kurang Setuju.	38	38,78
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Secara keseluruhan ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Hal ini didukung pula dengan pernyataan setuju oleh 59,18% responden bahwa tidak tersedianya fasilitas kolam pelabuhan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Yang lainnya sebesar 40,82% responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut (Tabel 4.18)

Tabel 4.18 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Kolam Pelabuhan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	58	59,18
2.	Kurang Setuju.	40	40,82
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

F. Ketersediaan Fasilitas Pemecah Gelombang

Fasilitas pemecah gelombang merupakan fasilitas pelindung utama bagi pelabuhan. Berfungsi untuk melindungi areal perairan pelabuhan, yaitu memperkecil tinggi gelombang laut, sehingga kapal dapat berlabuh dengan tenang guna dapat melakukan bongkar muat. Berdasarkan hasil observasi, PPI Bulu belum memiliki *breakwater* atau bangunan pemecah gelombang untuk melindungi kapal dari gelombang laut. Dengan tidak tersedianya fasilitas pemecah gelombang di PPI Bulu menyebabkan kegiatan berlabuh kapal perikanan tidak berjalan dengan lancar. Pernyataan tersebut didukung oleh 46,94% responden yang menyatakan setuju dan masih terdapat 35,71% yang menyatakan kurang setuju (Tabel 4.19)

Tabel 4.19 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Pemecah Gelombang di PPI Bulu Menyebabkan Kegiatan Berlabuh Kapal Perikanan Tidak Berjalan Lancar

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	46	46,94
2.	Kurang Setuju.	35	35,71
3.	Tidak Setuju.	17	17,35
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Bukan hanya menyebabkan kegiatan berlabuh kapal perikanan tidak berjalan lancar jika tidak tersedia fasilitas pemecah gelombang, melainkan juga menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Pernyataan tersebut didukung oleh 59,18% responden yang menyatakan setuju (Tabel 4.20).

Tabel 4.20 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Pemecah Gelombang di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	58	59,18
2.	Kurang Setuju.	40	40,82
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.12 Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

G. Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI

Dinas perikanan adalah lembaga unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan kelautan yang berfungsi untuk merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan kelautan. Badan Pengelola PPI merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan yang secara struktural bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi. BPPPI sebagai bagian dari organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan bertugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas PPI serta tata operasional kegiatan nelayan, kapal perikanan dan pengusaha perikanan.

Berdasarkan hasil survey ke responden mengenai kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu diperoleh tanggapan dari masyarakat bahwa Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu belum mampu menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang. Pernyataan tersebut didukung oleh 61,22% responden yang menyatakan lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu tidak mampu menyediakan fasilitas (Tabel 4.21).

Tabel 4.21 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang

No	Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mampu menyediakan fasilitas	59	61,22
2.	Mampu menyediakan fasilitas, tanpa memelihara fasilitas	39	38,78
3.	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas pada akhirnya berpengaruh terhadap keberhasilan mengelola PPI Bulu. Hal ini didukung dengan pernyataan setuju oleh 51,02% responden, sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju hanya 27,55% dan 21,43% (Tabel 4.22).

Tabel 4.22 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan Mengelola Fasilitas PPI Bulu Dipengaruhi Oleh Kemampuan Aparatur Kelembagaan BPPPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	50	51,02
2.	Kurang Setuju.	27	27,55
3.	Tidak Setuju.	21	21,43
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Pada tabel 4.23 menyatakan bahwa Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu tidak mampu menyediakan fasilitas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Pernyataan

tersebut didukung oleh 56,12% yang setuju bahwa ketidakmampuan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu dalam menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.23

Tabel 4.23 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketidakmampuan Menyediakan Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	55	56,12
2.	Kurang Setuju.	27	27,55
3.	Tidak Setuju.	16	16,33
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

H. Ketersediaan Dana

Ketersediaan dana yang dimaksud adalah dana yang diperlukan untuk menyediakan dan memelihara fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang. Dana untuk penyediaan fasilitas bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hasil operasional pemanfaatan fasilitas PPI Bulu oleh masyarakat perikanan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas PPI Bulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPPPI Bulu, saat ini dana untuk menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang belum tersedia dan akhirnya berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan. Pernyataan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.24

Tabel 4.24 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang di PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	54	55,10
2.	Kurang Setuju.	29	29,59
3.	Tidak Setuju.	15	15,31
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Pada tabel 4.24 dapat dilihat bahwa responden sebanyak 55,10% menyatakan setuju; 29,59% kurang setuju dan 15,31% tidak setuju bahwa ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai tempat berlabuh kapal perikanan.

Ketersediaan dana untuk fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang harus ditopang dengan dana dari Pemerintah. Pernyataan tersebut dinyatakan setuju oleh 69,39% responden dan yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut sebesar 30,61% (Tabel 4.25).

Tabel 4.25 Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Mendukung Aktivitas Berlabuh Kapal di PPI Bulu Harus Ditopang Dengan Dana Dari Pemerintah

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	68	69,39
2.	Kurang Setuju.	30	30,61
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.2 Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

Analisis karakteristik terhadap fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dilihat dari aspek – aspek berikut,

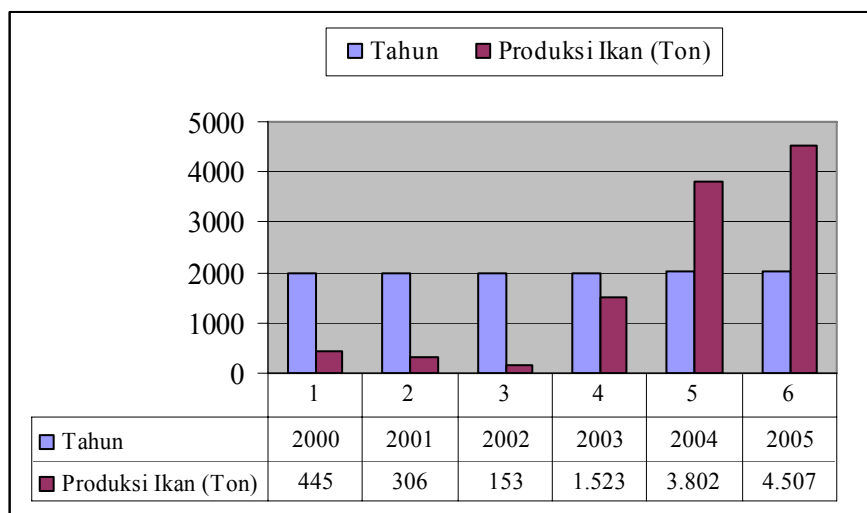
A. Volume Ikan

Produksi ikan yang didaratkan di PPI Bulu dalam kurun waktu enam tahun, yaitu tahun 2000 – 2005 rata – rata per-tahun adalah 1789 ton dengan jumlah produksi pada akhir tahun 2005 adalah 4507 ton. Produksi ikan yang didaratkan di PPI Bulu pada tahun 2005 tersebut berada pada jumlah yang paling besar. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2002 terjadi penurunan jumlah ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2002, sebesar 49,89% dengan jumlah produksi 153 Ton. Kemudian sejak tahun 2003 hingga tahun 2005 terjadi kenaikan jumlah ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Pada tahun 2003 pendaratan jumlah ikan meningkat pesat dengan pertumbuhan lebih dari 100%, yaitu 892,75% dengan jumlah produksi 1.523 Ton. Lebih jelasnya mengenai pertumbuhan jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bulu Tahun 2000- 2005 dapat dilihat pada tabel 4.26 dan gambar 4.13

Tabel 4.26 Pertumbuhan Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 – 2005

No	Tahun	Ikan Yang didaratkan (Kg)	
		Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
1.	2000	445	-
2.	2001	306	-31,24
3.	2002	153	-49,89
4.	2003	1.523	892,75
5.	2004	3.802	149,52
6.	2005	4.507	18,53

Sumber : Data Potensi Perikanan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2005 Kecamatan Bancar



Gambar 4.13 Perkembangan Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 – 2005

Adapun jenis ikan yang dominan didaratkan di PPI Bulu yaitu Ikan Tengiri, Tongkol, Manyung, Bawal, Selar, Layur, Cumi –cumi, Alu – alu, Kakap merah, Kakap putih, Pari, Teri, Kembang, Alu – alu, Dorang, Tembang, Ikan sebelah, Kurisi.

Jumlah produksi ikan di PPI Bulu mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup drastis dan sebagian besar masyarakat perikanan menyatakan kurang setuju bahwa volume ikan yang didaratkan di PPI Bulu mendukung fungsi PPI sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh 51,02% responden, 31,63% responden menyatakan tidak setuju dan 17,25% responden setuju (Tabel 4.27).

Tabel 4.27 Persepsi Masyarakat Bahwa Volume Ikan Yang Didaratkan di PPI Bulu Mendukung Fungsi PPI Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	17	17,35
2.	Kurang Setuju.	50	51,02
3.	Tidak Setuju.	31	31,63
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berbeda halnya dengan persepsi masyarakat bahwa keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dipengaruhi oleh volume ikan yang didaratkan di PPI Bulu. Berdasarkan hasil survey ke masyarakat perikanan, 45,92% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan yang setuju sebesar 18,37%, kurang setuju sebesar 35,71%. Adapun prosentase persepsi masyarakat bahwa

keberhasilan PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan dipengaruhi oleh jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.28

Tabel 4.28 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Dipengaruhi Oleh Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di PPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	18	18,37
2.	Kurang Setuju.	35	35,71
3.	Tidak Setuju.	45	45,92
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

B. Aksesibilitas Ke Lokasi TPI (*aksesibilitas*)

Jarak antara tempat pendaratan kapal ke gedung TPI adalah 7-8 m dengan waktu pengangkutan 5 – 8 menit untuk tiap keranjang. Tidak memiliki jalur khusus untuk mengangkut hasil tangkapan ikan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang nelayan diperoleh pernyataan bahwa tidak adanya jalur khusus untuk mengangkut hasil tangkapan ikan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI menyebabkan masyarakat nelayan kesulitan untuk mengangkut ikan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI. Hal ini mendorong timbulnya kebiasaan masyarakat nelayan untuk mengangkut ikan hasil tangkapan ke luar PPI Bulu, yaitu ke sepanjang jalan (Gambar 4.14).

Hasil wawancara dengan seorang nelayan tersebut ditunjang dengan hasil kuisioner mengenai persepsi masyarakat terhadap kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI. Hasilnya diperoleh bahwa sebesar 57,14% responden menyatakan tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi TPI melainkan ke luar gedung TPI. Sebesar 22,45% menyatakan cukup mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI tetapi tidak melalui jalan penghubung kemudian 20,41% menyatakan mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI dan melalui jalan penghubung (Tabel 4.29).

Tabel 4.29 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI

No	Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi TPI	56	57,14
2.	Cukup mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI tetapi tidak melalui jalan penghubung	22	22,45
3.	Mudah mengangkut ikan hasil tangkapan ke lokasi TPI dan melalui jalan penghubung.	20	20,41
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI mendukung keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan. Hal tersebut dinyatakan kurang setuju sebesar 53,06% dari keseluruhan masyarakat. Pernyataan lain juga disebutkan bahwa 51,02% responden masyarakat kurang setuju bahwa ketersediaan jalan penghubung di PPI Bulu dapat mempersulit pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI Bulu. Lebih jelasnya persepsi masyarakat terkait dengan pengaruh kemudahan pengangkutan ikan hasil tangkapan ke lokasi gedung TPI dan ketersediaan jalan penghubung dapat dilihat pada tabel 4.30 dan 4.31

Tabel 4.30 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI Mendukung Keberhasilan Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	30	30,61
2.	Kurang Setuju.	52	53,06
3.	Tidak Setuju.	16	16,33
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.31 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jalan Penghubung Di PPI Bulu Dapat Mempersulit Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	48	48,98
2.	Kurang Setuju.	50	51,02
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

C. Ketersediaan Fasilitas Dermaga

Ketersediaan fasilitas dermaga mendukung kegiatan bongkar muat ikan di PPI agar terjamin kualitas ikan yang didaratkan, prosesnya cepat dan aman sampai TPI. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada wilayah penelitian diperoleh data bahwa PPI Bulu belum memiliki dermaga. Aktivitas bongkar muat ikan dilakukan di ruang mana saja, baik langsung di gedung TPI maupun di sepanjang pantai (gambar 4.14). Bongkar muat ikan yang dilakukan di sepanjang pantai kawasan PPI Bulu dapat beresiko terhadap kualitas ikan. Ikan menjadi mudah terkena air dan cepat mengalami kebusukan.

Pentingnya ketersediaan fasilitas dermaga untuk bongkar muat ikan menjadikan masyarakat setuju dengan adanya dermaga di PPI Bulu. Hal ini didukung dengan persepsi masyarakat bahwa ketersediaan fasilitas dermaga mendukung kegiatan bongkar muat ikan di PPI Bulu. Mayoritas responden sebesar

88,78% menyatakan setuju sedangkan sisanya sebesar 11,22% kurang setuju. Prosentase persepsi masyarakat bahwa ketersediaan fasilitas dermaga mendukung kegiatan bongkar muat ikan di PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.32

Tabel 4.32 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Dermaga Mendukung Kegiatan Bongkar Muat Ikan Di PPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	88	88,79
2.	Kurang Setuju.	10	11,22
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Sebagian besar responden menyatakan ketersediaan fasilitas dermaga mendukung kegiatan bongkar muat ikan di PPI Bulu. PPI Bulu tidak memiliki fasilitas dermaga meski demikian masyarakat kurang setuju hal tersebut menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai tempat pendaratan ikan. Pernyataan ini didukung oleh persepsi masyarakat yang menyatakan kurang setuju sebesar 56,12% bahwa tidak tersedianya fasilitas dermaga di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai tempat pendaratan ikan, sebesar 32,65% menyatakan setuju dan 11,22% tidak setuju dengan pernyataan tersebut (Tabel 4.33).

Tabel 4.33 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Dermaga Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berhasil Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	48	32,65
2.	Kurang Setuju.	50	56,12
3.	Tidak Setuju.	0	11,22
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

D. Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Ikan

PPI Bulu memiliki 1 unit gedung pelelangan ikan yang luasnya 162m², konstruksi atap terdiri dari genteng biasa. Gedung pelelangan ikan digunakan sebagai tempat penampungan ikan setelah dilakukan bongkar muat ikan di sepanjang pantai (gambar 4.14). Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagian besar responden sebesar 63,27% menyatakan bahwa fasilitas gedung pelelangan ikan tersedia dan berfungsi sebagai tempat penampungan ikan (Tabel 4.34).

Tabel 4.34 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Ikan Di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Ikan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai	36	36,73

	tempat penampungan ikan		
3.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat penampungan ikan	62	63,27
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Persepsi masyarakat terhadap pengaruh ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan terhadap fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan berbeda – beda, diantaranya 14,29% setuju, 29,59% kurang setuju dan mayoritas sebesar 56,12% tidak setuju bahwa ketersediaan fasilitas gedung pelelangan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan (Tabel 4.35).

Tabel 4.35 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Pendaratan Ikan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	14	14,29
2.	Kurang Setuju.	29	29,59
3.	Tidak Setuju.	55	56,12
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.14 Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

E. Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI

BPPPI Bulu sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur beserta Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur selaku pihak yang merumuskan kebijaksanaan teknis fasilitas PPI belum mampu menyediakan fasilitas dermaga tetapi telah mampu menyediakan fasilitas gedung pelelangan ikan. Manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan oleh responden masyarakat perikanan selaku pihak yang berhak menerima pelayanan fasilitas PPI (Tabel 4.36).

Tabel 4.36 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Dalam Mengelola Fasilitas Dermaga Dan Gedung Pelelangan Ikan

No	Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mampu menyediakan fasilitas.	54	55,10
2.	Mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas.	44	44,90
3.	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.36 diperoleh prosentase bahwa sebesar 55,10% responden menilai bahwa aparaturnya lembaga tersebut tidak mampu menyediakan fasilitas, yaitu dermaga. Sebesar 44,90% responden menyatakan aparaturnya lembaga mampu menyediakan fasilitas tanpa memeliharanya, yaitu fasilitas gedung pelelangan ikan. Gedung pelelangan ikan dibangun pada tahun 1987 sehingga pada tahun 2006 bangunan tersebut telah berumur 19 tahun. Tidak adanya pemeliharaan dalam kurun waktu tersebut dapat dilihat dari banyaknya genteng yang pecah sehingga pada saat hujan sebagian besar bocor. Hal ini menjadikan kegiatan penampungan ikan di gedung pelelangan ikan menjadi terganggu. Meski demikian, sikap masyarakat sebesar 56,12% responden kurang setuju bahwa kemampuan aparaturnya lembaga dalam mengelola fasilitas menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkapan (tabel 4.37)

Tabel 4.37 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	35	34,69
2.	Kurang Setuju.	55	56,12
3.	Tidak Setuju.	8	9,18
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

E. Ketersediaan Dana

Dana penyediaan dan pemeliharaan fasilitas merupakan pendukung aktivitas pendaratan ikan di PPI Bulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPPPI Bulu diperoleh data bahwa hingga tahun 2006 dana untuk membangun dermaga dan untuk perawatan fasilitas belum tersedia. Hal ini tentunya berpengaruh pada kebiasaan masyarakat dalam mendaratkan ikan sesuai pernyataan oleh 47,96% responden yang setuju bahwa ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas dermaga dan gedung pelelangan ikan PPI Bulu berpengaruh pada fungsi PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan (Tabel 4.38).

Tabel 4.38 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Dermaga Dan Gedung Pelelangan Ikan PPI Bulu Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	47	47,96
2.	Kurang Setuju.	41	41,84
3.	Tidak Setuju.	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Dana untuk mengelola fasilitas yang menunjang PPI Bulu sebagai tempat pendaratan ikan harus ditopang dengan dana dari Pemerintah. Hal tersebut didukung dengan pernyataan setuju oleh 54,08%. Prosentase persepsi masyarakat bahwa untuk mengelola fasilitas yang melayani bongkar muat ikan di PPI Bulu harus ditopang dengan dana dari Pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.39

Tabel 4.39 Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Melayani Bongkar Muat Ikan Di PPI Bulu Harus Ditopang Dengan Dana Dari Pemerintah

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	53	54,08
2.	Kurang Setuju.	45	45,92
3.	Tidak Setuju.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.3 Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan

Analisis karakteristik terhadap fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan dikaji dari beberapa variabel, meliputi aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, fasilitas instalasi air bersih, fasilitas pabrik es, fasilitas gudang dingin, fasilitas drainase, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, serta ketersediaan dana.

A. Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan

Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan bertujuan untuk mempertahankan kesegaran ikan selama mungkin atau menjaga agar produksi ikan setelah sampai di tangan konsumen masih dalam keadaan segar. Hal ini menjadikan aktivitas penanganan ikan segar sebagai salah satu bagian penting dalam mata rantai industri perikanan. Penanganan ikan segar di PPI Bulu meliputi aktivitas sebagai berikut,

1. Pemilahan dan Penimbangan

Ikan hasil tangkapan di kelompokkan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan (disortir), kemudian di cuci dengan air laut atau air tawar. Setelah ikan dicuci, kemudian di timbang sebelum akhirnya di jual oleh nelayan ke pedagang. Pemilahan ini disesuaikan dengan keinginan/ permintaan pasar yang bertujuan untuk mempermudah pendistribusian ikan hasil tangkapan ke konsumen. Aktivitas ini dilakukan di gedung TPI, sepanjang jalan dan pantai kawasan PPI Bulu.

2. Penyimpanan

Tidak ada aktivitas penyimpanan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu sebagai bentuk proses pengawetan ikan. Tidak adanya proses pengawetan ikan segar di PPI Bulu, menjadikan ikan hasil tangkapan harus habis terjual pada hari itu. Oleh masyarakat perikanan di sekitar PPI Bulu ikan diawetkan dengan pengolahan ikan – ikan segar seperti pengeringan ikan dan pengasapan.

3. Pengepakan

Pengepakan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan pedagang ditujukan pada jenis ikan segar. Ikan yang sudah terjual dikepak terlebih dahulu sebelum diangkut keluar PPI Bulu, waktu pengepakan sekitar jam 06.00 – 07.30. Peralatan yang digunakan untuk mengepak ikan hasil tangkapan

bermacam – macam, yaitu blung dan kranjang. Pengepakan produk ikan segar yang pemasarannya ke sekitar PPI Bulu, yaitu desa nelayan Bulu dibawa dengan gerobak mini atau becak yang sebelumnya telah diberi es selapis demi selapis. Pengepakan produk ikan segar yang pemasarannya jauh dari PPI Bulu (> 5 Km) tetapi masih dalam satu kabupaten menggunakan tong plastik yang sebelumnya telah diberi es selapis demi selapis untuk mempertahankan kesegaran ikan sampai di tangan konsumen. Pemasaran ikan segar hingga keluar kota dengan menggunakan peti dingin (*cool box*) pada alat transportasi yang disediakan dan ikan telah diberi es selapis demi selapis. Pada dinding peti dingin (*cool box*) ini memiliki lapisan isolator yang berfungsi untuk mencegah kebusukan ikan sehingga ikan tetap segar dan harga tidak turun. Pengepakan ikan segar dilakukan di gedung TPI dan halaman di depannya, gedung pengepakan, di sepanjang jalan dan pantai kawasan PPI Bulu. Gambaran mengenai aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan dapat dilihat pada gambar 4.15

Tidak seluruh responden masyarakat perikanan memberikan penanganan ikan segar secara lengkap di PPI Bulu. Prosentase aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.40

Tabel 4.40 Prosentase Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Oleh Responden Masyarakat Perikanan di PPI Bulu

No	Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak ada aktivitas penanganan di PPI	14	14,29
2.	Tidak lengkap meliputi < 4 aktivitas penanganan yaitu pemilahan, penimbangan dan pengepakan.	62	63,27
3.	Lengkap meliputi 4 aktivitas yaitu pemilahan, penimbangan, penyimpanan, dan pengepakan.	22	22,45
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Dari tabel 4.40 dapat ditunjukkan bahwa 63,27% dari seluruh responden melakukan penanganan ikan di PPI Bulu secara tidak lengkap. Penanganan ikan hasil tangkapan yang dilakukan meliputi pemilahan, penimbangan dan pengepakan. Kegiatan pengawetan atau penyimpanan ikan di PPI Bulu saat ini tidak pernah dilakukan.

Masyarakat berpendapat bahwa aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan. Pendapat tersebut dinyatakan oleh 57,14% yang setuju sedangkan

37,76% responden menyatakan kurang setuju dan 5,10% responden menyatakan tidak setuju (tabel 4.41).

Tabel 4.41 Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	57	57,14
2.	Kurang Setuju.	37	37,76
3.	Tidak Setuju.	4	5,10
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

B. Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan

PPI Bulu memiliki gedung pelelangan ikan yang luasnya 162 m². Gedung pelelangan ikan di PPI Bulu digunakan sebagai tempat untuk menangani ikan hasil tangkapan, yaitu digunakan pada saat pemilahan, penimbangan dan pengepakan. Pernyataan tersebut didukung oleh 51,02% responden yang menyatakan bahwa telah tersedia fasilitas gedung pelelangan PPI Bulu untuk melayani seluruh aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, dan pengepakan ikan hasil tangkapan. Lebih jelasnya prosentase persepsi masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas gedung pelelangan untuk menangani ikan hasil tangkapan di PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.42

Tabel 4.42 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Untuk Menangani Ikan Hasil Tangkapan Di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani sebagian aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, atau pengepakan ikan hasil tangkapan	48	48,98
3.	Fasilitas tersedia, digunakan untuk melayani seluruh aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, dan pengepakan ikan hasil tangkapan.	50	51,02
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan. Mayoritas sebesar 37,76% responden tidak setuju dan sebesar 35,71% responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut (tabel 4.43).

Tabel 4.43 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	26	26,53
2.	Kurang Setuju.	35	35,71
3.	Tidak Setuju.	37	37,76
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Selain menggunakan fasilitas gedung pelelangan ikan, PPI Bulu menggunakan fasilitas ruang pengepakan untuk menyelenggarakan aktivitas penanganan ikan (gambar 4.15). Ruang pengepakan tersebut digunakan oleh para pengusaha perikanan yang berjumlah 7 orang.

C. Ketersediaan Fasilitas Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih/air tawar memegang peranan sangat penting pada Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan. Kebutuhan akan air bersih pada sebuah PPI merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan nelayan saat proses pencucian ikan, pembersihan kapal serta pencucian lantai TPI. Sebagai pusat pelaksanaan penanganan PPI harus mampu menyediakan air dalam jumlah yang cukup. Berdasarkan laporan tahunan Badan Pengelola PPI Bulu 2005 diperoleh data bahwa suplai air bersih di PPI Bulu belum memiliki jumlah yang mencukupi, instalasi air bersih sebagai tempat penyimpanan air yang bersumber dari PDAM memiliki volume 3 lt/detik.

Menurut persepsi masyarakat sebesar 54,08% fasilitas instalasi air bersih yang tersedia digunakan untuk pembersihan ikan dan pembersihan lantai gedung pelelangan (tabel 4.44).

Tabel 4.44 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Instalasi Air Bersih Di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Instalasi Air Bersih	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas instalasi air bersih	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia tetapi hanya berfungsi untuk pembersihan ikan atau pembersihan lantai gedung pelelangan.	45	45,92
3.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk pembersihan ikan serta pembersihan lantai gedung pelelangan	53	54,08
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

PPI Bulu tidak menjadi pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan disebabkan oleh ketersediaan instalasi air bersih di PPI Bulu. Walaupun 7,14% dari keseluruhan masyarakat menyatakan setuju, 36,73% menyatakan kurang setuju

terhadap pernyataan tersebut, bahkan sebagian besar menyatakan tidak setuju yaitu 56,13% (Tabel 4.45).

Tabel 4.45 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Instalasi Air Bersih Menyebabkan PPI Bulu Tidak Menjadi Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	7	7,14
2.	Kurang Setuju.	36	36,73
3.	Tidak Setuju.	55	56,13
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

D. Ketersediaan Fasilitas Pabrik Es

Fasilitas pabrik es berfungsi untuk pembuatan es dan penumpukan/penyimpanan es curai/es balok. PPI Bulu telah tersedia fasilitas pabrik es dengan luas 250 m² dan kapasitas 10 ton, namun saat ini mesin – mesin peralatannya telah mengalami kerusakan, tidak bisa digunakan untuk pembuatan es (gambar 4.15). Pernyataan tersebut didukung oleh 87,76% responden masyarakat perikanan sebagai pengguna fasilitas PPI yang menyatakan bahwa fasilitas pabrik es tersedia tetapi tidak berfungsi untuk penyimpanan es, bukan untuk pembuatan es sehingga kebutuhan es tidak terpenuhi dari PPI Bulu (tabel 4.46)

Tabel 4.46 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Pabrik Es di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Instalasi Air Bersih	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas pabrik es	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.	87	87,76
3.	Fasilitas tersedia, berfungsi untuk pembuatan dan penyimpanan es curai/es balok.	11	12,24
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Kondisi bangunan fasilitas pabrik es tidak terawat, alat – alat pembuatan es telah usang dan bangunan gedung menjadi rusak. Ketersediaan fasilitas pabrik es di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan Hal ini didukung dengan pernyataan setuju oleh 50% responden. Yang kurang setuju dan tidak setuju dengan pendapat tersebut masing – masing sebesar 44,90% dan 5,10% (Tabel 4.47).

Tabel 4.47 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Pabrik Es Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	50	50,00
2.	Kurang Setuju.	44	44,90
3.	Tidak Setuju.	4	5,10
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

E. Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin (*coldstorage/chillroom*)

Gudang dingin (*Cold Storage/chillroom*) merupakan fasilitas PPI yang berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan sehingga kebusukan ikan yang terjadi dapat ditekan. Hal ini dilakukan dengan melayani kebutuhan es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan sebagai upaya penerapan rantai dingin dalam proses penanganan produk hasil tangkapan. Berdasarkan hasil laporan tahunan Badan Pengelola PPI Bulu diperoleh data bahwa fasilitas gudang dingin di PPI Bulu mengalami kerusakan pada bagian pintu yang disebabkan dinding penahan engsel daun pintu patah akibat perkaratan. Gudang dingin akhirnya hanya digunakan untuk menyimpan es yang diperoleh dari luar PPI Bulu guna membantu kebutuhan es tanpa ada penyimpanan atau pembekuan ikan segar di dalamnya (Gambar 4.15). Es digunakan pada saat ikan didaratkan di kawasan PPI Bulu hingga menuju ke daerah pemasaran ikan hasil tangkapan.

Data tersebut didukung dengan hasil kuisioner mengenai tanggapan masyarakat perikanan, dimana sebagian besar responden sebesar 85,71%% menyatakan bahwa fasilitas gudang dingin tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan (Tabel 4.48)

Ketersediaan fasilitas gudang dingin berpengaruh terhadap fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan. Walaupun sebesar 8,16% menyatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut, namun sebagian besar sebanyak 48,98%% menyatakan setuju terhadap pendapat tersebut (Tabel 4.49)

Tabel 4.48 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas gudang dingin	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.	85	85,71
3.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk mempertahankan kesegaran ikan.	13	14,29
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.49 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	48	48,98
2.	Kurang Setuju.	42	42,86
3.	Tidak Setuju.	8	8,16
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

F. Drainase

Drainase sebagai saluran pembuangan limbah/kotoran yang melewati PPI Bulu memiliki panjang 86m². Saluran drainase di kawasan PPI Bulu digunakan sebagai saluran yang menampung limbah aktivitas perikanan di PPI Bulu (gambar 4.15). Dengan tersedianya saluran drainase di kawasan PPI Bulu mampu mendorong kelancaran penanganan ikan hasil tangkapan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan setuju oleh 48,98% responden (Tabel 4.50).

Tabel 4.50 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Saluran Drainase Di Kawasan PPI Bulu Mendorong Kelancaran Penanganan Ikan Hasil Tangkapan.

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	48	48,98
2.	Kurang Setuju.	41	41,84
3.	Tidak Setuju.	9	9,18
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan ditentukan oleh ketersediaan saluran drainase. Pernyataan tersebut kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, dilihat dari besarnya prosentase yang menyatakan kurang setuju sebesar 46,94% dan tidak setuju sebesar 45,92%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.51

Tabel 4.51 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan Ditentukan Oleh Ketersediaan Saluran Drainase

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	7	7,14
2.	Kurang Setuju.	46	46,94
3.	Tidak Setuju.	45	45,92
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.15 Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan

G. Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI

Badan Pengelola PPI Bulu bertugas mengelola fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penanganan ikan di PPI Bulu. Pengelolaan fasilitas dilakukan oleh bagian seksi sarana yang tugasnya melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pelaksana gudang es, khususnya dalam mengelola fasilitas gudang es (*chillroom*). Persepsi masyarakat terhadap kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam menyediakan instalasi air bersih, pabrik es, dan gudang dingin dapat dilihat pada tabel 4.52

Tabel 4.52 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Dalam Menyediakan Instalasi Air Bersih, Pabrik Es, Gudang Dingin, Dan Drainase

No	Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mampu menyediakan fasilitas.	8	9,18
2.	Mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas.	70	70,41
3.	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas.	20	20,41
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.52 dapat ditunjukkan dari keseluruhan responden, yaitu 70,41% responden menyatakan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas. Hal ini bisa dilihat dari adanya kerusakan atau tidak berfungsinya fasilitas yang telah disediakan, yaitu gudang dingin (*chillroom*) dan pabrik es. Selibihnya sebesar 20% responden menyatakan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu mampu menyediakan dan memelihara fasilitas dan 9% responden menyatakan tidak mampu.

Untuk melihat apakah masyarakat setuju bahwa kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas penanganan ikan berpengaruh terhadap fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan hasil tangkapan dapat dilihat pada tabel 4.53. Dari tabel 4.53 diperoleh pendapat bahwa 63,27% responden kurang setuju, 28,57% setuju dan 8,16% tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Tabel 4.53 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan BPPPI Dalam Mengelola Fasilitas Penanganan Ikan Mempengaruhi Fungsi PPI Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	28	28,57
2.	Kurang Setuju.	62	63,27
3.	Tidak Setuju.	8	8,16
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

H. Ketersediaan Dana

Ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan PPI Bulu berpengaruh pada kelancaran aktivitas penanganan. Walaupun 15,31% dari keseluruhan masyarakat memberikan tanggapan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, namun sebagian besar menyatakan setuju yaitu 42,86 % responden. Prosentase persepsi masyarakat mengenai ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas penanganan ikan PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.54

Tabel 4.54 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Penanganan Ikan PPI Bulu Berpengaruh Pada Kelancaran Aktivitas Penanganan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	42	42,86
2.	Kurang Setuju.	41	41,84
3.	Tidak Setuju.	15	15,31
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Ketersediaan dana dari retribusi pemanfaatan fasilitas PPI saat ini diperoleh dari pemanfaatan fasilitas bengkel dan ruangan penanganan ikan oleh masyarakat perikanan. Ketersediaan dana dari retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 0,75 % sudah tidak diterima seiring dengan berhenti beroperasinya pelelangan ikan sejak tahun 2003. Hal ini menunjukkan dana yang tersedia untuk mengelola fasilitas terbatas. Meski demikian dari hasil survey ke responden, mayoritas sebesar 56,12% responden menyatakan kurang setuju bahwa tidak tersedianya dana fasilitas penanganan ikan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penanganan ikan. Ada pula sebesar 33,67% menyatakan setuju dan 10,20% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Gambaran mengenai pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.55

Tabel 4.55 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Dana Fasilitas Penanganan Ikan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	33	33,67
2.	Kurang Setuju.	55	56,12
3.	Tidak Setuju.	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.4 Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

Analisis karakteristik terhadap fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan dikaji dari beberapa variabel, meliputi aktivitas pemasaran, lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga, aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, ketersediaan fasilitas areal parkir, ketersediaan fasilitas jalan penghubung, kemampuan aparatatur kelembagaan dan ketersediaan dana. Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan adalah sebagai berikut,

A. Aktivitas Pemasaran

Kegiatan pemasaran ikan merupakan kegiatan penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen. Waktu pemasaran didasarkan pada jenis ikan yang dipasarkan. Jenis ikan segar setelah melalui penanganan tertentu langsung dikirim pada saat itu juga, yaitu sekitar jam 08.00 – 09.00. Jenis ikan yang melalui proses pengolahan terlebih dahulu biasanya dikirim 1 – 2 hari setelah pendaratan ikan hasil tangkapan sesuai dengan lamanya proses pengolahan ikan. Daerah pemasaran hasil perikanan meliputi pemasaran dalam kota, antar kota dan antar propinsi. Pemasaran dalam kota adalah pemasaran hasil perikanan ke sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, yaitu Desa Nelayan di Kecamatan Bancar dan luar Kecamatan Bancar. Pemasaran antar kota meliputi Surabaya, Bojonegoro, Tulungagung, Mojokerto, dan Trenggalek. Pemasaran antar propinsi meliputi Semarang, Bandung, dan Jakarta. Lebih jelasnya gambaran mengenai jangkauan dan aktivitas pemasaran ikan dapat dilihat pada gambar 4.18 dan 4.19

Aktivitas pemasaran oleh masyarakat perikanan dilakukan dari PPI dan luar PPI Bulu. Sebagian besar responden masyarakat perikanan pernah menampung dan memasarkan ikan hasil tangkapan dari PPI dan luar PPI Bulu, yaitu sebanyak 46,94%

dari seluruh responden masyarakat perikanan. Mengenai aktivitas pemasaran oleh sejumlah responden masyarakat perikanan dapat dilihat pada tabel 456.

Tabel 4.56 Prosentase Aktivitas Penampungan Dan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Responden Masyarakat Perikanan PPI Bulu

No	Aktivitas Penampungan Dan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.	7	7,14
2.	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI dan luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.	46	46,94
3.	Aktivitas penampungan dan pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.	45	45,92
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Aktivitas pemasaran ikan hasil tangkapan dari PPI Bulu mendukung fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Responden masyarakat perikanan yang setuju dengan pernyataan tersebut sebesar 48,98%, yang kurang setuju sebesar 46,94% dan sebesar 4,08% tidak setuju dengan pernyataan tersebut (tabel 4.57).

Tabel 4.57 Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Dari PPI Mendukung Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	48	48,98
2.	Kurang Setuju.	46	46,94
3.	Tidak Setuju.	4	4,08
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

B. Lembaga Pemasaran

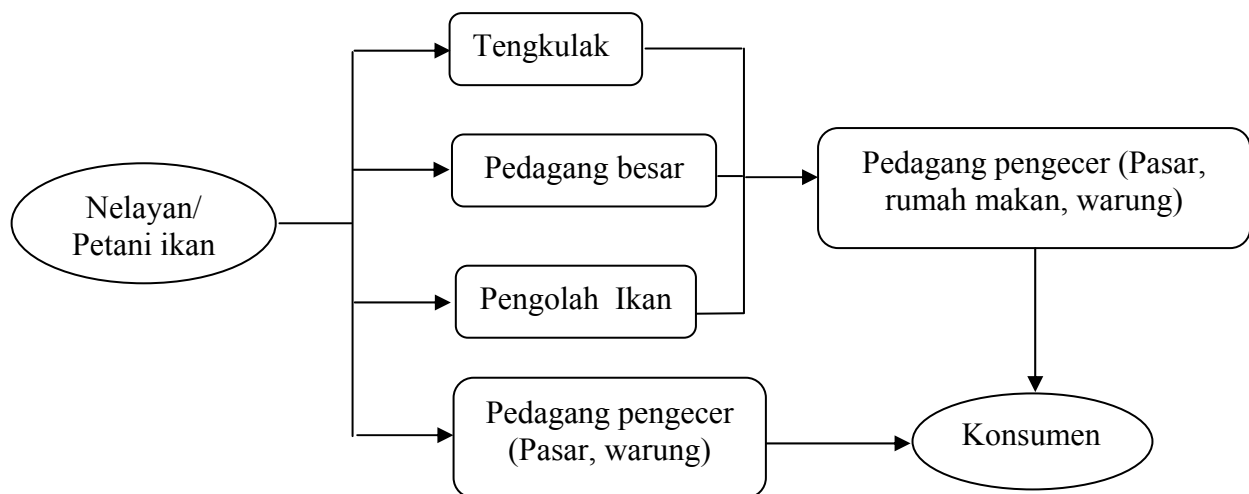
Pemasaran hasil perikanan ke berbagai daerah pemasaran tersebut melibatkan berbagai lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang dilalui dalam kegiatan pemasaran adalah tengkulak, pedagang besar, pengolah ikan, dan pedagang pengecer (pasar, warung). Banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat tersebut menunjukkan adanya berbagai pola pemasaran hasil perikanan. Melalui pola pemasaran hasil perikanan dapat diperlihatkan pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran dan sekaligus menunjukkan panjang – pendeknya saluran tata niaga hasil perikanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pedagang diperoleh data mengenai pola pemasaran hasil perikanan. Pola pemasaran hasil perikanan dibedakan menjadi dua berdasarkan daerah pemasaran, yaitu pola pemasaran dalam Kabupaten Tuban

dan pola pemasaran luar Kabupaten Tuban. Lebih jelasnya mengenai pola pemasaran dapat dilihat pada gambar 4.16 dan 4.17

1) Pola Pemasaran Hasil Perikanan dalam Kabupaten Tuban

Berdasarkan gambar 4.16 dapat diperlihatkan adanya pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran dalam Kabupaten Tuban. Pihak yang terlibat sebagai lembaga pemasaran tersebut membentuk beberapa saluran pemasaran sebagai berikut,

1. Nelayan/petani ikan – tengkulak – pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen.
2. Nelayan/petani ikan - Pedagang besar - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen.
3. Nelayan/petani ikan - Pengolah Ikan - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) - konsumen.
4. Nelayan/petani ikan - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) - konsumen.

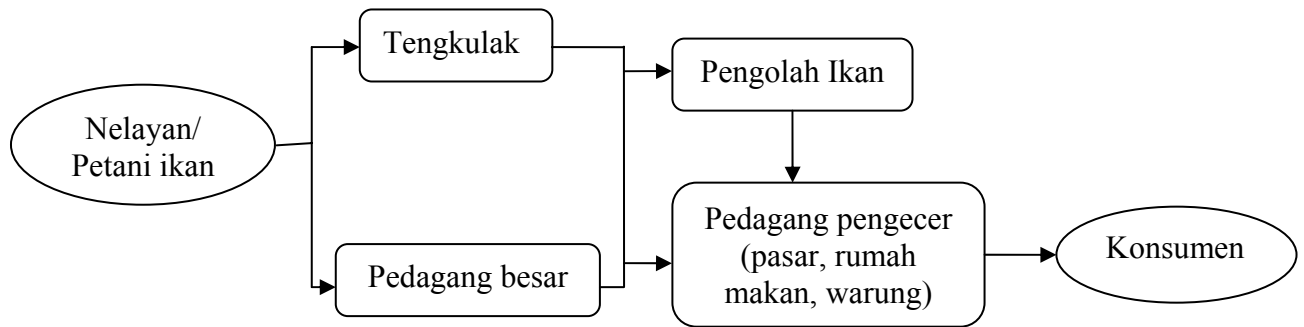


Gambar 4.16 Pola Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Kabupaten Tuban

Pada beberapa saluran pemasaran tersebut melibatkan pedagang pengecer (pasar, rumah makan, dan warung) yang berlokasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Singgahan, dan Kecamatan Kerek.

2) Pola Pemasaran Hasil Perikanan Luar Kabupaten Tuban

Pada gambar 4.17 ditunjukkan pola pemasaran hasil perikanan luar Kabupaten Tuban sebagai berikut,



Gambar 4.17 Pola Pemasaran Hasil Perikanan Luar Kabupaten Tuban

Berdasarkan gambar 4.17 membentuk beberapa saluran pemasaran sebagai berikut,

1. Nelayan/petani ikan – tengkulak – pengolah ikan - Pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen.
2. Nelayan/petani ikan – tengkulak - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen.
3. Nelayan/petani ikan - pedagang besar – pengolah ikan - Pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen.
4. Nelayan/petani ikan - Pedagang besar - Pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen.

Pada beberapa saluran pemasaran tersebut melibatkan pedagang pengecer (pasar, rumah makan, dan warung) yang berlokasi di beberapa kota, yaitu Surabaya, Bojonegoro, Tulungagung, Mojokerto, dan Trenggalek Semarang, Bandung, dan Jakarta.

Pola pemasaran dalam Kabupaten Tuban dan luar Kabupaten tersebut menunjukkan adanya pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran dan sekaligus menunjukkan panjang – pendeknya saluran tata niaga hasil perikanan. Saluran Pemasaran paling panjang adalah Nelayan/petani ikan – tengkulak – pengolah ikan - Pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen. Hal ini ditunjukkan pada pola pemasaran luar Kabupaetn Tuban. Sedangkan saluran pemasaran paling pendek adalah Nelayan/petani ikan - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) - konsumen. Hal ini ditunjukkan pada pola pemasaran dalam Kabupaten Tuban.

Berdasarkan panjang pendeknya saluran tata niaga hasil perikanan, pola pemasaran yang paling efisien adalah yang paling pendek saluran pemasarannya, yaitu nelayan/petani ikan - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) –

konsumen. Pada pola pemasaran tersebut membentuk margin pemasaran yang rendah sehingga harga di tingkat produsen tinggi dan harga di tingkat konsumen layak atau rendah. Pola pemasaran yang paling panjang saluran pemasarannya adalah Nelayan/petani ikan – tengkulak – pengolah ikan - Pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen. Pada pola pemasaran tersebut lebih banyak melibatkan lembaga pemasaran sehingga meningkatkan margin pemasaran. Hal ini menyebabkan harga di tingkat produsen menjadi rendah, dan harga di tingkat konsumen tinggi. Dengan demikian, produsen dan konsumen tidak saling diuntungkan. Dengan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih lama yang mampu meningkatkan resiko terjadinya kerusakan ikan

Beragamnya pola pemasaran hasil perikanan di wilayah penelitian berpengaruh terhadap keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan. Sebagian besar masyarakat perikanan menyatakan bahwa keberhasilan PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan disebabkan adanya saluran pemasaran yang efektif atau saluran pemasaran yang melibatkan sedikit lembaga pemasaran, yaitu ≤ 3 lembaga pemasaran. Lebih jelasnya prosentase persepsi masyarakat terkait dengan pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.58

Pada tabel 4.58 dapat ditunjukkan bahwa sebesar 29,59% responden setuju, 36,73% kurang setuju dan 33,67% tidak setuju bahwa saluran pemasaran yang efektif menyebabkan keberhasilan fungsi PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.

Tabel 4.58 Persepsi Masyarakat Bahwa Saluran Pemasaran Yang Efektif Menyebabkan Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	29	29,59
2.	Kurang Setuju.	36	36,73
3.	Tidak Setuju.	33	33,67
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Selain pernyataan tersebut diatas dikemukakan pernyataan dari masyarakat yang mayoritas sebesar 54,08% tidak setuju bahwa panjangnya saluran pemasaran menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Yang setuju dengan pernyataan tersebut terdapat 6,12% responden masyarakat perikanan (tabel 4.59).

Tabel 4.59 Persepsi Masyarakat Bahwa Panjangnya Saluran Pemasaran Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	6	6,12
2.	Kurang Setuju.	39	39,80
3.	Tidak Setuju.	54	54,08
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

C. Informasi Pasar dan Harga

Informasi pasar meliputi stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga. Informasi pasar dan harga disediakan di sebuah Pangkalan Pendaratan Ikan sangat diperlukan oleh nelayan, petani ikan, pengolah hasil perikanan, pedagang dan konsumen untuk tujuan perbaikan efisiensi pemasaran dan peningkatan volume pemasaran. Responden masyarakat perikanan sebagai pengguna fasilitas PPI Bulu membutuhkan informasi pasar dan harga guna mendukung kelancaran pemasaran. Ketersediaan informasi mengenai pasar dan harga di PPI Bulu berdasarkan persepsi masyarakat dapat dijelaskan pada tabel 4.60

Tabel 4.60 Prosentase Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga di PPI Bulu

No	Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak menyediakan informasi pasar dan harga.	60	61,22
2.	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai pergerakan arus barang dan harga.	38	38,78
3.	Menyediakan informasi pasar dan harga mengenai stock dan penawaran, pergerakan arus barang dan harga.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.60 dapat ditunjukkan bahwa 61,22% responden menyatakan PPI Bulu tidak menyediakan informasi pasar dan harga. Ketersediaan informasi pasar dan harga yang ada di PPI Bulu menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil menjadi pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Pernyataan ini didukung oleh 60,20% responden masyarakat perikanan yang menyatakan setuju. Persepsi masyarakat bahwa ketersediaan informasi pasar dan harga di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil menjadi pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan dapat dilihat pada tabel 4.61

Tabel 4.61 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga Di Ppi Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Menjadi Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	59	60,20
2.	Kurang Setuju.	30	30,61
3.	Tidak Setuju.	9	9,18
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

D. Aksesibilitas Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan

Penyediaan jaringan jalan, moda transportasi darat dan laut sebagai prasarana dan sarana sistem transportasi diperlukan untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. Adapun tingkat kemudahan dalam penyaluran produk perikanan dari PPI Bulu ke daerah pemasaran tangkapan ikan dapat dilihat pada tabel 4.62. Dari tabel 4.62 dapat dilihat bahwa mayoritas sebesar 57,14% responden menyatakan bahwa aksesibilitas dalam penyaluran produk perikanan dirasakan mudah dengan ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi darat.

Tabel 4.62 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Mendistribusikan Produksi Perikanan Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan

No	Kemudahan Mendistribusikan Produksi Perikanan Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mudah dengan tidak tersedia jaringan jalan dan moda transportasi darat.	0	0,00
2.	Cukup mudah dengan ketersediaan jaringan jalan atau moda transportasi darat.	42	42,86
3.	Mudah dengan ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi darat.	56	57,14
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Adanya kemudahan yang dirasakan oleh sebagian besar responden masyarakat perikanan tersebut ditunjang dengan keberadaan lokasi PPI Bulu yang strategis, yaitu :

- Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu berada pada jalur transportasi Pantai Utara Jawa dengan hirarki jalan arteri primer dan dibangun sebagai outer ring-road (lingkar luar) bagi Kabupaten Tuban.
- Sirkulasi pengangkutan hasil perikanan cukup lancar didukung adanya alat transportasi dan jarang terjadi kemacetan pada proses perjalanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan.

- Kegiatan penyaluran hasil perikanan dari produsen ke konsumen di dalam Kabupaten Tuban dan di luar Kabupaten menggunakan alat transportasi diantaranya, angkutan pedesaan, pick-up dan truck.

TPI Bulu yang berada di lokasi yang strategis dan didukung dengan aksesibilitas yang baik tersebut mendukung kemudahan perolehan peralatan perikanan dan kegiatan pemasaran ikan. Daerah pemasaran produk perikanan dari PPI Bulu dibedakan menjadi tiga, yaitu daerah pemasaran produksi perikanan dalam kota, antar kota dan antar propinsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pedagang, perjalanan ke masing – masing daerah pemasaran produk perikanan tersebut memiliki jarak, waktu tempuh dan moda transportasi yang berbeda – beda, yaitu :

- Pemasaran dalam kota dengan jarak 1 – 2 km ditempuh dalam waktu 10 – 15 menit ke desa nelayan di sekitar PPI Bulu, jarak 20 km dengan waktu 30 menit ke Pasar Glondong gede, Kecamatan Tambakboyo dan jarak 45 km dengan waktu tempuh 1 jam ke kota Tuban (gambar 4.19). Alat transportasi yang digunakan adalah angkutan pedesaan dan mobil pick-up.
- Pemasaran antar kota pada jarak > 50 Km ditempuh dalam waktu 3 – 6 jam yaitu ke Surabaya, Bojonegoro dan Tulungagung dengan mobil pickup.
- Pemasaran antar propinsi pada jarak > 100 Km ditempuh dalam waktu 1 – 2 hari, yaitu ke Semarang, Bandung dan Jakarta dengan truck.

Tabel 4.63 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jaringan Jalan Dan Moda Transportasi Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan Menyebabkan Ketidاكلancaran Pemasaran Produk Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	12	12,24
2.	Kurang Setuju.	34	34,69
3.	Tidak Setuju.	52	53,06
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Adanya kemudahan dalam penyaluran produk perikanan didukung dengan pernyataan oleh sebagian besar responden sebanyak 53,06% yang tidak setuju bahwa ketersediaan jaringan jalan dan moda transportasi dari PPI Bulu ke daerah pemasaran tangkapan ikan menyebabkan ketidاكلancaran pemasaran produk perikanan.

E. Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan

PPI sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan menggunakan fasilitas gedung pelelangan untuk tempat penampungan dan transaksi jual beli ikan sebagai bagian dari aktivitas pemasaran.

Sebelum hasil perikanan dipasarkan ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan terdapat kegiatan penampungan, pemilahan (sortasi), penimbangan, transaksi jual beli ikan yang dilakukan di gedung pelelangan ikan PPI Bulu dengan luas 162 m² (Gambar 4.19). Masyarakat perikanan sebagai pengguna fasilitas di PPI Bulu menilai bahwa fasilitas gedung pelelangan ikan tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang. Pernyataan tersebut didapat dari 73,47% responden masyarakat perikanan, sedangkan sebesar 26,53% menyatakan bahwa fasilitas gedung pelelangan ikan tersedia dan berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang (Tabel 4.64).

Tabel 4.64 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas gedung pelelangan.	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.	72	73,47
3.	Fasilitas tersedia dan berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.	26	26,53
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Sebesar 57,14% responden masyarakat perikanan kurang setuju bahwa ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan di PPI Bulu mendukung fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Lebih jelasnya mengenai tanggapan masyarakat terhadap pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.65

Tabel 4.65 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Mendukung Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	33	33,67
2.	Kurang Setuju.	56	57,14
3.	Tidak Setuju.	9	9,18
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

F. Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir

PPI Bulu memiliki dua bidang halaman/areal parkir yang luasnya 175m², berada di depan kantor BPPPI dan depan gedung pabrik es. Berdasarkan hasil observasi ke wilayah penelitian, areal parkir depan kantor BPPPI dimanfaatkan untuk kegiatan parkir bagi tamu – tamu dinas dan parkir kendaraan karyawan PPI sedangkan areal parkir di depan gedung pabrik es tidak digunakan untuk menampung alat

transportasi pengangkut hasil perikanan melainkan sebagai salah satu tempat jual beli ikan hasil tangkapan (gambar 4.19). Ketersediaan areal parkir yang seharusnya sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan, melancarkan arus lalu lintas di PPI, dan mampu menampung 4 mobil tidak digunakan untuk menampung alat transportasi pengangkut ikan. Kendaraan pengangkut hasil perikanan parkir di luar halaman PPI Bulu atau di tepi jalan.

Hasil observasi peneliti didukung dengan hasil survey ke responden masyarakat perikanan, yaitu sebesar 81,63% responden menyatakan bahwa fasilitas areal parkir tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan sedangkan sebesar 18,37% responden menyatakan bahwa areal parkir telah berfungsi sebagaimana mestinya (tabel 4.66).

Tabel 4.66 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir di PPI Bulu

No	Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak tersedia fasilitas areal parkir	0	0,00
2.	Fasilitas tersedia tetapi tidak berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan.	81	81,63
3.	Fasilitas tersedia dan berfungsi sebagai tempat parkir moda transportasi pengangkut ikan hasil tangkapan	17	18,37
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Ketersediaan fasilitas areal parkir di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Tidak seluruh responden masyarakat perikanan setuju dengan pernyataan tersebut. Bahkan didominasi dengan pernyataan kurang setuju yang persentasenya sebesar 59,18%; 30,61% responden menyatakan setuju dan 10,20% responden menyatakan tidak setuju (tabel 4.67).

Tabel 4.67 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	30	30,61
2.	Kurang Setuju.	58	59,18
3.	Tidak Setuju.	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.18 Jangkauan Pemasaran Produk Perikanan

Gambar 4.19 Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

G. Ketersediaan Fasilitas Jalan Penghubung

Jalan penghubung merupakan jalan komplek pelabuhan yang berfungsi untuk melancarkan aktivitas pengangkutan ikan. Pernyataan tersebut didukung oleh 52,04% responden masyarakat perikanan bahwa ketersediaan fasilitas jalan penghubung memperlancar aktivitas pengangkutan ikan di PPI Bulu (tabel 4.68).

Tabel 4.68 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Jalan Penghubung Memperlancar Aktivitas Pengangkutan Ikan di PPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	51	52,04
2.	Kurang Setuju.	30	30,61
3.	Tidak Setuju.	17	17,35
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Hasil observasi ke wilayah penelitian menunjukkan PPI Bulu tidak memiliki jalur penghubung sebagai jalur khusus yang berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan. Sebagian besar responden masyarakat perikanan setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu sebesar 55,10%. Selebihnya tanggapan responden masyarakat perikanan mengenai ketersediaan jalan penghubung PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan dapat dilihat pada tabel 4.69

Tabel 4.69 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jalan Penghubung PPI Bulu Menyebabkan PPI Tidak Berhasil Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	54	55,10
2.	Kurang Setuju.	34	34,69
3.	Tidak Setuju.	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

H. Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan Badan Pengelola PPI

Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu telah menyediakan fasilitas gedung pelelangan dan areal parkir guna mendukung kegiatan pemasaran dari PPI Bulu. Namun belum mampu menyediakan jalan penghubung untuk memperlancar kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan. Dari hasil survey ke masyarakat perikanan, mayoritas sebesar 69,39% responden menilai Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pengelola PPI Bulu telah mampu menyediakan fasilitas tanpa

memelihara dan 30,61% tidak mampu menyediakan fasilitas (tabel 4.70). Dari kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pengelola PPI Bulu dalam mengelola fasilitas mendukung keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.71 bahwa sebanyak 42,86% responden masyarakat perikanan menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut.

Tabel 4.70 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Gedung Pelelangan, Areal Parkir, Dan Jalan Penghubung

No	Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mampu menyediakan fasilitas	30	30,61
2.	Mampu menyediakan tanpa memelihara fasilitas	68	69,39
3.	Mampu menyediakan dan memelihara fasilitas	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.71 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan BPPPI Bulu Mengelola Fasilitas Pemasaran Hasil Perikanan Mendukung Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	42	42,86
2.	Kurang setuju	38	38,78
3.	Tidak setuju	18	18,37
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

I. Ketersediaan Dana

Ketersediaan dana untuk pembangunan fasilitas perikanan mampu menunjang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh masyarakat perikanan. Salah satunya adalah dana untuk mengelola fasilitas pemasaran guna mendukung fungsi PPI sebagai pusat pemasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPPPI Bulu, dana untuk mengelola fasilitas pemasaran saat ini belum dapat diupayakan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur sehingga fasilitas yang ada belum terpelihara dengan baik. Meski demikian sebagian besar masyarakat sebanyak 42,86% responden menyatakan kurang setuju bahwa ketersediaan dana untuk mengelola fasilitas pemasaran ikan di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.72

Tabel 4.72 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Pemasaran Ikan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Hasil Perikanan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	36	36,73
2.	Kurang setuju	42	42,86
3.	Tidak setuju	20	20,41
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berbeda halnya dengan persepsi masyarakat bahwa untuk mengelola fasilitas yang melayani pemasaran ikan di PPI Bulu diperlukan dana yang tidak sedikit. Secara keseluruhan responden masyarakat perikanan setuju dengan pernyataan tersebut terlihat pada prosentase responden sebesar 50,00%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.73

Tabel 4.73 Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Melayani Pemasaran Ikan di PPI Bulu Diperlukan Dana Yang Tidak Sedikit

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	50	50,00
2.	Kurang setuju	38	39,80
3.	Tidak setuju	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.5 Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data dikaji dari beberapa variabel meliputi penyuluhan , pengumpulan data, kemampuan penyuluh perikanan, kelompok masyarakat perikanan, ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan, ketersediaan fasilitas kantor administrasi, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, serta ketersediaan dana. Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut,

A. Penyuluhan

Fungsi PPI sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan adalah memberikan pengarahan terhadap masyarakat perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Penyuluhan sebagai bentuk penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat perikanan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat perikanan.

Pelaksanaan penyuluhan dilihat berdasarkan jenis dan penyelenggara serta peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan. Penyelenggaraan penyuluhan di PPI

Bulu yang diselenggarakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 4.74 berikut,

Tabel 4.74 Pelaksanaan Penyuluhan Masyarakat Perikanan PPI Bulu

Tahun	Jenis Kegiatan	Penyelenggara	Peserta
2004	Sosialisasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan	Subdinas Prasarana Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur	Nelayan, Bakul dan unsur Muspika
	Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam menunjang peningkatan partisipasi pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana tangkap	Subdinas prasarana perikanan dan kelautan Propinsi Jawa Timur	Nelayan, Bakul
	Pelatihan penerapan PMMT bagi nelayan	Subdinas usaha perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur	Nelayan, Bakul dan unsur Muspika, Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban
2005	Tidak ada kegiatan	-	-
2006	Sosialisasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 dan 7 tahun 2005 tentang retribusi pemakaian kekayaan negara	Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur	Muspika Kecamatan Bancar, Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban
	Pelatihan teknologi penangkapan ikan	BPPPI Bulu, BBPPPI Semarang	Kelompok nelayan Purseine
	Penyuluhan alat GPS	BPPPI Bulu dan BBPPPI Probolinggo	Kelompok Masyarakat Nelayan

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pengelola PPI Bulu

Dari tabel 4.74 diatas dapat dilihat adanya kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan pada tahun 2004 dan 2006, sedangkan tahun 2005 tidak terselenggara penyuluhan. Penyelenggara penyuluhan tersebut diantaranya adalah Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pengelola PPI yang dihadiri oleh nelayan, pedagang/bakul dan unsur Muspika Kecamatan Bancar. Berbagai jenis kegiatan penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM perikanan dalam menjalankan aktivitas perikanan, diantaranya (1) penyuluhan yang berkaitan dengan teknologi penangkapan ikan dan penyuluhan alat GPS bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan, (2) sosialisasi yang berkaitan dengan retribusi pelelangan ikan dan pemanfaatan fasilitas PPI bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional PPI Bulu. Kegiatan penyuluhan perikanan tidak selalu diikuti oleh masyarakat perikanan (gambar 4.20). Peran serta masyarakat dalam mengikuti penyuluhan dapat dilihat pada tabel 4.75

Tabel 4.75 Prosentase Peran Serta Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Penyuluhan di PPI Bulu

No	Peran Serta Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Penyuluhan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu	56	57,14
2.	Mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan.	42	42,86
3.	Mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan dan prinsip – prinsip serta praktek tataniaga.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Dari tabel 4.75 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sebanyak 57,14% tidak pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu, sedangkan 42,86% mengikuti penyuluhan di PPI Bulu mengenai teknis penangkapan. Penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu tersebut menunjukkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Hal ini dinyatakan kurang setuju oleh 50,00% responden, sedangkan yang setuju sebanyak 33,67% dan yang tidak setuju sebesar 16,33% (tabel 4.76).

Tabel 4.76 Persepsi Masyarakat Bahwa Penyelenggaraan Penyuluhan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	33	33,67
2.	Kurang setuju	50	50,00
3.	Tidak setuju	15	16,33
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

B. Pengumpulan Data

Dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan diperlukan data perikanan baik data primer maupun data sekunder. Selain kegiatan penyuluhan untuk masyarakat perikanan, di PPI Bulu juga telah terkumpul data perikanan baik data primer maupun data sekunder. Pelayanan data dan informasi kegiatan perikanan tangkap di sekitar PPI Bulu disediakan oleh Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu. Data perikanan ini dihimpun dari sumber data/ pelaku usaha perikanan tangkap, meliputi jumlah dan jenis kapal perikanan yang berlabuh di PPI Bulu, jumlah dan jenis alat tangkap, jumlah nelayan, jenis, jumlah dan nilai produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu, daerah pemasaran hasil perikanan, jumlah tenaga kerja, jenis dan jumlah perbekalan melaut, dan ketersediaan fasilitas. Data ini digunakan untuk pelaporan tentang kondisi perikanan

yang ada di PPI Bulu kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. Data – data tersebut dibutuhkan oleh masyarakat/swasta, lembaga dan pemerintah.

Kelengkapan data mengenai kondisi perikanan PPI Bulu menentukan keberhasilan fungsi PPI Bulu sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Pernyataan tersebut didukung oleh 53,06% responden masyarakat perikanan yang menyatakan setuju (tabel 4.77).

Tabel 4.77 Persepsi Masyarakat Bahwa PPI Bulu Bisa Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data Ditentukan Dari Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	52	53,06
2.	Kurang setuju	28	28,57
3.	Tidak setuju	18	18,37
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Sebagian besar responden masyarakat perikanan menyatakan kurang setuju sebesar 41,84% dan tidak setuju sebesar 40,82% bahwa pengumpulan data di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Prosentase terkecil sebesar 17,35% yang setuju terhadap pernyataan tersebut (tabel 4.78)

Tabel 4.78 Persepsi Masyarakat Bahwa Pengumpulan Data di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	17	17,35
2.	Kurang setuju	41	41,84
3.	Tidak setuju	40	40,82
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

C. Kemampuan Penyuluh Perikanan

Penyuluh perikanan bertugas melaksanakan penyuluhan perikanan di lapangan. Penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan perikanan memiliki beberapa metode pendekatan, dapat bersifat persuasif, akomodatif, dan fasilitatif. Kemampuan penyuluh perikanan dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat perikanan dapat dijelaskan pada tabel 4.79

Tabel 4.79 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyuluh Perikanan Dalam Memberikan Penyuluhan Perikanan

No	Kemampuan Penyuluh Perikanan Dalam Memberikan Penyuluhan Perikanan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Hanya mampu meyakinkan	40	40,82
2.	Mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan	41	41,84
3.	Mampu meyakinkan, mengakomodasi masalah di	17	17,35

	bidang perikanan dan mampu menghubungkan masyarakat perikanan dengan sumber informan.		
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.79 sebesar 41,84% responden menilai bahwa penyuluh perikanan mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan, 40,82% responden menilai bahwa penyuluh perikanan hanya mampu meyakinkan dan 17,35% responden menilai penyuluh perikanan masmpu meyakinkan, mengakomodasi masalah di bidang perikanan dan mampu menghubungkan masyarakat perikanan dengan sumber informan. Dengan melihat kemampuan penyuluh perikanan tersebut menjadi penyebab PPI Bulu kurang berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data (tabel 4.80). Dari tabel 4.80 dapat ditunjukkan 48,98% dari seluruh responden masyarakat perikanan menyatakan setuju.

Tabel 4.80 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Penyuluh Perikanan Di Ppi Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	48	48,98
2.	Kurang setuju	37	37,76
3.	Tidak setuju	13	13,27
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

D. Kelompok Masyarakat Perikanan

Kelompok masyarakat perikanan merupakan kelompok khalayak yang menerima penyuluhan, yaitu kelompok nelayan. Kelompok nelayan baru dibentuk pada tahun 2006 oleh Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu. Sebelumnya kelompok nelayan yang ada masih berupa perkumpulan nelayan yang melakukan kumpul – kumpul antar masyarakat nelayan tanpa ada keterkaitan dengan lembaga – lembaga formal seperti Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu.

Kelompok nelayan saat ini ada tiga kelompok yang masing – masing terdiri dari sepuluh orang, yaitu satu nelayan pemilik kapal sebagai ketua kelompok dan sembilan Anak Buah Kapal sebagai anggota. Kelompok nelayan ini merupakan gabungan masyarakat nelayan yang berasal dari Desa Bulujowo, Banjarjo dan Bulumeduro. Keberadaan kelompok nelayan ini bertujuan untuk mempermudah

penyaluran informasi yang diberikan oleh lembaga – lembaga formal bagi masyarakat nelayan. Melalui kelompok nelayan ini pernah diselenggarakan pertemuan yang membahas permasalahan – permasalahan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu, yaitu tidak beroperasinya pelelangan ikan, kerusakan fasilitas, dan pemberian penyuluhan yang berkaitan dengan teknologi penangkapan ikan. Mengingat kelompok nelayan ini baru terbentuk tahun 2006 dan belum seluruh masyarakat nelayan bergabung dalam kelompok nelayan sehingga informasi yang diberikan belum seluruhnya diterima oleh masyarakat nelayan.

Kelompok nelayan yang terbentuk tersebut belum diikuti oleh seluruh masyarakat perikanan. Peran serta masyarakat nelayan dalam kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel 4.81

Tabel 4.81 Peran Serta Masyarakat Dalam Kelompok Masyarakat Perikanan di PPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Belum bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan.	39	39,80
2.	Bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan tetapi hanya sebagai formalitas.	42	42,86
3.	Bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan dan berperan aktif mengikuti kegiatannya.	17	17,35
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Dari tabel 4.81 dapat dilihat bahwa 42,86 % responden bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan tetapi hanya sebagai formalitas, 39,80% responden belum bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan. Prosentase paling kecil sebesar 17,35% responden yang telah bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan dan berperan aktif dalam penyuluhan (tabel 4.82).

Tabel 4.82 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberadaan Kelompok Masyarakat Perikanan Di Wilayah Penelitian Mendukung PPI Bulu Tidak Menjadi Pusat Pelaksanaan Penyuluhan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	43	43,88
2.	Kurang setuju	35	35,71
3.	Tidak setuju	20	20,41
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

E. Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan

Fasilitas balai pertemuan nelayan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan terhadap aktivitas penyuluhan. PPI Bulu tidak memiliki balai pertemuan nelayan sehingga menggunakan gedung pelelangan ikan yang berfungsi sebagai

tempat berkumpulnya para nelayan Bulu termasuk dalam memberikan penyuluhan bagi para nelayan dan pedagang Bulu (gambar 4.20). Dengan adanya fasilitas gedung pelelangan sebagai pengganti fasilitas balai pertemuan nelayan mempengaruhi tanggapan responden masyarakat perikanan bahwa ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan mendukung penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu. Masing – masing sebesar 42,86% responden menyatakan setuju dan kurang setuju bahwa ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan mendukung penyelenggaraan penyuluhan di PPI Bulu sedangkan 14,29% tidak setuju dengan pernyataan tersebut (tabel 4.83).

Tabel 4.83 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di PPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	42	42,86
2.	Kurang setuju	42	42,86
3.	Tidak setuju	14	14,29
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berbeda halnya dengan persepsi masyarakat bahwa ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan di PPI Bulu menjadikan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan. Mayoritas responden masyarakat perikanan sebesar 44,90% tidak setuju dengan pernyataan tersebut (Tabel 4.84).

Tabel 4.84 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Di PPI Bulu Menjadikan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	13	13,27
2.	Kurang setuju	41	41,84
3.	Tidak setuju	44	44,90
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

F. Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi

Fasilitas kantor administrasi digunakan sebagai tempat pengumpulan data statistik perikanan. Di PPI Bulu tersedia kantor administrasi dengan luas 950 m². Kondisi fisik bangunan tidak rusak, bersih dan terawat, mampu menampung aktivitas pemakai di dalamnya, yaitu para aparatur Badan Pengelola PPI Bulu. Hal ini ditunjukkan adanya penataan ruang yang rapi dan memberi kesan nyaman bagi para pegawai Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu (gambar 4.20).

Kantor administrasi PPI Bulu berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil survey ke reponen masyarakat perikanan diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden, yaitu sebesar 47,96% menyatakan setuju bahwa ketersediaan fasilitas kantor administrasi mendukung fungsi PPI Bulu dalam kegiatan pengumpulan data (tabel 4.85). Dengan tersedia kantor administrasi, data – data mengenai kondisi perikanan di PPI Bulu dapat dikumpulkan dan disimpan guna keperluan selanjutnya.

Tabel 4.85 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi Mendukung Fungsi PPI Bulu Dalam Kegiatan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	47	47,96
2.	Kurang setuju	41	41,84
3.	Tidak setuju	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Ketersediaan fasilitas kantor administrasi di PPI Bulu mendukung fungsi PPI Bulu dalam kegiatan pengumpulan data. Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian besar responden (55,10%) tidak setuju bahwa ketersediaan fasilitas kantor administrasi di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil dalam pengumpulan data (tabel 4.86).

Tabel 4.86 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Dalam Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	10	10,20
2.	Kurang setuju	34	34,69
3.	Tidak setuju	54	55,10
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.20 Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengumpulan Data

G. Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI

Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI dalam mengelola fasilitas kantor administrasi dan balai pertemuan nelayan mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data. Hal ini disebabkan kelancaran kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas – fasilitas tersebut yang dikelola oleh BPPPI Bulu. Dari hasil wawancara dengan BPPPI Bulu didapatkan kesimpulan bahwa BPPPI bersama Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur belum mampu menyediakan fasilitas balai pertemuan nelayan sedangkan kantor administrasi masih terpelihara dengan adanya kebersihan ruang dan kondisi bangunan yang tidak rusak.

Berbeda halnya dengan persepsi masyarakat, responden masyarakat perikanan sebagai pihak yang menerima penyuluhan menyatakan kurang setuju (47,96%) bahwa kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dalam mengelola fasilitas balai pertemuan nelayan dan kantor administrasi mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data (tabel 4.87).

Tabel 4.87 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Mengelola Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Dan Kantor Administrasi Mempengaruhi Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	26	26,53
2.	Kurang setuju	47	47,96
3.	Tidak setuju	25	25,51
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Persepsi masyarakat tersebut didukung oleh 50,00% responden yang menyatakan kurang setuju bahwa aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu yang tidak mampu menyediakan fasilitas menjadi penyebab PPI Bulu kurang berhasil menyelenggarakan penyuluhan dan mengumpulkan data. (tabel 4.88)

Tabel 4.88 Persepsi Masyarakat Bahwa Aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu Yang Tidak Mampu Menyediakan Fasilitas Menjadi Penyebab PPI Bulu Kurang Berhasil Menyenggarakan Penyuluhan dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	23	23,47
2.	Kurang setuju	50	50,00
3.	Tidak setuju	25	26,53
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

H. Ketersediaan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPPPI Bulu diperoleh data bahwa untuk menyediakan fasilitas balai pertemuan nelayan belum tersedia dana dari APBN.

Dengan dana yang terbatas untuk menyediakan balai pertemuan nelayan menyebabkan PPI Bulu kurang berhasil sebagai pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. Terdapat masing – masing sebesar 34,69% responden yang menyatakan setuju dan kurang setuju terhadap pernyataan tersebut (tabel 4.89).

Tabel 4.89 Persepsi Masyarakat Bahwa Keterbatasan Dana Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berhasil Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	34	34,69
2.	Kurang setuju	34	34,69
3.	Tidak setuju	30	30,61
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Sebagian besar masyarakat (47,96%) menyatakan kurang setuju bahwa tidak tersedianya dana untuk menyediakan balai pertemuan nelayan dan merawat bangunan kantor administrasi PPI Bulu mendukung kegiatan penyuluhan dan pengumpulan data (tabel 4.90).

Tabel 4.90 Persepsi Masyarakat Bahwa Dana Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan - Kantor Administrasi PPI Bulu Mendukung Kegiatan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	25	25,51
2.	Kurang setuju	47	47,96
3.	Tidak setuju	26	26,53
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.6 Fasilitator Pembentukan Harga

Karakteristik terhadap fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga ditinjau dari beberapa variabel meliputi penjualan ikan hasil tangkapan, pembayaran ikan hasil tangkapan, peraturan penyelenggaraan lelang, peran serta masyarakat, dan kemampuan aparatur kelembagaan KUD.

A. Penjualan Ikan Hasil Tangkapan

Jual beli ikan hasil tangkapan di PPI Bulu tidak melalui proses pelelangan ikan dimana dengan proses pelelangan ikan terdapat persaingan harga antar pedagang dan

nelayan memiliki posisi tawar dalam penentuan harga. Hal ini terjadi sejak tahun 2003 dimana Pemerintah Daerah Tingkat I dalam hal ini gubernur mengeluarkan Surat Keputusan untuk mencabut ijin pelelangan di PPI Bulu dari KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo” hingga sekarang. Sejak itu pula sebagian besar nelayan dan pedagang melakukan aktivitas jual – beli ikan hasil tangkapan di luar PPI Bulu, yaitu di sepanjang pantai Bulu. Dalam proses jual beli ikan, harga ditentukan oleh pedagang tanpa melibatkan lembaga tertentu misalnya Koperasi Unit Desa (KUD). Harga ikan basah yang ditetapkan oleh pedagang/bakul disesuaikan dengan jenis ikan. Dari data potensi perikanan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Bulu, diperoleh harga ikan Tengiri Rp. 19.000 – Rp. 21.000,- per Kg; Tongkol Rp. 8.000 – Rp. 9.000,- per Kg; Kembung (ukuran sedang) Rp. 5.500,- - Rp. 6.500,- per Kg; Cumi –cumi (ukuran besar Rp. 20.000,- per Kg, ukuran sedang Rp.17.000 – Rp.18.000,- per Kg dan ukuran kecil Rp. 9.000 – Rp. 12.000,- per Kg). Harga jual ikan kering atau jemuran juga disesuaikan dengan jenis ikannya, contoh Teri (cemek, kadrak) Rp. 28.000 – Rp. 32.000 per Kg; Tembang/Jui Rp. 1.200 – Rp. 1.500,- per Kg dan Kembung (ukuran besar Rp. 3.500,- – Rp. 7.000,- per Kg dan ukuran kecil Rp. 4.000,- – Rp 6.000,- per Kg) Harga ikan ini berfluktuatif dan ditetapkan oleh pedagang, namun kurang sesuai dengan harga pasar dan cenderung merugikan kepentingan masyarakat nelayan.

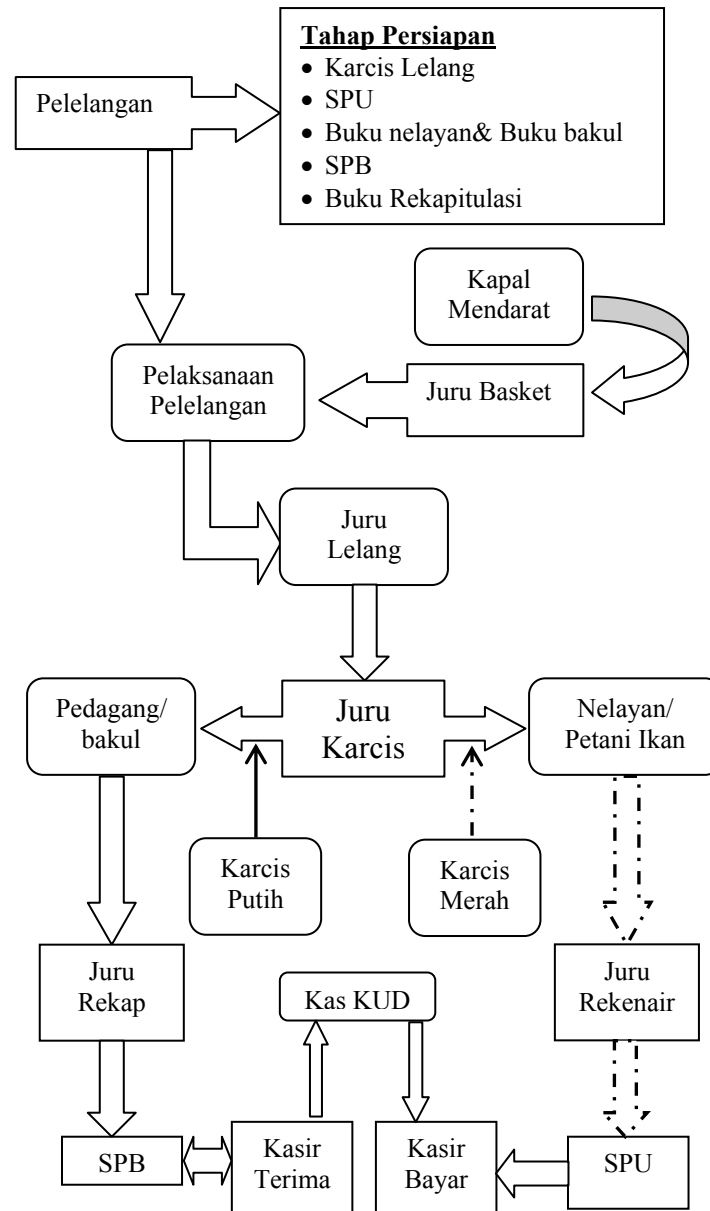
Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, Pada era tahun 1990 – an sistem penjualan ikan hasil tangkapan melalui pelelangan di gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bahkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur pernah dinyatakan sebagai salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang melakukan pelelangan ikan secara murni di Propinsi Jawa Timur. Sistem penjualan ikan secara lelang melibatkan beberapa pihak, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) selaku pihak penyelenggara pelelangan ikan, nelayan sebagai produsen dan pedagang atau bakul sebagai pembeli. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan di PPI Bulu melalui beberapa tahapan, yakni tahapan persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, dan tahap pembayaran uang lelang oleh pedagang/bakul dan penerimaan uang lelang oleh nelayan. Tahapan penyelenggaraan lelang lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, yakni persiapan segala keperluan administrasi, yakni persiapan Karcis Lelang, Surat Permintaan Uang (SPU), Surat Pembayaran Bakul (SPB), Buku Nelayan dan Buku Bakul serta Buku Rekapitulasi.

2. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
 - Pengecekan dan identifikasi para pedagang/bakul yang mempunyai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI)pada hari sebelumnya. Petugas akan meminta pedagang/bakul melunasi hutangnya, apabila tidak bisa maka dikenai sanksi untuk tidak diikutsertakan.
 - Juru Basket akan melakukan pengecekan jenis ikan dan mendatanya untuk selanjutnya diberikan kepada Juru Lelang.
 - Pelelangan dimulai. Juru Lelang menawarkan harga jual ikan yang telah ditetapkan. Pedagang/bakul akan memberikan penawaran di bawah harga jual ikan yang ditetapkan. Juru Lelang secara perlahan menaikkan harga jual ikan. Penawaran akan dihentikan apabila tinggal satu orang pedagang/bakul yang mengacungkan jari dan menyepakati harga jual tersebut.
 - Juru Karcis akan mencatat hasil pelelangan. Karcis warna merah untuk nelayan dan warna putih untuk pedagang/bakul.
 - Nelayan selanjutnya memberikan karcis kepada Juru Rekenair (Juru Buku Nelayan) dan selanjutnya Juru Rekenair akan melakukan perhitungan total hasil lelang sesuai jumlah karcis yang ada.
 - Juru Rekenair memberikan karcis tersebut kepada Juru Buku Bakul untuk didata secara otentik. Selanjutnya Juru Rekenair akan memberikan SPU kepada nelayan.
 - Pedagang/bakul memberikan karcis warna putih kepada Juru Rekapitulasi untuk didata jumlah lelang pedagang/bakul, selanjutnya karcis tersebut diberikan kepada Kasir Terima untuk dijadikan SPB, sedangkan nelayan memberikan SPU kepada Kasir Bayar.
3. Tahap pembayaran uang lelang oleh pedagang/bakul dan penerimaan uang lelang oleh nelayan dimana berdasarkan SPU dan SPB tersebut nelayan menerima uang dari Kasir Bayar, sedangkan pedagang/bakul menerima ikan.

Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan di PPI Bulu disesuaikan dengan kondisi nelayan dan pedagang/bakul. Pedagang/bakul yang mempunyai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan (KPLI) pada hari sebelumnya wajib melunasi hutangnya apabila ingin mengikuti pelelangan. Hal ini dilakukan pada tahap sebelum pelaksanaan lelang dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata cara pelelangan ikan

di PPI Bulu sedikit berbeda dengan penyelenggaraan lelang di PPI lain pada umumnya yang merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Lebih jelasnya mengenai alur tata cara pelelangan ikan di PPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 4.21



Gambar 4.21 Alur Tata Cara Pelelangan Ikan di PPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban

Sistem penjualan ikan secara lelang merupakan upaya memfasilitasi terbentuknya harga jual ikan namun sejak tahun 2003 hingga sekarang penjualan ikan secara lelang sudah tidak berjalan di PPI Bulu. Gambaran mengenai penjualan ikan di dapat dilihat pada gambar 4.22 Dengan melihat kondisi di wilayah penelitian, maka sebesar 85,71% responden menyatakan ssetuju bahwa cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu menunjukkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga (tabel 4.91).

Tabel 4.91 Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	85	85,71
2.	Kurang setuju	13	14,29
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.92 Persepsi Masyarakat Bahwa Penjualan Ikan Hasil Tangkapan PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	72	73,47
2.	Kurang setuju	26	26,53
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Sejak penyelenggaraan Pelelangan Ikan di PPI Bulu berhenti beroperasi banyak terjadi pro-kontra dalam menanggapi permasalahan tersebut, khususnya nelayan dengan pedagang. Diantara kedua belah pihak tersebut memberikan tanggapan yang berbeda terhadap sistem penjualan ikan secara lelang sebelum tahun 2003 dan tanpa pelelangan yang terjadi sejak tahun 2003. Tanggapan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Nelayan Anak Buah Kapal dan pedagang dikaji dari beberapa aspek yaitu harga, tawar menawar, dan ketersediaan pedagang. Lebih jelasnya mengenai tanggapan nelayan Anak Buah Kapal (ABK) terhadap sistem penjualan ikan secara lelang dan tanpa lelang dapat dilihat pada tabel 4.93

Tabel 4.93 Tanggapan Nelayan Anak Buah Kapal Terhadap Sistem Penjualan Ikan Secara Lelang dan Tanpa Lelang Di PPI Bulu

Aspek Penjualan Ikan	Sistem penjualan ikan		Tanggapan Nelayan Anak Buah Kapal
	Lelang	Tanpa Lelang	
Harga	√	-	Sistem penjualan ikan secara lelang dapat meningkatkan harga jual ikan yang berdampak pada peningkatan pendapatan, mengikuti harga pasar, ada persaingan harga dari seluruh pedagang untuk memperoleh harga tertinggi.
Tawar Menawar	√	-	Penjualan ikan secara lelang terdapat proses tawar – menawar antara nelayan dan pedagang. Proses tersebut disaksikan oleh lembaga formal, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Proses tawar menawar tersebut dapat meminimalisir terjadinya intervensi harga dan monopoli pasar oleh pedagang/bakul.
Ketersediaan pedagang	√	√	Sistem penjualan ikan secara lelang ataupun tanpa lelang sama - sama menguntungkan nelayan. Hal ini dikarenakan pedagang selaku pembeli selalu tersedia dan membutuhkan ikan hasil tangkapan nelayan.

Sumber : Hasil Survey Primer, Tahun 2006

Berdasarkan tabel 4.94 dapat dilihat bahwa sistem penjualan ikan secara lelang lebih menguntungkan bagi nelayan. Hal ini terlihat dari aspek harga, tawar menawar dan ketersediaan ikan. Bagi pedagang sendiri memiliki tanggapan yang berbeda dengan nelayan Anak Buah Kapal (ABK) terhadap sistem penjualan ikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.94 berikut,

Tabel 4.94 Tanggapan Pedagang Terhadap Sistem Penjualan Ikan Secara Lelang dan Tanpa Lelang Di PPI Bulu

Aspek Penjualan Ikan	Sistem penjualan ikan		Tanggapan Pedagang
	Lelang	Tanpa Lelang	
Harga	-	√	Sistem penjualan ikan tanpa lelang menyebabkan pedagang memiliki kesempatan untuk memonopoli harga jual ikan tanpa mengikuti harga pasar. Hal ini menyebabkan harga jual ikan menurun yang berdampak pada meningkatnya keuntungan pedagang/bakul.
Tawar Menawar	-	√	Penjualan ikan tanpa lelang tidak melalui proses tawar – menawar antara nelayan dan pedagang serta tidak melibatkan pihak lain. Dalam proses tawar menawar tidak terjadi persaingan antar pedagang sehingga intervensi harga dan monopoli pasar oleh pedagang/bakul tidak dapat diminimalisir.
Ketersediaan Ikan	√	√	Sistem penjualan ikan saat ada lelang dan tanpa lelang sama – sama menguntungkan pedagang. Hal ini dikarenakan persediaan ikan selalu ada. Aktivitas melaut dan menjual ikan hasil tangkapan merupakan mata pencaharian utama masyarakat nelayan dan dari hasil tersebut digunakan untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarganya.

Sumber : Hasil Survey Primer, Tahun 2006

Dari tabel 4.94 dapat dilihat bahwa sistem penjualan ikan tanpa melalui proses lelang ikan lebih menguntungkan pedagang, yaitu dari segi harga dan tawar menawar

B. Pembayaran Ikan Hasil Tangkapan

Hasil penjualan ikan hasil tangkapan oleh nelayan dibayar dikemudian hari oleh pedagang, yaitu 7 – 10 hari setelah ikan hasil tangkapan habis dijual oleh pedagang. Sebagian pedagang ada yang membayar lunas setelah ikan habis terjual. Fenomena tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat perikanan PPI Bulu dimana nelayan sangat tergantung dengan keberadaan pedagang (gambar 4.21). Prosentase cara pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu dapat dilihat pada tabel 4.95

Tabel 4.95 Prosentase Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu

No	Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Hasil penjualan dibayar beberapa hari setelah ikan habis terjual.	71	72,45
2.	Hasil penjualan dibayar lunas setelah ikan habis terjual.	27	27,55
3.	Hasil penjualan langsung dibayar lunas oleh pembeli.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Dari tabel 4.95 dapat dilihat bahwa meski ada 27,55% responden masyarakat perikanan yang menyatakan bahwa hasil penjualan dibayar lunas setelah ikan habis terjual, namun sebagian besar 72,45% responden menyatakan hasil penjualan dibayar beberapa hari setelah ikan habis terjual. Cara pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan yang demikian menunjukkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga. Terdapat 40,82% responden menyatakan setuju, 45,92% menyatakan kurang setuju dan 13,27% tidak setuju dengan pernyataan tersebut (tabel 4.96).

Tabel 4.96 Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	40	40,82
2.	Kurang setuju	45	45,92
3.	Tidak setuju	13	13,27
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambar 4.22 Fungsi PPI Bulu Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga

C. Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan

Aturan adalah suatu bentuk kaidah yang mengatur berbagai pola hidup dan kehidupan masyarakat atau lembaga yang bersifat keharusan. Dalam penyelenggaraan lelang ikan terdapat suatu aturan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab dan berfungsi mengatur tata cara/operasional penyelenggaraan lelang ikan. Aturan atau produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah pusat berlaku umum pada semua TPI di Indonesia, diantaranya adalah produk hukum tentang Retribusi Daerah pada penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI. Aturan tersebut mengacu pada Undang – undang nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 20 tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, penjabaran aturan tersebut didasarkan pada dan atau mengacu pada aturan atau produk hukum yang lebih tinggi. Implementasi dan penjabaran aturan atau produk hukum pada tingkat regional (propinsi dan kabupaten) akan disesuaikan dengan kepentingan penyelenggaraan TPI berdasarkan komponen – komponen pelaku penyelenggaraan TPI tersebut (kebijakan pemerintah daerah setempat, nelayan dan pedagang/bakul serta koperasi sebagai unit pelaksana pelelangan).

Penerapan aturan atau produk hukum di TPI adalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan khususnya tentang besarnya tarif retribusi daerah guna menjamin kelancaran ketertiban pelelangan ikan. Penjabaran aturan penyelenggaraan lelang di TPI Bulu mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat I, yaitu Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan pelelangan Ikan di Jawa Timur dan Pemerintah Tingkat II, yaitu Peraturan Daerah Tuban No. 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan ikan.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan lelang ikan di PPI Bulu tidak mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan KUD menunjukkan bahwa KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo” sebagai unit penyelenggara pelelangan ikan di PPI Bulu telah menetapkan kebijakan berupa aturan baru tentang kenaikan tarif retribusi dari 5% menjadi 6,5% sejak tahun 1995 sampai ditutupnya Ijin Pelelangan

(tahun 2003) tanpa merujuk pada Peraturan Pemerintah yang berlaku (Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban). Kepala Bagian Keuangan KUD Mina Tani "Tresno Maneko Karyo" menjelaskan bahwa tarif retribusi sebesar 6,5 % tersebut akan dipungut sebesar 4% dari nelayan dan sisanya sebesar 2,5 % dari pedagang/bakul. Adapun rincian penggunaan retribusi pelelangan ikan adalah 0,75% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke Pemerintah Daerah Tingkat I; 1,25% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke Pemerintah Daerah Tingkat II dan sisanya 4,5% digunakan untuk perawatan TPI (0,25%); gaji karyawan TPI (1,25%) pengembangan KUD (1,5%) dan *saving* nelayan (1,5%). Dana *saving* nelayan tersebut baru bisa dicairkan setiap setahun sekali. Apabila dirujuk berdasarkan aturan perundang – undangan tentang retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Tingkat I dan II, penerapan kebijakan KUD Mina Tani "Tresno Maneko Karyo" telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Sikap masyarakat terhadap penerapan kebijakan KUD Mina Tani "Tresno Maneko Karyo" tersebut secara keseluruhan tidak mendukung, yaitu sebesar 61,22% dan yang mendukung tetapi menjalankan sebagian adalah sebesar 38,78%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.97

Tabel 4.97 Prosentase Sikap Masyarakat Terhadap Penerapan Kebijakan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu

No	Sikap Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak mendukung	60	61,22
2.	Mendukung tetapi menjalankan sebagian	38	38,78
3.	Mendukung dan menjalankan sepenuhnya	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Penerapan aturan penyelenggaraan lelang ikan oleh KUD yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan lelang ikan PPI Bulu. Hal ini didukung dengan 57,14% responden yang menyatakan setuju dengan pendapat tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.98

Tabel 4.98 Persepsi Masyarakat Bahwa Penerapan Aturan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di PPI Bulu Mempengaruhi Keberhasilan Penyelenggaraan Lelang Ikan PPI Bulu

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	40	57,14
2.	Kurang setuju	45	33,67
3.	Tidak setuju	13	9,18
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Bukan hanya mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan lelang ikan, pada akhirnya penerapan aturan penyelenggaraan lelang oleh KUD tersebut menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh 62,24% responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Lebih jelasnya mengenai Persepsi masyarakat bahwa penerapan aturan penyelenggaraan lelang di PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga dapat dilihat pada tabel 4.99

Tabel 4.99 Persepsi Masyarakat Bahwa Penerapan Aturan Penyelenggaraan Lelang di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	61	62,24
2.	Kurang setuju	31	31,63
3.	Tidak setuju	6	6,12
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

D. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. Dalam pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan, mayoritas responden masyarakat perikanan tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan. Hal ini dinyatakan oleh 58,17%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.100

Tabel 4.100 Prosentase Keterlibatan Masyarakat Memberikan Masukan Dalam Pembuatan Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu

No	Keterlibatan Masyarakat Dalam Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan.	57	58,17
2.	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tetapi tidak terealisasi.	31	31,63
3.	Dilibatkan, memberi masukan dalam pembuatan peraturan penyelenggaraan lelang ikan dan terealisasi	10	10,20
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan mempengaruhi keberhasilan PPI Bulu sebagai fasilitator pembentukan harga. Walaupun sebesar 7,14% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut namun sebagian besar 60,20% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.101

Tabel 4.101 Persepsi Masyarakat Bahwa Keterlibatan Saudara Dalam Pembuatan Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu Mempengaruhi Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	60	60,20
2.	Kurang setuju	32	32,65
3.	Tidak setuju	6	7,14
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

E. Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD

Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan diperlukan adanya lembaga berbadan hukum yang beranggotakan orang – orang dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yaitu koperasi. Salah satu bentuk koperasi adalah KUD yang merupakan lembaga hukum perekonomian rakyat yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah untuk mengelola unit pelelangan TPI. Koperasi Unit Desa Mina Tani” Tresno Maneko Karyo” adalah lembaga yang diberi kepercayaan oleh Pemerintah sebagai unit pelaksana pelelangan ikan di PPI Bulu.

Koperasi Unit Desa Mina Tani” Tresno Maneko Karyo” sebagai lembaga perekonomian rakyat menjalankan beberapa aktivitas, antara lain unit pelelangan, sarana produksi, simpan pinjam, warung serba ada (waserda), Rice Milling Unit (RMU), pembayaran rekening listrik dan warung telekomunikasi (wartel). Sebagai lembaga pengelola dan penyelenggara pelelangan ikan, KUD berperan menyelenggarakan kegiatan jual beli ikan melalui pelelangan ikan dan bertugas dalam mengelola keuangan retribusi pelelangan. Saat ini aktivitas – aktivitas tersebut tidak beroperasi lagi sejak dicabutnya ijin usaha pengelolaan TPI oleh Pemerintah, kecuali rekening listrik dan wartel.

PPI sebagai fasilitator pembentukan harga melibatkan lembaga KUD sebagai penyelenggara lelang sehingga kemampuan aparatur lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) berpengaruh terhadap keberhasilan fungsi PPI sebagai fasilitator pembentukan harga. Berdasarkan hasil survey ke responden masyarakat perikanan dapat diketahui kemampuan aparatur kelembagaan KUD seperti pada tabel 4.102

Tabel 4.102 Prosentase Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang di PPI Bulu

No	Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak menyelenggarakan lelang ikan dan tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	73	73,47
2.	Menyelenggarakan lelang ikan tetapi tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	22	22,45
3.	Menyelenggarakan lelang ikan, melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.	3	4,08
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.102 dapat diketahui bahwa mayoritas sebesar 73,47% responden masyarakat perikanan menyatakan bahwa aparat lembaga KUD tidak mampu menyelenggarakan lelang ikan dan tidak melaporkan keuangan retribusi lelang secara transparan.

Persepsi masyarakat terhadap aparat lembaga KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo” yang dinilai tidak mampu menyelenggarakan lelang ditunjang dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat perikanan. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut,

- Pedagang (diwakili oleh tengkulak) menyatakan bahwa sikap dan perilaku pengurus KUD kurang disenangi oleh pedagang, dikarenakan sistem perekrutan keanggotaan KUD tidak melibatkan para pedagang/bakul. Pedagang tengkulak tersebut menjelaskan bahwa para pedagang setuju jika pelelangan diaktifkan kembali dan seluruh pedagang/bakul berinteraksi secara resmi di TPI asalkan pedagang juga terdaftar sebagai anggota KUD. Pedagang tersebut juga menilai bahwa pengurus KUD tidak transparan dalam pengelolaan dana sehingga banyak unit koperasi yang tidak jalan termasuk pelelangan ikan dan tidak ada kejelasan penggunaan keuangan. Menurut pedagang tengkulak tersebut dengan keterlibatan pedagang/bakul sebagai anggota KUD dapat mengetahui penggunaan dana KUD secara lebih jelas.
- Nelayan (diwakili oleh Anak Buah Kapal) menyatakan bahwa nelayan kecewa dengan KUD karena dianggap tidak mampu mengelola pelelangan dan keuangan retribusi lelang dengan baik dan benar. Nelayan tersebut menilai bahwa pengurus KUD telah melakukan korupsi, uang modal melaut dari hasil penjualan ikan tidak diberikan dan terpaksa para nelayan menjual ikan di luar TPI. Menurut para nelayan lumayan menjual di luar TPI walaupun harganya tidak sebagus di TPI, yang terpenting segera habis terjual. Para nelayan senang

kalau lelang dibuka kembali asalkan petugas KUD harus jujur, mampu memberikan biaya melaut bagi para nelayan yang diperoleh dari hasil penjualan ikan.

Berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo” tidak mampu mengelola penyelenggaraan lelang sebagai upaya pembentukan harga dimana KUD tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan kepada nelayan, terdapat penyelewengan dana oleh KUD untuk kepentingan pengurus atau pengelolanya.

Kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD Mina Tani “Tresno Maneko Karyo” terhadap PPI Bulu menyebabkan PPI Bulu tidak berfungsi sebagai fasilitator pembentukan harga. Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian besar responden sebanyak 72,45% seperti pada tabel 4.103

Tabel 4.103 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Lembaga KUD Terhadap PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	72	72,45
2.	Kurang setuju	23	23,47
3.	Tidak setuju	3	4,08
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.7 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

Pembangunan PPI merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kesejahteraan masyarakat nelayan dilihat dari pendapatan dan kemampuan keluarga responden nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

A. Pendapatan Responden Nelayan

a. Pemilik Kapal

Pendapatan responden nelayan pemilik kapal diperoleh dari hasil tangkapan ikan yang dijual ke pedagang. Pada saat nelayan pemilik kapal melaut bersama Anak Buah Kapal, biaya operasional ditanggung oleh pemilik kapal dan Anak Buah Kapal mendapatkan upah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan. Sistem bagi hasil yang berlaku dengan membagi keuntungan hasil penjualan ikan sebesar 50% menjadi hak pemilik kapal dan 50 % dibagikan untuk Anak Buah Kapal yang berjumlah 10 - 20 orang. Perhitungan tersebut berlaku jika tidak terjadi kerugian atau

hasil penjualan tangkapan ikan lebih besar dari biaya operasional. Pada saat terjadi kerugian dimana biaya operasional lebih besar dari hasil penjualan tangkapan ikan, maka hasil penjualan tangkapan ikan seluruhnya menjadi hak nelayan Anak Buah Kapal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat karakteristik nelayan pemilik kapal berdasarkan tingkat pendapatan pada tabel 4.104

Tabel 4.104 Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Pemilik Kapal

No	Tingkat Pendapatan	Prosentase (%)
1.	< 1.000.000	33,33
2.	1.000.000 – 1.500.000	33,33
3.	1.500.000 – 2.000.000	16,67
4.	2.000.000 – 2.500.000	8,33
5.	>2.500.000	8,33
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Pada tabel 4.10 dapat ditunjukkan bahwa tingkat pendapatan responden nelayan pemilik kapal yang terbesar adalah Rp < 1.000.000 dan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 dengan prosentase masing – masing sebesar 33,33%. Kemudian sebesar 16,67% memiliki tingkat pendapatan Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 dan yang terkecil adalah Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000 dan > Rp. 2.500.000 dengan prosentase masing – masing sebesar 8,33%.

Dari pendapatan yang diperoleh responden nelayan pemilik kapal tersebut sebagian menurun dan ada yang tetap sejak tahun 2003, yaitu sejak pelelangan ikan berhenti beroperasi di PPI Bulu. Lebih jelasnya prosentase mengenai perubahan tingkat pendapatan responden nelayan pemilik kapal telah mengalami kenaikan, tetap bahkan penurunan dapat dilihat pada tabel 4.105

Tabel 4. 105 Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Pemilik Kapal

No	Perubahan Tingkat Pendapatan	Prosentase (%)
1.	Meningkat	33,33
2.	Tetap	50,00
3.	Menurun	16,67
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.105 diatas dapat ditunjukkan bahwa mayoritas responden nelayan pemilik kapal sebesar 50,00% perubahan tingkat pendapatannya tetap, tidak menurun ataupun meningkat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu pemilik kapal yang menyatakan bahwa ada lelang atau tidak ada lelang sama saja, jumlah pendapatan yang mereka peroleh relatif tetap. Hal ini disebabkan karena para nelayan pemilik kapal merasa kecewa dengan KUD, meski ada lelang tetapi hasil penjualan ikan tidak bisa langsung diperoleh dan harus menunggu beberapa hari

bahkan sering tidak dikembalikan ke nelayan. Dengan tidak ada lelang dan memilih menjual langsung ke pedagang tanpa melalui lelang di PPI Bulu kadang lebih enak karena di luar PPI Bulu, pedagang biasanya langsung membayar setelah ikan habis terjual. Yang paling penting bagi nelayan pemilik kapal adalah ikan hasil tangkapan habis terjual, tidak masalah keuntungan yang diperoleh tidak sebesar kalau ada lelang di PPI Bulu namun dengan langsung menjual ke pedagang di luar PPI Bulu, nelayan segera mendapatkan modal kembali untuk melaut.

b. Anak Buah Kapal

Pendapatan responden nelayan Anak Buah Kapal diperoleh dari hasil penjualan tangkapan ikan, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50 % untuk Anak Buah Kapal. Hal ini dapat dilihat adanya ketergantungan nelayan Anak Buah Kapal terhadap pemilik kapal. Dari upah tersebut diperoleh pendapatan perbulan yang bersumber dari kegiatan melaut. Lebih jelasnya mengenai tingkat pendapatan responden nelayan Anak Buah Kapal dapat dilihat pada tabel 4.106

Tabel 4.106 Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Anak Buah Kapal

No	Tingkat Pendapatan	Prosentase (%)
1.	< 300.000	16,87
2.	300.000 – 400.000	45,78
3.	400.000 – 500.000	19,28
4.	500.000 – 600.000	8,43
5.	> 600.000	9,64
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Dari tabel 4.15 diatas dapat ditunjukkan bahwa mayoritas responden nelayan Anak Buah Kapal memiliki pendapatan < Rp. 300.000 – Rp. 400.000 dengan prosentase 45,78%. Kemudian sekitar 19,28% merupakan pendapatan Rp 400.000 – Rp. 500.000, 9,64% sebesar Rp. >600.000 dan yang paling sedikit 8,43% % adalah pendapatan Rp. 500.000 – Rp. 600.000.

Dari pendapatan yang diperoleh responden nelayan anak buah kapal tersebut sebagian menurun dan ada yang tetap sejak tahun 2003, yaitu sejak pelelangan ikan berhenti beroperasi di PPI Bulu. Lebih jelasnya prosentase mengenai keadaan pendapatan responden nelayan anak buah kapal telah mengalami kenaikan, tetap bahkan penurunan dapat dilihat pada tabel 4.107

Tabel 4.107 Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Anak Buah Kapal

No	Perubahan Tingkat Pendapatan	Prosentase (%)
1.	Meningkat	6,02
2.	Tetap	40,96
3.	Menurun	53,01
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Berdasarkan tabel 4.107 dapat diketahui bahwa perubahan tingkat pendapatan sebesar 53,01% responden nelayan anak buah kapal menurun. Hasil survey tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan nelayan anak buah kapal yang menyatakan bahwa pendapatan responden nelayan anak buah kapal menurun dikarenakan di PPI Bulu sudah tidak terselenggara lelang. Dengan tidak ada lelang, harga jual ikan ditentukan oleh pedagang dari Bulu dengan harga yang jauh lebih murah dari harga lelang di PPI maupun harga pasar. Nelayan anak buah kapal mau tidak mau harus menjual ke pedagang agar ikan hasil tangkapan habis terjual, modal bisa kembali dan mendapatkan pinjaman dari pedagang. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan nelayan terhadap pedagang, nelayan anak buah kapal yang statusnya sebagai buruh bagi majikannya (pemilik kapal) dianggap rendah oleh pedagang dan lemahnya posisi tawar nelayan anak buah kapal menyebabkan harga yang diterima relatif rendah. Dengan demikian pedagang beranggapan bahwa kelemahan – kelemahan yang dimiliki nelayan anak buah kapal tersebut dijadikan alasan dalam menguasai harga jual ikan yang sangat merugikan nelayan anak buah kapal.

Gambaran mengenai perubahan tingkat pendapatan responden nelayan dapat diperjelas berdasarkan tingkat pendapatan sehingga diperoleh data perubahan tingkat pendapatan yang menurun, tetap dan naik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.108

Tabel 4.108 Crosstabulasi Perubahan Tingkat Pendapatan Berdasarkan Responden Nelayan dan Tingkat Pendapatan

Responden Nelayan	Tingkat Pendapatan		Perubahan Tingkat Pendapatan			Total
			Menurun	Tetap	Meningkat	
Pemilik Kapal	Rp < 1.000.000	Frekuensi	2	2		4
		% dari Total	16,7%	16,7%		33,3%
	Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000	Frekuensi		4		4
		% dari Total		33,3%		33,3%
	Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000	Frekuensi			2	2
		% dari Total			16,7%	16,7%
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000	Frekuensi			1	1
		% dari Total			8,3%	8,3%

	> Rp. 2.500.000	Frekuensi			1	1
		% dari Total			8,3%	8,3%
	Total	Frekuensi	2	6	4	12
		% dari Total	16,7%	50,0%	33,3%	100,0%
Anak Buah Kapal	< Rp. 300.000	Frekuensi	12	2		14
		% dari Total	14,5%	2,4%		16,9%
	Rp. 300.000 - Rp. 400.000	Frekuensi	23	15		38
		% dari Total	27,7%	18,1%		45,8%
	Rp 400.000 - Rp. 500.000	Frekuensi	8	8		16
		% dari Total	9,6%	9,6%		19,3%
	Rp. 500.000 - Rp. 600.000	Frekuensi		7		7
		% dari Total		8,4%		8,4%
	Rp. > 600.000. < Rp. 300.000	Frekuensi	1	2	5	8
		% dari Total	1,2%	2,4%	6,0%	9,6%
	Total	Frekuensi	44	34	5	83
		% dari Total	53,0%	41,0%	6,0%	100,0%

Sumber: Hasil analisis, 2007

Tabel 4.109 Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan Berdasarkan Responden Nelayan Dan Tingkat Pendapatan

Responden Nelayan	Tingkat Pendapatan	Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan
Pemilik Kapal	Rp < 1.000.000	Menurun dan tetap
	Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000	Tetap
	Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000	Naik
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000	Naik
	Rp. >2.500.000	Naik
Anak Buah Kapal	Rp. < 300.000	Menurun
	Rp. 300.000 - Rp. 400.000	Menurun
	Rp 400.000 - Rp. 500.000	Menurun dan tetap
	Rp. 500.000 - Rp. 600.000	Tetap
	Rp. > 600.000.	Tetap

Sumber: Hasil analisis, 2007

Hasil tabulasi silang pada tabel 4.109 menunjukkan perubahan tingkat pendapatan dominan responden nelayan pemilik kapal dan anak buah kapal. Perubahan tingkat pendapatan responden nelayan pemilik kapal dominan menurun dengan tingkat pendapatan Rp <1.000.000, tetap dengan tingkat pendapatan Rp <1.000.000 dan Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 kemudian naik pada tingkat pendapatan Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000, Rp. 2.000.000 - Rp. 2.500.000 dan > Rp. 2.500.000. Berbeda halnya dengan keadaan pendapatan responden nelayan anak buah kapal yang dominan menurun pada tingkat pendapatan Rp. < Rp. 300.000, Rp.

300.000 - Rp. 400.000, dan Rp 400.000 - Rp. 500.000 dan tetap pada tingkat pendapatan Rp 400.000 - Rp. 500.000, Rp. 500.000 - Rp. 600.000 dan Rp. > 600.000.

Pendapatan responden nelayan pemilik kapal dan anak buah kapal beragam dan dari perolehan pendapatan nelayan menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pernyataan tersebut dinyatakan kurang setuju oleh sebagian besar masyarakat, yaitu 50,00% responden masyarakat perikanan sedangkan yang setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut masing – masing sebesar 36,73% dan 13,27% (tabel 4.110).

Tabel 4.110 Persepsi Masyarakat Bahwa Perolehan Pendapatan Nelayan Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	36	36,73
2.	Kurang setuju	50	50,00
3.	Tidak setuju	12	13,27
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

B. Kemampuan Responden Nelayan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya.

Kemampuan nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini bisa dilihat dari besarnya pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran keluarga nelayan. Jika pendapatan keluarga nelayan lebih besar daripada pengeluarannya berarti keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Jika pendapatan keluarga nelayan sama dengan pengeluaran berarti keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan primer saja dan jika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Kemampuan keluarga nelayan yang meningkat menunjukkan PPI mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk mengetahui hal tersebut dibedakan dalam dua kelompok responden nelayan, yaitu responden nelayan pemilik kapal dan responden nelayan anak buah kapal.

a. Pemilik Kapal

Responden nelayan pemilik kapal sebagian besar 58,33% mampu memenuhi kebutuhan primer saja, sebesar 25,00% mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dan yang paling sedikit, yaitu 16,67% tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup primer (Tabel 4.111).

Tabel 4.111 Prosentase Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya

No	Kemampuan Responden Nelayan Pemilik Kapal	Prosentase (%)
1.	Tidak mampu memenuhi kebutuhan primer	16,67
2.	Mampu memenuhi kebutuhan primer saja	58,33
3.	Mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder	25,00
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Kemampuan masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tersebut berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu seiring dengan keberadaan PPI Bulu tanpa ada proses penjualan ikan secara lelang di dalamnya, tepatnya sejak tahun 2003 dan setelah itu kemampuan nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mengalami kenaikan, tetap dan menurun. Dari hasil survey ke masyarakat, diperoleh data sebagian besar 66,67% tingkat kemampuan responden nelayan pemilik kapal tetap sedangkan yang mengalami kenaikan dan penurunan masing – masing sebesar 16,67% (tabel 4.112).

Tabel 4.112 Prosentase Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya

No	Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik Kapal	Prosentase (%)
1.	Meningkat	16,67
2.	Tetap	66,67
3.	Menurun	16,67
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

b. Anak Buah Kapal

Dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan, Anak Buah Kapal memiliki kemampuan yang berbeda dengan pemilik kapal. Sebagian besar responden nelayan Anak Buah Kapal tidak mampu memenuhi kebutuhan primer keluarganya. Hal ini dinyatakan oleh 79,07% responden sedangkan yang mampu memenuhi kebutuhan primer saja sebanyak 18,60% dan yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder sebesar 2,33% (Tabel 4.113)

Tabel 4.113 Prosentase Kemampuan Responden Nelayan Anak Buah Kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya

No	Kemampuan Responden Nelayan	Prosentase (%)
1.	Tidak mampu memenuhi kebutuhan primer	79,07
2.	Mampu memenuhi kebutuhan primer saja	18,60
3.	Mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder	2,33
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Adapun dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 2003 di PPI Bulu sudah tidak terselenggara pelelangan ikan telah terjadi perubahan tingkat kemampuan

nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagian besar yaitu 70,93% kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya telah menurun sedangkan yang tetap terdiri dari 29,07% responden nelayan Anak Buah Kapal (tabel 4.114).

Tabel 4.114 Prosentase Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya

No	Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik Kapal	Prosentase (%)
1.	Meningkat	0,00
2.	Tetap	29,07
3.	Menurun	70,93
TOTAL		100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Gambaran mengenai perubahan tingkat kemampuan responden nelayan dapat diperjelas berdasarkan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga diperoleh data perubahan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menurun, tetap dan naik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.115

Tabel 4.115 Crosstabulasi Perubahan Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Berdasarkan Responden Nelayan dan Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Nelayan

Responden Nelayan	Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga		Perubahan Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga			Total
			Menurun	Tetap	Naik	
Nelayan Pemilik Kapal	Tidak mampu memenuhi kebutuhan primer	Frekuensi	2			2
		% dari Total	16,7%			16,7%
		Mampu memenuhi kebutuhan primer saja	Frekuensi		7	
	Mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder	% dari Total		58,3%		58,3%
Frekuensi			1	2	3	
% dari Total			8,3%	16,7%	25,0%	
Total	Frekuensi	2	8	2	12	
	% dari Total	16,7%	66,7%	16,7%	100,0%	
Nelayan Anak Buah Kapal	Tidak mampu memenuhi kebutuhan primer	Frekuensi	53	15		68
		% dari Total	61,6%	17,4%		79,1%
		Mampu memenuhi kebutuhan primer saja	Frekuensi	6	10	
	% dari Total	7,0%	11,6%		18,6%	
Mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder	Frekuensi	2			2	
	% dari Total	2,3%			2,3%	
	Total	Frekuensi	61	25		86
	% dari Total	70,9%	29,1%		100,0%	

Sumber: Hasil analisis, 2007

Tabel 4.116 Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan Berdasarkan Responden Nelayan Dan Tingkat Pendapatan

Responden Nelayan	Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga	Perubahan Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Dominan
Pemilik Kapal	Tidak mampu memenuhi kebutuhan primer	Menurun
	Mampu memenuhi kebutuhan primer saja	Tetap
	Mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder	Naik
Anak Buah Kapal	Tidak mampu memenuhi kebutuhan primer	Menurun
	Mampu memenuhi kebutuhan primer saja	Tetap
	Mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder	Menurun

Sumber: Hasil analisis, 2007

Hasil tabulasi silang pada tabel 4.116 menunjukkan perubahan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga nelayan pemilik kapal dan anak buah kapal secara dominan. Perubahan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dominan menurun pada pemilik kapal yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, dominan tetap pada pemilik kapal yang mampu memenuhi kebutuhan primer saja, dan dominan naik pada pemilik kapal yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Berbeda dengan nelayan anak buah kapal yang dominan menurun pada anak buah kapal yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, kemudian dominan tetap pada anak buah kapal yang mampu memenuhi kebutuhan primer saja.

Kemampuan keluarga nelayan Bulu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian besar responden sebesar 70,41% yang setuju kemudian yang kurang setuju dan tidak setuju masing – masing sebesar 25,51% dan 4,08% (tabel 4.117).

Tabel 4.117 Kemampuan Keluarga Nelayan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	70	70,41
2.	Kurang setuju	25	25,51
3.	Tidak setuju	3	4,08
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

C. Penjualan ikan Hasil Tangkapan

Sistem penjualan ikan secara lelang bertujuan untuk meningkatkan harga jual ikan hasil tangkapan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penjualan ikan hasil

tangkapan secara lelang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, yaitu nelayan dan pedagang dalam tawar menawar harga ikan namun sebaliknya yang terjadi di PPI Bulu. Masyarakat nelayan PPI Bulu berada pada posisi yang lebih tergantung pada pedagang, harga ditentukan pedagang yang seringkali merugikan nelayan karena jauh dibawah harga jual beli ikan di pasar. Sebesar 66,33% responden setuju bahwa cara penjualan ikan hasil tangkapan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan (tabel 4.118) dan sebesar 76,53% responden menyatakan setuju bahwa cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan (tabel 4.119)

Tabel 4.118 Persepsi Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	65	66,33
2.	Kurang setuju	33	33,67
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.119 Persepsi Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berhasil Mengupayakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	76	76,53
2.	Kurang setuju	16	16,33
3.	Tidak setuju	6	7,14
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.4.8 Sumber Pendapatan Daerah

Karakteristik fungsi PPI sebagai sumber pendapatan daerah dikaji dari beberapa variabel, meliputi penerimaan retribusi, penjualan ikan hasil tangkapan dan koordinasi antara Pemerintah dengan KUD.

A. Penerimaan Retribusi

Retribusi yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas perikanan di sebuah Pangkalan Pendaratan Ikan adalah retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan. Adanya pungutan retribusi pelelangan ikan dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Peluang menerima retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dari PPI Bulu dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sejak tahun 1993 hingga

tahun 2002. Lebih jelasnya mengenai perkembangan penjualan hasil tangkapan ikan dan nilai retribusi pelelangan ikan dapat dilihat pada tabel 4.120

Tabel 4.120 Perkembangan Penjualan dan Nilai Retribusi Pelelangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Bulu Tahun 1993 - 2003

Tahun	Penjualan		Nilai Retribusi	
	Berat Ikan (Kg)	Harga (Rupiah)	Retribusi (5%)	Pertumbuhan (%)
1993	1.253.765	1.454.196.610	72.709.830	-
1994	1.344.227	1.636.274.610	81.813.725	12,5
1995	1.320.412	1.570.992.350	78.549.617.	-3,98
1996	1.160.228	2.206.678.690	110.333.934	40,47
1997	760.636	1.706.306.770	85.315.338	-22,67
1998	875.160	3.787.863.820	189.393.191	121,99
1999	449.551	2.283.975.600	114.198.780	-39,70
2000	445.673	2.540.015.000	127.000.750	11,2
2001	306.328	2.220.015.700	111.000.785	-12,59
2002	153.505	1.151.351.500	40.607.437	-63,42
2003	1.523.933	6.044.530.200	-	-

Sumber : Data Potensi Perikanan Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000-2005 Kecamatan Bancar

Dari tabel 4.120 dapat dilihat bahwa penjualan ikan secara lelang menghasilkan retribusi pelelangan ikan. Retribusi pelelangan ikan sebesar 5% dialokasikan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebesar 1,25% dan diperoleh sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hasil penjualan dan nilai retribusi tertinggi terjadi pada tahun 1998, yaitu Rp. 3.787.863.820 dan Rp. 189.393.191. Kemudian sejak tahun 2001 mulai terjadi penurunan hasil penjualan dan nilai retribusi pelelangan ikan hingga pada tahun 2003 sudah tidak beroperasi pelelangan ikan di PPI Bulu.

Sejak tahun 2003 beriringan dengan dikeluarkannya surat keputusan yang mencabut ijin pelelangan pada KUD, maka pelelangan ikan telah berhenti beroperasi di PPI Bulu. Dengan tidak adanya aktivitas pelelangan ikan berarti tidak ada penerimaan retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dari PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban.

Keberhasilan PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dilihat dari penerimaan retribusi pelelangan ikan. Pernyataan tersebut didukung oleh sebagian besar responden, yaitu 71,43% menyatakan setuju (tabel 4.121). Dengan tidak adanya retribusi pelelangan ikan untuk

Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban menunjukkan PPI Bulu tidak berhasil menjalankan fungsinya sebagai sumber pendapatan daerah.

Tabel 4.121 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Dilihat Dari Penerimaan Retribusi Pelelangan Ikan PPI Bulu Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	70	71,43
2.	Kurang setuju	28	28,57
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.122 Persepsi Masyarakat Bahwa Retribusi Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Tuban Dari PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	52	53,06
2.	Kurang setuju	46	46,94
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

B. Penjualan Ikan Hasil Tangkapan

Sistem penjualan ikan secara lelang memberi peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelelangan ikan. Namun sejak tahun 2003 hingga sekarang seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang. Ikan hasil tangkapan nelayan langsung dijual ke pedagang. Dalam jual beli ikan hasil tangkapan tersebut harga ditentukan oleh pedagang dimana nelayan tidak memiliki posisi tawar dalam transaksi tersebut. Proses jual beli ikan dengan sistem seperti itu telah menjadi kebiasaan masyarakat perikanan Bulu. Hal ini didasari oleh adanya rasa ketergantungan nelayan terhadap pedagang dalam peminjaman modal dan keinginan nelayan agar ikan hasil tangkapan habis terjual pada hari tersebut.

Cara penjualan ikan hasil tangkapan di PPI Bulu mempengaruhi fungsi PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini dinyatakan setuju oleh sebagian besar responden sebanyak 72,45%, lainnya sebesar 27,55% menyatakan kurang setuju terhadap pendapat tersebut (tabel 4.123).

Tabel 4.123 Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	71	72,45
2.	Kurang setuju	27	27,55
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Adanya sistem penjualan ikan hasil tangkapan yang terjadi di kawasan PPI Bulu tersebut menjadi penyebab PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan Daerah Kabupaten Tuban. Seperti halnya pernyataan pada tabel 4.124 bahwa 64,29% responden setuju dengan pendapatan tersebut.

Tabel 4.124 Persepsi Masyarakat Bahwa Sistem Penjualan Ikan di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	63	64,29
2.	Kurang setuju	35	35,71
3.	Tidak setuju	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

C. Koordinasi antara Pemerintah dengan KUD

Koordinasi antara Pemerintah dengan Koperasi Unit Desa terbentuk dalam kegiatan penyaluran hasil retribusi pelelangan ikan. Adanya koordinasi antara kedua belah pihak dapat mendukung kelancaran penerimaan retribusi lelang pada KUD hingga ke Pemerintah dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah tersebut adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dan KUD yang berperan menyelenggarakan lelang dan mengelola retribusi pelelangan ikan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) “Tresno Maneko Karyo”. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola KUD diperoleh data bahwa tidak ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD “Tresno Maneko Karyo” dalam kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lelang termasuk pelaporan hasil kegiatan lelang bahkan saat ini jarang ada komunikasi antara keduanya. Pernyataan tersebut sependapat dengan 56% responden masyarakat perikanan, sedangkan yang 44% responden masih menyatakan ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan namun hanya sebagai formalitas.

Pendapat yang mengemukakan bahwa koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD “Tresno Maneko Karyo” menyebabkan PPI Bulu tidak berhasil sebagai sumber pendapatan daerah tidak dibenarkan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari responden masyarakat perikanan bahwa 53,06% menyatakan kurang setuju, sedangkan yang setuju sebesar 11,22%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.125

Tabel 4.125 Persepsi Masyarakat Mengenai Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD Dalam Penyaluran Retribusi Pelelangan Ikan

No	Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban Dengan KUD	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Tidak ada koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan	55	56,12
2.	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan hanya sebagai formalitas.	43	43,88
3.	Koordinasi antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan terealisasi.	0	0,00
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

Tabel 4.126 Persepsi Masyarakat Bahwa Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban Dengan KUD dalam Penyaluran Retribusi Pelelangan Ikan Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

No	Persepsi Masyarakat	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	Setuju	11	11,22
2.	Kurang setuju	52	53,06
3.	Tidak setuju	35	35,71
TOTAL		98	100,00

Sumber: Survey Primer, 2006

4.5 Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

Analisis tingkat optimal fungsi pangkalan pendaratan ikan digunakan untuk mengevaluasi tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan. Analisis tingkat optimal fungsi PPI yaitu pengukuran tingkat optimal fungsi PPI didasarkan pada kriteria fungsi dengan memberikan skala pengukuran pada setiap kriteria. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.127

Tabel 4.127 Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Berdasarkan Kriteria Dan Skala Pengukuran Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu

Kriteria Fungsi PPI	Parameter	Karakteristik Fungsi PPI	Skala Pengukuran Fungsi PPI		
			1	2	3
Tempat berlabuh kapal perikanan	Aktivitas kapal perikanan.	Kapal perikanan berlabuh di sepanjang pantai pendaratan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, tidak tertampung di kolam pelabuhan. Dengan berlabuh di sepanjang pantai tanpa perlindungan dari gelombang laut sehingga kapal – kapal yang berlabuh pernah mengalami kerusakan dan tenggelam. Hal tersebut didukung dengan sebesar 34,69% yang masih menyatakan tidak mudah dalam mendaratkan ikan, memuat perbekalan, dan istirahat sedangkan sebesar 48,98% responden menyatakan cukup mudah.	-	2	-
	Jumlah kapal perikanan	PPI Bulu mampu menampung 25 kapal purse seine berkekuatan 20 GT untuk berlabuh di pantai pendaratan PPI Bulu tetapi hasil survey ke responden menyatakan bahwa dalam waktu yang bersamaan kapal yang mendarat di PPI Bulu jumlahnya beragam. Mayoritas sebesar 68,37% responden menyatakan jumlah kapal perikanan yang mendarat di PPI Bulu sebanyak ≥ 20 kapal	-	-	3
	Kondisi perairan	Kondisi perairan tidak tenang, dipengaruhi oleh gelombang laut sehingga beresiko terhadap kapal – kapal perikanan yang berlabuh. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan BPPPI Bulu dan 52,04% responden.	1	-	-
	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	PPI Bulu tidak memiliki alur pelayaran yang digunakan untuk mengarahkan kapal masuk/keluar ke/dari kolam pelabuhan.	1	-	-
	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	PPI Bulu tidak memiliki kolam pelabuhan yang digunakan sebagai tempat penampungan kapal perikanan. Kapal perikanan mendarat di sepanjang pantai tanpa perlindungan dari ombak laut.	1	-	-
	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	PPI Bulu belum memiliki breakwater atau bangunan pemecah gelombang untuk melindungi kapal dari gelombang laut.	1	-	-
	Kemampuan aparatur	Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu tidak mengelola PPI dimana tidak mampu menyediakan fasilitas	1	-	-

Kriteria Fungsi PPI	Parameter	Karakteristik Fungsi PPI	Skala Pengukuran Fungsi PPI		
			1	2	3
	kelembagaan BPPPI	alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan pemecah gelombang. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh 61,22% responden.			
	Ketersediaan dana	Dana untuk menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang belum tersedia	1	-	-
Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan	Volume ikan	Selama tahun 2005 jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bulu sebesar 4507 ton	-	-	3
	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	Hasil survey sebanyak 57,14% responden menyatakan tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi TPI Bulu melainkan ke luar PPI Bulu, yaitu di sepanjang jalan.	1	-	-
	Ketersediaan fasilitas dermaga	Tidak tersedia dermaga yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan di PPI Bulu. Lokasi bongkar muat ikan di PPI biasanya dilakukan di sepanjang pantai, atau langsung di gedung TPI.	1	-	-
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan.	Gedung pelelangan ikan PPI Bulu digunakan sebagai tempat penampungan ikan setelah dilakukan bongkar muat ikan di sepanjang pantai.	-	-	3
	Kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI	BPPPI Bulu sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur belum mampu menyediakan fasilitas dermaga, hanya mampu menyediakan fasilitas gedung pelelangan ikan tanpa melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada bangunan fasilitas yang rusak.	-	2	-
	Ketersediaan dana	Dana untuk pembangunan dermaga belum dialokasikan untuk PPI Bulu dan dana pemeliharaan gedung pelelangan guna mendukung kegiatan bongkar muat ikan juga belum tersedia.	1	-	-
Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan	Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	Ikan hasil tangkapan yang mendarat di PPI mendapatkan penanganan berupa pemilahan dan penimbangan, penyimpanan, dan pengepakan tanpa pengawetan.	-	2	-
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Gedung pelelangan ikan digunakan sebagai tempat untuk menangani ikan hasil tangkapan, yaitu pada saat pemilahan, penimbangan dan pengepakan.	-	-	3
	Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	Tersedia instalasi air bersih dari PDAM sebagai sumber air tawar dengan vol 3 lt/dt. Mayoritas 54,08% responden masyarakat perikanan menyatakan instalasi air bersih berfungsi untuk pembersihan ikan serta pembersihan lantai gedung pelelangan.	-	-	3
	Ketersediaan fasilitas pabrik es	Fasilitas pabrik es telah rusak peralatannya, tidak dapat digunakan dalam pembuatan es, penumpukan/penyimpanan es curai / es balok. Hal ini dinyatakan oleh 87,76% responden masyarakat perikanan sebagai pengguna fasilitas PPI Bulu.	-	2	-
	Ketersediaan fasilitas gudang dingin (<i>coldstorage/chillroom</i>)	Fasilitas gudang dingin yang tersedia tidak dapat digunakan untuk pengawetan ikan. Fungsinya hanya untuk tempat penyimpanan es balok yang dibeli dari luar PPI Bulu. Hal ini telah dinyatakan oleh 83% responden.	-	2	-

Kriteria Fungsi PPI	Parameter	Karakteristik Fungsi PPI	Skala Pengukuran Fungsi PPI		
			1	2	3
	Kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI	BPPPI Bulu sebagai unit pelaksana teknis Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur telah menyediakan dan memelihara fasilitas gedung pelelangan, instalasi air bersih sehingga tetap berfungsi, menyediakan fasilitas pabrik es dan gudang dingin namun tidak mampu merawatnya sehingga fasilitas tersebut tidak berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya.	-	2	-
	Ketersediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana dari retribusi pemanfaatan fasilitas PPI saat ini diperoleh dari pemanfaatan fasilitas bengkel dan ruangan penanganan ikan oleh masyarakat perikanan. Dana untuk perbaikan fasilitas penanganan yang mengalami kerusakan belum tersedia • Ketersediaan dana dari retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 0,75 % sudah tidak diterima seiring dengan berhenti beroperasinya pelelangan ikan sejak tahun 2003 	1	-	-
Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan	Aktivitas pemasaran	Sebesar 46,94% responden masyarakat perikanan menampung dan memasarkan hasil perikanan dari PPI dan luar Bulu ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.	-	2	-
	Lembaga pemasaran	Saluran pemasaran yang sering digunakan untuk memasarkan hasil perikanan dalam dan luar Kabupaten Tuban adalah melibatkan 4 lembaga pemasaran, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Nelayan/petani ikan - Pedagang besar - Pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen. • Nelayan/petani ikan – tengkulak - pedagang pengecer (pasar, rumah makan, warung) – konsumen. 	-	2	-
	Informasi pasar dan harga	Sebesar 61,22% responden masyarakat perikanan menyatakan PPI Bulu tidak menyediakan informasi pasar dan harga.	1	-	-
	Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> o Pemasaran di dalam kota dengan jarak 1 – 2 km ditempuh dalam waktu 10 – 15 menit ke desa nelayan di sekitar PPI Bulu, jarak 20 Km dengan waktu 30 menit ke Pasar Glondong gede, Kecamatan Tambakboyo dan jarak 45 km dengan waktu tempuh 1 jam ke kota Tuban. Alat transportasi yang digunakan adalah angkutan pedesaan dan mobil pick-up. o Pemasaran antar kota pada jarak > 50 Km ditempuh dalam waktu 3 – 6 jam yaitu ke Surabaya, Bojonegoro dan Tulungagung dengan mobil pickup. o Pemasaran antar propinsi pada jarak > 100 Km ditempuh dalam waktu 1 – 2 hari, yaitu ke Semarang, Bandung dan Jakarta dengan truck. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu berada pada jalur transportasi Pantai Utara Jawa dengan hirarki jalan arteri primer. Sirkulasi pengangkutan hasil perikanan cukup lancar didukung adanya alat transportasi dan jarang terjadi kemacetan pada proses perjalanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan. Kemudahan tersebut didukung oleh 57,14% responden.	-	-	3

Kriteria Fungsi PPI	Parameter	Karakteristik Fungsi PPI	Skala Pengukuran Fungsi PPI		
			1	2	3
	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	Tersedia fasilitas gedung pelelangan ikan tetapi 73,47% responden menyatakan fasilitas tersebut tidak berfungsi untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang.	-	2	-
	Ketersediaan fasilitas areal parkir	Areal parkir PPI Bulu tidak digunakan untuk menampung alat transportasi pengangkut ikan, melainkan sebagai salah satu lokasi jual beli ikan hasil tangkapan.	-	2	-
	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	PPI Bulu tidak memiliki jalur penghubung sebagai jalur khusus yang berfungsi untuk memperlancar aktivitas pengangkutan ikan dalam pemasaran hasil perikanan	1	-	-
	Kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI	Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu telah menyediakan fasilitas gedung pelelangan dan areal parkir guna mendukung kegiatan pemasaran dari PPI Bulu. Namun belum mampu menyediakan jalan penghubung untuk memperlancar kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan.	-	2	-
	Ketersediaan dana	Hasil wawancara dengan BPPPI Bulu, dana untuk mengelola fasilitas pemasaran saat ini belum dapat diupayakan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur sehingga fasilitas yang ada belum terpelihara dengan baik	1	-	-
Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data	Penyuluhan	Berdasarkan laporan tahunan Badan Pengelola PPI, penyuluhan yang pernah diselenggarakan adalah penyuluhan yang berkaitan dengan pelatihan teknologi penangkapan ikan dan penyuluhan alat GPS pada tahun 2006. Sebesar 57,14% responden tidak pernah mengikuti penyuluhan di PPI Bulu dan sebesar 42,86% responden mengikuti penyuluhan tersebut.	-	2	-
	Pengumpulan data	Tersedia data perikanan, meliputi jumlah dan jenis kapal perikanan yang berlabuh di PPI Bulu, jumlah dan jenis alat tangkap, jumlah nelayan, jenis, jumlah dan nilai produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu, daerah pemasaran hasil perikanan, jumlah tenaga kerja, jenis dan jumlah perbekalan melaut, dan ketersediaan fasilitas.	-	-	3
	Kemampuan penyuluh perikanan	41,84% responden menilai bahwa penyuluh perikanan mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan, 40,82% responden menilai bahwa penyuluh perikanan hanya mampu meyakinkan dan sisanya sebesar 17,35% responden menilai penyuluh perikanan masmpu meyakinkan, mengakomodasi masalah di bidang perikanan dan mampu menghubungkan masyarakat perikanan dengan sumber informan.	-	2	-
	Kelompok masyarakat perikanan	Kelompok nelayan dibentuk tahun 2006. Kelompok nelayan yang terbentuk tersebut belum diikuti oleh seluruh masyarakat perikanan dimana sebesar 42,86% responden telah bergabung dalam kelompok masyarakat perikanan tetapi hanya sebagai formalitas.	-	2	-
	Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	Tidak tersedia fasilitas balai pertemuan nelayan untuk kegiatan penyuluhan tetapi menggunakan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat pemberian penyuluhan.	1	-	-

Kriteria Fungsi PPI	Parameter	Karakteristik Fungsi PPI	Skala Pengukuran Fungsi PPI		
			1	2	3
	Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	Tersedia fasilitas kantor administrasi yang digunakan sebagai tempat pengumpulan data – data statistik perikanan.	-	-	3
	Kemampuan aparatur kelembagaan BPPPI	BPPPI bersama Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur belum mampu menyediakan fasilitas balai pertemuan nelayan sedangkan kantor administrasi masih terpelihara dengan adanya kebersihan ruang dan kondisi bangunan yang tidak rusak.	-	2	-
	Ketersediaan dana	Dana penyediaan fasilitas PPI, yaitu balai pertemuan nelayan yang berasal dari APBN belum diperoleh.	1	-	-
Fasilitator pembentukan harga	Penjualan ikan hasil tangkapan	Sejak tahun 2003 seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang, melainkan langsung dijual ke pedagang dan harga ditentukan oleh pedagang.	1	-	-
	Pembayaran ikan hasil tangkapan	Hasil penjualan ikan dibayar dikemudian hari oleh pedagang, yaitu 7 – 10 hari setelah ikan hasil tangkapan habis dijual oleh pedagang. Dari hasil survey primer menunjukkan sebesar 72,45% responden menerima pembayaran hasil penjualan ikan hasil tangkapan beberapa hari setelah ikan habis terjual oleh pedagang.	1	-	-
	Peraturan penyelenggaraan lelang	Penerapan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tidak berdasarkan Perda pelelangan ikan (Perda Jawa Timur dan Kabupaten). KUD membuat kebijakan baru, yaitu menaikkan tarif retribusi dari 5% menjadi 6,5%, 4% dipungut dari nelayan dan 2,5% dipungut dari pedagang.	1	-	-
	Peran serta masyarakat	Dalam pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan, mayoritas responden masyarakat perikanan sebesar 58,17% tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembahasan /rapat pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan.	1	-	-
	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	KUD tidak menyelenggarakan lelang ikan dan KUD tidak melaporkan/ mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan kepada nelayan. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh 73,47% responden masyarakat perikanan. Dari hasil wawancara dengan, nelayan dan pedagang menilai bahwa pengurus KUD telah melakukan korupsi dan tidak transparan dalam pengelolaan dana sehingga banyak unit koperasi yang tidak jalan termasuk pelelangan ikan dan tidak ada kejelasan penggunaan keuangan.	1	-	-
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan	Pendapatan responden nelayan	Perubahan tingkat pendapatan responden nelayan pemilik kapal sebesar 50,00% cenderung tetap sedangkan nelayan anak buah kapal sebesar 53,01% tingkat pendapatannya cenderung menurun. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan tingkat pendapatan responden nelayan dominan menurun.	1	-	-
	Kemampuan keluarga nelayan memenuhi	Dari 66,67% responden nelayan pemilik kapal, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya cenderung tetap sedangkan 70,93% responden nelayan anak buah kapal cenderung	1	-	-

Kriteria Fungsi PPI	Parameter	Karakteristik Fungsi PPI	Skala Pengukuran Fungsi PPI		
			1	2	3
	kebutuhan hidup keluarga.	menurun. Kondisi tersebut menunjukkan perubahan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dominan menurun.			
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Dalam jual beli ikan hasil tangkapan, harga ditentukan oleh pedagang tanpa melalui pelelangan ikan. Nelayan tidak bisa menawar dalam jual beli ikan hasil tangkapan	1	-	-
Sumber pendapatan daerah	Penerimaan retribusi	Sejak tahun 2003 tidak ada penerimaan retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dari PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban.	1	-	-
	Penjualan ikan hasil tangkapan	Seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang, melainkan langsung dijual ke pedagang dan harga ditentukan oleh pedagang.	1		
	Koordinasi antara Pemerintah dan KUD	Dalam menyalurkan hasil retribusi pelelangan ikan dari KUD ke Dinas Perikanan Kabupaten Tuban, tidak ada koordinasi antara keduanya. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh 56,12% responden masyarakat perikanan.	1	-	-

Berdasarkan tabel kriteria dan skala pengukuran fungsi PPI diatas bahwa dari 8 kriteria untuk mengukur fungsi PPI diperoleh jumlah nilai dari skala pengukuran sebanyak 80.

- Fungsi PPI optimal, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 115 – 147
- Fungsi PPI kurang optimal, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 82 – 114
- Fungsi PPI tidak optimal, jika jumlah nilai skala pengukuran adalah 49 – 81

Berdasarkan jumlah nilai skala pengukuran dan tingkatan fungsi PPI dapat disimpulkan bahwa fungsi PPI Bulu, Kecamatan Bancar tidak optimal.

4.6 Analisis Faktor

Berdasarkan hasil analisa yang menyatakan bahwa fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan pada wilayah penelitian tidak optimal, sehingga perlu mengetahui faktor – fator penyebab terjadinya kondisi tersebut. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan pada wilayah penelitian tidak optimal dilakukan analisis faktor dengan menggunakan bantuan software *SPSS Ver. 11.0 For Windows*.

Analisis faktor dipergunakan untuk mereduksi jumlah variabel yang banyak menjadi variabel baru yang disebut faktor dan masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung dari variabel asli (*original variabel*). Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi: aktivitas perikanan, jumlah kapal perikanan, kondisi perairan, ketersediaan fasilitas, kemampuan aparatur kelembagaan, volume ikan, aksesibilitas, lembaga pemasaran, informasi pasar dan harga, kelompok masyarakat perikanan, peraturan penyelenggaraan lelang, peran serta masyarakat, pendapatan, kemampuan keluarga nelayan, penerimaan retribusi, koordinasi antar instansi.

Input data yang dipergunakan dalam analisis faktor adalah data ratio dimana kategori diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi dan urutan kategori data dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris dan angka pada skala menunjukkan usuran yang sebenarnya dari kategori yang diukur serta dapat dibuat suatu perkalian atau pembagian (Hasan, 2002 : 27). Adapun skala pengukurannya menggunakan skala *likert* yaitu jenis skala yang dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik), seperti sikap, pendapat dan persepsi sosial seseorang atau sekelompok orang (Hasan, 2002 : 72). Dimana input data yang dipergunakan dalam penelitian adalah persepsi masyarakat sebagai responden (objek penelitian) sebesar 98 responden masyarakat perikanan yang terdiri dari nelayan dan pedagang terhadap pertanyaan kuisioner. Persepsi masyarakat tersebut dinyatakan untuk mengetahui kondisi eksisting terkait dengan variabel penelitian dan pemilihan bentuk kata-kata terhadap masing-masing pertanyaan kuisioner dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

- a. Setuju
- b. Kurang setuju
- c. Tidak setuju

Banyaknya kategori dalam skala *likert* yang dipergunakan dalam penelitian didasarkan pada perhitungan dalil Sturges (lihat pers. 3-11). Hal ini telah sesuai dengan pernyataan Nugroho (2005 : 91) bahwa analisis faktor yang berasal dari data primer melalui suatu kuisioner akan mengkuantitatifkan data dengan skala likert dan menggunakan rata – rata pembobotan tersebut sebagai data statistik yang akan diolah.

Oleh karena data statistik yang dipergunakan dalam analisis faktor ini berasal dari kuisioner, maka dilakukan uji validitas dan uji realibilitas untuk kemudian dipergunakan dalam analisis faktor. Guna keperluan analisis faktor secara kuantitatif, maka jawaban-jawaban responden tersebut diberi skor pada masing-masing pertanyaan. Berdasarkan skor yang diberikan oleh responden masyarakat terhadap masing-masing pertanyaan tersebut, maka diperoleh prosentase sikap responden yang menyatakan setuju terhadap faktor–faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tidak optimal. Pada masing - masing pertanyaan yang diajukan (tabel 3.11), maka prosentase sikap responden terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.128 berikut,

Tabel 4.128 Prosentase Persepsi Responden Masyarakat Perikanan Terhadap Pertanyaan Yang Diajukan

Pertanyaan	Setuju (1)	Kurang setuju (2)	Tidak Setuju (3)	Pertanyaan	Setuju (1)	Kurang setuju (2)	Tidak Setuju (3)
X13a	0,00	50,00	50,00	X41a	32,65	53,06	14,29
X13b	61,22	25,51	13,27	X41b	48,98	46,94	4,08
X14a	52,04	47,96	0,00	X43a	61,22	38,78	0,00
X14b	27,55	53,06	19,39	X43b	60,20	30,61	9,18
X15a	61,22	38,78	0,00	X45a	0,00	73,47	26,53
X15b	59,18	40,82	0,00	X45b	33,67	57,14	9,18
X16a	46,94	35,71	17,35	X46a	0,00	81,63	18,37
X16b	59,18	40,82	0,00	X46b	30,61	59,18	10,20
X17a	61,21	39,32	0,00	X47a	52,04	30,61	17,35
X17b	51,02	27,55	21,43	X47b	55,10	34,69	10,20
X17c	56,12	27,55	16,33	X51a	57,14	42,86	0,00
X18a	55,10	29,59	15,31	X51b	33,67	50,00	16,33
X18b	69,39	30,61	0,00	X53a	40,82	41,84	17,35
X22a	57,14	22,45	20,41	X53b	48,98	37,76	13,27
X22b	30,61	53,06	16,33	X54a	39,80	42,86	17,35
X22c	48,98	51,02	0,00	X54b	72,45	27,55	0,00
X23a	88,78	11,22	0,00	X61a	85,71	14,29	0,00
X23b	32,65	56,12	11,22	X61b	73,47	26,53	0,00
X24a	0,00	36,73	63,27	X63a	61,22	38,78	0,00
X24b	14,29	29,59	56,12	X63b	57,14	33,67	9,18
X26a	47,96	41,84	10,20	X63c	62,24	31,63	6,12
X26b	54,08	45,92	0,00	X64a	58,17	31,63	10,20
X34a	0,00	87,76	12,24	X64b	60,20	32,65	7,14
X34b	50,00	44,90	5,10	X65a	73,47	22,45	4,08

Pertanyaan	Setuju (1)	Kurang setuju (2)	Tidak Setuju (3)	Pertanyaan	Setuju (1)	Kurang setuju (2)	Tidak Setuju (3)
X35a	0,00	85,71	14,29	X65b	72,46	23,47	4,08
X35b	48,98	42,86	8,16	X73a	66,33	33,67	0,00
X37a	9,12	71,14	20,25	X73b	76,53	16,33	7,14
X37b	28,57	63,27	8,16	X81a	71,43	28,57	0,00
X38a	42,86	41,84	15,31	X81b	53,06	46,94	0,00
X38b	33,67	56,12	10,20	X82a	72,45	27,55	0,00
				X82b	64,29	35,71	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Berdasarkan tabel 4.128 diketahui bahwa responden masyarakat perikanan di lokasi penelitian secara keseluruhan menyatakan setuju terhadap variabel yang diujikan sebagai faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tidak optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada besarnya prosentase sikap responden masyarakat, yaitu > 45% responden menyatakan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan. Lebih jelasnya penentuan jumlah variabel yang diujikan didahului dengan proses uji validitas dan reliabilitas pada daftar pertanyaan sebelum pada tahapan analisis faktor.

A. Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir suatu daftar (konstruk) pertanyaan dimana dalam penelitian ini merupakan kelayakan butir-butir pertanyaan kuisisioner yang mendefinisikan setiap variabel.

Menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS pada tabel korelasi (lihat Lampiran III) dengan data dasar, yaitu pilihan masyarakat sebagai responden terhadap butir-butir pertanyaan kuisisioner yang mendefinisikan setiap variabel. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi pearson yang merupakan r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} yang ditunjukkan dalam angka kritis nilai r sesuai tingkat signifikannya. Adapun perhitungan nilai r_{tabel} adalah dengan menentukan derajat bebas (df) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$df = n - k$$

$$df = 98 - 3$$

$$df = 95$$

Dimana:

n = banyaknya responden

k = banyaknya butir jawaban setiap pertanyaan

Sehingga dapat dilihat pada tabel angka kritis nilai r , r_{tabel} dengan nilai derajat bebas (df) yaitu 95 pada tingkat signifikan 1% adalah 0,2605

Nilai validitas masing-masing butir pertanyaan terhadap masing-masing variabel dapat dijelaskan pada tabel 4.129.

Tabel 4.129 Nilai Validitas Pertanyaan Pada Masing – masing Variabel Penelitian

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Aktivitas kapal perikanan	X11a	0,139	0,2605	Tidak Valid
	X11b	0,418	0,2605	Valid
Jumlah kapal perikanan	X12a	0,297	0,2605	Valid
	X12b	0,824	0,2605	Valid
Kondisi perairan	X13a	0,900	0,2605	Valid
	X13b	0,953	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	X14a	0,890	0,2605	Valid
	X14b	0,942	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	X15a	0,945	0,2605	Valid
	X15b	0,946	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	X16a	0,968	0,2605	Valid
	X16b	0,864	0,2605	Valid
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	X17a	0,925	0,2605	Valid
	X17b	0,976	0,2605	Valid
	X17c	0,972	0,2605	Valid
Ketersediaan dana	X18a	0,971	0,2605	Valid
	X18b	0,925	0,2605	Valid
Volume ikan	X21a	0,658	0,2605	Valid
	X21b	0,728	0,2605	Valid
Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	X22a	0,945	0,2605	Valid
	X22b	0,910	0,2605	Valid
	X22c	0,881	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas dermaga	X23a	0,855	0,2605	Valid
	X23b	0,965	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	X24a	0,886	0,2605	Valid
	X24b	0,952	0,2605	Valid
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	X25a	0,477	0,2605	Valid
	X25b	0,699	0,2605	Valid
Ketersediaan dana	X26a	0,944	0,2605	Valid
	X26b	0,969	0,2605	Valid
Aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan	X31a	0,683	0,2605	Valid
	X31b	0,673	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	X32a	0,757	0,2605	Valid
	X32b	0,911	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas instalasi air bersih	X33a	0,852	0,2605	Valid
	X33b	0,295	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas pabrik es	X34a	0,799	0,2605	Valid
	X34b	0,954	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas gudang dingin	X35a	0,814	0,2605	Valid
	X35b	0,938	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas drainase	X36a	0,617	0,2605	Valid
	X36b	0,915	0,2605	Valid
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	X37a	0,900	0,2605	Valid
	X37b	0,914	0,2605	Valid

Variabel	Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Ketersediaan dana	X38a	0,913	0,2605	Valid
	X38b	0,884	0,2605	Valid
Aktivitas Pemasaran	X41a	0,894	0,2605	Valid
	X41b	0,857	0,2605	Valid
Lembaga pemasaran	X42a	0,885	0,2605	Valid
	X42b	0,796	0,2605	Valid
Informasi pasar dan harga	X43a	0,865	0,2605	Valid
	X43b	0,928	0,2605	Valid
Aksesibilitas ke daerah pemasaran tangkapan ikan	X44a	0,713	0,2605	Valid
	X44b	0,868	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	X45a	0,851	0,2605	Valid
	X45b	0,924	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas areal parkir	X46a	0,838	0,2605	Valid
	X46b	0,937	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	X47a	0,945	0,2605	Valid
	X47b	0,929	0,2605	Valid
Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	X48a	0,733	0,2605	Valid
	X48b	0,907	0,2605	Valid
Ketersediaan dana	X49a	0,835	0,2605	Valid
	X49b	0,792	0,2605	Valid
Penyuluhan	X51a	0,894	0,2605	Valid
	X51b	0,946	0,2605	Valid
Pengumpulan data	X52a	0,529	0,2605	Valid
	X52b	0,722	0,2605	Valid
	X52c	0,731	0,2605	Valid
Kemampuan penyuluh perikanan	X53a	0,974	0,2605	Valid
	X53b	0,973	0,2605	Valid
Kelompok masyarakat perikanan	X54a	0,867	0,2605	Valid
	X54b	0,883	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas balai pertemuan nelayan	X55a	0,831	0,2605	Valid
	X55b	0,828	0,2605	Valid
Ketersediaan fasilitas kantor administrasi	X56a	0,800	0,2605	Valid
	X56b	0,806	0,2605	Valid
Kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI	X57a	0,768	0,2605	Valid
	X57b	0,756	0,2605	Valid
Ketersediaan dana	X58a	0,799	0,2605	Valid
	X58b	0,843	0,2605	Valid
Penjualan ikan hasil tangkapan	X61a	0,895	0,2605	Valid
	X61b	0,935	0,2605	Valid
Pembayaran ikan hasil tangkapan	X62a	0,747	0,2605	Valid
	X62b	0,900	0,2605	Valid
Peraturan penyelenggaraan lelang	X63a	0,944	0,2605	Valid
	X63b	0,632	0,2605	Valid
	X63c	0,909	0,2605	Valid
Peran serta masyarakat	X64a	0,947	0,2605	Valid
	X64b	0,938	0,2605	Valid
Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	X65a	0,933	0,2605	Valid
	X65b	0,934	0,2605	Valid
Pendapatan responden nelayan	X71a	0,837	0,2605	Valid
	X71b	0,777	0,2605	Valid
Kemampuan keluarga nelayan memenuhi kebutuhan hidup keluarga	X72a	0,812	0,2605	Valid
	X72b	0,855	0,2605	Valid

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penjualan ikan hasil tangkapan	X73a	0,909	0,2605	Valid
	X73b	0,944	0,2605	Valid
Penerimaan retribusi	X81a	0,891	0,2605	Valid
	X81b	0,912	0,2605	Valid
Penjualan ikan hasil tangkapan	X82a	0,953	0,2605	Valid
	X82b	0,959	0,2605	Valid
Koordinasi antara Pemerintah dengan KUD	X83a	0,709	0,2605	Valid
	X83b	0,837	0,2605	Valid

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan tabel 4.129 dapat dilihat bahwa terdapat 1 pertanyaan yang menunjukkan tidak valid, yaitu pertanyaan X11a pada variabel aktivitas kapal perikanan. Hal itu menunjukkan bahwa pertanyaan kuisisioner tersebut tidak layak dalam mendefinisikan variabel aktivitas kapal perikanan.

B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk - konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuisisioner (Nugroho, 2005: 72).

Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel terhadap seluruh butir pertanyaan yang memenuhi syarat validitas sesuai dengan uji validitas yang telah dilakukan sebelumnya. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

Uji reliabilitas dilakukan seperti halnya uji validitas dengan mempergunakan data statistik yang memenuhi uji validitas pada worksheets SPSS (lihat Lampiran II). Output SPSS untuk uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel *Reliability Statistics* pada masing-masing variabel yang diujikan. Nilai reliabilitas setiap variabel ditunjukkan oleh nilai *Cronbach's Alpha* (lihat Lampiran II). Lebih jelasnya nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.130.

Tabel 4.130 Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X11	-10,3847	Tidak Reliabel	X44	0,4065	Tidak Reliabel
X12	-7046	Tidak Reliabel	X45	0,7151	Reliabel
X13	0,8098	Reliabel	X46	0,7016	Reliabel
X14	0,7910	Reliabel	X47	0,8580	Reliabel
X15	0,8813	Reliabel	X48	0,5049	Tidak Reliabel
X16	0,8381	Reliabel	X49	0,4880	Tidak Reliabel
X17	0,9381	Reliabel	X51	0,7987	Reliabel
X18	0,8407	Reliabel	X52	0,3724	Tidak Reliabel
X21	-0,0759	Tidak Reliabel	X53	0,9445	Reliabel
X22	0,8847	Reliabel	X54	0,6935	Reliabel
X23	0,7126	Reliabel	X55	0,5456	Tidak Reliabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X24	0,7841	Reliabel	X56	0,4484	Tidak Reliabel
X25	-0,8104	Tidak Reliabel	X57	0,2770	Tidak Reliabel
X26	0,8897	Reliabel	X58	0,5175	Tidak Reliabel
X31	-0,1769	Tidak Reliabel	X61	0,7962	Reliabel
X32	0,5507	Tidak Reliabel	X62	0,5199	Tidak Reliabel
X33	0,4470	Tidak Reliabel	X63	0,8942	Reliabel
X34	0,6344	Reliabel	X64	0,8725	Reliabel
X35	0,6622	Reliabel	X65	0,8516	Reliabel
X36	0,3352	Tidak Reliabel	X71	0,4648	Tidak Reliabel
X37	0,7841	Reliabel	X72	0,5607	Tidak Reliabel
X38	0,7592	Reliabel	X73	0,8248	Reliabel
X41	0,6942	Reliabel	X81	0,7685	Reliabel
X42	0,5801	Tidak Reliabel	X82	0,9043	Reliabel
X43	0,7419	Reliabel	X83	0,3352	Tidak Reliabel

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan tabel 4.130, maka dapat diketahui bahwa terdapat 21 variabel penelitian yang memiliki nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,6 atau tidak reliabel sedangkan 29 variabel reliabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduapuluhsembilan variabel tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk analisis faktor.

C. Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan tahap akhir untuk mengetahui faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tidak optimal. Adapun tahapan analisis faktor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.) Merumuskan Masalah Faktor Analisis

Meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Menentukan tujuan analisis faktor

Tujuan analisis faktor dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tidak optimal di wilayah penelitian.

b. Menentukan variabel yang dipergunakan

Variabel yang digunakan dalam analisis faktor dispesifikasi berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai proses penentuan variabel yang dapat dipergunakan dalam analisis faktor, yaitu variabel yang memenuhi syarat valid (nilai korelasi $> 0,2607$) dan reliabel (*Cronbach's Alpha* $> 0,6$). Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas, variabel yang dapat dipergunakan dalam analisis faktor meliputi : aktivitas perikanan, kondisi perairan, ketersediaan fasilitas,

kemampuan aparaturnya, ketersediaan dana, informasi pasar dan harga, kelompok masyarakat perikanan, peraturan penyelenggaraan lelang, peran serta masyarakat, penerimaan retribusi.

c. Pengukuran variabel berdasarkan skala

Analisis faktor yang berasal dari data primer melalui suatu kuisisioner akan mengkuantitatifkan data dengan skala *likert* (Nugroho, 2005 : 91). Analisis faktor dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari kuisisioner dengan mengkuantitatifkan data tersebut dengan skala *likert* sebagai data statistik yang akan diolah. Adapun skala *likert* yang dipergunakan untuk menentukan faktor-faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan tidak optimal dapat dilihat pada tabel 3.11.

d. Penentuan elemen sampel (n)

Dalam penelitian ini jumlah variabel yang diujikan sebanyak 10 variabel sehingga sampel minimum yang diperlukan sebanyak :

$\begin{aligned} \text{Sampel minimum} &= 5 \times \sum \text{variabel} \\ &= 5 \times 10 \\ &= 50 \end{aligned}$

Adapun objek dalam penelitian ini sebanyak 98 responden. Jadi objek penelitian telah memenuhi jumlah sampel minimum yang diperlukan.

2.) Menentukan Bentuk Matriks Korelasi

Analisis faktor dapat dipergunakan dengan tepat jika variabel-variabel yang akan dianalisis berkorelasi. Dengan analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan antara variabel, kekuatan hubungan dan sifat hubungan/arah korelasi. Jika korelasi antar variabel kecil (hubungan lemah) maka analisis faktor tidak tepat. Diharapkan dari variabel-variabel tersebut memiliki hubungan, korelasi tinggi antar variabel dan korelasi yang tinggi dengan faktor-faktor sebagai variabel baru yang disaring dari variabel – variabel asli. Adapun matriks korelasi yang dibentuk berdasarkan data hasil survei dari 98 responden dapat dilihat pada tabel 4.131

		X13	X14	X15	X16	X17	X18	X22	X23	X24	X26	X34	X35	X37	X38	X41	X43	X45	X46	X47	X51	X53	X54	X61	X63	X64	X65	X73	X81	X82
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,031	,003	,000	,000	,000											
X51	Pearson Correlation	-,755	-,784	-,707	-,744	-,655	-,570	-,725	-,486	,482	-,841	,130	-,064	-,100	-,291	,508	-,633	,035	-,519	-,559	1									
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,202	,531	,327	,004	,000	,000	,733	,000	,000										
X53	Pearson Correlation	,771	,926	,841	,969	,925	,902	,962	,856	-,295	,473	,284	,604	,503	,137	,185	,915	,479	,895	,935	-,687	1								
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,003	,000	,005	,000	,000	,178	,068	,000	,000	,000	,000	,000									
X54	Pearson Correlation	,504	,685	,422	,714	,636	,670	,676	,622	,072	,321	,220	,309	,468	-,183	,366	,671	,635	,721	,697	-,406	,695	1							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,481	,001	,030	,002	,000	,071	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000								
X61	Pearson Correlation	,473	,739	,671	,802	,840	,893	,809	,772	,175	,110	,473	,635	,501	-,183	,588	,856	,858	,832	,764	-,286	,815	,802	1						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,084	,280	,000	,000	,000	,071	,000	,000	,000	,000	,000	,004	,000	,000							
X63	Pearson Correlation	,103	,231	,206	,149	,277	,301	,260	,462	,075	-,485	,553	,634	,083	,368	,508	,340	,464	,419	,380	,043	,270	,281	,422	1					
	Sig. (2-tailed)	,314	,022	,042	,143	,006	,003	,010	,000	,461	,000	,000	,000	,414	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,676	,007	,005	,000						
X64	Pearson Correlation	,110	-,089	,133	-,013	,033	-,001	-,037	-,163	-,007	,128	-,029	,069	-,117	-,198	-,213	,039	-,115	-,224	-,129	-,021	-,039	-,431	-,156	-,341	1				
	Sig. (2-tailed)	,279	,383	,191	,898	,749	,995	,718	,109	,945	,209	,779	,500	,250	,050	,035	,700	,258	,026	,204	,838	,700	,000	,125	,001					
X65	Pearson Correlation	,219	-,003	,146	-,001	-,012	-,083	-,006	-,112	-,360	,235	-,184	,019	-,084	,161	-,422	-,034	-,400	-,166	-,003	-,217	,015	-,393	-,289	-,252	,637	1			
	Sig. (2-tailed)	,030	,980	,151	,995	,907	,419	,957	,271	,000	,020	,070	,850	,409	,114	,000	,737	,000	,102	,974	,032	,882	,000	,004	,012	,000				
X73	Pearson Correlation	,487	,786	,754	,844	,893	,924	,848	,757	,154	,230	,487	,552	,460	-,119	,445	,893	,809	,822	,723	-,415	,823	,718	,925	,334	-,062	-,235	1		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,129	,023	,000	,000	,000	,000	,243	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,546	,020				
X81	Pearson Correlation	,278	,543	,631	,600	,671	,695	,586	,334	,332	,320	,095	,125	,128	-,251	,130	,611	,590	,434	,336	-,402	,511	,529	,619	,121	-,119	-,223	,664	1	
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,001	,001	,350	,218	,208	,013	,202	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,235	,243	,027	,000		
X82	Pearson Correlation	,496	,800	,830	,868	,911	,934	,855	,663	,173	,403	,294	,410	,342	-,196	,247	,888	,748	,740	,631	-,526	,801	,677	,868	,154	,006	-,166	,931	,782	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,088	,000	,003	,000	,001	,053	,014	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,129	,954	,103	,000	,000	

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Keterangan :

X13 = Kondisi perairan

X14 = Ketersediaan fasilitas alur pelayaran

X15 = Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan

X16 = Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang

X17 = Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI

X18 = Ketersediaan dana

X22 = Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI

X23 = Ketersediaan fasilitas dermaga

X24 = Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan

X26 = Ketersediaan dana

X34 = Ketersediaan fasilitas pabrik es

X35 = Ketersediaan fasilitas gudang dingin

X37 = Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI

X38 = Ketersediaan dana

X41 = Aktivitas Pemasaran

X43 = Informasi pasar dan harga

X45 = Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan

X46 = Ketersediaan fasilitas areal parkir

X47 = Ketersediaan fasilitas jalan penghubung

X51 = Penyuluhan

X53 = Kemampuan penyuluh perikanan

X54 = Kelompok masyarakat perikanan

X61 = Penjualan ikan hasil tangkapan

X63 = Peraturan penyelenggaraan lelang

X64 = Peran serta masyarakat

X65 = Kemampuan aparatur kelembagaan KUD

X73 = Penjualan ikan hasil tangkapan

X81 = Penerimaan retribusi

X82 = Penjualan ikan hasil tangkapan

Berdasarkan tabel 4.131 dapat dilihat adanya nilai dari Sig (2-tailed) dan *Pearson Correlation*. Sig (2-tailed) merupakan nilai *p-value* yang menunjukkan ada - tidaknya hubungan antar variabel sedangkan *Pearson Correlation* merupakan nilai koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan/keeratan hubungan antar variabel. Untuk menunjukkan ada/tidaknya hubungan antar variabel menggunakan pedoman sebagai berikut :

Hipotesis :

Ho : Tidak ada hubungan antara (korelasi) antara dua variabel

Hi : Ada hubungan (korelasi) antara dua variabel; atau angka korelasi tidak 0.

Dasar pengambilan keputusan

- Ho di terima, tidak ada hubungan jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, atau nilai *p-value* pada kolom *sig.(2- tailed) > level of significant (alpha)= 0,05*.
- Ho di tolak, ada hubungan jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, atau nilai *p-value* pada kolom *sig.(2- tailed) < level of significant (alpha)= 0,05*.

Hubungan antar variabel dapat dilihat dengan koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk mengukur keeratan/kekuatan hubungan antar variabel dan memeriksa arah hubungan setiap variabel. Keeratan/kekuatan hubungan antar variabel menggunakan pedoman seperti pada tabel 4.132

Tabel 4.132 Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi	Kualifikasi
0.00 – 0.199	Lemah Sekali
0.20 – 0.399	Lemah
0.40 – 0.599	Cukup
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 10.00	Sangat Kuat

Sumber: Singgih, 2000 : 125

Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sifat nilai koefisien adalah plus (+) atau minus (-) yang menunjukkan arah korelasi. Makna sifat korelasi (Nugroho, 2005: 36) antara lain :

1. Korelasi positif (+) berarti jika variabel x_1 mengalami kenaikan maka variabel x_2 juga akan mengalami kenaikan atau jika variabel x_2 mengalami kenaikan maka variabel x_1 juga akan mengalami kenaikan.
2. Korelasi negatif (-) berarti jika variabel x_1 mengalami kenaikan maka variabel x_2 mengalami penurunan atau jika variabel x_2 mengalami kenaikan maka variabel x_1 akan mengalami penurunan.

Analisis korelasi dari tabel 4.131 adalah sebagai berikut :

1. X13 (kondisi perairan) dengan X14 (ketersediaan fasilitas alur pelayaran)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,000 < 0,05$. Artinya kondisi perairan berkorelasi/ada hubungan dengan ketersediaan fasilitas alur pelayaran.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* 0,765. Artinya keeratan hubungan kondisi perairan dengan ketersediaan fasilitas alur pelayaran kuat. Sifat korelasi (+) berarti jika kondisi perairan mengalami kenaikan maka ketersediaan fasilitas alur pelayaran juga mengalami kenaikan
2. X14 (ketersediaan fasilitas alur pelayaran) dengan X34 (ketersediaan fasilitas pabrik es)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,062 > 0,05$. Artinya ketersediaan fasilitas alur pelayaran tidak berkorelasi/ tidak ada hubungan dengan ketersediaan fasilitas pabrik es.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* 0,189. Artinya keeratan hubungan ketersediaan fasilitas alur pelayaran dengan ketersediaan fasilitas pabrik es lemah sekali. Sifat korelasi (+) berarti jika ketersediaan fasilitas alur pelayaran mengalami kenaikan maka ketersediaan fasilitas pabrik juga mengalami kenaikan
3. X23 (ketersediaan fasilitas dermaga) dengan X41 (aktivitas pemasaran)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,003 < 0,05$. Artinya ketersediaan fasilitas dermaga berkorelasi/ ada hubungan dengan aktivitas pemasaran.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* 0,298. Artinya keeratan hubungan ketersediaan fasilitas dermaga dengan aktivitas pemasaran lemah. Sifat korelasi (+) berarti jika ketersediaan fasilitas dermaga mengalami kenaikan maka aktivitas pemasaran juga mengalami kenaikan
4. X26 (ketersediaan dana) dengan X41 (aktivitas pemasaran)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,000 < 0,05$. Artinya ketersediaan dana berkorelasi/ ada hubungan dengan aktivitas pemasaran.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* -0,601. Artinya keeratan hubungan ketersediaan dana dengan aktivitas pemasaran kuat. Sifat korelasi (-) berarti jika ketersediaan dana mengalami kenaikan maka aktivitas pemasaran mengalami penurunan.

5. X51 (penyuluhan) dengan X46 (ketersediaan fasilitas areal parkir)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,000 < 0,05$. Artinya penyuluhan berkorelasi/ ada hubungan dengan ketersediaan fasilitas areal parkir.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* $-0,519$. Artinya keeratan hubungan penyuluhan dengan ketersediaan fasilitas areal parkir cukup. Sifat korelasi (-) berarti jika ketersediaan fasilitas areal parkir mengalami kenaikan maka penyuluhan mengalami penurunan.
6. X64 (peran serta masyarakat) dengan X 65 (kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,000 < 0,05$. Artinya peran serta masyarakat berkorelasi/ ada hubungan dengan kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* $0,637$. Artinya keeratan hubungan peran serta masyarakat dengan kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD kuat. Sifat korelasi (+) berarti jika peran serta masyarakat mengalami kenaikan maka kemampuan aparaturnya kelembagaan KUD juga mengalami kenaikan.
7. X81 (penerimaan retribusi) dengan X82 (penjualan ikan hasil tangkapan)
 - Nilai *p-value* pada kolom *sig. 2-tailed* $0,000 < 0,05$. Artinya penerimaan retribusi berkorelasi/ ada hubungan dengan penjualan ikan hasil tangkapan.
 - Koefisien korelasi pada kolom *Pearson Correlation* $0,782$. Artinya keeratan hubungan penerimaan retribusi dengan penjualan ikan hasil tangkapan kuat. Sifat korelasi (+) berarti jika penjualan ikan hasil tangkapan mengalami kenaikan maka penerimaan retribusi juga mengalami kenaikan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar keeratan hubungan antar variabel kuat sehingga penggunaan analisis faktor tepat. Setelah diketahui hubungan antar variabel, berikutnya untuk menguji ketepatan analisis faktor dilakukan Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) yang berfungsi untuk mengukur kecukupan sampling (*sampling adequacy*). Nilai KMO menunjukkan bahwa sejauh mana korelasi antar - pasangan variabel dapat diterangkan oleh variabel lainnya. Jika nilai KMO $0,5 - 1$ berarti analisis faktor tepat, namun jika kurang dari $0,5$

analisis faktor dikatakan tidak tepat (Supranto, 2004 : 118). Pengklasifikasian nilai KMO 0,5 – 1 sesuai dengan tabel 4.133

Tabel 4.133 Kaiser – Meyer – Olkin

Ukuran KMO	Rekomendasi
$\geq 0,90$	Baik sekali
$\geq 0,80$	Baik
$\geq 0,70$	Sedang
$\geq 0,60$	Cukup
$\geq 0,50$	Kurang
$< 0,50$	Ditolak

Sumber : Subhash Sharma (1996) dalam Modul aplikasi SPSS (2005:23)

Berdasarkan analisis faktor yang dilakukan terhadap variabel- variabel yang diujikan maka pada output SPSS (lihat Lampiran V) dapat dilihat nilai KMO sebesar 0,882. Berdasarkan pengklasifikasian KMO pada tabel 4.133 dapat dilihat bahwa nilai KMO sebesar 0,882 dinyatakan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dianggap sebagai teknik yang tepat untuk matrik korelasi yang telah ditunjukkan pada tabel 4.132 sebelumnya. Lebih jelasnya hasil uji KMO dan Barlett dapat dilihat pada tabel 4.134 berikut,

Tabel 4.134 Hasil Uji KMO dan Bartlett

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy	0,882	
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	5742,031
	Df	406
	Sig.	0,000

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Setelah mengetahui bahwa analisis faktor dianggap sebagai teknik yang tepat berdasarkan uji KMO dan Barlett, maka dilakukan analisis faktor untuk mengekstraksi variabel sehingga variabel tidak berkorelasi sesamanya, bebas satu sama lainnya, lebih sedikit jumlahnya daripada variabel asli akan tetapi bisa menyerap sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli.

3.) Menentukan Metode Analisis Faktor

Pendekatan ekstraksi yang dipergunakan untuk mereduksi variabel penelitian adalah *Principal Component Analysis* dimana jumlah varian dalam data yang terkandung dalam semua variabel asli dipertimbangkan.

4.) Menentukan Banyaknya Faktor

Seperti telah dijelaskan pada Bab III Metode Penelitian mengenai metode analisis faktor bahwa terdapat beberapa kriteria dalam penentuan banyaknya faktor, meliputi kriteria akar ciri (*Eigenvalues*), presentase keragaman kumulatif (*Percentage of Variances*) dan *scree plot*.

- a. Penentuan banyaknya faktor berdasarkan kriteria akar ciri (*Eigenvalues*) dan kriteria presentase keragaman kumulatif (*Percentage of Variances*)
- Akar ciri menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung keragaman variabel yang diujikan. Adapun akar ciri dan keragaman kumulatif dari variabel yang diujikan dapat dilihat pada output SPSS tabel *Total Variance Explained* kolom *Initial Eigenvalues* (lihat Lampiran V). Lebih jelasnya akar ciri dan keragaman kumulatif dari variabel yang diujikan dapat dilihat pada tabel 4.135.

Tabel 4.135 Penentuan Jumlah Faktor Berdasarkan Akar Ciri Dan Prosentase Keragaman Kumulatif

Faktor	Akar Ciri		
	Total	Prosentase Keragaman (%)	Prosentase Kumulatif (%)
1	15,451	53,280	53,280
2	4,638	15,993	69,274
3	2,687	9,266	78,539
4	1,802	6,214	84,754
5.	1,250	4,309	89,063
6.	0,683	2,355	91,418
7.	0,487	1,680	93,098
8.	0,446	1,537	94,634
9.	0,315	1,087	95,722
10.	0,256	0,884	96,606
11.	0,195	0,673	97,280
12.	0,168	0,581	97,860
13.	0,129	0,446	98,306
14.	0,101	0,349	98,655
15.	0,081	0,280	98,935
16.	0,063	0,220	99,155
17.	0,048	0,167	99,322
18.	0,036	0,125	99,447
19.	0,031	0,110	99,557
20.	0,024	0,084	99,642
21.	0,022	0,076	99,718
22.	0,018	0,064	99,782
23.	0,014	0,051	99,833
24.	0,013	0,045	99,878
25.	0,011	0,038	99,916
26.	0,008	0,029	99,945
27.	0,007	0,026	99,972
28.	0,004	0,015	99,988
29.	0,003	0,012	100,000

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Suatu akar ciri (*eigenvalues*) menunjukkan besarnya sumbangan dari faktor terhadap varian seluruh variabel asli. Hanya faktor dengan varian lebih besar dari satu (> 1) yang dimasukkan dalam model. Faktor dengan varian lebih kecil dari satu (< 1) tidak lebih baik dari asli, sebab variabel

asli telah dibakukan (*standardized*) yang berarti rata-ratanya nol dan variannya satu (Supranto, 2004 : 128).

Berdasarkan tabel 4.135, maka dapat diketahui bahwa faktor yang mempunyai nilai akar ciri lebih dari 1 sebanyak lima faktor. Hal ini berarti bahwa dari duapuluh sembilan variabel awal yang diujikan direduksi menjadi lima faktor, dengan keragaman tiap faktor adalah sebagai berikut :

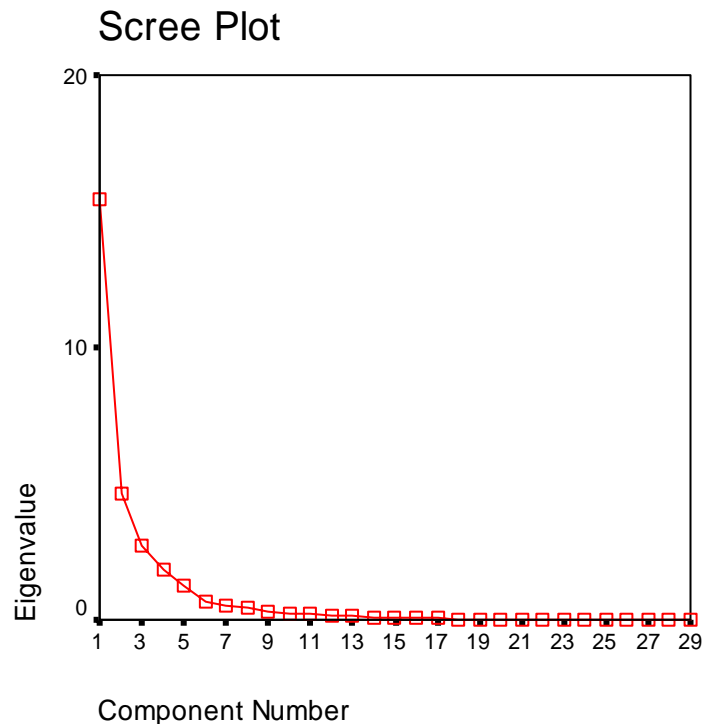
- Keragaman faktor pertama adalah $\frac{15,451}{29} \times 100\% = 53,280\%$.
- Keragaman faktor kedua adalah $\frac{4,638}{29} \times 100\% = 15,993\%$
- Keragaman faktor ketiga adalah $\frac{2,687}{29} \times 100\% = 9,266\%$
- Keragaman faktor keempat adalah $\frac{1,802}{29} \times 100\% = 6,214\%$
- Keragaman faktor kelima adalah $\frac{1,250}{29} \times 100\% = 4,309\%$

Keragaman total yang dapat diterangkan oleh kelima faktor tersebut adalah : $53,280\% + 15,993\% + 9,266\% + 6,214\% + 4,309\% = 89,063\%$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh keragaman total sebesar 89,063% yang menunjukkan bahwa lima faktor tersebut telah mampu menerangkan keragaman total data sebesar 89,063%. Hal tersebut telah sesuai dengan pedoman yang disarankan bahwa ekstraksi faktor dihentikan jika kumulatif persentase varian sudah mencapai paling sedikit 60% atau 75% dari seluruh variabel asli (Supranto, 2004 : 129-130). Jadi penentuan banyaknya faktor berdasarkan kriteria akar ciri dan kriteria keragaman kumulatif adalah sebesar lima faktor.

b. Penentuan banyaknya faktor berdasarkan *scree plot*

Selain menggunakan kriteria akar ciri dan keragaman kumulatif, maka penentuan banyaknya faktor juga dapat ditentukan oleh *scree plot*. Adapun *scree plot* dapat dilihat pada output SPSS grafik *scree plot* dengan input data ratio yaitu jawaban responden terhadap pertanyaan dengan variabel yang reliabel. Lebih jelasnya grafik *scree plot* dapat dilihat pada gambar 4.23.



Gambar 4.23 Scree Plot

Berdasarkan gambar 4.23 maka terlihat bahwa dari faktor 1 ke faktor 2 arah garis menurun cukup tajam. Kemudian dari faktor 2 ke faktor 3, 4 dan 5 masih menurun. Dari faktor 5 dan seterusnya arah garis cenderung menurun namun dengan slope yang lebih kecil. Bentuk *scree plot* pada gambar 4.23 menunjukkan bahwa dari faktor 1 ke faktor 5 terjadi perubahan dari terjal ke landai. Sehingga lima faktor sudah dapat menunjukkan seluruh keragaman variabel.

5.) Penentuan Variabel-Variabel Yang Diujikan Pada Faktor Yang Terbentuk

Berdasarkan penentuan banyaknya faktor berdasarkan kriteria akar ciri, keragaman kumulatif dan *scree plot*, maka dua faktor telah mampu menerangkan seluruh keragaman variabel. Tahapan selanjutnya yaitu penentuan masing-masing variabel terhadap faktor yang terbentuk. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai beban faktor yang menunjukkan besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor yang terbentuk. Nilai beban faktor ditunjukkan pada output SPSS tabel *Component Matrix* (Lampiran V). Lebih jelasnya persebaran variabel-variabel pada faktor yang terbentuk dapat dilihat pada tabel 4.136 berikut,

Tabel 4.136 Penyebaran Variabel-Variabel Pada Faktor Yang Terbentuk

Variabel	Faktor				
	1	2	3	4	5
X13	0,756	-0,166	-,252	-0,148	0,199
X14	0,951	-0,017	-,163	0,079	0,122
X15	0,922	0,049	-0,033	-0,176	-0,138
X16	0,972	-0,009	-0,016	0,0162	0,162
X17	0,968	0,137	0,066	-0,037	0,058
X18	0,948	0,202	0,171	0,008	0,024
X22	0,971	0,071	-0,083	0,024	0,146
X23	0,774	0,356	-0,270	0,155	0,181
X24	-0,144	0,226	0,860	0,123	-0,255
X26	0,571	-0,759	-0,098	-0,096	0,111
X34	0,203	0,702	0,078	0,004	0,185
X35	0,462	0,750	-0,154	-0,156	0,070
X37	0,362	0,172	0,017	0,071	0,789
X38	0,062	0,161	-0,882	0,069	-0,246
X41	0,036	0,795	0,378	0,224	0,328
X43	0,951	0,199	0,053	-0,023	0,043
X45	0,532	0,535	0,563	0,210	0,019
X46	0,835	0,290	-0,172	0,218	0,242
X47	0,807	0,255	-0,263	0,072	0,380
X51	-0,776	0,449	0,353	0,034	0,111
X53	0,940	0,132	-0,143	0,085	0,224
X54	0,675	0,061	0,180	0,508	0,319
X61	0,795	0,414	0,285	0,196	0,205
X63	0,213	0,782	-0,240	0,288	-0,226
X64	0,011	-0,054	0,160	-0,931	-0,026
X65	0,015	-0,177	-0,286	-0,821	-0,009
X73	0,856	0,319	0,274	0,114	0,105
X81	0,682	-0,062	0,458	0,209	-0,285
X82	0,903	0,094	0,352	0,061	-0,024

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Berdasarkan tabel 4.136, maka dapat diketahui bahwa variabel - variabel tersebar pada faktor pertama. Adapun persebaran variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 4.137.

Tabel 4.137 Penentuan Variabel Pada Setiap Faktor

Faktor	Variabel	Keterangan	Nilai beban faktor
I	X13	Kondisi perairan	0,756
	X14	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	0,951
	X15	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	0,922
	X16	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	0,972
	X17	Kemampuan aparaturnya lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI	0,968
	X18	Ketersediaan dana	0,948
	X22	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	0,971
	X23	Ketersediaan fasilitas dermaga	0,774
	X26	Ketersediaan dana	0,571
	X43	Informasi pasar dan harga	0,951
	X46	Ketersediaan fasilitas areal parkir	0,835
	X47	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	0,807
	X53	Kemampuan penyuluh perikanan	0,940

Faktor	Variabel	Keterangan	Nilai beban faktor
	X54	Kelompok masyarakat perikanan	0,675
	X61	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,795
	X64	Peran serta masyarakat	0,011
	X65	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	0,015
	X73	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,856
	X81	Penerimaan retribusi	0,682
	X82	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,903
II	X34	Ketersediaan fasilitas pabrik es	0,702
	X35	Ketersediaan fasilitas gudang dingin	0,750
	X38	Ketersediaan dana	0,161
	X41	Aktivitas Pemasaran	0,795
	X51	Penyuluhan	0,449
	X63	Peraturan penyelenggaraan lelang	0,782
III	X24	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	0,860
	X45	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	0,563
IV	-	-	-
V	X37	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	0,789

Sumber : Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan tabel 4.137, maka terlihat penyebaran variabel-variabel pada faktor yang terbentuk masih sulit diintrepetasikan karena sebagian besar variabel berkumpul di dalam suatu faktor tertentu, yaitu dominan faktor I, kemudian faktor II, III, dan V sedangkan faktor IV tidak memiliki variabel. Untuk membuat hasil dari analisis faktor lebih berarti maka dilakukan rotasi faktor.

6.) Rotasi Varimax Terhadap Faktor-Faktor Yang Terbentuk

Hasil rotasi varimax pada faktor yang terbentuk dapat dilihat pada output SPSS tabel *Rotated Component Matrix*(Lampiran V). Lebih jelasnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.138.

Tabel 4.138 Penyebaran Variabel-Variabel Pada Faktor Yang Terbentuk Hasil Rotasi Faktor Varimax

Variabel	Faktor				
	1	2	3	4	5
X13	0,704	-0,458	0,059	0,039	0,114
X14	0,933	-0,267	0,030	-0,094	-0,017
X15	0,859	-0,249	-0,083	0,205	-0,232
X16	0,958	-0,210	-0,085	-0,011	0,041
X17	0,966	-0,082	-0,095	0,110	-0,062
X18	0,961	0,037	-0,151	0,109	-0,094
X22	0,972	-0,183	0,010	-0,024	0,007
X23	0,856	0,027	0,344	-0,063	-0,006
X24	-0,103	0,670	-0,621	0,124	-0,177
X26	0,395	-0,771	-0,362	-0,180	0,138
X34	0,372	0,534	0,298	0,237	0,075
X35	0,595	0,331	0,465	0,377	-0,081
X37	0,511	0,128	0,150	-0,057	0,697

Variabel	Faktor				
	1	2	3	4	5
X38	0,047	-0,332	0,776	-0,137	-0,373
X41	0,280	0,879	0,142	0,102	0,231
X43	0,962	-0,035	-0,053	0,116	-0,085
X45	0,656	0,649	-0,253	0,092	-0,071
X46	0,917	0,040	0,232	-0,132	0,057
X47	0,889	-0,070	0,311	-0,035	0,206
X51	-0,625	0,702	0,048	0,154	0,177
X53	0,963	-0,162	0,106	0,016	0,074
X54	0,760	0,192	-0,143	-0,427	0,187
X61	0,906	0,365	-0,088	0,009	0,064
X63	0,357	0,509	0,548	-0,018	-0,403
X64	-0,087	-0,297	-0,186	0,869	0,102
X65	-0,104	-0,577	0,128	0,650	0,071
X73	0,921	0,240	-0,152	0,060	-0,021
X81	0,626	0,099	-0,537	-0,098	-0,320
X82	0,896	0,076	-0,359	0,057	-0,109

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan tabel 4.139, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar variabel tetap tersebar pada faktor pertama seperti sebelum dilakukan rotasi varimax. Adapun persebaran variabel-variabel tersebut setelah dilakukan rotasi varimax dapat dilihat pada tabel 4.139

Tabel 4.139 Penentuan Variabel Pada Setiap Faktor Hasil Rotasi Faktor Varimax

Faktor	Variabel	Keterangan	Nilai beban faktor
I	X13	Kondisi perairan	0,704
	X14	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	0,933
	X15	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	0,859
	X16	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	0,958
	X17	Kemampuan aparatour kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	0,966
	X18	Ketersediaan dana	0,961
	X22	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	0,972
	X23	Ketersediaan fasilitas dermaga	0,856
	X26	Ketersediaan dana	0,395
	X35	Ketersediaan fasilitas gudang dingin	0,595
	X43	Informasi pasar dan harga	0,962
	X45	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	0,656
	X46	Ketersediaan fasilitas areal parkir	0,917
	X47	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	0,889
	X53	Kemampuan penyuluh perikanan	0,963
	X54	Kelompok masyarakat perikanan	0,760
	X61	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,906
	X73	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,921
	X81	Penerimaan retribusi	0,626
X82	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,896	
II	X24	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	0,670
	X34	Ketersediaan fasilitas pabrik es	0,534
	X41	Aktivitas Pemasaran	0,879
	X51	Penyuluhan	0,702

Faktor	Variabel	Keterangan	Nilai beban faktor
III	X38	Ketersediaan dana	0,776
	X63	Peraturan penyelenggaraan lelang	0,548
IV	X64	Peran serta masyarakat	0,869
	X65	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	0,650
V	X37	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	0,697

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan tabel 4.139, maka dapat dilihat bahwa setelah dilakukan rotasi varimax faktor I memiliki hubungan yang erat dengan duapuluh variabel, faktor II memiliki hubungan yang erat dengan empat variabel, faktor III memiliki hubungan erat dengan dua variabel, faktor IV memiliki hubungan erat dengan dua variabel dan faktor V berhubungan erat hanya dengan 1 variabel.

7) Penamaan Faktor – faktor yang terbentuk (Interpretasi Faktor)

Interpretasi faktor dilakukan terhadap faktor hasil rotasi, yaitu telah terbentuk dua faktor dengan delapan variabel. Faktor – faktor tersebut cukup diberi nama faktor I, II, III, IV dan V dikarenakan banyaknya variabel yang membentuk suatu faktor tersebut. Pada dasarnya tidak aturan khusus dalam penamaan faktor-faktor yang terbentuk. Hubungan antar faktor dengan sekumpulan peubah jarang menghasilkan faktor yang bisa diinterpretasikan (diambil kesimpulannya), karena memang tidak pernah ada nama yang tepat untuk menggabungkan sekumpulan peubah walaupun variabel-variabel tersebut mirip Tabel 4.140 menunjukkan ringkasan seluruh variabel pada tiap faktor yang terbentuk dan juga penamaan faktor.

Tabel 4.140 Penamaan pada Faktor – faktor Yang terbentuk

Nama Faktor	Persentase Keragaman (%)	Variabel	Keterangan	Nilai beban faktor
I	53,280	X22	Aksesibilitas ke lokasi gedung TPI	0,972
		X17	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	0,966
		X53	Kemampuan penyuluh perikanan	0,963
		X43	Informasi pasar dan harga	0,962
		X18	Ketersediaan dana	0,961
		X16	Ketersediaan fasilitas pemecah gelombang	0,958
		X14	Ketersediaan fasilitas alur pelayaran	0,933
		X73	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,921

Nama Faktor	Persentase Keragaman (%)	Variabel	Keterangan	Nilai beban faktor
		X46	Ketersediaan fasilitas areal parkir	0,917
		X61	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,906
		X82	Penjualan ikan hasil tangkapan	0,896
		X47	Ketersediaan fasilitas jalan penghubung	0,889
		X15	Ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan	0,859
		X23	Ketersediaan fasilitas dermaga	0,856
		X54	Kelompok masyarakat perikanan	0,760
		X13	Kondisi perairan	0,704
		X45	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan	0,656
		X81	Penerimaan retribusi	0,626
		X35	Ketersediaan fasilitas gudang dingin	0,595
		X26	Ketersediaan dana	0,395
II	15,993	X41	Aktivitas Pemasaran	0,879
		X51	Penyuluhan	0,702
		X24	Ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan	0,670
		X34	Ketersediaan fasilitas pabrik es	0,534
	9,266	X38	Ketersediaan dana	0,776
		X63	Peraturan penyelenggaraan lelang	0,548
IV	6,214	X64	Peran serta masyarakat	0,869
		X65	Kemampuan aparatur kelembagaan KUD	0,650
V	4,309	X37	Kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI	0,697

Sumber: Hasil Analisis, 2007

Berdasarkan tabel 4.140, maka faktor yang terbentuk adalah faktor I, faktor II, III, IV dan V dengan penjelasan sebagai berikut :

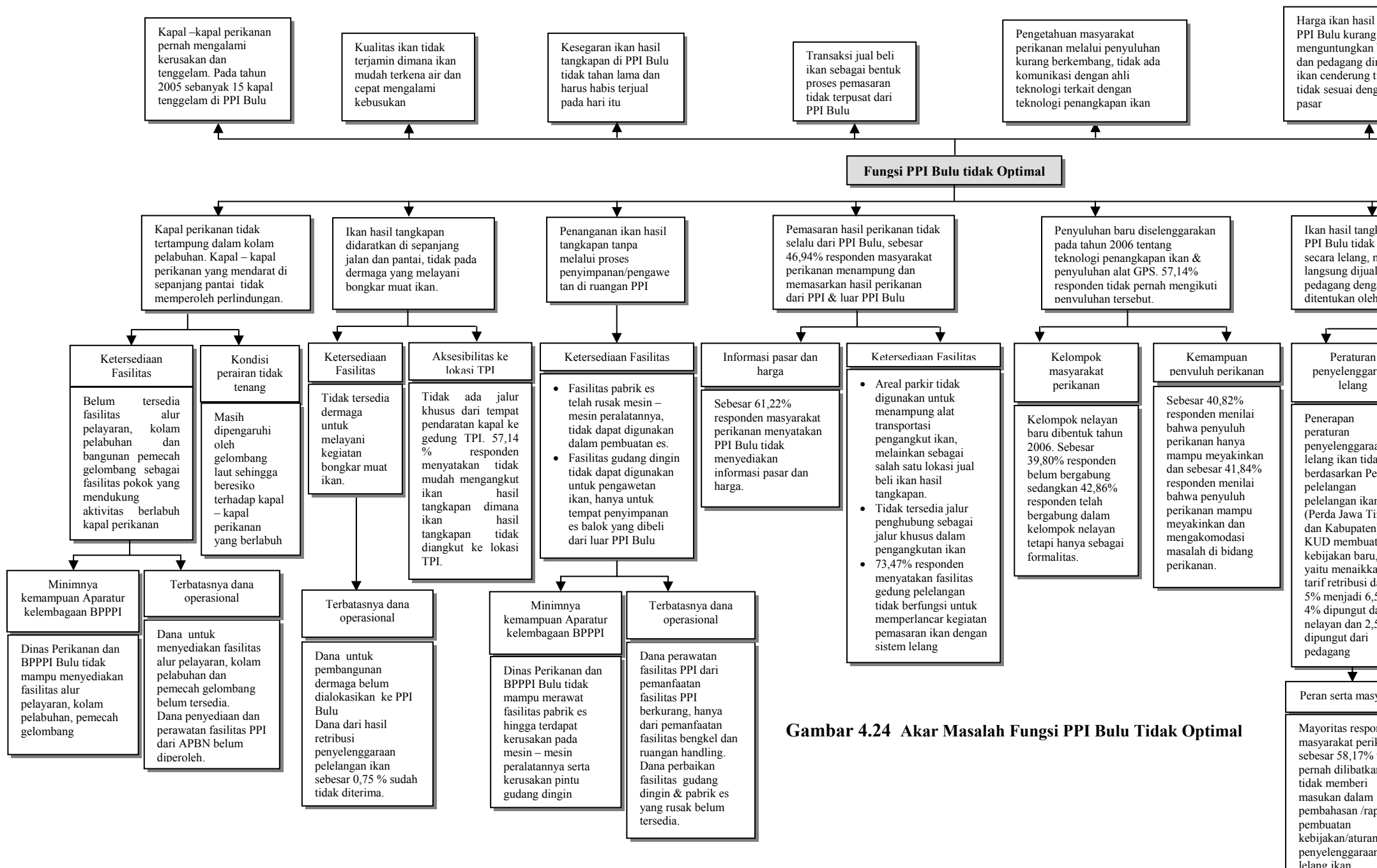
- Faktor I memiliki keeratan hubungan dengan duapuluh variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah aksesibilitas ke lokasi gedung TPI, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, kemampuan penyuluh perikanan, informasi pasar dan harga, ketersediaan dana, ketersediaan fasilitas pemecah gelombang, ketersediaan fasilitas alur pelayaran, penjualan ikan hasil tangkapan, ketersediaan fasilitas areal parkir, ketersediaan fasilitas jalan penghubung, ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan, ketersediaan fasilitas dermaga, kelompok masyarakat perikanan, kondisi perairan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan,

penerimaan retribusi, ketersediaan fasilitas gudang dingin. Faktor I ini memberikan persentase keragaman sebesar 53,280% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor I memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 53,280%.

- Faktor II memiliki keeratan hubungan dengan empat variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah variabel aktivitas pemasaran, penyuluhan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan, kemudian ketersediaan fasilitas pabrik es. Faktor II ini memberikan persentase keragaman sebesar 15,993% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor II memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 15,993%.
- Faktor III memiliki keeratan hubungan dengan dua variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah ketersediaan dana, peraturan penyelenggaraan lelang. Faktor III ini memberikan persentase keragaman sebesar 9,266% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor III memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 9,266%.
- Faktor IV memiliki keeratan hubungan dengan dua variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah peran serta masyarakat kemudian kemampuan aparatur kelembagaan KUD. Faktor IV ini memberikan persentase keragaman sebesar 6,214% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor III memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 6,214%.
- Faktor V berhubungan hanya dengan satu variabel yaitu kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI. Faktor V ini memberikan persentase keragaman sebesar 4,309% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor III memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 4,309%.

4.7 Analisis Akar Masalah

Berdasarkan hasil analisis tingkat optimal fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu berdasarkan kriteria dan skala pengukuran fungsi PPI Bulu disimpulkan bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu tidak berfungsi secara optimal. Faktor – faktor yang menyebabkan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tidak optimal disamping bisa dicari dengan analisis faktor juga bisa dengan analisis akar masalah. Pencarian faktor penyebab melalui analisis akar masalah lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.24



Gambar 4.24 Akar Masalah Fungsi PPI Bulu Tidak Optimal

Berdasarkan gambaran secara menyeluruh dan hasil analisis pada penelitian yang berjudul “Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar diperoleh kesimpulan mengenai potensi dan masalah pada Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.141

Tabel 4.141 Potensi dan Masalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu

No	Potensi	Halaman
1.	Dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2000 hingga tahun 2005 terjadi peningkatan produksi ikan yang didaratkan di PPI Bulu rata – rata 195,9% pertahun. Jumlah produksi dari tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah 445 ton, 306 ton, 153 ton, 1.523 ton, 3.802 ton, dan 4.507 ton	133
2.	PPI Bulu berada di jalur yang strategis. Jaringan jalan yang melewati PPI Bulu merupakan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), yang menghubungkan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan RUTR Kawasan Pantai Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2015 status jalan tersebut adalah jalan propinsi dengan fungsi jalan arteri primer.	139
3.	Perangkutan umum yang melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu diantaranya adalah bus antar propinsi, bus antar kecamatan, dan angkutan pedesaan. Pergerakan masyarakat Desa Nelayan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu menggunakan angkutan pedesaan, mobil pickup dan truck untuk menunjang aktivitas perikanan di kawasan tersebut	140
4.	Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu dilewati oleh jaringan prasarana (utilitas) yang menunjang aktivitas perikanan di PPI, yaitu : air bersih yang bersumber dari instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyuplai air tawar; jaringan listrik yang berasal dari PLN berupa instalasi listrik tegangan menengah dan tegangan rendah; saluran drainase tanpa pendangkalan kotoran/sampah	145
5.	PPI Bulu berada di perairan pantai yang dangkal pada perkampungan nelayan. Sebelum dibangun fasilitas perikanan berupa TPI telah terbentuk aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan antara nelayan dan pedagang di sepanjang jalan sekitar TPI Bulu.	145
6.	PPI Bulu dekat dengan pemukiman nelayan, yaitu 1 – 2 km sehingga strategis sebagai berkumpulnya aktivitas jual beli hasil tangkapan ikan, penyaluran tenaga kerja perikanan untuk PPI dan sebaliknya penyaluran hasil perikanan ke konsumen	145
7.	PPI Bulu dekat dengan pertokoan alat perikanan yaitu 1- 2 Km. Pertokoan alat perikanan tersebut berjumlah 19 unit yang berlokasi di depan PPI Bulu, yaitu Desa Banjarjo dan Bulumeduro	145
8.	Terdapat pom bensin di sekitar PPI Bulu, yaitu pada jarak 2, 3 dan 5 km dari PPI Bulu. Pencapaian menuju pom bensin dengan alat transportasi becak, sepeda dan sepeda motor.	145
9.	Industri pengolahan ikan berada pada jarak 1- 2 km dari PPI Bulu. Tersebar di Desa Boncong, Bulumeduro, Banjarjo, dan Bulujowo.	145
10.	Sistem melaut nelayan Bulu adalah sistem“one day fishing” dimana nelayan melaut menginap selama satu malam, berangkat melaut antara jam 14.00 – 15.00 sore hari dan mendarat kembali pada jam 02.00 – 06.00 pagi hari. Hal tersebut menjadikan hasil tangkapan ikan yang diperoleh tetap segar	157
11.	Dalam waktu yang bersamaan mampu menampung 25 kapal poursesine berkekuatan 20 GT (ekuivalen dengan 500 GT).	162
12.	Fasilitas gedung pelelangan PPI Bulu digunakan untuk melayani seluruh aktivitas penanganan, yaitu pemilahan, penimbangan, dan pengepakan ikan hasil tangkapan	180
13.	Saluran drainase di kawasan PPI Bulu digunakan sebagai saluran yang menampung limbah aktivitas perikanan di PPI Bulu	184
No	Masalah	Halaman
1.	Dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2000 hingga tahun 2005 terjadi penurunan nilai retribusi pelelangan ikan (5%) di PPI Bulu rata – rata 12,96% pertahun. Penurunan awal terjadi pada tahun 2001 dengan nilai penurunan sebesar 12,59% dan terus menurun. Sejak tahun 2003 hingga saat ini produksi ikan yang didaratkan di	134

	PPI Bulu dijual tanpa melalui proses pelelangan ikan sehingga tidak ada nilai retribusi pelelangan ikan. Nilai retribusi pelelangan ikan (5%) dari tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah Rp. 127.000.750, Rp. 111.000.785, Rp. 40.607.437, -, -, -.	
2.	Beberapa peralatan yang tidak tersedia di pertokoan alat perikanan di depan PPI Bulu, seperti pukot harimau, lampu galaxy dibeli dari Kota Tuban dan Surabaya	145
3.	Tangki BBM dan instalasinya tidak tersedia di TPI, masyarakat nelayan memperoleh BBM dari pom bensin yang berlokasi pada jarak 2 km, 3 dan 5 km di luar TPI. Ketersediaan BBM dari pom bensin yang berada di luar TPI kurang mampu memenuhi kebutuhan nelayan sebagai perbekalan melaut	145
4.	Kapal yang melaut tidak membawa bahan tambahan es sebagai pengawet.	159
5.	Pembekalan kapal nelayan Bulu masih dilakukan di sepanjang pantai bahkan ada yang menyebrangi lautan untuk mengangkut perbekalan menuju ke kapal masing - masing sehingga kemudahan dalam pembekalan kapal belum dirasakan oleh seluruh nelayan Bulu	159
6.	Pada tahun 2005 telah terjadi penurunan sebesar 8% dengan jumlah armada kapal perikanan sebanyak 630 kapal.	162
7.	Kondisi perairannya masih sering dipengaruhi oleh gelombang laut sehingga tidak tenang dan masih beresiko terhadap kapal – kapal perikanan yang berlabuh sehingga tahun 2005 sebanyak 15 kapal tenggelam di perairan PPI Bulu	163
8.	PPI Bulu tidak memiliki alur pelayaran untuk mengarahkan kapal masuk ke dan keluar dari kolam pelabuhan sehingga mempermudah dan memperlancar olah gerak kapal	164
9.	PPI Bulu tidak memiliki kolam pelabuhan yang digunakan sebagai tempat penampungan kapal perikanan, tempat melakukan gerakan untuk memutar kapal. Pada wilayah penelitian kapal perikanan mendarat di sepanjang pantai yang luasnya 0,3 Ha sehingga kapal yang berlabuh tidak cukup terlindung dari gangguan arus dan ombak laut	165
10.	PPI Bulu belum memiliki breakwater atau bangunan pemecah gelombang untuk melindungi kapal dari gelombang laut	166
11.	61,22% responden menyatakan lembaga Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu tidak mampu menyediakan fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang	168
12.	Dana untuk menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang belum tersedia	169
13.	Tidak memiliki jalur khusus untuk mengangkut hasil tangkapan ikan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI	172
14.	PPI Bulu belum memiliki dermaga untuk melayani aktivitas bongkar muat ikan	173
15.	Tidak seluruh responden masyarakat perikanan memberikan penanganan ikan segar secara lengkap di PPI Bulu. Sebesar 63,27% responden menangani ikan dengan melakukan pemilahan, penimbangan dan pengepakan. Kegiatan pengawetan atau penyimpanan ikan di PPI Bulu saat ini tidak pernah dilakukan	180
16.	Mesin – mesin pabrik es dengan luas 250 m2 dan kapasitas 10 ton telah mengalami kerusakan, tidak bisa digunakan untuk pembuatan es melainkan hanya bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan es	182
17.	fasilitas gudang dingin di PPI Bulu mengalami kerusakan pada bagian pintu yang disebabkan dinding penahan engsel daun pintu patah akibat perkaratan	183
18.	70,41% responden menyatakan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu mampu menyediakan fasilitas tanpa memelihara fasilitas. Hal ini bisa dilihat dari adanya kerusakan atau tidak berfungsinya fasilitas yang telah disediakan, yaitu gudang dingin (chillroom) dan pabrik es	187

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2007

4.1	Tinjauan Kabupaten Tuban.....	131
4.2	Tinjauan Kecamatan Bancar	135
	4.2.1 Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Bancar	135
	4.2.2 Penggunaan Lahan.....	139
	4.2.3 Sistem Transportasi.....	139
	4.2.4 Perikanan Tangkap.....	144
4.3	Tinjauan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	144
4.4	Analisis Karakteristik Terhadap Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	157
	4.4.1 Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	157
	4.4.2 Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	170
	4.4.3 Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....	179
	4.4.4 Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....	189
	4.4.5 Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	203
	4.4.6 Fasilitator Pembentukan Harga.....	213
	4.4.7 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.....	227
	4.4.8 Sumber Pendapatan Daerah	236
4.5	Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	241
4.6	Analisis Faktor	247
4.7	Analisis Akar Masalah.....	260

Tabel 4.1	Jumlah dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban Tahun 2000 - 2005.....	133
Tabel 4.2	Perkembangan Nilai Pelelangan Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kabupaten Tuban Tahun 2000 – 2005.....	134
Tabel 4.3	Penggunaan Lahan.....	139
Tabel 4.4	Jumlah dan Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap PPI Bulu terhadap Kecamatan Bancar Tahun 2000 - 2004.....	144
Tabel 4.5	Jenis Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	147
Tabel 4.6	Rincian Tarif Retribusi Pemanfaatan Fasilitas PPI Bulu Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002	155
Tabel 4.7	Jumlah Bahan Perbekalan Kapal di PPI Bulu.....	158
Tabel 4.8	Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Menjalankan Aktivitas Kapal Perikanan di PPI Bulu.....	160
Tabel 4.9	Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Kapal Perikanan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.....	160
Tabel 4.10	Jumlah Armada Kapal Perikanan Nelayan Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 - 2005	162
Tabel 4.11	Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Kapal Perikanan di PPI Bulu..	162
Tabel 4.12	Persepsi Masyarakat Bahwa Jumlah Kapal Yang Mendarat Di PPI Bulu Menentukan Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	163
Tabel 4.13	Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Perairan Untuk Operasi Kapal Perikanan Di PPI Bulu.....	163
Tabel 4.14	Persepsi Masyarakat Bahwa Kondisi Perairan Di Kawasan PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.....	164

Tabel 4.15 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Alur Pelayaran PPI Bulu Berpengaruh Pada Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.....	160
Tabel 4.16 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Alur Pelayaran Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	165
Tabel 4.17 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kolam Pelabuhan di PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.....	165
Tabel 4.18 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Kolam Pelabuhan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	166
Tabel 4.19 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Pemecah Gelombang di PPI Bulu Menyebabkan Kegiatan Berlabuh Kapal Perikanan Tidak Berjalan Lancar	166
Tabel 4.20 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Pemecah Gelombang di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan	166
Tabel 4.21 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang	168
Tabel 4.22 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan Mengelola Fasilitas PPI Bulu Dipengaruhi Oleh Kemampuan Aparatur Kelembagaan BPPPI Bulu....	168
Tabel 4.23 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketidakmampuan Menyediakan Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.....	169
Tabel 4.24 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan Dan Pemecah Gelombang di PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlabuh Kapal Perikanan.....	169
Tabel 4.25 Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Mendukung Aktivitas Berlabuh Kapal di PPI Bulu Harus Ditopang Dengan Dana Dari Pemerintah	170
Tabel 4.26 Pertumbuhan Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPI Bulu Tahun 2000 – 2005	170
Tabel 4.27 Persepsi Masyarakat Bahwa Volume Ikan Yang Didaratkan di PPI Bulu Mendukung Fungsi PPI Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan.....	171
Tabel 4.28 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Dipengaruhi Oleh Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di PPI Bulu.....	172
Tabel 4.29 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI	172
Tabel 4.30 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemudahan Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI Mendukung Keberhasilan Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.....	173
Tabel 4.31 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jalan Penghubung Di PPI Bulu Dapat Mempersulit Pengangkutan Ikan Hasil Tangkapan Ke Lokasi Gedung TPI Bulu	173

Tabel 4.32 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Dermaga Mendukung Kegiatan Bongkar Muat Ikan Di PPI Bulu	174
Tabel 4.33 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Fasilitas Dermaga Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berhasil Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.....	174
Tabel 4.34 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Ikan Di PPI Bulu	174
Tabel 4.35 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.....	175
Tabel 4.36 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Dalam Mengelola Fasilitas Dermaga Dan Gedung Pelelangan Ikan	177
Tabel 4.37 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan.....	178
Tabel 4.38 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Dermaga Dan Gedung Pelelangan Ikan PPI Bulu Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan	178
Tabel 4.39 Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Melayani Bongkar Muat Ikan Di PPI Bulu Harus Ditopang Dengan Dana Dari Pemerintah	178
Tabel 4.40 Prosentase Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan Oleh Responden Masyarakat Perikanan di PPI Bulu	180
Tabel 4.41 Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Penanganan Ikan Hasil Tangkapan PPI Bulu Mempengaruhi Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan	181
Tabel 4.42 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Untuk Menangani Ikan Hasil Tangkapan Di PPI Bulu	181
Tabel 4.43 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	182
Tabel 4.44 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Instalasi Air Bersih Di PPI Bulu.....	182
Tabel 4.45 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Instalasi Air Bersih Menyebabkan PPI Bulu Tidak Menjadi Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	183
Tabel 4.46 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Pabrik Es di PPI Bulu.....	183
Tabel 4.47 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Pabrik Es Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan	183
Tabel 4.48 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin di PPI Bulu.....	184
Tabel 4.49 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gudang Dingin Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....	185
Tabel 4.50 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Saluran Drainase Di Kawasan PPI Bulu Mendorong Kelancaran Penanganan Ikan Hasil Tangkapan. .	185

Tabel 4.51 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan Ditentukan Oleh Ketersediaan Saluran Drainase	185
Tabel 4.52 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Dalam Menyediakan Instalasi Air Bersih, Pabrik Es, Gudang Dingin, Dan Drainase	187
Tabel 4.53 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan BPPPI Dalam Mengelola Fasilitas Penanganan Ikan Mempengaruhi Fungsi PPI Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan	188
Tabel 4.54 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Penanganan Ikan PPI Bulu Berpengaruh Pada Kelancaran Aktivitas Penanganan	188
Tabel 4.55 Persepsi Masyarakat Bahwa Tidak Tersedianya Dana Fasilitas Penanganan Ikan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Ikan	189
Tabel 4.56 Prosentase Aktivitas Penampungan Dan Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Responden Masyarakat Perikanan PPI Bulu.....	190
Tabel 4.57 Persepsi Masyarakat Bahwa Aktivitas Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan Dari PPI Mendukung Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	190
Tabel 4.58 Persepsi Masyarakat Bahwa Saluran Pemasaran Yang Efektif Menyebabkan Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	193
Tabel 4.59 Persepsi Masyarakat Bahwa Panjangnya Saluran Pemasaran Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	194
Tabel 4.60 Prosentase Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga di PPI Bulu	190
Tabel 4.61 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Informasi Pasar Dan Harga Di Ppi Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Menjadi Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	195
Tabel 4.62 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Mendistribusikan Produksi Perikanan Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan	195
Tabel 4.63 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jaringan Jalan Dan Moda Transportasi Dari PPI Bulu Ke Daerah Pemasaran Tangkapan Ikan Menyebabkan Ketidاكلancaran Pemasaran Produk Perikanan.....	196
Tabel 4.64 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Di PPI Bulu	197
Tabel 4.65 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Gedung Pelelangan Mendukung Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	197
Tabel 4.66 Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir di PPI Bulu.....	198
Tabel 4.67 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Areal Parkir Di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan.....	198
Tabel 4.68 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Jalan Penghubung Memperlancar Aktivitas Pengangkutan Ikan di PPI Bulu	201

Tabel 4.69 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Jalan Penghubung PPI Bulu Menyebabkan PPI Tidak Berhasil Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan	201
Tabel 4.70 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan Dinas Perikanan Dan BPPPI Bulu Dalam Mengelola Fasilitas Gedung Pelelangan, Areal Parkir, Dan Jalan Penghubung	202
Tabel 4.71 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan BPPPI Bulu Mengelola Fasilitas Pemasaran Hasil Perikanan Mendukung Keberhasilan Fungsi PPI Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	202
Tabel 4.72 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Dana Untuk Mengelola Fasilitas Pemasaran Ikan di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pemasaran Dan Distribusi Hasil Perikanan	203
Tabel 4.73 Persepsi Masyarakat Bahwa Untuk Mengelola Fasilitas Yang Melayani Pemasaran Ikan di PPI Bulu Diperlukan Dana Yang Tidak Sedikit.....	203
Tabel 4.74 Pelaksanaan Penyuluhan Masyarakat Perikanan PPI Bulu.....	204
Tabel 4.75 Prosentase Peran Serta Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Penyuluhan.....	205
Tabel 4.76 Persepsi Masyarakat Bahwa Penyelenggaraan Penyuluhan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	205
Tabel 4.77 Persepsi Masyarakat Bahwa PPI Bulu Bisa Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data Ditentukan Dari Pengumpulan Data	206
Tabel 4.78 Persepsi Masyarakat Bahwa Pengumpulan Data di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	206
Tabel 4.79 Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Penyuluh Perikanan Dalam Memberikan Penyuluhan Perikanan	206
Tabel 4.80 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Penyuluh Perikanan Di Ppi Bulu Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data.....	207
Tabel 4.81 Peran Serta Masyarakat Dalam Kelompok Masyarakat Perikanan di PPI Bulu.....	208
Tabel 4.82 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberadaan Kelompok Masyarakat Perikanan Di Wilayah Penelitian Mendukung PPI Bulu Tidak Menjadi Pusat Pelaksanaan Penyuluhan	208
Tabel 4.83 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Mendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di PPI Bulu.....	209
Tabel 4.84 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Di PPI Bulu Menjadikan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan	209
Tabel 4.85 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi Mendukung Fungsi PPI Bulu Dalam Kegiatan Pengumpulan Data	210
Tabel 4.86 Persepsi Masyarakat Bahwa Ketersediaan Fasilitas Kantor Administrasi di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Dalam Pengumpulan Data	210
Tabel 4.87 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Mengelola Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Dan Kantor Administrasi Mempengaruhi Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	212

Tabel 4.88 Persepsi Masyarakat Bahwa Aparatur Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu Yang Tidak Mampu Menyediakan Fasilitas Menjadi Penyebab PPI Bulu Kurang Berhasil Menyelenggarakan Penyuluhan dan Pengumpulan Data	212
Tabel 4.89 Persepsi Masyarakat Bahwa Keterbatasan Dana Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Menyebabkan PPI Bulu Kurang Berhasil Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data	213
Tabel 4.90 Persepsi Masyarakat Bahwa Dana Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan - Kantor Administrasi PPI Bulu Mendukung Kegiatan Penyuluhan Dan Pengumpulan Data.....	213
Tabel 4.91 Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga	218
Tabel 4.92 Persepsi Masyarakat Bahwa Penjualan Ikan Hasil Tangkapan PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	218
Tabel 4.93 Tanggapan Nelayan Anak Buah Kapal Terhadap Sistem Penjualan Ikan Secara Lelang dan Tanpa Lelang Di PPI Bulu	218
Tabel 4.94 Tanggapan Pedagang Terhadap Sistem Penjualan Ikan	219
Tabel 4. 95 Prosentase Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu.....	219
Tabel 4.96 Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Pembayaran Hasil Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga	220
Tabel 4.97 Prosentase Sikap Masyarakat Terhadap Penerapan Kebijakan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu.....	223
Tabel 4.98 Persepsi Masyarakat Bahwa Penerapan Aturan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di PPI Bulu Mempengaruhi Keberhasilan Penyelenggaraan Lelang Ikan PPI Bulu	223
Tabel 4.99 Persepsi Masyarakat Bahwa Penerapan Aturan Penyelenggaraan Lelang di PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	224
Tabel 4.100 Prosentase Keterlibatan Masyarakat Memberikan Masukan Dalam Pembuatan Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu	224
Tabel 4.101 Persepsi Masyarakat Bahwa Keterlibatan Saudara Dalam Pembuatan Peraturan Penyelenggaraan Lelang Ikan di PPI Bulu Mempengaruhi Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga	225
Tabel 4.102 Prosentase Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Aparatur Kelembagaan KUD Dalam Penyelenggaraan Lelang di PPI Bulu	226
Tabel 4.103 Persepsi Masyarakat Bahwa Kemampuan Aparatur Lembaga KUD Terhadap PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berfungsi Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	227
Tabel 4.104 Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Pemilik Kapal	228
Tabel 4. 105 Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Pemilik Kapal	228
Tabel 4.106 Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Anak Buah Kapal.....	229
Tabel 4.107 Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Nelayan Anak Buah Kapal	230
Tabel 4.108 Crosstabulasi Perubahan Tingkat Pendapatan Berdasarkan Responden Nelayan dan Tingkat Pendapatan	230

Tabel 4.109 Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan Berdasarkan Responden Nelayan Dan Tingkat Pendapatan.....	231
Tabel 4.110 Persepsi Masyarakat Bahwa Perolehan Pendapatan Nelayan Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	232
Tabel 4.111 Prosentase Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	233
Tabel 4.112 Prosentase Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	233
Tabel 4.113 Prosentase Kemampuan Responden Nelayan Anak Buah Kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	233
Tabel 4.114 Prosentase Perubahan Tingkat Kemampuan Responden Nelayan Pemilik kapal Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarganya	234
Tabel 4.115 Crosstabulasi Perubahan Tingkat Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Berdasarkan Responden Nelayan dan Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Nelayan.....	234
Tabel 4.116 Perubahan Tingkat Pendapatan Dominan Berdasarkan Responden Nelayan Dan Tingkat Pendapatan.....	235
Tabel 4.117 Kemampuan Keluarga Nelayan Memenuhi Kebutuhan Hidup Keluarga Menunjukkan PPI Bulu Tidak Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	235
Tabel 4.118 Persepsi Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.....	236
Tabel 4.119 Persepsi Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berhasil Mengupayakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.....	236
Tabel 4.120 Perkembangan Penjualan dan Nilai Retribusi Pelelangan Ikan.....	237
Tabel 4.121 Persepsi Masyarakat Bahwa Keberhasilan PPI Bulu Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Dilihat Dari Penerimaan Retribusi Pelelangan Ikan PPI Bulu Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.....	238
Tabel 4.122 Persepsi Masyarakat Bahwa Retribusi Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Tuban Dari PPI Bulu Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah	238
Tabel 4.123 Persepsi Masyarakat Bahwa Cara Penjualan Ikan Hasil Tangkapan di PPI Bulu Berpengaruh Pada Fungsi PPI Bulu Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.....	239
Tabel 4.124 Persepsi Masyarakat Bahwa Sistem Penjualan Ikan di PPI Bulu Menjadi Penyebab PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban	239
Tabel 4.125 Persepsi Masyarakat Bahwa Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dengan KUD Dalam Penyaluran Retribusi Pelelangan Ikan Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.....	240
Tabel 4.126 Persepsi Masyarakat Bahwa Koordinasi Antara Dinas Perikanan Kabupaten Tuban Dengan KUD dalam Penyaluran Retribusi Pelelangan Ikan Menyebabkan PPI Bulu Tidak Berhasil Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.....	240
Tabel 4.127 Analisis Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Berdasarkan Kriteria Dan Skala Pengukuran Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	241

Tabel 4.128 Prosentase Persepsi Responden Masyarakat Perikanan.....	248
Tabel 4.129 Nilai Validitas Pertanyaan Pada Masing – masing Variabel Penelitian	250
Tabel 4.130 Reliabilitas Variabel Penelitian	252
Tabel 4.131 Matriks Korelasi	255
Tabel 4.132 Koefisien Korelasi	257
Tabel 4.133 Kaiser – Meyer – Olkin	260
Tabel 4.134 Hasil Uji KMO dan Bartlett.....	260
Tabel 4.135 Penentuan Jumlah Faktor Berdasarkan Akar Ciri Dan Prosentase Keragaman Kumulatif.....	261
Tabel 4.136 Penyebaran Variabel-Variabel Pada Faktor Yang Terbentuk.....	264
Tabel 4.137 Penentuan Variabel Pada Setiap Faktor.....	264
Tabel 4.138 Penyebaran Variabel-Variabel Pada Faktor Yang Terbentuk.....	265
Tabel 4.139 Penentuan Variabel Pada Setiap Faktor.....	266
Tabel 4.140 Penamaan pada Faktor – faktor Yang terbentuk.....	267
Tabel 4.141 Potensi dan Masalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu.....	272

Gambar 4.1 Wilayah Administrasi Kecamatan Bancar	136
Gambar 4.2 Lokasi PPI Bulu pada Kecamatan Bancar	137
Gambar 4.3 Lokasi PPI Bulu pada Desa Nelayan Kecamatan Bancar	138
Gambar 4.4 Penggunaan Lahan Desa Nelayan Kecamatan Bancar	141
Gambar 4.5 Jaringan Jalan Yang Melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	142
Gambar 4.6 Perangkutan Yang Melewati Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu.....	143
Gambar 4.7 Karakteristik Lokasi PPI Bulu	146
Gambar 4.8 Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu	148
Gambar 4.9 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Kabupaten Tuban	153
Gambar 4.10 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa	154
Gambar 4.11 Jangkauan Penangkapan Ikan	161
Gambar 4.12 Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Berlubuh Kapal Perikanan	161
Gambar 4.13 Perkembangan Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu Tahun 2000 – 2005.....	171
Gambar 4.14 Fungsi PPI Bulu Sebagai Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan	176
Gambar 4.15 Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penanganan Mutu Hasil Perikanan.....	186
Gambar 4.16 Pola Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Kabupaten Tuban.....	191
Gambar 4.17 Pola Pemasaran Hasil Perikanan Luar Kabupaten Tuban.....	192
Gambar 4.18 Jangkauan Pemasaran Produk Perikanan	199
Gambar 4.19 Karakteristik Terhadap Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan Hasil Tangkapan	200
Gambar 4.20 Fungsi PPI Bulu Sebagai Pusat Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengumpulan Data	211
Gambar 4.21 Alur Tata Cara Pelelangan Ikan di PPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban	217
Gambar 4.22 Fungsi PPI Bulu Sebagai Fasilitator Pembentukan Harga.....	221
Gambar 4.23 Scree Plot	263

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis yang telah dilakukan terhadap Evaluasi Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (studi kasus : PPI Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Karakteristik Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu

Analisis karakteristik terhadap fungsi PPI Bulu dikaji dari 8 kriteria, meliputi :

1. Tempat berlabuh kapal perikanan

- Kapal perikanan berlabuh, mendaratkan ikan dan memuat perbekalan di sepanjang pantai pendaratan PPI Bulu. Istirahat kurang berjalan lancar dimana kapal sering terkena gelombang laut, tidak ada perlindungan kapal dan pernah mengalami kerusakan hingga tenggelam. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2005, dimana ada 15 kapal milik nelayan Bulu yang tenggelam di sekitar PPI Bulu. Dalam menjalankan aktivitas kapal perikanan dirasakan cukup mudah oleh sebesar 48,98% responden masyarakat perikanan.
- Dalam waktu yang bersamaan PPI Bulu mampu menampung 25 kapal puseseseine berkekuatan 20 GT untuk berlabuh di pantai pendaratan PPI Bulu dan sebesar 68,37% responden menyatakan kapal yang mendarat di PPI Bulu pada waktu yang bersamaan sebanyak ≥ 20 kapal.
- Kondisi perairannya masih sering dipengaruhi oleh gelombang laut sehingga tidak tenang dan masih beresiko terhadap kapal – kapal perikanan yang berlabuh.
- Tidak memiliki fasilitas pokok, yaitu kolam pelabuhan dan alur pelayaran.
- Sebesar 61,22% responden menyatakan Dinas Perikanan dan BPPPI tidak mampu menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang.
- Dana untuk menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan pemecah gelombang belum tersedia.

2. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan

- PPI Bulu mendaratkan ikan rata – rata per-tahun adalah 1789 ton dengan jumlah produksi pada akhir tahun 2005 adalah 4507 ton.

- Jarak tempat pendaratan kapal ke gedung TPI 7-8 m, waktu pengangkutan 5 – 8 menit untuk tiap keranjang dan tidak memiliki jalur khusus dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI. Sebesar 57,14% responden menyatakan Tidak mudah mengangkut ikan hasil tangkapan dimana ikan hasil tangkapan tidak diangkut ke lokasi TPI.
 - PPI Bulu belum memiliki dermaga, bongkar muat ikan dilakukan di ruang mana saja, baik langsung di gedung TPI maupun di sepanjang pantai.
 - 63,27% responden menggunakan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagai tempat penampungan ikan.
 - 55,10% responden menilai bahwa aparaturnya Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu tidak mampu menyediakan fasilitas, yaitu dermaga. Sebesar 44,90% responden menyatakan aparaturnya mampu menyediakan fasilitas tanpa memeliharanya, yaitu fasilitas gedung pelelangan ikan.
 - Hingga tahun 2006 dana untuk membangun dermaga dan untuk perawatan fasilitas belum tersedia.
3. Pusat pelaksanaan penanganan mutu hasil perikanan
- Penanganan ikan segar di PPI Bulu tidak lengkap, sebesar 63,27% responden melakukan pemilahan, penimbangan dan pengepakan tanpa penyimpanan di PPI.
 - Gedung pelelangan ikan di PPI Bulu digunakan sebagai tempat untuk menangani ikan hasil tangkapan.
 - Fasilitas instalasi air bersih digunakan untuk pembersihan ikan dan lantai gedung pelelangan.
 - Mesin – mesin peralatan pabrik es telah mengalami kerusakan.
 - Gudang dingin di PPI Bulu mengalami kerusakan pada bagian pintu, hanya digunakan untuk menyimpan es yang diperoleh dari luar PPI Bulu
 - Saluran drainase di kawasan PPI Bulu digunakan sebagai saluran yang menampung limbah aktivitas perikanan di PPI Bulu.
 - Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu mampu menyediakan fasilitas pabrik es dan gudang dingin tanpa memelihara fasilitas.
 - Ketersediaan dana dari retribusi pemanfaatan fasilitas PPI saat ini diperoleh dari pemanfaatan fasilitas bengkel dan ruangan penanganan ikan.

4. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan

- Sebesar 46,94% responden menampung dan memasarkan ikan hasil tangkapan dari PPI dan luar PPI ke berbagai daerah pemasaran hasil perikanan secara domestik.
- Saluran pemasaran yang sering digunakan untuk memasarkan hasil perikanan dalam dan luar Kabupaten Tuban melibatkan 4 lembaga pemasaran.
- 61,22% responden masyarakat perikanan menyatakan PPI Bulu tidak menyediakan informasi pasar dan harga.
- Sirkulasi pengangkutan hasil perikanan cukup lancar didukung adanya alat transportasi dan jarang terjadi kemacetan pada proses perjalanan ke daerah pemasaran tangkapan ikan. Kemudahan tersebut didukung oleh 57,14% responden.
- Areal parkir PPI Bulu digunakan sebagai salah satu lokasi jual beli ikan hasil tangkapan.
- PPI Bulu tidak memiliki jalur penghubung, Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dan BPPPI Bulu belum mampu menyediakannya dan belum mengupayakan dana untuk itu.

5. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data

- Penyuluhan yang pernah diselenggarakan adalah penyuluhan yang berkaitan dengan pelatihan teknologi penangkapan ikan dan penyuluhan alat GPS
- Tersedia data perikanan, meliputi jumlah dan jenis kapal perikanan yang berlabuh di PPI Bulu, jumlah dan jenis alat tangkap, jumlah nelayan, jenis, jumlah dan nilai produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu, daerah pemasaran hasil perikanan, jumlah tenaga kerja, jenis dan jumlah perbekalan melaut, dan ketersediaan fasilitas
- 41,84% responden menilai bahwa penyuluh perikanan mampu meyakinkan dan mengakomodasi masalah di bidang perikanan.
- Kelompok nelayan yang terbentuk tersebut belum diikuti oleh seluruh masyarakat perikanan

- Tidak tersedia fasilitas balai pertemuan nelayan untuk kegiatan penyuluhan tetapi kantor administrasi digunakan sebagai tempat pengumpulan data – data statistik perikanan.
- BPPPI bersama Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur belum mampu menyediakan fasilitas balai pertemuan nelayan sedangkan kantor administrasi masih terpelihara dengan adanya kebersihan ruang dan kondisi bangunan yang tidak rusak
- Dana penyediaan fasilitas PPI, yaitu balai pertemuan nelayan yang berasal dari APBN belum diperoleh.

6. Fasilitator pembentukan harga

- Sejak tahun 2003 seluruh ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPI Bulu tidak dijual secara lelang, melainkan langsung dijual ke pedagang dan harga ditentukan oleh pedagang
- Hasil penjualan ikan dibayar dikemudian hari oleh pedagang, yaitu 7 – 10 hari setelah ikan hasil tangkapan habis dijual oleh pedagang
- Penerapan peraturan penyelenggaraan lelang ikan tidak berdasarkan Perda pelelangan pelelangan ikan (Perda Jawa Timur dan Kabupaten). KUD membuat kebijakan baru, yaitu menaikkan tarif retribusi dari 5% menjadi 6,5%, 4% dipungut dari nelayan dan 2,5% dipungut dari pedagang.
- Dalam pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan, mayoritas responden masyarakat perikanan sebesar 58,17% tidak pernah dilibatkan dan tidak memberi masukan dalam pembahasan /rapat pembuatan kebijakan/aturan penyelenggaraan lelang ikan.
- KUD tidak menyelenggarakan lelang ikan dan KUD tidak melaporkan/ mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan kepada nelayan. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh 73,47% responden masyarakat perikanan.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

- Nelayan anak buah kapal sebesar 53,01% tingkat pendapatannya cenderung menurun dan kemampuan 70,93% responden nelayan anak buah kapal memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung menurun

- Penentuan harga jual beli ikan yang ditentukan pedagang tanpa melalui pelelangan ikan merugikan nelayan.

8. Sumber pendapatan daerah.

- Sejak tahun 2003 tidak ada penerimaan retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dari PPI Bulu sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Tuban
- Dalam menyalurkan hasil retribusi pelelangan ikan dari KUD ke Dinas Perikanan Kabupaten Tuban, tidak ada koordinasi antara keduanya. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh 56,12% responden masyarakat perikanan

B. Tingkat Optimal Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu

Berdasarkan hasil analisis tingkat optimal fungsi PPI dengan kriteria dan skala pengukuran fungsi diperoleh kesimpulan bahwa fungsi PPI Bulu tidak optimal. Jumlah nilai skala pengukuran fungsi PPI Bulu yang diperoleh adalah 80.

C. Faktor Penyebab Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu Tidak Optimal

Faktor penyebab fungsi PPI tidak optimal terdiri dari 5 faktor, yaitu

1. Faktor I memiliki keeratan hubungan dengan duapuluh variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah aksesibilitas ke lokasi gedung TPI, kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI, kemampuan penyuluh perikanan, informasi pasar dan harga, ketersediaan dana, ketersediaan fasilitas pemecah gelombang, ketersediaan fasilitas alur pelayaran, penjualan ikan hasil tangkapan, ketersediaan fasilitas areal parkir, ketersediaan fasilitas jalan penghubung, ketersediaan fasilitas kolam pelabuhan, ketersediaan fasilitas dermaga, kelompok masyarakat perikanan, kondisi perairan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan, penerimaan retribusi, ketersediaan fasilitas gudang dingin. Faktor I ini memberikan persentase keragaman sebesar 53,280% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor I memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 53,280%. Keeratan hubungan yang paling tinggi ke keeratan hubungan yang paling rendah suatu variabel terhadap Faktor I adalah .
2. Faktor II memiliki keeratan hubungan dengan empat variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah variabel aktivitas pemasaran, penyuluhan, ketersediaan fasilitas gedung pelelangan ikan, kemudian ketersediaan fasilitas pabrik es. Faktor II ini memberikan persentase keragaman

- sebesar 15,993% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor II memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 15,993%.
3. Faktor III memiliki keeratan hubungan dengan dua variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah ketersediaan dana, peraturan penyelenggaraan lelang. Faktor III ini memberikan persentase keragaman sebesar 9,266% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor III memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 9,266%.
 4. Faktor IV memiliki keeratan hubungan dengan dua variabel dengan keeratan hubungan yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah peran serta masyarakat kemudian kemampuan aparatur kelembagaan KUD. Faktor IV ini memberikan persentase keragaman sebesar 6,214% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor III memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 6,214%.
 5. Faktor V berhubungan hanya dengan satu variabel yaitu kemampuan aparatur kelembagaan Dinas Perikanan dan BPPPI. Faktor V ini memberikan persentase keragaman sebesar 4,309% yang berarti bahwa variabel – variabel yang mendukung faktor III memberikan sumbangan terhadap faktor – faktor penyebab fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu tidak optimal sebesar 4,309%.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya mengoptimalkan atau memperbaiki fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu di masa mendatang. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil analisis faktor dan akar masalah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menyediakan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan bangunan pemecah gelombang guna melindungi kapal perikanan yang sedang berlabuh. Dalam memperbaiki fungsi tersebut perlu meningkatkan kepedulian Dinas Perikanan dan BPPPI Bulu dengan mengupayakan dana penyediaan fasilitas alur pelayaran, kolam pelabuhan dan bangunan pemecah gelombang.

2. Guna menjamin kualitas ikan diperlukan fasilitas dermaga untuk melayani kegiatan bongkar muat ikan; jalur penghubung sebagai jalur khusus dalam pengangkutan ikan dari tempat pendaratan kapal ke gedung TPI. Dengan demikian perlu mengalokasikan dana pembangunan dermaga ke PPI Bulu, bisa melalui hasil retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan.
3. Perlu memperbaiki fasilitas yang telah rusak seperti mesin peralatan pabrik es dan pintu gudang dingin sehingga dapat digunakan untuk pembuatan es dan pengawetan ikan di ruangan PPI Bulu. Guna memperbaiki fungsi PPI Bulu perlu meningkatkan kepedulian Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur selaku pendiri PPI Bulu bersama Dinas Perikanan Kabupaten Tuban untuk menyediakan dana perbaikan fasilitas tersebut. Agar fasilitas tetap terpelihara diperlukan peran serta masyarakat perikanan sebagai pengguna untuk ikut merawat fasilitas PPI Bulu.
4. Agar pemasaran ikan hasil tangkapan terpusat dari PPI Bulu, maka :
 - Perlu disediakan informasi harga jual beli ikan di PPI Bulu.
 - Menggunakan fasilitas gedung pelelangan ikan sebagaimana mestinya yaitu memperlancar kegiatan pemasaran ikan dengan sistem lelang
 - Mempergunakan areal parkir untuk menampung alat transportasi pengangkut ikan.
5. Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat perikanan melalui penyuluhan, terjalannya komunikasi dengan ahli teknologi terkait dengan teknologi penangkapan ikan, maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah :
 - Membentuk kelompok nelayan dengan peran aktif nelayan di dalamnya. Hal ini diperlukan dorongan BPPPI Bulu sebagai pengelola PPI beserta masyarakat perikanan.
 - Perlu penyuluh perikanan yang mampu menghubungkan nelayan dengan ahli teknologi sehingga terjalin komunikasi/*sharing* antara nelayan dengan ahli teknologi.

6. Agar harga jual beli ikan di PPI Bulu menguntungkan nelayan maupun pedagang dengan sistem lelang diperlukan penerapan peraturan penyelenggaraan lelang ikan yang berdasarkan Perda pelelangan ikan (Perda Jawa Timur dan Kabupaten) dan kemampuan aparatur/ Sumber Daya Manusia KUD yang berkualitas.
 - a. KUD telah menyalahgunakan penerapan peraturan penyelenggaraan lelang ikan dengan membuat kebijakan baru, yaitu menaikkan tarif retribusi dari 5% menjadi 6,5%; 4% dipungut dari nelayan dan 2,5% dipungut dari pedagang. Perlu ketegasan pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut, yaitu :
 - Pembuatan aturan perlu mengimplementasikan aturan dan sanksi yang tegas terhadap lembaga atau siapapun atas penyalahgunaan dalam menerapkan peraturan penyelenggaraan lelang.
 - Perlunya peninjauan kembali Perda Retribusi & pelelangan dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* karena dinilai masih merugikan pihak nelayan & pedagang/bakul. Keterlibatan masyarakat perikanan dapat berupa pemberian masukan dalam pembahasan/rapat pembuatan aturan penyelenggaraan lelang ikan sehingga dapat diketahui kebutuhan masyarakat perikanan dari respon yang ada.
 - Pengeluaran aturan baru nantinya sebaiknya ada tenggat waktu untuk sosialisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan aparatur/kualitas SDM KUD dalam upaya menggerakkan pelelangan ikan kembali dengan konsekuensi sebagai berikut :
 - Pertanggungjawaban aparatur KUD dalam pengelolaan keuangan retribusi lelang secara transparan.
 - Aparatur KUD menjalin kerjasama dengan pihak perbankan untuk pendanaan modal lelang KUD sehingga lelang bisa jalan kembali.
7. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, perlu mengaktifkan pelelangan ikan kembali. Dengan lelang ikan diperoleh harga jual beli ikan yang sesuai dengan harga pasar, ada tawar menawar di dalamnya sehingga lebih menguntungkan nelayan.
8. Perlu mengaktifkan lelang ikan kembali dan selalu ada koordinasi antara KUD dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tuban dalam penyaluran retribusi pelelangan ikan.